

GEPOLITIK BUNG KARNNO

PROGRESSIVE GEOPOLITICAL COEXISTENCE



HASTO KRISTİYANTO

GEOPOLITIK BUNG KARNO
PROGRESSIVE GEOPOLITICAL COEXISTENCE

Hasto Kristiyanto



UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Copyright © 2023 Hasto Kristiyanto
Cetakan Pertama, Mei 2023
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Geopolitik Bung Karno *Progressive Geopolitical Coexistence* / Penulis, Hasto Kristiyanto. — Bogor : Unhan RI Press, 2023.
xxxii + 302 hlm.; illus.; 15,5 cm x 23 cm
ISBN 978-623-5885-45-2
I. Judul II. Hasto Kristiyanto
1. Geopolitik
320.12 - DDC 23

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

GEOPOLITIK BUNG KARNO

PROGRESSIVE GEOPOLITICAL COEXISTENCE

PENULIS

Hasto Kristiyanto

EDITOR

Suryo AB, A. Tarmiji Alkhudri

LAYOUT

Ernes Dj. Fambrene, Dindin, Faisol Abdul Kharis

GRAFIS

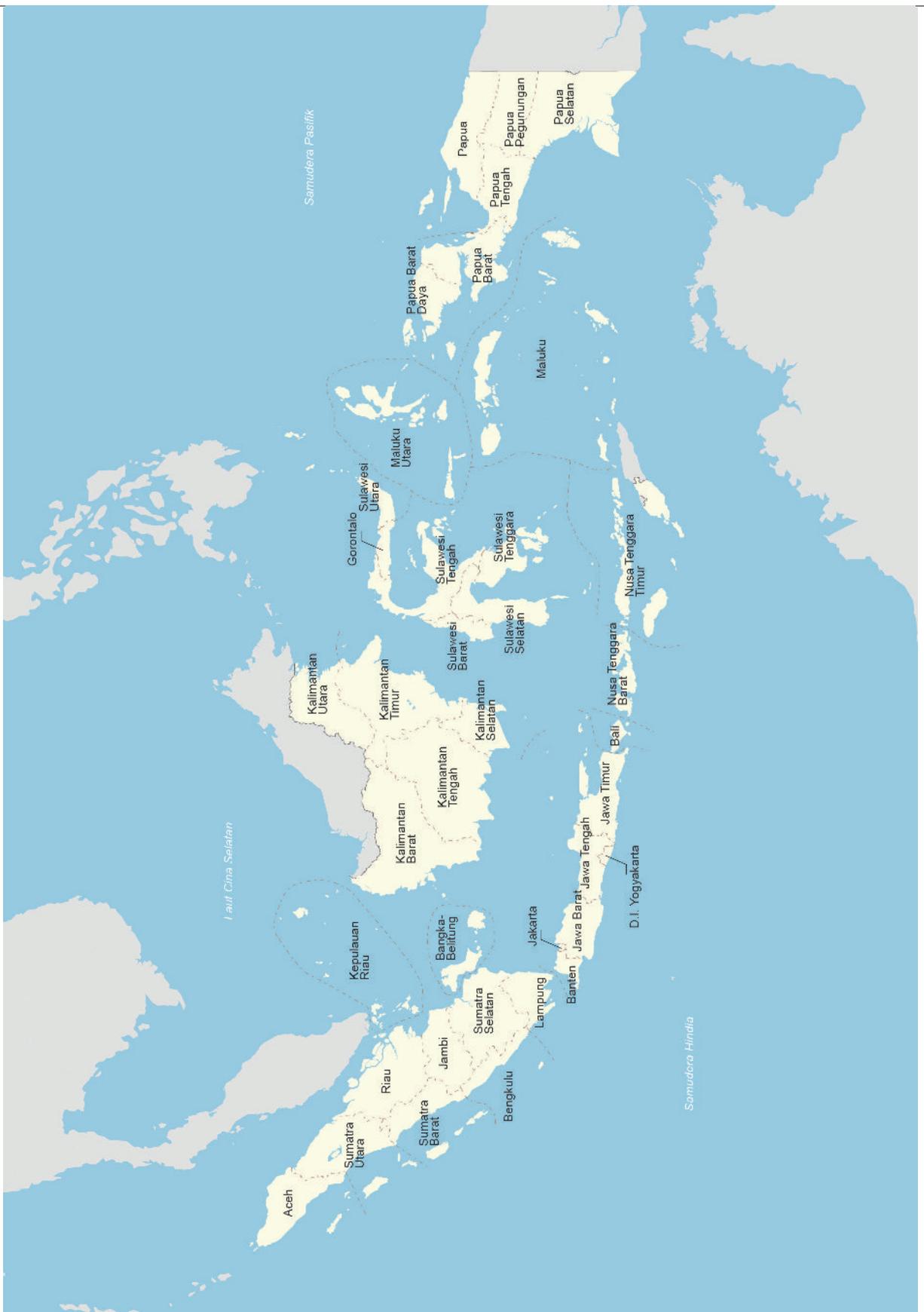
Adhitya Maheswara, Gun Gun Gunadi, M Yusuf

PENERBIT

UNHAN RI PRESS

Anggota IKAPI (415/Anggota Luar Biasa/JBA/2021)

Jakarta 2023



SAMBUTAN

PRESIDEN KELIMA REPUBLIK INDONESIA



Geopolitik Bung Karno dalam pandangan saya tidak hanya berkaitan dengan bagaimana memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia atas cara pandang politik berdasarkan konstelasi geografis. Menurut Bung Karno, geopolitik merupakan pengetahuan tentang keadaan, baik itu sejarah, kehidupan perekonomian, pemerintahan, kultur, karakter, dan pendeknya seluruh aspek kehidupan suatu bangsa. Pentingnya pengetahuan geopolitik dalam kepemimpinan nasional,

mendorong Bung Karno untuk mendirikan Lembaga Pertahanan Nasional, yang kemudian berubah namanya menjadi Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS).

Lemhannas merupakan kawah candradimuka pemimpin bangsa. Di Lembaga ini, para calon pemimpin dari seluruh wilayah Indonesia, baik dari sipil maupun militer, pusat maupun daerah, representasi partai ataupun kelompok fungsional, dan juga yang berasal dari aparaturnegara, semua *blended* menjadi satu, dan dipersiapkan serta berproses menjadi pemimpin dengan pemahaman geopolitik.

Pengetahuan geopolitik sangatlah penting, terlebih dengan berbagai pertarungan hegemoni seperti perang Rusia Ukraina; ketegangan di Selat Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan; konflik di

Timur Tengah yang tidak kunjung usai; perang saudara di Sudan; perang dingin di bumi Peninsula dan lain-lain. Di tengah pertarungan geopolitik tersebut, dunia memerlukan *alternative of view*, berupa konsepsi pemikiran geopolitik yang menjawab berbagai persoalan geopolitik saat ini dan di masa yang akan datang.

Dalam disertasi “Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negara” di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Sdr. Hasto Kristiyanto tidak hanya mengonstruksikan teori geopolitik Bung Karno yang disebutnya sebagai *Progressive Geopolitical Coexistence*. Dalam disertasi tersebut, *Body of Knowledge* Geopolitik Soekarno juga dapat dirumuskan dengan baik, serta posisi teoritiknya terhadap teori geopolitik klasik, kontemporer dan geopolitik kritis. Hal yang menggembirakan bagi saya, bagaimana dalam disertasi tersebut ditegaskan bahwa pemikiran geopolitik Bung Karno menjadi *alternative of view* di dalam mencari solusi atas berbagai pertarungan geopolitik saat ini.

Sebagai *alternative of view*, Pemikiran geopolitik Bung Karno menempatkan Pancasila pada spiritnya untuk membangun persaudaraan dunia. Pancasila lahir dari pengetahuan geopolitik atas realitas sistem internasional yang anarkis. Atas dasar hal tersebut, Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bertindak aktif, bahkan progresif, di dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Pancasila memberikan landasan filosofis bagaimana dunia harus dibangun agar bebas dari kolonialisme dan imperialisme. Dalam konteks ini, Indonesia harus menggalang solidaritas bangsa-bangsa dengan membangun tata dunia baru yang demokratis, berkeadilan, dan bebas dari perang.

Konstruksi pemikiran geopolitik Bung Karno tersebut menjadi landasan kebijakan luar negeri dan pertahanan negara yang mengedepankan kemanusiaan atau Internasionalisme. *Playing field* Indonesia adalah dunia, sehingga harus bertindak aktif berdasarkan legitimasi historis yang menunjukkan kuatnya kepemimpinan Indonesia melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955, Gerakan Non Blok (GNB) tahun 1961, *Conference of the New Emerging Forces* (CONEFO) dan Konferensi Anti Pangkalan Militer Asing tahun 1965, serta keterlibatan Indonesia di dalam misi perdamaian di banyak negara yang mengalami konflik. Dalam upaya ini terbukti Pancasila mampu menjadi *lifeline* Dunia Baru. Dengan gagasan ini, pada

tahun 1960 di PBB, Bung Karno menyampaikan pidato “*To Build the World Anew*”. Melalui pidatonya ini Bung Karno menempatkan peran penting PBB untuk bertindak adil dan demokratis dengan menempatkan seluruh anggota PBB pada posisi setara. Dalam pidato tersebut Bung Karno juga menyampaikan postulatnya bahwa dunia akan damai apabila terbebas dari berbagai bentuk kolonialisme dan imperialisme. Dalam upaya ini, Bung Karno menyerukan pentingnya *retooling* Dewan Keamanan PBB agar lebih *powerful* di dalam mewujudkan dunia yang bebas dari perang.

Seluruh pemikiran geopolitik Bung Karno memiliki relevansi penting, terutama gagasannya yang bertolak belakang dengan pemikiran geopolitik Barat yang berakar dari teori *Lebensraum*. Relevansi tersebut juga tampak dari keberhasilan Tiongkok yang mampu mempertemukan dua negara yang saling bertikai, yakni Iran dan Arab Saudi untuk berunding meretas jalan perdamaian. Kepemimpinan Tiongkok tersebut seharusnya juga dilakukan oleh Indonesia. Apa yang dilakukan Tiongkok tersebut tidak terlepas dari perjuangan Bung Karno pada tahun 1955 yang berhasil mengajak Tiongkok untuk keluar dari politik tirai bambu dengan menghadiri KAA. Bung Karno juga dikenal konsisten memperjuangkan Tiongkok menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sebagai representasi bangsa-bangsa Asia-Afrika. Kepemimpinan Tiongkok di dalam memelopori perdamaian di Timur Tengah tersebut senafas dengan spirit Dasa Sila Bandung dan Gerakan Non Blok.

Hadirnya buku geopolitik Bung Karno ini menjadi referensi yang penting bagi kebijakan luar negeri dan pertahanan negara. Dengan penemuan kembali terhadap pemikiran geopolitik Bung Karno yang telah dikonstruksikan secara akademis, maka kebijakan politik luar negeri bebas aktif dan pertahanan negara tidak bisa dilepaskan dari spirit anti penjajahan, dan secara aktif melakukan penggalangan kekuatan, serta bagaimana menggunakan kekuatan itu bagi perdamaian dunia. Dalam upaya ini nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan antar bangsa, dan koeksistensi damai harus dijalankan secara progresif di dalam merancang tatanan dunia baru berdasarkan Pancasila.

Hal yang tidak kalah menarik dalam buku ini adalah bagaimana melalui pengetahuan geopolitik, Bung Karno merancang koridor strategis dengan menempatkan pentingnya perguruan tinggi sebagai *city of intellect*, dimana penguasaan ilmu pengetahuan, melalui riset

dan inovasi dikedepankan. Adanya koridor strategis tersebut juga tampak dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana yang sangat visioner dan digagas oleh lebih dari 600 doktor dan disahkan pada tahun 1960.

Semoga dengan terbitnya buku geopolitik Bung Karno ini dapat menggelorakan kembali kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Sebab dengan posisi Indonesia yang sangat strategis, pada dasarnya merupakan tanggung jawab yang bersifat kodrati bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya di dalam seluruh aspek kehidupan. Di sinilah pemikiran geopolitik Soekarno memiliki peran penting sebagai api penggerak kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Merdeka!!!

Jakarta, Mei 2023

Prof. Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri

Presiden Kelima Republik Indonesia

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)



PROLOG

REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA



Pertama-tama saya menyambut dengan baik atas terbitnya buku yang disusun oleh Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M., IPU, yang berjudul “Geopolitik Bung Karno *Progressive Geopolitical Coexistence*”. Buku ini disusun berdasarkan *novelty* hasil disertasi S3 yang diselesaikan dengan baik melalui diskusi-diskusi akademik yang menarik dengan berbagai perspektif yang kaya ragamnya. Semenjak awal kita membaca buku ini, maka ide orisinal yang mengemuka adalah penegasan pemahaman geopolitik dari politik geografi. Geopolitik lebih fokus menganalisis fenomena politik dari perspektif geografi, sedangkan politik geografi menganalisis fenomena geografi dari perspektif politik. Dari pemahaman inilah, maka kita semua dapat menganalisis bahwa pemikiran geopolitik Soekarno adalah politik sebagai manifestasi kepentingan nasional dari perspektif konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Secara akademik, jelas geopolitik Soekarno sangat menentang geopolitik klasik, yang menjadi referensi beberapa negara untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Definisi geopolitik klasik, sebagai cabang geopolitik tradisional adalah pendudukan dan penguasaan wilayah menggunakan kekuatan militer sebagai rasionalisasi berkembangnya suatu negara. Dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya sekaligus mencapai kesejahteraan,

justru negara-negara tersebut berlomba mencari wilayah lain untuk dijajah. Kesejahteraan suatu bangsa, justru menyengsarakan kehidupan bangsa lain. Inilah yang sangat ditentang oleh Soekarno. Geopolitik Soekarno lebih ditujukan untuk membangun kesejahteraan bersama. Kesejahteraan yang saling menghormati satu bangsa dengan bangsa lainnya. Kesejahteraan yang saling menguntungkan dalam hidup berdampingan (*coexistence*). Geopolitik Soekarno yang mendekonstruksi entitas dasar geopolitik klasik adalah geopolitik kritik (*Critical Geopolitics*).

Pada masa mudanya, pemikiran geopolitik Soekarno tampak dari gagasan yang sangat berani ketika tulisan beliau dipublikasikan surat kabar “Suluh Indonesia Muda” pada tahun 1928 yang dipengaruhi pemikiran masyarakat dunia pada saat itu menyaksikan keunggulan armada laut Jepang mengalahkan armada laut Rusia pada pertempuran Tsushima tahun 1905. Kekalahan Rusia membuktikan bahwa bangsa Eropa dapat dikalahkan oleh bangsa Asia. Soekarno percaya dominasi fisik rasialis kulit putih telah berakhir. Soekarno percaya berdirinya “Boedi Oetomo” pada tahun 1908 sebagai suatu pergerakan kebangsaan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemenangan Jepang tersebut. Soekarno berhasil memproyeksikan gagasan mendasar atas fenomena kekalahan ras kulit putih sebagai kebangkitan ras kulit berwarna dari belenggu penjajahan. Geopolitik Soekarno adalah nasionalisme Indonesia. Dengan pemikiran geopolitiknya, maka Soekarno sebagai tokoh pergerakan berhasil banyak mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan Belanda dan pada akhirnya merebut kemerdekaan pada tahun 1945. Geopolitik Soekarno sebagai Presiden RI juga berhasil mempersatukan seluruh Bangsa Indonesia untuk berperang melawan Inggris dan Belanda dalam perang kemerdekaan hingga tahun 1949. Lahirlah Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang dianut hingga kini. Pemikiran geopolitik Soekarno sebagai tokoh dunia juga tercermin dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang berhasil mendorong banyak negara memperoleh kemerdekaan setelah berlangsungnya konferensi tersebut. Geopolitik Soekarno adalah geopolitik populer (*Popular Geopolitics*).

Geopolitik Soekarno adalah geopolitik kontemporer yang berhasil memadukan geopolitik kritik dengan geopolitik populer. Geopolitik Soekarno selalu berusaha memproyeksikan kepentingan

nasional ke arena internasional. Soekarno menunjukkan kepentingan nasional Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ketika menjawab permintaan Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjöld saat krisis Timur-Tengah pada tahun 1956 dengan mengirim Pasukan TNI sebagai Pasukan Perdamaian Dunia. Pasukan TNI adalah pasukan perdamaian PBB yang pertama mengawali tradisi kontribusi perdamaian dunia hingga kini diikuti banyak negara. Setahun berselang, Soekarno memerintahkan Djoeanda selaku perdana menteri untuk mendeklarasikan “Wawasan Nusantara” pada tahun 1957 sebagai hukum internasional yang baru. Suatu perjuangan diplomatis yang pantang menyerah hingga masyarakat dunia mengakui dan menerimanya sebagai hukum yang berlaku positif pada tahun 1994. Dalam konteks pertahanan negara, maka sangat penting wilayah daratan dan perairan Indonesia sebagai satu mandala pertahanan yang solid. Geopolitik Soekarno tidak saja piawai memproyeksikan kepentingan nasional RI menjadi hukum internasional yang baru, bahkan juga mahir memanfaatkan hukum internasional yang ada untuk kepentingan nasional RI. Ketika menghadapi berbagai ancaman stabilitas keamanan negeri dengan mencuatnya gerakan pemberontakan dan separatisme, Soekarno tanpa ragu menggelar operasi militer. Soekarno yakin sekali hukum internasional berpihak kepada negara induk ketika harus mengatasi persoalan integritas wilayah kedaulatannya, sebagaimana tertuang di dalam Piagam PBB. TNI tidak saja diperintahkan untuk menjaga ideologi Pancasila dan memadamkan berbagai macam pemberontakan, bahkan TNI juga diperintahkan untuk mengusir kekuatan militer Belanda keluar dari Papua.

Geopolitik Soekarno yang brilian diteliti secara ilmiah dengan berbagai data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperkuat pandangan para narasumber dari dalam negeri dan luar negeri sebagai informan, sedangkan data kuantitatif diperkuat hasil survei kepada para responden di seluruh Indonesia. Data-data tersebut juga diolah melalui tahapan *preliminary research* dengan menyelenggarakan *Small Group Discussion* (SGD), meningkat pada *Focus Group Discussion* (FGD), hingga *Round Table Discussion* (RTD) mengundang para pakar lintas disiplin keilmuan. Buku ini sengaja ditulis dengan format semi disertasi untuk menunjukkan betapa metodologi penelitian yang digunakan berhasil mengakomodasi semua data yang sangat kompleks untuk kemudian dianalisis

menggunakan berbagai teori makro, teori meso, dan teori mikro. Hasil analisis berhasil membuktikan *body of knowledge* pemikiran geopolitik Soekarno untuk kemudian diuji secara matematis menggunakan berbagai perangkat statistik non-parametrik dan statistik parametrik. Setiap variabel yang terbukti mewakili *body of knowledge* diukur secara parsial dan simultan menggunakan program aplikasi yang valid menunjukkan signifikannya korelasi antara Geopolitik Soekarno dengan Pertahanan Negara. Metodologi penelitian yang mengkombinasikan paradigma ilmu sosial dan ilmu eksakta merupakan salah satu keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dari penelitian ini.

Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M., IPU, atas keberhasilan menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Pertahanan di Universitas Pertahanan RI. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi kejayaan Bangsa Indonesia.

Saya juga mengucapkan selamat membaca kepada seluruh rakyat Indonesia. Salam Bela Negara!!!

Jakarta, Mei 2023

Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, M.Sc., DESD., ASEAN Eng.

Laksamana Madya TNI

Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia

PRAKATA

Buku ini diadaptasi dari disertasi saya yang berjudul “Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negara” di Program Studi Ilmu Pertahanan, Konsentrasi Strategi Pertahanan, Program Doktorat Universitas Pertahanan Republik Indonesia (2022). Studi yang ada berangkat dari kajian panjang tentang pemikiran-pemikiran Soekarno, Proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia, tentang geopolitik, geostrategi dan geoekonomi. Studi ini menggali pemikiran-pemikiran Geopolitik Politik Soekarno dari berbagai sumber primer sejarah dari pidato pembelaan Soekarno di Pengadilan Landraad Hindia Belanda di Bandung 1930, hingga tulisan-tulisan, pidato-pidato, buku-buku karya Soekarno, literatur tentang pemikiran-pemikiran Soekarno, wawancara-wawancara mendalam dengan keluarga Soekarno, para ahli, para pelaku sejarah di sekitar kehidupan politik Soekarno dan sumber-sumber lain yang relevan tentang biografi politik Soekarno. Studi ini juga mencakup tindakan-tindakan politik Soekarno dalam hubungan internasional seperti ketokohnya dalam Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non Blok (GNB), dan dialektika hubungan Soekarno dengan negara-negara besar seperti Tiongkok, Uni Soviet dan Amerika Serikat, di mana Soekarno menyatakan gagasan-gagasan geopolitiknya.

Selain berisi tentang studi pemikiran Geopolitik Soekarno, saya juga melakukan studi tentang dampak gagasan intelektual Geopolitik Soekarno dalam strategi pertahanan negara Republik Indonesia baik di era pemerintahan Soekarno, Orde Baru, dan pasca Orde Baru, hingga sekarang.

Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saya bisa menyelesaikan studi tentang Geopolitik Soekarno kepada:

1. Prof. Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri, Presiden Kelima Republik Indonesia, Guru Besar Universitas Pertahanan Republik Indonesia, yang telah memberikan inspirasi penelitian ini dan sekaligus sebagai narasumber utama di dalam memahami keseluruhan pemikiran Geopolitik Soekarno;
2. Laksdya TNI Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, M.Sc., DESD., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai Co-Promotor I;
3. Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D, selaku Promotor,
4. Letjen TNI (Purn) Dr. I Wayan Midhio, M.Phil, selalu Co-Promotor II;
5. Para penguji eksternal, Jenderal Pol (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Prof. Dr. Komarudin, M.Si., dan Prof. Evi Fitriyani, M.A., Ph.D., dan Prof. Dr. S.P. Djati, M.Si., M.A.
6. Mayjen TNI Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., CIQnR., CIQaR., CIPA, Direktur Program Doktor Universitas Pertahanan Republik Indonesia.
7. Prof. Dr. Irdam Ahmad, M.Stat., yang telah memberikan bimbingan dan terkait dengan penelitian kuantitatif dalam disertasi.
8. Para informan wawancara mendalam, Guntur Soekarnoputra, Dra. Retno Marsudi, LL.M. (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia), Arif Havas Oegroseno (Duta Besar Jerman), Dr. Lalu Muhamad Iqbal (Duta Besar Turki), Ir. Heri Akhmadi (Duta Besar Jepang), Irjen Pol (Purn.) Drs. Sidarto Danusubroto, S.H., Satyagraha (alm.), Prof. Huang Shuhai, Dr. Makmur Keliat, Dr. Noer Hassan Wirajuda, Dr. Connie Rahakundini Bakrie, Evan A Laksmana Ph.D., dan 30 informan lainnya yang telah mendukung dan memperkaya penelitian ini.

9. Prof. Dr. Komarudin, M.Si, Rektor Universitas Negeri Jakarta yang juga telah memberikan banyak masukan dalam disertasi sekaligus menjadi penguji eksternal Sidang Promosi Tertutup.
10. Para narasumber *Focus Group Discussion*, yaitu Laksamana TNI Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M; Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D; Prof. Makarim Wibisono, Ph.D; Mayjen TNI Dr. Budi Pramono, S.IP., M.A., M.M., (GSC)., CiQnR., CIQaR.; Laksma TNI Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si; dan Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M. Si.
11. Para narasumber *Round Tabel Discussion*, yaitu Prof. Dr. Drs. Ermaya Suryadinata, S.H., M.S., M.H; Prof. Hikmahanto Juwana; Letjen TNI (Purn.) Yoedhy Swastanto, M.B.A; Dr. Kusnanto Anggoro; Dr. Rizal Sukma, M.Sc., Andi Widjayanto, S.Sos., M.Sc; dan Dr. Budiasih, S.E., M.E.
12. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Doktoral Universitas Pertahanan Republik Indonesia.
13. Teman sejawat di Cohort 3 yang telah memberikan semangat, dan dukungannya serta kerja sama yang solid bagi kemajuan Universitas Pertahanan Republik Indonesia.
14. Teman diskusi geopolitik: Suryo AB, Ahmad Tarmiji Alkhudri, Bonnie Triyana, Aman Abadi, I Made Sumertajaya, Yohanes Carmelo, Darwin Iskandar, Bonnie Setiawan, Guswandi, Restu Hapsari, Emiliana Indri Eryolanda, Dian Syarif, Cecep Hidayat, dan Rendy Ananta Prasetya.
15. Tim pengambil data: Sirkis Nugroho, Kusnanto, Nano Heryanto, Hadi Iskandar, dan Laurentius Elang Sukma Yudha.
16. Rekan akademisi yang telah memberikan kiritik konstruktif bagi buku ini, Dr. Margaretha Hanita, dan Dr. Airlangga Pribadi.
17. Keluarga yang telah memberikan dukungan semangat dan doa: Prof. Dr. dr. Daldiyono Hardjodisastro, Maria Stefania Ekowati, Ignatius Windu Hastomo, dan Agatha Puspita Astri.

Buku ini tentu saja masih kurang sempurna, dan diperlukan studi lebih lanjut untuk lebih memahami pemikiran Geopolitik Soekarno di masa mendatang dari semua perspektif ilmu. Saya berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pertahanan, menjadi landasan kebijakan luar negeri, kebijakan pertahanan, dan praktik-praktik kenegaraan bagi perjuangan membangun tata dunia baru yang bebas dari berbagai bentuk penjajahan.

Jakarta, Mei 2023

Hasto Kristiyanto

DAFTAR ISI

SAMBUTAN PRESIDEN KELIMA REPUBLIK INDONESIA	v
PROLOG REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA	ix
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR BAGAN	xxvi
DAFTAR SINGKATAN	5
BAB 1 MEREKONSTRUKSI PEMIKIRAN GEOPOLITIK SOEKARNO	1
1.1. Definisi dan Ruang Lingkup Geopolitik	1
1.2. Diskursus Perkembangan Geopolitik Klasik hingga Kontemporer	4
1.2.1. Geopolitik Klasik	4
1.2.2. Geopolitik Kritis: Dari Paragh Khanna hingga Anita Sengupta	10
1.3. Merekonstruksi Pemikiran Geopolitik Soekarno	20
1.4. Fokus Kajian: Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negara	36

1.5. Sistematika Penulisan	37
BAB 2 BIOGRAFI DAN SINTESIS PEMIKIRAN GEOPOLITIK SOEKARNO	41
2.1. Biografi, Situasi Politik, dan Cara Pandang Soekarno tentang Dunia	41
2.2. Tokoh-tokoh yang Mempengaruhi Pemikiran Geopolitik Soekarno	49
2.3. Kritik-kritik Soekarno atas Teori Geopolitik Barat ...	58
2.4. Arah, Ideologi, dan Karya-karya Pemikiran Geopolitik Soekarno	63
BAB 3 KONSTRUK TEORI <i>PROGRESSIVE GEOPOLITICAL COEXISTENCE</i> (PGC): PERTAUTAN GEOPOLITIK, KEPENTINGAN NASIONAL, DAN PERTAHANAN NEGARA	83
3.1. <i>Body of Knowledge</i> dan Tujuh Variabel Geopolitik Soekarno	83
3.2. Posisi Pemikiran Geopolitik Soekarno dalam Peta Geopolitik Klasik dan Kontemporer	91
3.3. Operasionalisasi 7 Variabel Geopolitik Soekarno, Kepentingan Nasional, dan Pertahanan Negara	98
3.4. Pengukuran 7 Variabel Geopolitik Soekarno, Kepentingan Nasional, dan Pertahanan Negara	115
3.4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas	116
3.4.2. Deskripsi Data	120
3.4.3. Hubungan Tujuh Variabel dengan Pemikiran Geopolitik Soekarno	124
3.4.4. <i>Structural Equation Model</i> (SEM)	125

3.5. <i>Progressive Geopolitical Coexistence</i> sebagai Konstruksi Pemikiran Geopolitik Soekarno	146
3.5.1. Intisari Pembuktian Kuantitatif PGC Soekarno	146
3.5.2. Intisari PGC Soekarno dalam Pembuktian Fenomenologis	147
3.5.3. PGC Soekarno sebagai <i>State of the Art</i> Pemikiran Geopolitik Soekarno	151
 BAB 4 PENGARUH PEMIKIRAN GEOPOLITIK SOEKARNO TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL	 153
4.1. Konsep dan Dimensi Kepentingan Nasional	153
4.2. Pengaruh pemikiran Geopolitik Soekarno Terhadap Kepentingan Nasional	159
4.2.1. Pembebasan Irian Barat	159
4.2.2. Koridor Pembangunan Nasional	167
4.2.3. Pelembagaan Pertahanan Negara: Darat, Laut, dan Angkasa	174
4.2.4. Koridor Kepentingan Nasional	180
 BAB 5 PENGARUH PEMIKIRAN GEOPOLITIK SOEKARNO TERHADAP DUNIA	 185
5.1. Pasifik sebagai <i>Pivot</i> Dunia	185
5.2. Pancasila sebagai <i>Lifeline</i> Dunia Baru	187
5.3. Konferensi Asia-Afrika, Gerakan Non-Blok dan Kemerdekaan Bangsa-Bangsa Asia	189
5.4. Tatanan Dunia Baru: Dunia tanpa Imperialisme dan Kolonialisme	192

5.5. PGC sebagai <i>Alternative of View</i> dalam Sistem Internasional	198
--	-----

BAB 6 PENGARUH DAN DAMPAK PEMIKIRAN GEOPOLITIK SOEKARNO TERHADAP PERTAHANAN NEGARA ERA SOEKARNO 207

6.1. Konsep Keamanan dan Pertahanan Negara	208
6.2. Pengaruh Pemikiran Geopolitik Soekarno Terhadap Pertahanan Negara	212
6.2.1. Tingginya Indeks Pertahanan Negara	212
6.2.2. Kemandirian Pertahanan Negara	217
6.2.3. Keikutsertaan dalam Misi Perdamaian Dunia	230
6.3. Dampak Pemikiran Geopolitik Soekarno: Disegani Dunia dan Sekaligus Sebagai Ancaman	234

BAB 7 RELEVANSI DAN IMPLEMENTASIPEMIKIRAN GEOPOLITIK SOEKARNO TERHADAP KEBIJAKAN PERTAHANAN PASCA SOEKARNO 241

7.1. Implementasi Pemikiran Geopolitik Soekarno Terhadap Pertahanan: dari Era Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo Periode Pertama	241
7.1.1. Sistem Internasional dan Kebijakan Pertahanan	243
7.1.2. Gelar Militer dan Gelar Operasi	250
7.1.3. Peringkat Pertahanan	252
7.1.4. Geopolitik dan Pertahanan Negara	252
7.2. Relevansi pemikiran Geopolitik Soekarno dalam konteks Empiris	261

7.3. Pemikiran Geopolitik Soekarno sebagai Peta Jalan Desain Pertahanan Negara	265
---	-----

**BAB 8 PENGARUSUTAMAAN GEOPOLITIK SOEKARNO
DALAM PERTAHANAN NEGARA 271**

8.1. Pengaruh dan Relevansi Geopolitik Soekarno	271
8.2. Pengarusutamaan Geopolitik Soekarno bagi Pertahanan Negara	273
8.3. Rekomendasi Akademis dari Pemikiran Geopolitik Soekarno	274
8.4. Rekomendasi Praktis dari Pemikiran Geopolitik Soekarno	275

EPILOG

AKTUALISASI GEOPOLITIK BUNG KARNO	277
DAFTAR PUSTAKA	281
INDEX	299
TENTANG PENULIS	301

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	<i>Pivot Area</i> atau <i>Heartland Theory</i>	5
Gambar 1.2	Peta <i>Rimland Theory</i>	8
Gambar 1.3	Transformasi Geopolitik Dunia dalam <i>Teori Connectography</i>	14
Gambar 1.4	Telaah Kajian Geopolitik dengan <i>Bibliometric Analysis</i> menggunakan <i>software Publish or Perish (PoP)</i> dan <i>VOSviewer</i> (N = 1000 Referensi)	19
Gambar 1.5	Studi-studi Geopolitik Kontemporer	21
Gambar 1.6	Peta Wilayah Indonesia Hasil Deklarasi Djuanda ..	25
Gambar 1.7	Peta Garis Hidup Imperialisme	27
Gambar 2.1	Presiden Soekarno Memperjuangkan Kemerdekaan Bangsa Asia Afrika dalam Pidatonya pada Konferensi	42
Gambar 2.2	Tradisi Intelektual Soekarno	47
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran Geopolitik Soekarno	48
Gambar 2.4	Imajinasi Soekarno: Pan-Indonesia	61
Gambar 2.5	Buku Mustika Rasa dan Di Bawah Bendera Revolusi	82
Gambar 3.1	<i>Scatterplot</i> Mendeteksi <i>Outlier</i>	140
Gambar 3.2	Tujuh Variabel Pemikiran Geopolitik Soekarno dalam Pembuktian Fenomenologis	150
Gambar 4.1	Landasan Teori Kepentingan Nasional	158
Gambar 4.2	Koridor Pembangunan Nasional	169
Gambar 4.3	Struktur Kabinet Soekarno Tahun 1962	176
Gambar 4.4	Koridor Pertahanan Geopolitik Soekarno	179
Gambar 4.5	Siklus Pemikiran Geopolitik Soekarno	181

Gambar 5.1	Asia Tenggara menjadi Pusat Pertarungan Imperialisme Dunia	187
Gambar 5.2	Warisan Konferensi Asia-Afrika 1955 dan Gerakan Non Blok	193
Gambar 5.3	Isu Pertahanan dan Keamanan Regional-Global	205
Gambar 6.1	Konsep Ancaman	211
Gambar 6.2	Tabel Komparasi Kekuatan Militer di Asia-Afrika	216
Gambar 6.3	Konsep Pemikiran Geopolitik Soekarno dalam Konteks Pertahanan dan Keamanan Negara	217
Gambar 6.4	Pesawat Serbaguna Gelatik	225
Gambar 6.5	Roket Produksi Proyek Menang	226

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Landasan Teoretis Tujuh Variabel Pemikiran Geopolitik Soekarno	57
Tabel 2.2	Pidato Soekarno yang Terkait dengan Pemikiran Geopolitik	66
Tabel 3.1	Ringkasan Body of Knowledge Pemikiran Geopolitik Soekarno	90
Tabel 3.2	Posisi Pemikiran Geopolitik Soekarno dalam Peta Geopolitik Klasik hingga Kontemporer	96
Tabel 3.3	Kisi-kisi Instrumen Demografi	100
Tabel 3.4	Kisi-kisi Instrumen Teritorial	102
Tabel 3.5	Kisi-kisi Instrumen Sumber Daya Alam	103
Tabel 3.6	Kisi-kisi Instrumen Militer	106
Tabel 3.7	Kisi-kisi Instrumen Politik	107
Tabel 3.8	Kisi-kisi Instrumen Koeksistensi Damai	109
Tabel 3.9	Kisi-kisi Instrumen Sains dan Teknologi	111
Tabel 3.10	Kisi-kisi Instrumen Kepentingan Nasional	113
Tabel 3.11	Kisi-kisi Instrumen Pertahanan Negara	115
Tabel 3.12	Pengujian Validitas Variabel Pemikiran Geopolitik Soekarno Terhadap Kepentingan Nasional dan Pertahanan	116
Tabel 3.13	Pengujian Reliabilitas Variabel Pemikiran Geopolitik Soekarno bagi Kepentingan Nasional dan Pertahanan	120
Tabel 3.14	Sebaran Rata-Rata pada Setiap Variabel	120
Tabel 3.15	Sebaran Rata-Rata setiap Indikator	121
Tabel 3.16	Hubungan 7 Variabel dengan Pemikiran Geopolitik Soekarno	125

Tabel 3.17	Estimasi Parameter dan Pengujian Parameter Model Pertama	137
Tabel 3.18	Goodness of Fit Model Struktural Pertama	138
Tabel 3.19	Estimasi Parameter dan Pengujian Hipotesis (Model Kedua)	141
Tabel 3.20	Goodness of Fit Model Struktural Kedua	145
Tabel 3.21	Tujuh Variabel Pemikiran Geopolitik Soekarno dalam Pembuktian Fenomenologis	148
Tabel 4.1	Konsep Kepentingan Nasional	157
Tabel 4.2	Konsep Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana	171
Tabel 4.3	Estimasi Parameter dan Pengujian Hipotesis Variabel Independen terhadap Kepentingan Nasional	180
Tabel 6.1	Daftar Alutsista di Era Soekarno	213
Tabel 6.2	Pengeluaran Pemerintah (Dalam Miliar Rupiah) ...	214
Tabel 6.3	Impor Pengadaan Alutsista Indonesia periode 1950-1965 (dalam US\$ Juta)	215
Tabel 6.4	Daftar Raket Produksi PERAL	221
Tabel 6.5	Daftar Kapal ALRI 1954	221
Tabel 7.1	Perbandingan Perubahan dan Keberlanjutan Kebijakan Pertahanan Indonesia Tahun 1945 – 2019	254
Tabel 7.2	Besar Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total Terhadap Pertahanan	262
Tabel 7.3	Integrasi Kebijakan dalam Pembangunan Pertahanan Negara	266

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Model Pengukuran Demografi	126
Bagan 3.2	Model Pengukuran Teritorial	127
Bagan 3.3	Model Pengukuran SDA	128
Bagan 3.4	Model Pengukuran Militer	129
Bagan 3.5	Model Pengukuran Politik	130
Bagan 3.6	Model Pengukuran Koeksistensi Damai	131
Bagan 3.7	Model Pengukuran Sains dan Teknologi	132
Bagan 3.8	Model Pengukuran Kepentingan Nasional	133
Bagan 3.9	Model Pengukuran Pertahanan	134

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD	: Angkatan Darat
ADRI	: Angkatan Darat Republik Indonesia
AGFI	: <i>Adjust Goodness of Fit Index</i>
AL	: Angkatan Laut
ALRI	: Angkatan Laut Republik Indonesia
ALT	: Kekuatan Alutsista
ALUTSISTA	: Alat Utama Sistem Persenjataan
AMOS	: <i>Analysis of Moment Structure</i>
AMPAI	: <i>American Motion Picture Association in Indonesia</i>
ANRI	: Arsip Nasional Republik Indonesia
ANZUS	: <i>Australia, New Zealand, United States Security Treaty</i>
APRI	: Angkatan Perang Republik Indonesia
APRIS-AD	: Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Angkatan Darat
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
AU	: Angkatan Udara
AURI	: Angkatan Udara Republik Indonesia
BA	: <i>Bibliometric Analysis</i>
BAKOPDA	: Badan Koordinasi Pembangunan Daerah
BAPENGKOP	: Badan Penggerak Koperasi
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BATAN	: Badan Tenaga Atom Nasional
BPUPK	: Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
BRI	: <i>The Belt and Road Initiative</i>
BRICS	: Brazil Russia India China South Africa
CDA	: <i>Critical Discourse Analysis</i>
CFA	: <i>Confirmatory Factor Analysis</i>
CFI	: <i>Comparative Fit Index</i>
CFS	: <i>Critical Discourse Analysis, Fenomenology dan Survey</i>

CIA	: Central Intelligence Agency
COI	: <i>City of Intellect</i>
CONEFO	: The Conference Of The New Emerging Forces
CR	: <i>Critical Ratio</i>
DAD	: Dewan Angkatan Darat
DAL	: Dewan Angkatan Laut
DEM	: Demografi
DEMAR	: Dewan Maritim
DEPERNAS	: Dewan Perancang Nasional
DI/TII	: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DPPP	: Depot Penyelidikan Percobaan dan Perbuatan
EEC	: <i>Eurasian Economic Community</i>
EKO	: Indikator Ekologi
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
FPA	: <i>Foreign Policy Association</i>
FPDA	: <i>Five Power Defense Arrangement</i>
G30S/PKI	: Gerakan 30 September / Partai Komunis Indonesia
GANEF0	: <i>Games of the New Emerging Forces</i>
GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara
GESTOK	: Gerakan Satu Oktober
GFI	: <i>Goodness of Fit Index</i>
GNB	: Gerakan Non Blok
GOF	: <i>Goodness of Fit</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HKM	: Indikator Hukum
IDE	: Indikator Ideologi
IKL	: Indikator Iklim
IMF	: International Monetary Fund
INP	: <i>Instrument of National Power</i>
INT	: Indikator Intelijen
IPA	: <i>Interpretative Phenomenological Analysis</i>
ITB	: Institut Teknologi Bandung
KAA	: Konferensi Asia Afrika
KAL	: Kerja sama dan Aliansi
KAMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KASAB	: Kepala Staf Angkatan Bersenjata
KEP	: Kepentingan Nasional
KGB	: Komite Gosudarstvennoy Bezopasnosti

KIAA	: Konferensi Islam Asia Afrika
KIAPMA	: Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KOE	: Koeksistensi Damai
KON	: Indikator Konsepsi Tanah Air
KOPELAPIP	: Komando Pelaksana Proyek Industri Pesawat
KOTI	: Komando Operasi Tertinggi
KPM	: <i>Koninklijke Paketvaart Maatschappij</i>
KSAD	: Kepala Staff TNI Angkatan Darat
KSAL	: Kepala Staff TNI Angkatan Laut
KSAP	: Kepala Staff Angkatan Kepolisian
KS AU	: Kepala Staff TNI Angkatan Udara
KSL	: Konversi Skala Lima
KSS	: Kerja sama Selatan-Selatan
KTT-GNB	: Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok
LAPAN	: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
LBB	: Liga Bangsa-bangsa
LCS	: Laut China Selatan
LEMHANNAS	: Lembaga Ketahanan Nasional
LIPNUR	: Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio
LISREL	: <i>Linear Structural Relations</i>
LN	: <i>League of Nations</i>
LPB	: <i>Leger Produktie Bedrijven</i>
MAPHILINDO	: Malaysia Philipina Indonesia
MBAD	: Markas Besar Angkatan Darat
ME	: <i>Marine Establishment</i>
MIL	: Militer
MLE	: <i>Maximum Likelihood Estimation</i>
MUPPENAS	: Musyawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NEFO	: <i>New Emerging Forces</i>
NEKOLIM	: Neo kolonialisme dan Imperialisme
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OBOR	: <i>One Belt One Road</i>
OLDEFO	: Old Emerging Forces
OPS	: Organisasi Pengusaha Sejenis
PABAL-AD	: Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat

PAL	: Penataran Angkatan Laut
PANGTI	: Panglima Tertinggi
PAPFIAS	: Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialisme Amerika Serikat
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
PCFI	: <i>Parsimony Adjustment to the CFI</i>
PDB	: Produk Domestik Bruto
PER	: Pertahanan
PERAL-AD	: Peralatan Angkatan Darat
PERMESTA	: Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta
PGI	: <i>Progressive Geopolitical Coexistence</i>
PINDAD	: Perindustrian TNI Angkatan Darat
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PMD	: Poros Maritim Dunia
PND	: Indikator Pendidikan
PNFI	: <i>Parsimony Adjustment to the NFI</i>
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PNSB	: Pembangunan Nasional Semesta Berencana
POP	: <i>Publish of Perish</i>
PP	: Peraturan Pemerintah
PPS	: <i>Probability Proportional to Size</i>
PRIMA	: Proyek Ilmiah dan Militer
PRRI	: Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
PRT	: Indikator Pertahanan
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PSM	: Pabrik Senjata dan Mesiu
RCEP	: <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RMSEA	: <i>Root Mean Square Error of Approximation</i>
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
RTD	: <i>Round Table Discussion</i>
SAS	: <i>Special Air Service</i>
SDA	: Sumber Daya Alam
SDE	: <i>State Driven Economic</i>
SDR	: <i>Strategic Defense Review</i>
SEM	: <i>Structural Equation Model</i>
SESKOAD	: Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat

SEZ	: <i>Special Economic Zones</i>
SIS	: <i>The Secret Intelligence Service</i>
SISHANKAMRATA	: Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta
SPSS	: <i>Statistical Package for the Social Sciences</i>
SSC	: <i>South-south Cooperation</i>
STR	: Indikator Strategi
TEK	: Sains dan Teknologi
TER	: Teritorial
TLI	: <i>Tucker Lewis Index</i>
TNI	: Tentara Nasional Republik Indonesia
TPP	: <i>Trans Pasific Partnership</i>
TRI AU	: Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara
TRIKORA	: Tri Komando Rakyat
TT	: Tentara Territorium
TUPOKSI	: Tugas Pokok Fungsi
UN	: United Nation
UNOC	: <i>Operation in the Congo</i>
US	: United States
USIA	: United States Information Agency
USINDOPACOM	: United States Indo Pasific Command
UUD	: Undang-undang Dasar
VUCA	: <i>Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity</i>
WTO	: World Trade Organization



BAB 1

MEREKONSTRUKSI PEMIKIRAN GEPOLITIK SOEKARNO

Merekonstruksi pemikiran Geopolitik Soekarno dalam konteks kekinian sangat penting di tengah dinamika geopolitik kontemporer yang kompleks. Pemikiran Geopolitik Soekarno secara empirik telah terbukti memberikan landasan pijak dan sebagai *alternative of view* dalam membangun tata dunia internasional yang mengedepankan kemanusiaan, keadilan, persahabatan antar bangsa bagi perdamaian dunia. Bab 1 merupakan catatan pembuka yang dijelaskan pentingnya merekonstruksi pemikiran Geopolitik Soekarno dan memberikan pemosisian Geopolitik Soekarno di antara peta teoretis dan metodologis geopolitik klasik dan kontemporer.

Di dalam Bab 1 akan dijelaskan lingkup bahasan tentang definisi dan ruang lingkup geopolitik; diskursus perkembangan geopolitik dari klasik hingga kontemporer; rekonstruksi pemikiran Geopolitik Soekarno; dan fokus kajian: pemikiran Geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara.

1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Geopolitik

Studi Geopolitik berimpitan dengan pertahanan negara dan secara intrinsik memuat aspek Geostrategis.¹ Geostrategis menurut Zbigniew Brzezinski adalah manajemen strategis untuk Geopolitik.

1 Colin Flint (2006). *Introduction to Geopolitics*. New York: Routledge.

Brzezinski adalah tokoh terkemuka pemikir Geostrategi.² Karl Haushofer (1869-1946) mempertautkan politik dengan geografi dengan melihat konsep pertarungan kepentingan nasional antar negara (*struggle*), masyarakat (*people*), waktu, dan wilayah (*space*) sebagai dasar analisisnya.³ Rudolf Kjellen (1864-1922) salah seorang pendiri Geopolitik Jerman, guru besar Universitas Uppsala, Swedia, memandang Geopolitik sebagai sesuatu yang hidup dan dinamis atau *staten som lifsform*. Pandangan ini dilanjutkan Karl Haushofer yang menekankan pentingnya nasionalisme dalam konsep Geopolitik. Haushofer merumuskan Geopolitik sebagai aktivitas politik yang mendistribusikan kekuasaan negara terhadap seluruh entitas kontinen termasuk di dalamnya tanah, daratan, cuaca, maupun sumber-sumber daya.⁴

Istilah geopolitik digunakan dalam berbagai makna, dari makna geografi, makna politik hingga konstruksi geostrategis yang berkaitan dengan manajemen strategis untuk geopolitik bagi negara-negara. Teori geopolitik dengan demikian tidak bersifat linier melainkan kompleks. Akan tetapi dalam berbagai diskusi geopolitik, identitas, proses, dan identitas suatu negara sangat dipengaruhi secara deterministik oleh aspek geografis yang menjadi *impuls*-nya.⁵ Identitas suatu negara dapat dipelajari dari sejarah, geografi, nilai-nilai yang sedang berlangsung dan budaya strategis suatu bangsa. Budaya strategis mengombinasikan konteks geografi, sejarah, dan politik.⁶ Para ahli beranggapan bahwa ketiga hal ini memberi pengaruh kuat terhadap perilaku negara dalam rangka mencapai keinginan atau kepentingan nasionalnya.

2 Amr G. E. Sabet (2015). Geopolitics of a changing world order Contemporary. *Arab Affairs* Vol. 8, No. 2 (April-June), pp. 163-180 (18 pages), University of California Press.

3 Saul Bernard Cohen (2003). *Survey of Geopolitics*. In *Geopolitics: The Geography of International Relations*. London: Rowman and Littlefield Publishers.

4 Gearoid Ó Tuathail (1996). *Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space*. London: Routledge.

5 Colin Flint (2006). *Op. Cit.*; Gearoid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge (1998). *The Geopolitics Reader*. Routledge; Sören Scholvi, (2016). Geopolitics an Overview of Concepts and Empirical Examples from International Relations, *The Finnish Institute of International Affairs (FIIA) Working Paper*, No. 91, 2016, pp. 1-25; Kusnanto Anggoro (2017). Perubahan Geopolitik dan Ketahanan Nasional: Sebuah Penjelajahan Teoretikal. *Jurnal Lemhamas RI*, 5(1): 5-17.

6 Sara Smith (2012). Intimate geopolitics: Religion, marriage, and reproductive bodies in Leh, Ladakh. *Annals of the Association of American Geographers*, 102, 1511-1528.

Perilaku ini dapat dilihat pada Jerman yang bercorak ekspansionis hingga pertengahan abad ke-20. Jerman merujuk Teori Heartland dalam konsep geopolitik yang menyatakan barang siapa menguasai daerah jantung yaitu Eurasia akan menguasai dunia. Teori Geopolitik Jerman ini kemudian digunakan oleh Adolf Hitler sebagai pembenaran pergerakan ekspansionis Jerman yang sebelum Perang Dunia II. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menganut keyakinan pada Teori Rimland, yakni teori yang merumuskan bawah penguasaan daerah pinggir yang dianggap sebagai kunci bagi penguasaan hegemoni geopolitik global. Tiongkok dengan filosofi identitas *middle kingdom*, ingin menguasai Laut China Selatan (LCS) dengan klaim tradisionalnya bahwa LCS adalah wilayah teritorialnya. Tiongkok berhasrat meluruskan peta jalur geoeкономи melalui sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) yang membentengi Tiongkok sebagai titik sentralnya di LCS. Fenomena geopolitik Jerman, Amerika Serikat, dan Tiongkok tersebut menunjukkan bahwa terkait dengan identitas, perilaku dan interaksi aktor-aktor negara, faktor geografi berpengaruh secara dominan.⁷

Menurut Defarges gagasan dan materialisasi geopolitik berubah sesuai dengan tempat dan waktu.⁸ Seiring dengan kemajuan zaman, dinamika geopolitik baik internasional maupun domestik, telah berpengaruh langsung pada bidang keamanan, ekonomi, politik, militer dan kehidupan sosial. Perkembangan ini mendorong penjelasan konsep-konsep geopolitik di setiap negara yang membutuhkan perlindungan dari sistem pertahanan negara yang lebih komprehensif untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang bersifat asimetris (berat sebelah). Perubahan dunia yang cepat dalam aspek pertahanan negara, demokrasi, politik, ekonomi, hukum, teknologi dan informasi menjadi fenomena yang terus membuka ruang bagi negara-negara tertentu untuk melakukan ekspansinya melalui pendekatan geopolitik, baik yang bersifat praktis maupun populer. Kepentingan nasional hanya dapat tercapai dan terlindungi apabila didukung visi geopolitik yang merujuk pada kekuatan negara itu sendiri.⁹

7 Kusananto Anggoro (2017). Perubahan Geopolitik dan Ketahanan Nasional: Sebuah Penjelajahan Teoretikal. *Jurnal Lemhannas RI*, 5(1): 5-17.

8 Philippe Moreau Defarges (2005). *Introduction à la Géopolitique*. Paris: Édition du Seuil.

9 Ermaya Suradinata (1997). *Paradigma Geopolitik*. Jakarta: Lemhannas RI.

Pemikiran geopolitik mulai berkembang pesat sejak abad ke-19 pada masa puncak kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara Barat untuk memperluas wilayah kekuasaannya dan membentuk suatu imperium baru. Pemikiran geopolitik ini memberi referensi kepada kolonialisme. Pada awal perkembangannya, kolonialisme dilakukan oleh bangsa Eropa demi mencari sumber daya alam untuk kebutuhannya sendiri. Seiring wataknya yang eksploitatif, kolonialisme berubah dan menyatu dengan imperialisme berupa perluasan wilayah kekuasaan sebagaimana digambarkan dalam teori *Lebensraum*. Kelebihan produksi akibat Revolusi Industri di Inggris menyebabkan ekspansi wilayah adalah satu-satunya jalan keluar agar barang-barang yang berlebihan ini dapat dipasarkan di wilayah baru. Pemaknaan secara politik atas kondisi geografis semakin mendorong perkembangan pemikiran yang berkaitan dengan konstelasi geografis.

Geopolitik kemudian menjadi studi dan menjadi dasar pemikiran sejumlah tokoh dunia dengan menempatkan konsep geopolitik sebagai pertimbangan bagi para *statecrafts* dalam membuat kebijakan negara untuk memperoleh keunggulan politik di tengah persaingan global.¹⁰

1.2 Diskursus Perkembangan Geopolitik Klasik hingga Kontemporer

1.2.1 Geopolitik Klasik

Berbagai teori klasik maupun kontemporer dirumuskan menjelaskan fenomena-fenomena yang menyangkut aspek geografi dan kepentingan negara. Dalam sejarah keilmuan geopolitik klasik, pemahaman terhadap aspek geografi dan politik pertama kali ditulis oleh Frederich Ratzel (1844-1904), seorang pemikir geografi dan etnografi Jerman yang menjelaskan tentang *Political Geography*. Pemikiran tentang ilmu bumi politik (*Political Geography*) dilanjutkan Rudolf Kjellen (1864-1922), seorang *neo-logisme* geopolitik dari Universitas Uppsala, Swedia yang pertama kali

10 S. Sumarsono, et.al. (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

mencetuskan terminologi geopolitik.¹¹ Perbedaan pemikiran Ratzel dan Kjellen terletak pada fokus kajiannya. Ilmu bumi politik mengkaji fenomena geografi dari perspektif politik, sedangkan geopolitik (*Geographical Politics*) memiliki sudut pandang sebaliknya, yakni memandang fenomena politik dari perspektif geografi. Dalam artikelnya *Staten som Litsform* (1916), Kjellen menegaskan pokok pemikirannya yang dipengaruhi oleh ide-ide Darwin dan Ratzel, yakni bahwa negara merupakan suatu organisme yang hidup.¹²



Gambar 1.1. Pivot Area atau Heartland Theory

Sumber: Walters (2000)

Pemikiran Geopolitik Kjellen diteruskan Karl Haushofer yang pemikiran geopolitiknya ditulis dalam karya-karyanya di *Zeitschrift für Geopolitik* (Jurnal untuk Geopolitik) di mana Haushofer adalah editornya. Pandangan geopolitik Haushofer saat itu bertujuan untuk memperkuat nasionalisme dalam rangka memperjuangkan cita-cita bangsa Jerman bersatu. Geopolitik Haushofer menggambarkan distribusi kekuasaan negara atas seluruh entitas kontinen termasuk

11 Pemikiran Geopolitik Rudolf Kjellén terpengaruh oleh pemikiran Friedrich Ratzel. Bersama dengan rekannya Alexander von Humboldt, Karl Ritter, dan termasuk Friedrich Ratzel, Kjellén mendirikan Geopolitik Jerman, dalam Andreas Dorpalen (1984). *The World of General Haushofer*. Farrar & Rinehart, Inc., New York.

12 Rudolf Kjellén (1916). *Staten som lifsform*. Stockholm : Gebers.

tanah, daratan, cuaca maupun sumber daya yang di dalamnya terdapat peran kekuasaan beserta seluruh aktivitas politiknya. Karl Haushofer telah mengubah geopolitik menjadi sebuah disiplin akademis.¹³

Halford John Mackinder seorang akademisi Inggris menulis bahwa siapa yang menguasai Eropa Timur memerintah *Heartland*; yang menguasai *Heartland* memerintah *World-Island*; yang menguasai *World-Island*; memerintah dunia.¹⁴ Ini dikenal sebagai *Heartland Theory* atau Teori Wawasan Benua yang percaya jika mereka berhasil menguasai *Heartland*, secara tidak langsung akan menguasai *World-Island* dan mereka yang menguasai *World-Island* juga akan menguasai dunia.¹⁵ Wilayah *Heartland* adalah daerah pusat atau *pivot area*, yakni daerah Eurasia. Sementara itu, wilayah *World-Island* adalah seluruh bagian di luar Eurasia. Pada saat itu wilayah *Heartland* adalah wilayah negara-negara saingan berat Inggris. Jika dapat menaklukkan negara-negara tersebut, Inggris akan lebih mudah untuk menguasai area *World-Island* yang merupakan negara-negara jajahan Eropa.

Dalam pemikiran Mackinder, aspek geografis tidak berubah, namun faktor teknologi turut mengubah perspektif terhadap geografis. Mackinder mendalilkan geopolitik berbasis geografis yang mengamati pergerakan Rusia sebagai penguasa Eropa Timur. Posisi Rusia di sisi selatan berbatasan dengan Mongolia memiliki akses untuk mencapai daratan Asia. Agenda geopolitik untuk menguasai daerah jantung, mendorong Rusia mengembangkan jalur kereta api *Trans Siberian Railway* sebagai interkoneksi antar wilayah-wilayah Rusia, Mongolia hingga ke Jepang. Lintasan kereta api menandai perkembangan kemajuan teknologi dan transportasi darat yang signifikan dalam usaha integrasi sumber daya kawasan melalui lalu lintas jalur perdagangan.¹⁶

Mackinder menjelaskan terdapat tiga periode masa imperialisme, letak geografi dan kemajuan transportasi mampu

13 Gearoid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge (1998). *Op. Cit.*; Jorg Michael Dostal (2016). Review on The Demon of Geopolitics: How Karl Haushofer Educated Hitler and Hess. *thimehighereducation.com*, 19 May.

14 Halford John Mackinder (1904). The Geographical Pivot of History. *The Geographical Journal*, April.

15 Géaroid Ó Tuathail (1996). *Op. Cit.*

16 Halford John Mackinder (1904), *Op. Cit.*

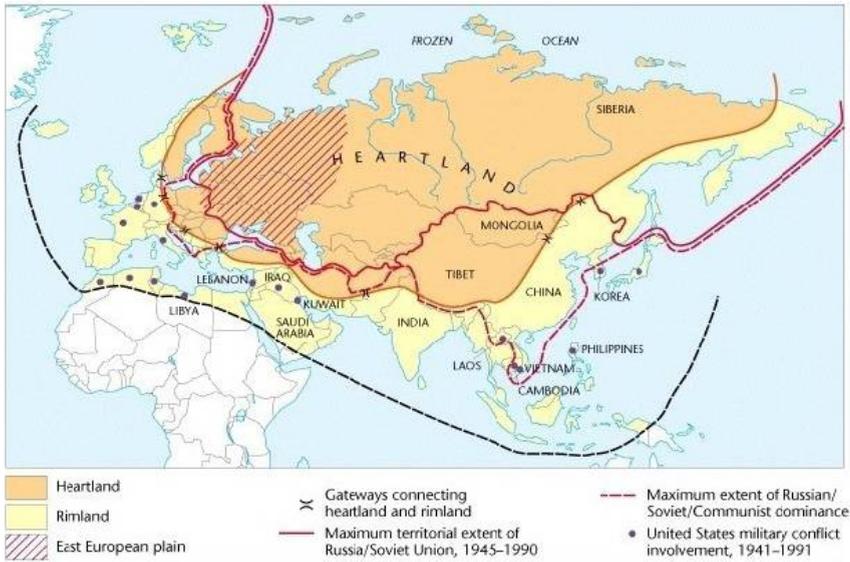
mempengaruhi peradaban. Pertama pre-columbian, yakni periode di mana bangsa-bangsa Asia mulai bermigrasi menggunakan tenaga hewan seperti kuda dan unta sebagai alat transportasinya melewati pegunungan Ural, Laut Kaspia, Rusia Selatan sampai di Semenanjung Eropa. Kedua columbian, yakni periode ekspansionisme yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa menggunakan kapal layar dan transportasi laut lainnya sehingga Eropa menguasai sea power. Ketiga, post-columbian, yakni periode saat negara-negara mulai membuka diri untuk saling terhubung. Ditemukannya mesin uap yang berlanjut pada pengembangan kereta uap dan kemudian ketika Terusan Suez dimanfaatkan Rusia untuk melakukan ekspansi wilayah daratan.¹⁷ Pemikiran Mackinder digunakan George Kennan sebagai dasar pembuatan *containment policy* yang digunakan untuk menghadang paham komunisme di Eropa Timur dan Asia.¹⁸

Antitesis dari teori Wawasan Benua (*Heartland Theory*) Mackinder adalah teori Wawasan Bahari (*Rimland Theory*). Teori ini menjelaskan siapa yang menguasai lautan, akan menguasai perdagangan, siapa yang menguasai perdagangan akan menguasai kekayaan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia. *Rimland* merupakan wilayah luar *Heartland* yang meliputi negara-negara luar Eropa, dengan anggapan: siapa yang mengendalikan *Rimland*, menguasai Eurasia. Siapa yang menguasai Eurasia mengendalikan nasib dunia. Negara-negara baru yang memiliki sumber daya melimpah baik alam maupun manusia dipercaya akan menjadi modal cukup untuk menguasai dunia.¹⁹

17 Géaroid Ó Tuathail (1996), *Op. Cit.*

18 Saul Bernard Cohen (2003), *Op. Cit.*

19 Géaroid Ó Tuathail (1996), *Op. Cit.*



Gambar 1.2. Peta Rimland Theory

Sumber: Walters (2000)

Pada awalnya, *Rimland Theory* digagas oleh Nicholas John Spykman yang kemudian dikenal sebagai Geopolitik Amerika, ahli bumi asal Amerika Serikat, kemudian dipopulerkan dan diperkuat Alfred Thayer Mahan. Mahan, seorang sejarawan sekaligus prajurit Angkatan Laut Amerika Serikat, mencetuskan *Sea Power Geopolitics Theory* yang menekankan penggunaan kekuatan laut untuk menguasai dunia melalui ekspansi perairan. Teori ini digagas pada 1909 pada saat Amerika Serikat dan Inggris sedang berkompetisi. Mengacu pada teori Mahan ini, Amerika Serikat membangun kebijakan strategis menguasai dunia dengan menguasai lautan hingga melampaui Inggris yang saat itu menguasai dua per tiga bagian laut dunia.²⁰

Kekuatan laut suatu negara, menurut Mahan ditentukan oleh enam unsur pendukung, antara lain:

- a. Kedudukan posisi geografis;
- b. Bentuk kontur tanah dan pantainya;

20 Geároid Ó Tuathail (1996). *Op. Cit.*

- c. Keluasan wilayah;
- d. Kepadatan jumlah penduduk;
- e. Kultur dan karakter penduduk; dan
- f. Sistem pemerintahan termasuk distribusi kekuasaan lembaga-lembaga nasional di dalamnya.

Mahan meyakini bahwa keenam unsur tersebut menentukan perkembangan kekuatan laut sekaligus menjadi penanda negara yang besar.²¹ Milan Vego menggarisbawahi ide pokok pemikiran Mahan di antaranya nilai-nilai strategis (*strategic values*), konsentrasi kekuatan (*power concentration*), berbagai akses komunikasi laut (*sea communications*), serta komando penguasaan laut (*command of the sea*).²²

Sebagai seorang ahli strategi yang terlatih dari pengalaman perang saudara di Amerika Serikat (1861-1865), Mahan, mendeklarasikan perluasan wilayah teritorial Amerika Serikat melalui kajiannya atas perbandingan perang yang dilakukan oleh dua kekuatan besar dunia saat itu, Inggris dan Prancis.²³ Kajian Mahan ini ditandai dengan sebuah pertanyaan: Bagaimana Amerika Serikat bisa seperti Inggris, mendapatkan keuntungan dengan memproteksi lautan sekaligus dapat menjadi kekuatan geopolitik. Mahan berhasil mengantarkan Amerika Serikat menggantikan kedudukan Inggris, sebagai kekuatan geopolitik nomor satu di dunia. Mahan dianggap berhasil melakukan kajian geopolitik dengan menggabungkan geografi dan sejarah dengan mengambil pelajaran atas konfrontasi panjang antara dua kekuatan besar pada tengah abad ke-17 dan ke-18, yakni pertarungan antara Inggris dan Prancis.

Mahan mengklasifikasi hasil penelitiannya itu menjadi dua prioritas besar, yakni: Pertama, pendekatan ekonomi dan konflik keuangan. Inggris, sebagai negara kolonial mempunyai prinsip bahwa perang harus menjadi sumber keuntungan, pembiayaan perang diatur secara metodis, biaya perang dipantau dengan sangat cermat. Sedangkan Prancis, di masa Raja Louis XIV dan Raja Louis XV gagal mengontrol keuangan negara yang sedang berperang

21 Alfred T. Mahan (1890). *The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783*. Boston: Little Brown and Company.

22 Milan Vego (2009). *Naval Classical Thinkers and Operational Art*. Rhode Island: Naval War College.

23 Philippe Moreau Defarges (2005). *Op. Cit.*

hingga mengalami kerugian besar. Kedua, kontrol atas laut, dengan mengamati Sir Walter Raleigh (1552-1618), seorang navigator perang laut Inggris yang andal, membuat Inggris tidak akan pernah melepas tekadnya membangun kerajaan di lautan dengan merebut titik-titik persimpangan strategis seperti Selat Gibraltar, Terusan Suez, Cape Town, Aden dan Singapura. Sementara itu Prancis berambisi menyatukan Eropa dan wilayah kolonialisasinya, mencoba menggabungkan ambisi kekuatan maritimnya untuk kolonisasi sekaligus mendominasi Eropa, namun Prancis kalah dalam kedua hal ini. Kesimpulan studi Mahan ini menjadi ungkapan yang sangat populer: “Siapa yang menguasai laut, memegang perdagangan dunia; siapa memegang perdagangan dunia, memegang kekayaan; siapa memegang kekayaan dunia, memegang dunia itu sendiri”.²⁴

1.2.2 Geopolitik Kritis: Dari Parag Khanna hingga Anita Sengupta

Pemikiran geopolitik kritis Parag Khanna ditulis dalam bukunya *Connectography: Mapping the Future of Global Civilization* (2016).²⁵ Parag Khanna menjelaskan *Connectography* sebagai teori kunci geopolitiknya. *Connectography* membahas pentingnya konektivitas negara dalam hubungan internasional. Menurut Khanna, konektivitas dapat diwujudkan apabila infrastruktur yang tersedia mampu mengakomodasi kebutuhan manusia. Infrastruktur tersebut meliputi moda transportasi, komunikasi dan energi. Konektivitas juga menjembatani kesenjangan antara penawaran dan permintaan di banyak aspek seperti penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan tujuan-tujuan lainnya.

Teori *Connectography* menekankan pada fungsi geografis dibanding hubungan politik. Fungsi ini berkaitan dengan ruang fungsional yakni bagaimana manusia menggunakan dunia dan bagaimana fungsi infrastruktur bekerja dan bermanfaat. Selain pembangunan infrastruktur, komponen penting lainnya adalah

24 Philippe Moreau Defarges (2008). *Dechiffrez les règles du jeu planétaire, La Géopolitique pour les nuls*. Paris: Édition du Seuil.

25 Parag Khanna (2016). *Connectography: Mapping the Future of Global Civilization*. New York: Random House. Lihat juga Khanna (2019). (2019). *The Future is Asian*. Simon and Schuster.

rantai pasokan (*supply chain*). Rantai pasokan kontemporer menciptakan jalur penghubung seluruh elemen, mulai dari aras lokal, nasional, regional kawasan, dan internasional untuk membentuk jaringan universal. Menurut Khanna, rantai pasokan bertujuan menghubungkan pasokan (*supply*) dan permintaan (*demand*) yang pada akhirnya akan membentuk sistem keterhubungan rantai pasokan dunia (*supply chain global system*). Dalam sistem rantai ini akan banyak aktor yang melibatkan diri di dalamnya. Aktor-aktor ini bertujuan untuk mendapat nilai efisiensi di setiap aspek kegiatan atau aktivitas pekerjaan mereka. Rantai ini tidak hanya berkaitan dengan masalah transportasi dalam rangka pemindahan produk antar lokasi, melainkan di dalamnya juga memuat peluang mobilitas ekonomi masyarakat baik berupa fisik maupun intelektual. Karena beragamnya aktor yang terlibat, Khanna mengindikasikan bahwa kajian geopolitik memiliki kompleksitasnya sendiri.

Dalam Teori *Connectography*, Khanna juga memperkenalkan konsep devolusi dan agregasi. Konsep devolusi menjelaskan bahwa konektivitas dapat mempersempit fragmentasi wilayah, misalnya dari kekaisaran menjadi bangsa, dari bangsa menjadi provinsi, dan dari provinsi menjadi kota. Konsep devolusi tidak hanya mengarah pada kemerdekaan, fragmentasi dan dekolonisasi, tetapi juga otoritas dan otonomi untuk mengejar kepentingannya sendiri. Devolusi memainkan peran penting dalam mengurangi konflik internasional, sengketa perbatasan dan menjadi pendorong penting stabilitas global yang melampaui demokrasi. Adapun agregasi adalah fenomena jangka panjang yang berada di luar relasi politik. Manifestasi agregasi yang dapat dilihat dari fragmentasi dan penyatuan batas dunia (negara) telah bergeser dalam tatanan geopolitik. Beberapa negara membuat pemetaan ulang dengan memperhatikan integrasi aspek fungsional sistem moneter, jalur transportasi, jaringan keuangan, rantai pasokan dan sebagainya. Pada akhirnya tercipta zona fungsional yang tumpang tindih dan berakibat mendorong aspek ekonomi di luar batasan geografis. Maksudnya perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara tersebut dalam mengelolanya, namun juga dipengaruhi oleh kekuatan negara lain yang terkoneksi dengannya. Dalam analisisnya ini Khanna menyebutkan bahwa ekonomi merupakan senjata pengontrol dalam manuver geopolitik.

Khanna juga menjelaskan bahwa salah satu kunci kemakmuran adalah tersedianya infrastruktur menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Rantai pasokan adalah salah satu produk konektivitas yang bermanfaat mentransfer sumber daya secara strategis ke lokasi produksi dan produk kepada konsumen. Ini karena sumber daya menjadi daya tarik untuk mengoptimalkan rantai pasokan dalam bentuk jalan raya, jaringan pipa, dan rel kereta api. *Supply chain system* yang canggih dapat mengurangi waktu pengiriman logistik dan menciptakan efisiensi dalam aktivitas pengangkutan sumber daya. Khanna menyoroti persaingan geopolitik yang cenderung mengesampingkan kepentingan keamanan dan perdamaian demi kepentingan perdagangan. Bahkan untuk memenangkan persaingan tersebut, negara-negara besar berusaha untuk menguasai lautan yang menjadi jalur perdagangan utama. Negara-negara pun bersedia melakukan intervensi militer untuk melindungi infrastruktur rantai pasokan tersebut.

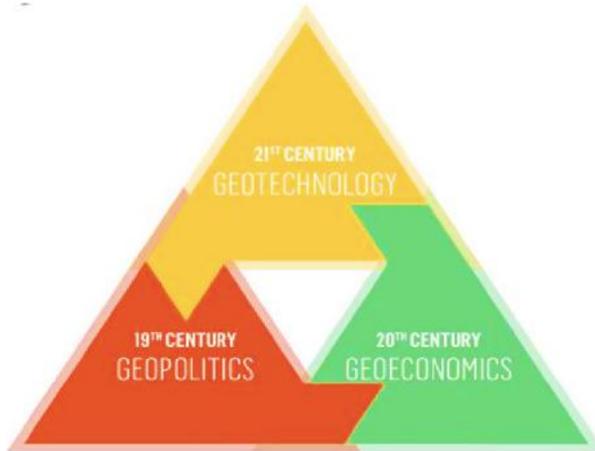
Persaingan geopolitik juga menciptakan beberapa kota dunia sebagai *mega-hub* perdagangan luar negeri, salah satunya adalah Dubai. Dubai menjelma sebagai kota dunia modern karena diuntungkan geolokasi dan kapasitasnya dalam menyerap dan mengirimkan barang, jasa, keuangan, orang dan data. Menurut Khanna negara yang berhasil memanfaatkan rantai pasokan dapat meningkatkan upah pekerja, perluasan lapangan kerja dan memperoleh banyak investasi. Berkaitan dengan hal ini para investor, baik lokal maupun internasional, tertarik berinvestasi pada negara tersebut karena menguntungkan dari segi apapun. Di kawasan Asia, Khanna menyebut Tiongkok dan India sebagai negara yang diminati para investor karena berhasil menerapkan sistem *Special Economic Zones (SEZ)*.²⁶ Di balik manfaat yang dapat diperoleh dengan *Supply Chain system*, menurut Khanna terdapat beberapa kelemahan yaitu, berkaitan dengan kualitas produk, standar infrastruktur, dan etika

²⁶ Menurut Laporan FIAS 2008 Zona Ekonomi Khusus (*Special Economic Zones/SEZ*) adalah wilayah geografis yang dibatasi yang terkandung dalam batas-batas nasional suatu negara di mana aturan bisnis berbeda dari yang berlaku di wilayah nasional. Aturan-aturan diferensial ini pada prinsipnya berhubungan dengan kondisi investasi, perdagangan dan bea cukai internasional, dan perpajakan; dimana zona tersebut diberikan lingkungan bisnis yang lebih liberal dan efektif daripada wilayah nasional [Thomas Farole (2011). *Special Economic Zones in Africa Comparing Performance and Learning from Global Experience*. The World Bank].

tata kelola. Ini karena perusahaan global sering melanggar aturan lokal saat mengekstraksi sumber daya untuk memenuhi tujuan rantai pasokan mereka.

Pada tahapan tertentu Khanna juga membahas mengenai konektivitas pada masyarakat global melalui peradaban dunia maya, pengenceran genetik manusia, dan bagaimana alam membentuk rantai pasokan modern. Internet termasuk ke dalam kebutuhan manusia sehingga pembangunan jaringan internet masuk ke dalam kategori pembangunan infrastruktur. Keberadaan internet sangat bermanfaat bagi negara berkembang. Mereka mendapat keuntungan dari infrastruktur berbiaya rendah melalui perangkat lunak berbasis *cloud*, penyimpanan data, dan aplikasi perusahaan. Selain itu infrastruktur digital telah memungkinkan konektivitas dengan menggabungkan pasar fisik virtual. Ini telah membantu konsumen untuk mengakses informasi, produk berbiaya rendah, dan berbagai layanan. Internet juga membantu tenaga kerja dengan menghubungkan penyedia kerja dan pekerja lepas.

Khanna juga membahas mengenai pengenceran genetik manusia. Khanna berpandangan bahwa manusia modern cenderung lebih bangga terhadap kota yang ditinggali dibanding bangsanya. Menurut Khanna, fenomena ini biasa terjadi pada kota-kota bisnis di dunia. Penduduk pada kota tersebut kebanggaan atas nasionalismenya berubah menjadi kebanggaan atas kewarganegaraan. Terakhir, Khanna membahas perubahan iklim dan bagaimana hal itu membuat manusia memikirkan strategi relokasi, dari kota besar ke kota kecil, dari perkotaan ke pedesaan, hidup dekat dengan alam namun bekerja secara digital. Perubahan iklim juga berdampak pada alam melalui kenaikan permukaan laut, penggurunan tanah subur, sungai kering, kekeringan dan bencana alam lainnya, sehingga menciptakan zona nomaden di berbagai tempat di seluruh dunia. Makanan dan air adalah sumber daya penting yang perlu diperhatikan agar negara dapat membangun infrastruktur untuk melayani penduduknya. Akan tetapi inisiatif keberlanjutan tidak dapat mengikuti industrialisasi melalui emisi karbon dan gas, yang membuat pemerintah dan manusia biasa terus mencari tempat yang layak huni.



Gambar 1.3. Transformasi Geopolitik Dunia dalam Teori *Connectography*

Sumber: Khanna (2016)

Secara ringkas Teori *Connectography* menjelaskan kompleksitas geopolitik kontemporer. Corak pemikiran Khanna menekankan pada fungsi geografis dibanding hubungan politik. Terdapat lima inti sari pemikiran Khanna yakni:

- a. Konektivitas negara-negara secara global, dalam konteks infrastruktur transportasi, energi, dan komunikasi;
- b. Sistem keterhubungan rantai pasokan dunia;
- c. *Multi-actors*, relasi, dan mobilitas yang kompleks;
- d. Devolusi dan agregasi wilayah;
- e. Ekonomi sebagai pengontrol manuver geopolitik; dan
- f. Transformasi geopolitik dunia dari geopolitik ke geoekonomi hingga geoteknologi.

Selain Khanna ada juga pemikir geopolitik perempuan asal Asia yang dikenal dengan Konsep *Connectography* yakni Anita Sengupta. Pemikiran Anita Sengupta tentang geopolitik dilandasi dengan adanya *grand theory* tentang *geographical pivot* yang dikemukakan Mackinder.²⁷ Dengan pemahaman

²⁷ Anita Sengupta (2009). *Heartlands of Eurasia: The Geopolitics of Political Space*. Oxford: Lexington Books.

bahwa, negara yang dapat menguasai *Heartland*, akan menguasai dunia. *Heartlands of Eurasia* mengeksplorasi bagaimana pengetahuan *meta geographical* dapat memberikan pemahaman atas proses yang terjadi di tingkat global dan kemudian diubah menjadi penalaran geopolitik dengan implikasi kebijakan luar negeri. Sengupta menyarankan untuk mengakses data-data untuk membuat pemetaan secara terperinci dengan pendekatan Mackinder, terutama tulisan-tulisan hasil penelitian baik dari dalam kawasan maupun luar, yang disesuaikan dalam konteks situasi dunia yang sangat berubah. Secara khusus Sengupta melihat bagaimana pembuat kebijakan dan pemikir strategis telah menggunakan konsep geopolitik ini sebagai justifikasi kebijakan mereka di kawasan. Terakhir, menganalisis sejauh mana pemikiran kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik.

Studi Sengupta ini melihat bagaimana visi tentang signifikansi *pivot area* dari suatu hamparan luas kawasan yang masuk ke dalam narasi kontemporer. Studi ini juga menggarisbawahi cara-cara yang sangat kreatif yakni dengan menafsirkan ulang ide-ide Mackinder sesuai dengan dinamika global yang berubah. Sengupta memfokuskan kajiannya pada perdebatan tentang kegunaan wilayah atau studi berbasis wilayah yang terletak dalam imajinasi geografis.

Selain tentang imajinasi geografis, Sengupta juga menawarkan Teori *Connectography* yang dirujuk dari Parag Khanna, dengan nama yang sama, untuk menyatukan negara-negara Asia. Sengupta memberikan contoh apa yang berlaku di negara-negara Schengen yang organisasi sebagai wadah dari kerja sama *regions* dan regionalnya tergantikan dengan apa yang dia sebut sebagai *logistical spaces*, adanya kesatuan visi untuk membangun infrastruktur bersama secara regional, dan *logistical spaces* akhirnya menjadi bentuk baru lain dari *power*.

Sengupta menggarisbawahi koneksi antara *strategic interest* dan *connectivity initiatives* mempunyai pemahaman bahwa kawasan dan *global connectivity* telah menjadi salah satu faktor penting dari pertarungan yang sangat kompetitif. Geopolitik dan transisi ekonomi politik menjadi pemain utama. Sengupta menawarkan konsep:

- a. *Imagining spaces through mobility;*
- b. *Governing Connectivity;* dan
- c. *Alternative Corridors.*

Dengan tiga konsep ini, Asia dapat bersama-sama menciptakan kesejahteraan dan stabilitas dalam menghadapi ketidakpastian situasi geopolitik maupun kompleksitas transisi ekonomi politik yang terus berubah secara dinamis. Situasi yang kompleks dan dinamis tersebut dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap situasi sosial-politik negara-negara di Asia.²⁸

Sengupta juga menawarkan konsep *The New Silk Roads* dan *Indian Alternative* sebagai dasar *logistical spaces* dengan mengutip Sir Olaf Kirkpatrick Caroe, tentang pembagian dunia berdasarkan *Seven Theatres of Power*, yaitu panggung pertarungan kekuatan di Atlantik, Eropa, *central land mass* (Asia), Samudera Hindia, Afrika, Pasifik dan Amerika. Sengupta juga mengidentifikasi *pivotal position* dari kawasan Asia sebagai langkah awal dan memudahkan membuat konektivitas yang saling memberikan jawaban atas kebutuhan masing-masing negara Asia.²⁹

Pemikiran Parag Khanna dan Anita Sengupta dalam konteks teori geopolitik masuk dalam lingkup mazhab Geopolitik Kritis.³⁰ Geopolitik kritis berangkat dari *human geography* dan berkembang di Eropa daratan menjadi ilmu tersendiri yang posisinya setara dengan ilmu Hubungan Internasional. Salah satunya, di Prancis dengan terbitnya karya Yves Lacoste *La Géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre* (*Geography is first and foremost about making war*) pada 1976. Geopolitik kritis beranggapan bahwa Geopolitik sebagai *instrumental form of knowledge and rationality* yang merujuk pemikiran Foucault yang menyatakan bahwa geografi adalah sebuah diskursus dari *form of power* atau *knowledge of power*.³¹ Sementara itu meminjam istilah Bourdieu, geografi adalah *field*. Dalam analisis tentang *field*, dapat dipetakan keamanan domestik dan internasional. Hasilnya adalah serangkaian perspektif

28 Anita Sengupta (2016). *Logistical Spaces – IV, The Asian Paradigm*. Mahanirban Calcutta Research Group: *Policies and Practices* 79.

29 Anita Sengupta (2019). *Connectivity as Influence: India's Policy in Central Asia in the Era of the New Silk Road* in *Revista UNISCI Journal Special Issue on Indian Strategic and Foreign Policy Making* (Madrid Spain) No 49, January.

30 Anita Sengupta (2005). *Russia, China and Multilateralism in Central Asia*. New Delhi: Shipra Publications; Anita Sengupta (2009). *Op. Cit*; Anita Sengupta (2016), *Loc. Cit*; Parag Khanna (2016), *Loc. Cit*; Parag Khanna (2019). *Op. Cit*.

31 Paul Vidal de la Blache (1926). *Principles of Human Geography*. Michigan: H. Holt; Yves Lacoste (1976). *La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre*. Paris: Maspéro; Gearoid Ó'Tuathail (1999). *Understanding critical geopolitics: Geopolitics and risk society*. *Journal of Strategic Studies*, 22:2-3, pp. 107-124.

baru tentang identifikasi ancaman politik, serta peran *power* dalam konstruksi beragam rezim internasional.³² Variabel-variabel yang dikaji dalam geopolitik kritis berdasarkan variabel yang menjadi isu penting dalam disiplin ilmu *human geography*.³³

Geopolitik Kritis dipengaruhi Mazhab Kritis Frankfurt. Asumsi yang digunakan dalam Geopolitik Kritis adalah emansipasi, yakni pembebasan cara berpikir konvensional menjadi lebih kritis sehingga pada akhirnya aspek emansipatoris menjadikan para akademisi geopolitik kritis mengangkat kepentingan geopolitik negara-negara dunia ketiga yang sering kali terlupakan. Geopolitik Kritis berusaha menyingkap dan mendekonstruksi ide-ide geopolitik yang dianggap berasal dari Barat. Salah satu pembeda utama antara Geopolitik Kritis dan Geopolitik Tradisional terletak pada pandangan bahwa pengetahuan dan ilmu tidak bebas dari pengaruh nilai. Teori ini beranggapan bahwa keadaan manusia bukan sesuatu yang bersifat konstan, kaku, atau infleksibel sehingga memunculkan asumsi bahwa setiap ilmu dan pemahamannya memiliki kumpulan kepercayaan, ideologi, dan nilai masing-masing. Hal-hal tersebutlah yang menjadi tujuan dasar dikembangkannya sebuah ilmu pengetahuan³⁴

Para pemikir kritis menempatkan *power* yang muncul dalam upaya membentuk wacana atau kebijakan mengonstruksi *perceived truth* atau kebenaran yang diakui karena dikonstruksikan oleh kelompok mayoritas.³⁵ Oleh karena itu, tindakan-tindakan negara-bangsa di mata Geopolitik Kritis tidak akan pernah bebas karena selalu

32 Didier Bigo (1996). *Polices en reseaux: l'expérience européenne*. Paris: Presses de sciences Po; Didier Bigo (2006). Globalized (in) Security: the Field and the Ban-opticon. In Didier Bigo and Anastasia Tsoukala (eds.). *Illiberal Practices of Liberal Regimes: the (in) security games*. Paris: L'Harmattan; Stefano Guzzini (2000). A Reconstruction of Constructivism in International Relations. *European Journal of International Relations* June 1; Anna Leander (2002). Do we really need reflexivity in IPE? Bourdieu's two reasons for answering affirmatively (contribution to a colloquium on Pierre Bourdieu). *Review of International Political Economy*, vol. 9(4), pp. 601-609; Anna Leander (2007). Thinking Tools: Analyzing Symbolic Power and Violence. In Audie Klotz dan Deepa Prakash (eds.). *Qualitative Methods in International Relations*, London: Palgrave.; Michael C. Williams (2007). *Culture and Security: symbolic power and the transformation of the international security order*. London: Routledge; Vincent Pouliot (2007). Subjectivism: Toward a Constructivist Methodology. *International Studies Quarterly*, vol. 51(2): 359-384.

33 Ó'Tuathail (1999), *Loc. Cit.*

34 John S. Moolakkattu (2009). Robert W. Cox and Critical Theory of International Relations. *International Studies* 46(4) 439-456.

35 Phil Kelly (2006). *A Critique of Critical Geopolitics*. United Kingdom: Routledge Taylor dan Francis Group.

terkait dengan pengetahuan dan *power* yang mengonstruksinya. Karenanya, Geopolitik Kritis menekankan pada aspek dekonstruksi kebenaran karena tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak dan objektif. Jika pemikiran ini ditarik ke level negara, segala bentuk pemikiran dan perspektif lama yang cenderung dogmatis harus didekonstruksi karena kedua hal tersebut sangat dipengaruhi pola pikir negara dominator yang biasanya diwakili oleh bangsa-bangsa Barat. Geopolitik Klasik memiliki kecenderungan untuk membesarkan Barat dan mengecilkan negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga.

Dalam perjalanannya, Geopolitik Kritis menolak topografi spasial negara dunia pertama dan ketiga, utara dan selatan, negara dan negara karena hal-hal tersebut sangatlah lekat pada pengaruh *power* dan kepentingan negara-negara Barat.³⁶ Phil Kelly lalu berpendapat bahwa Geopolitik Klasik digunakan negara-negara besar sebagai bagian dari upaya mereka untuk memproyeksikan pengaruh serta kekuasaan mereka atas negara-negara berkembang. Selain itu, mereka juga menggunakan geopolitik sebagai aspek penting untuk tetap mempertahankan keunggulan kompetitif mereka dengan sesama negara besar.³⁷ Ini mengakibatkan munculnya kecenderungan eksploitasi oleh negara-negara besar terhadap negara-negara yang lebih kecil. Dengan demikian menurut Geopolitik Kritis, negara-negara berkembang harus dapat bangkit dan melepaskan diri dari pengaruh luar yang menekan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan pencapaian kepentingan mereka. Geopolitik Kritis juga berusaha mendorong negara-negara kecil tersebut untuk mampu membangun pemerintahan berdaulat yang bersifat mandiri dan bebas dari segala macam pengaruh serta tekanan pihak luar terutama negara-negara besar.³⁸

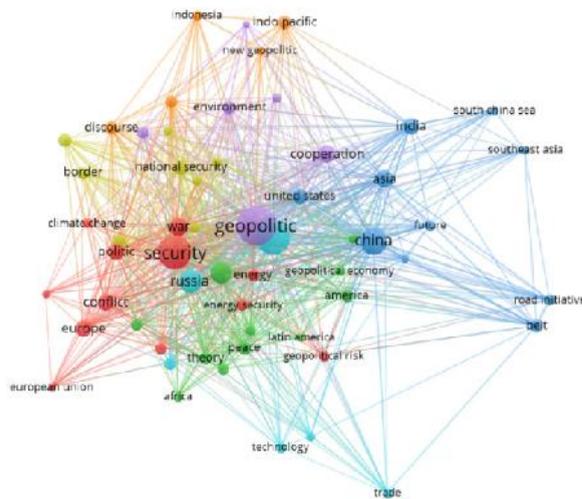
Karl Hermann Höhn menulis bahwa Geopolitik Kritis dalam ruang lingkupnya mengkaji ruang atau teritorial, kependudukan, sumber daya alam, organisasi, militer, ekonomi, sains dan

36 Gearóid Ó'Tuathail. (1994). Critical Geopolitics and Development Theory: Intensifying the Dialogue, dalam *Transactions of the Institute of British Geographers*, New Series, Vol. 19, No. 2, pp. 228-233.

37 Phil Kelly (2006), *Op. Cit.*

38 Simon Dalby (1990). American Security Discourse: The Persistence of Geopolitics. *Political Geography Quarterly*, vol. 9(2), pp. 171-188.

pendidikan.³⁹ Sejalan dengan Höhn, Teixeira dan Dias menjelaskan bahwa ruang lingkup kajian geopolitik kritis dan menambahkannya dengan kajian posisi/batas (*boundaries*), transportasi, iklim, sosial ekonomi dan struktur politik, teknologi, dan ideologi.⁴⁰ Selanjutnya, Sharp menjelaskan bahwa kajian atas geopolitik kritis dibangun dari pendekatan post-struktural dan diskursus-diskursus tentang identitas.⁴¹



Gambar 1.4. Telaah Kajian Geopolitik dengan *Bibliometric Analysis* menggunakan *software* Publish or Perish (PoP) dan VOSviewer (N = 1000 Referensi)

Sumber: Penulis (2022)

Terhitung sejak 1996-2015 ada sebanyak 1.013 kajian tentang geopolitik dari jurnal internasional bereputasi. Dari 1.013 artikel terkait studi geopolitik tersebut, isu yang dikaji mencakup isu

39 Karl Hermann Höhn (2011). *Geopolitics and the Measurement of National Power*. PhD dissertation, University of Hamburg.

40 Aurora A.C. Teixeira and Mariana Dias (2013). The importance of geopolitics in firms' international location decisions: The Polish case. *Communist and Post-Communist Studies* 46 (2013) 79–93.

41 Jo Sharp (2021) Materials, forensics and feminist geopolitics. *SAGE Journals*, Volume 45 Issue 5, October.

tentang *border and territory, emotional, geo-culture, geo-economy, countries, regional geopolitics, feminist geopolitics, dan critical geopolitics*. Kesemuanya itu dibangun dari paradigma kritis.⁴² Selanjutnya dengan menggunakan *tools bibliometrics analysis* antara 2016-2021 secara spesifik dilakukan penelusuran studi-studi geopolitik dan pertahanan. Penelusuran studi geopolitik ini bersumber dari buku, jurnal, prosiding, *technical report*, dan sejenisnya yang diunduh dari *google scholar* sebanyak 1.000 referensi.

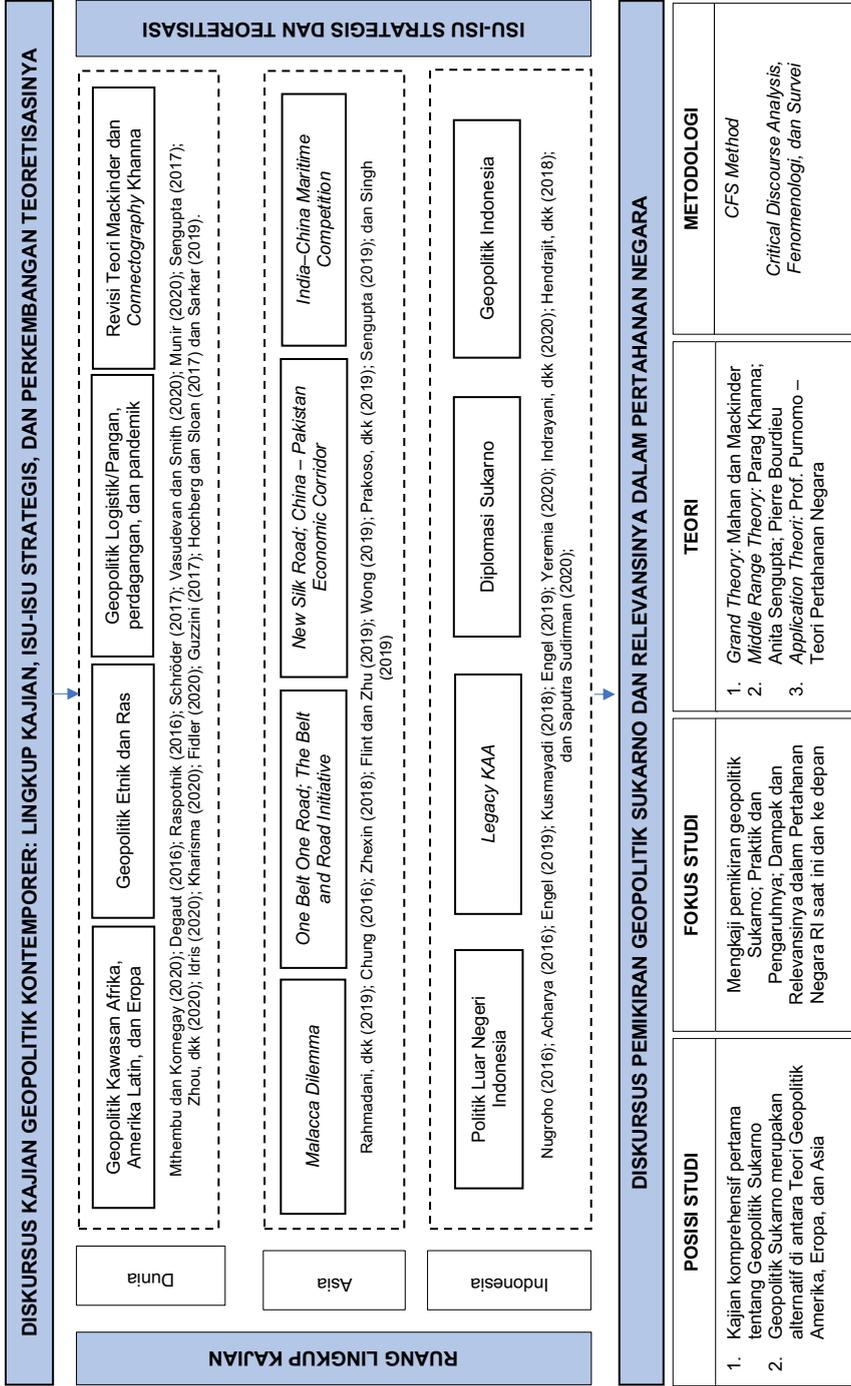
Untuk lebih mendalami atas ragam studi geopolitik tersebut, penulis melakukan penelaahan lebih detil dan komprehensif atas tiga puluh studi tentang geopolitik dan kaitannya dengan pertahanan. Dari hasil penelaahan, terdapat enam tema penting, di antaranya:

- a. Studi tentang Politik Luar Negeri Indonesia, warisan KAA, dan diplomasi Soekarno;
- b. Studi tentang geopolitik Indonesia, *Malacca Dilemma*, dan Asia Pasifik sebagai sentral geopolitik dunia;
- c. Studi tentang geopolitik di Kawasan Asia: dari One Belt One Road, New Silk Road, China-Pakistan Economic Corridor hingga India–China Maritime Competition;
- d. Studi tentang Geopolitik Dunia: dari Asia, Afrika, Amerika hingga Eropa;
- e. Isu-isu kontemporer dalam studi geopolitik; dan
- f. Studi tentang diskursus teori geopolitik.

1.3 Merekonstruksi Pemikiran Geopolitik Soekarno

Diskursus mengenai konsep, metodologi, dan studi geopolitik terus berkembang seiring dengan perkembangan pola hubungan internasional, terutama sejak jatuhnya Uni Soviet sebagai salah satu kekuatan bipolar yang kemudian mengubah peta kekuatan politik internasional. Pasca kekuatan bipolar, isu-isu geopolitik sering kali

42 Song Tao, Liu Weidong, Li Le (2016). International research on the border regions with a geopolitical perspective and revelation. *Progress in Geography*, 35(3): 276–285.



Gambar 1.5. Studi-studi Geopolitik Kontemporer

Sumber: diolah oleh Penulis (2022)

berkaitan dengan isu lingkungan hidup global, ekonomi, politik internasional, pertahanan, dan demokrasi dalam konteks dunia yang multipolar. Ini digambarkan dengan berubahnya aliansi global, regional dan antar-negara. Aliansi-aliansi baru ini beradaptasi dengan lingkungan strategis baru, antara lain:

- a. *North Atlantic Treaty Organization* (NATO);
- b. Uni-Eropa;
- c. *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) *Plus*;
- d. *Five Power Defense Arrangement* (FPDA) yang dilakukan oleh Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, Inggris;
- e. Brazil Rusia India China South Africa (BRICS);
- f. *Trans Pasific Partnership* (TPP) yang berhadapan dengan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP); dan
- g. *One Belt, One Road* (OBOR).⁴³

Adaptasi aliansi juga ditandai dengan terbentuknya aliansi pragmatis sebagai panggung pertarungan abadi antara Neo-liberalisme dan Neo-realisme.⁴⁴ Aliansi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama negara-negara juga dilakukan dalam bentuk *collective security*, dan aliansi strategis sebagai penyeimbang kekuatan dalam sistem politik internasional, atau yang sering disebut sebagai *balance of power*. Ini tampak dalam kerja

43 RD Wijk. (2010). *The Challenge: NATO in the Realm of New Geopolitical Realities*. Atlantic Council; A. O. García (2012). "The Role of China and the BRICs Project". *Mexican Law Review*, vol. 7(1), pp. 109-136; M.N. Jovanovic and Jelena Damjanovic. (2013). Geopolitics of the European Union: Are Steps backward the Way forward? *International Economics*, vol. LXVI (4), pp. 455-482; Ashley Jackson (2013). *The British Empire: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press; Brian Harding. (2017). Southeast Asia's Role in Geopolitics. Southeast Asia in an Evolving Global Landscape, retrieved from <https://sppga.ubc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/10/8-Brian-Harding.pdf>; S. C. Park. (2017). "RCEP versus TPP with the Trump Administration in the USA and Implications for East Asian Economic Cooperation", *EBER: Entrepreneurial Business and Economics Review*, vol. 5(4), pp. 135-152.

44 Francis Fukuyama (1992). *The End of History and The Last Man*. New York: Free Press; Andrew Linklater (1993). Liberal Democracy, Constitutionalism and the New World Order. In R. Leaver dan J. Richardson, eds., *The Post-Cold War Order: Diagnoses and Prognoses*. St. Leonards; Kenneth N. Waltz (2018). *Man, the State, and War: A Theoretical Analysis*. Columbia University Press; Robert W. Cox (1981). Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory. *Millennium*, Vol. 10, No. 2; Robert O. Keohane (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton.

sama interasional yang dipelopori Amerika Serikat dengan negara-negara sekutunya melalui *United States Indo Pasific Command* (USINDOPACOM), berhadapan dengan aliansi strategis Tiongkok dengan negara-negara yang membutuhkannya. Reaksi Tiongkok menandai munculnya kekuatan Neo-marxisme sebagai alternatif aliansi yang berpihak kepada negara-negara berkembang.⁴⁵

Sejalan dengan dinamika tersebut, diskursus studi geopolitik juga berkembang di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, konsep geopolitik tidak dapat dilepaskan dari pandangan Soekarno sebagai pendiri bangsa yang menyadari pentingnya keberadaan posisi Indonesia secara teritorial dalam cara pandang geopolitik, dan kawasan dengan menitikberatkan aspek geostrategi. Secara teoritis, konsep pemikiran Geopolitik Soekarno dipengaruhi konsep-konsep Geopolitik Jengish Khan, Ernest Renan, Otto Bauer, Karl Marx, Mackinder, Alfred Thayer Mahan, Karl Haushofer, Hector Charles Bywater, Ernest Reinhard, Jean Jaures, Karl Kautsky, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, dan Sun Yat Sen (Soekarno, 1930, 1945, 1957, 1955, 1958, 1964, 1965). Sementara itu, secara empiris, konsep pemikiran Geopolitik Soekarno dipengaruhi oleh Nikita Khrushchev, John F. Kennedy, Ho Chi Minh, Mao Zedong, H.O.S. Tjokroaminoto, Ki Hajar Dewantara, Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi dan Tan Malaka.⁴⁶

Pengaruh pemikiran Geopolitik Soekarno lainnya adalah gerakan-gerakan kemerdekaan rakyat Asia-Afrika melawan kolonialisme Eropa dan khususnya kemenangan Jepang atas Rusia (1904-1905) yang mendorong lebih luas gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia-Afrika dari kolonialisme. Kemenangan Jepang sebagai representasi bangsa Asia atas Rusia sebagai representasi bangsa Eropa, memberi tambahan keyakinan bahwa bangsa-bangsa

-
- 45 Kenneth N. Waltz (1979). *Theory of International Politics*. New York: Mcgraw Hill.
Waltz (2010). *Theory of International Politics*. Waveland Press; Kenneth N. Waltz (2018). *Op. Cit*; Parag Khanna (2016). *Op. Cit*; Parag Khanna (2019). *Op. Cit*; K. Mahubani. (2009). *The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East, Public Affairs*.
- 46 Gearoid O'Tuathail (1996). *Loc. Cit*. Francis P. Sempa (2002); *Geopolitics: From the Cold War to the 21st Century*. New Brunswick: Transaction Publishers; Saul Bernard Cohen (2003). *Op. Cit*; Adams, Cindy. (2011). *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat*. Yogyakarta: Yogyakarta Media Pressindo; Ellis Roxburgh (2015). *The Chinese Empire (Great Empires)*. London, United Kingdom: Wayland Publishers; Sigit Aris Prasetya (2017). *Dunia dalam Genggaman Bung Karno*. Tangerang Selatan: Imania; Wawancara Guntur Soekarnoputra, 31 Januari 2022.

Asia dan Afrika bisa bebas dari kolonialisme dan menjadi bangsa-bangsa yang merdeka. Dalam kolom berjudul Indonesianisme dan Pan-Asiatisme yang dipublikasikan *Suluh Indonesia Muda* pada 1928, Soekarno (1964) menulis: “*Sebagaimana dalam tahun 1905 kemenangan Japan di atas musuhnya beruang di kutub utara dirasakan oleh dunia Asia sebagai suatu kemenangan Asia di atas Eropah*”.

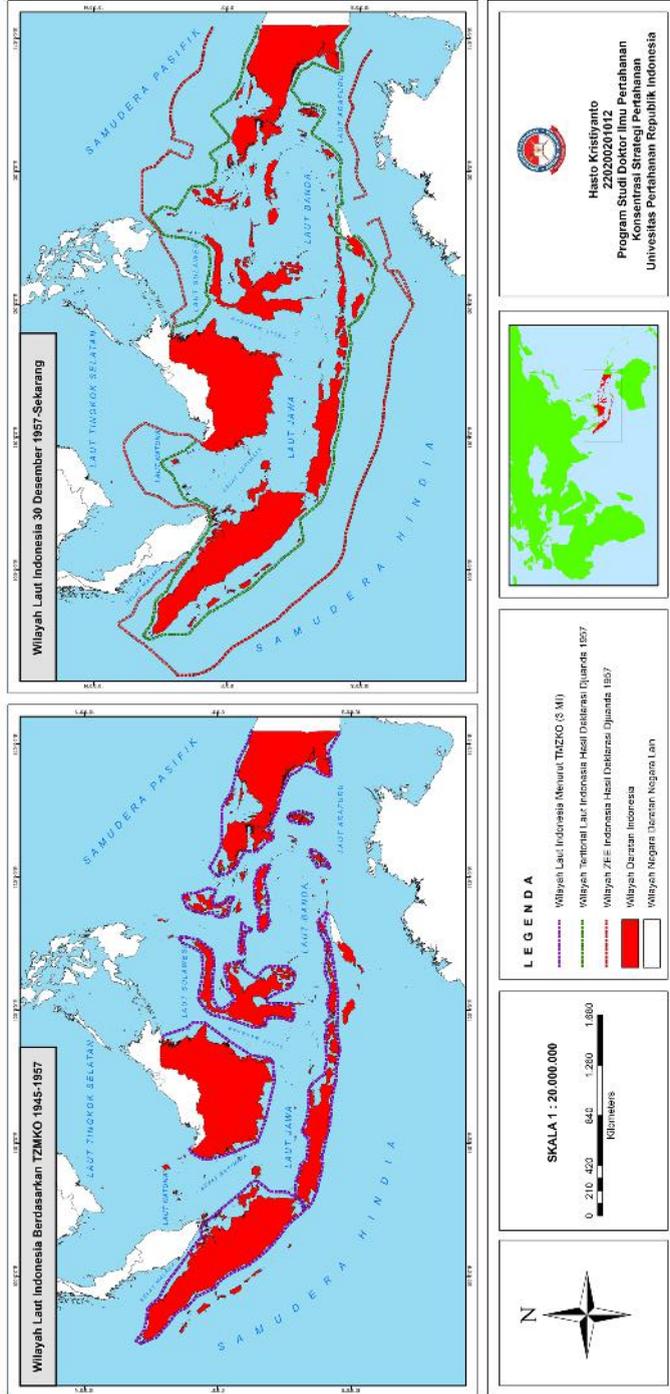
Kemenangan Jepang atas Rusia juga dirujuk Soekarno untuk menyempurnakan konsepsinya tentang Nasionalisme Indonesia yang diinspirasi oleh keberhasilan modernisasi Jepang, modernisasi militer dan masyarakatnya. Nasionalisme Indonesia dibangun tidak hanya dari perasaan senasib, ataupun pengalaman sebagai bangsa terjajah atau nasionalisme anti kolonialisme, namun juga sebagai integrasi antara manusia dengan Tanah Airnya. Berangkat dari konsep epistemologis tersebut, dalam pidato di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 1 Juni 1945, Soekarno menyatakan bahwa:

“Wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang terletak antara dua samudera dan dua benua. Kesatuan antara bangsa Indonesia dengan wilayah tanah air itu yang membentuk semangat dan wawasan kebangsaan, yaitu sebagai bangsa yang bersatu. Rasa kebangsaan Indonesia dibentuk oleh adanya kesatuan nasib, jiwa untuk bersatu dan kehendak untuk bersatu serta adanya kesatuan wilayah yang sebelumnya, bernama Nusantara (Soekarno, 1945).”

Pernyataan Soekarno tersebut merefleksikan kuatnya kesadaran geopolitik berkaitan dengan pemahaman siapa bangsa Indonesia dan di mana wilayah geografi Indonesia.⁴⁷ Kenyataan bahwa wilayah Indonesia sebagai satu bangsa membentang dari Sabang sampai Merauke sebagai negara kepulauan yang disatukan oleh laut mendorong dinyatakannya Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda memperluas wilayah Indonesia sejauh dua setengah kali lipat tanpa melalui perang sebagaimana terlihat pada Gambar 1.6.

⁴⁷ Wawancara Megawati Soekarnoputri, April 2022.

PERBEDAAN WILAYAH PERAIRAN INDONESIA MENURUT TZMKO 1945-1957 DAN HASIL DEKLARASI DJUANDA 1957



Gambar 1.6. Peta Wilayah Indonesia Hasil Deklarasi Djuanda

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

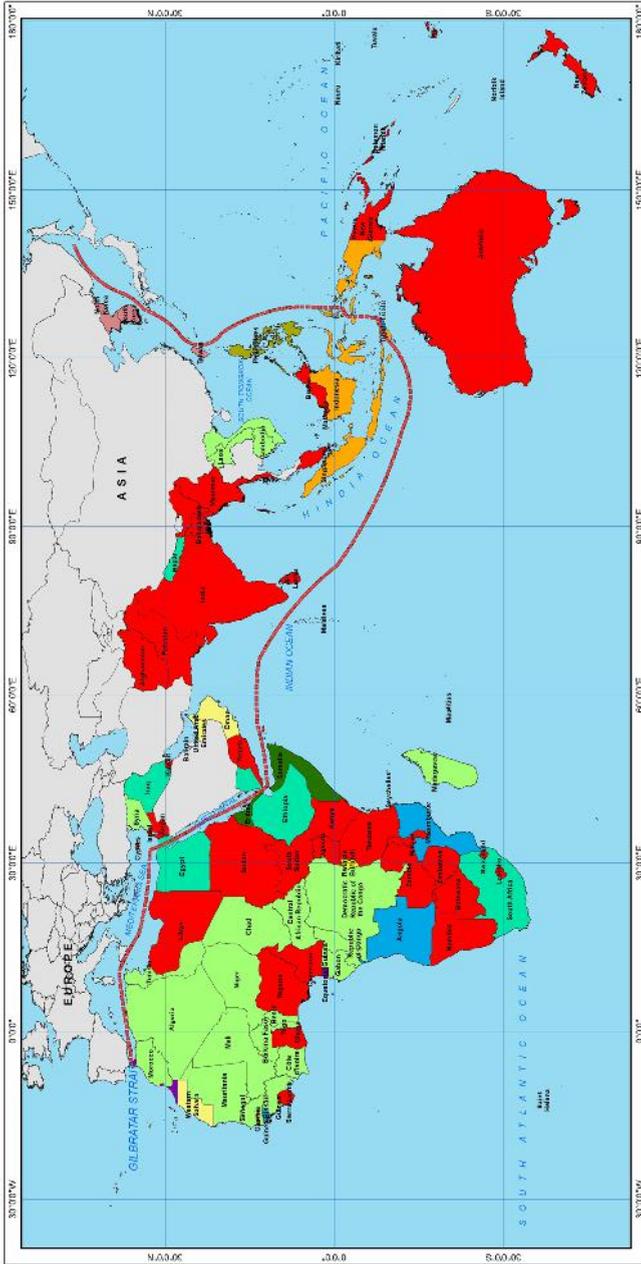
Doktrin kesatuan laut yang menyatukan pulau-pulau di Indonesia melahirkan konsep Wawasan Nusantara sebagai konsep Geopolitik Indonesia yang merujuk Pancasila sebagai ideologi geopolitik. Konsep Wawasan Nusantara mengacu pada dua pandangan yakni pandangan ke dalam (*inward looking*) dan pandangan ke luar (*outward looking*). Arah pandang ke dalam mengacu pada perhatian akan kesatuan wilayah, sedangkan pandangan keluar memberi makna pada aktifitas kepentingan nasional dalam usaha mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.⁴⁸ Ini merupakan perbedaan antara konsep Geopolitik Indonesia yang mementingkan pencapaian tujuan nasional dan perdamaian dunia, dibandingkan Geopolitik Barat yang sering digunakan sebagai instrumen dominasi dan penguasaan yang bersifat ekspansionis dan eksploitatif untuk keberlanjutan imperialisme dan kolonialisme.⁴⁹ Pemahaman Soekarno yang secara langsung mengalami penderitaan bangsa terjajah menimbulkan semangat anti-imperialisme kolonialisme yang digambarkan dalam “Peta Garis Hidup Imperialisme” (lihat Gambar 1.7). Peta Garis Hidup Imperialisme yang digunakan sebagai kritik atas teori Geopolitik Barat tersebut terbentang mulai dari Selat Gibraltar, melewati Laut Tengah, Terusan Suez, Laut Merah, Samudra Hindia, Laut China Selatan terus hingga ke Laut Jepang. Terkait hal ini, Soekarno mengatakan:

“Saya ingat, bahwa beberapa tahun yang lalu, saya mendapat kesempatan membuat analisis di muka umum tentang kolonialisme, dan bahwa saya di waktu itu minta perhatian pada apa yang saya namakan “Garis hidup imperialisme”. Garis itu terbentang mulai dari Selat Gibraltar, melalui Lautan Tengah, Terusan Suez, Lautan Merah, Lautan Hindia, Lautan China Selatan sampai ke Lautan Jepang. Daratan-daratan sebelah-menyebelah garis hidup yang panjang sekali itu sebagian besar adalah tanah jajahan, rakyatnya tidak merdeka, hari depannya tergadaikan kepada sistem asing. Sepanjang garis hidup itu, sepanjang urat-nadi imperialisme itu, dipompakan darah kehidupan kolonialisme (Soekarno, KAA, 18 April 1955).”⁵⁰

48 Ermaya Suradinata dan Alex Dinuth (Eds)(2001). *Geopolitik dan Konsep Ketahanan Nasional: Pemikiran Awal, Pengembangan dan Prospek*. Jakarta: Paradigma Cipta Yastigama.

49 Widoyo Alfandi (2002). *Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Politik dan Geopolitik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.

50 Perpustakaan Nasional RI (Tanpa Tahun). Pidato Presiden Soekarno pada Konferensi Asia Afrika 18 April 1955.



COLONIAL AFFILIATIONS BEFORE 1945



Skala 1 : 65.000.000



Kilometer

LEGENDS

	COLONIAL LINE		AMERICAN		DUTCH
	BRITISH		SPANISH		JAPANESE
	BELGIUM		PORTUGAL		INDEPENDENT STATE 1945
	FRANCE		ITALIAN		DEPENDENT STATE 1968



Hasto Kristiyanto
220200201012
Program Studi Doktor Ilmu Pertahanan
Konsentrasi Strategi Pertahanan
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Gambar 1.7. Peta Garis Hidup Imperialisme

Sumber: diolah oleh Peneliti dari Sockarno (1955)

Garis Hidup Imperialisme menggambarkan kolonialisme terhadap bangsa-bangsa Asia Afrika. Penggambaran Garis Hidup ini menjadi dasar bagi Soekarno menggalang solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955; Gerakan Non Blok (GNB) pada 1961; Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) pada 1965; *The Conference of the New Emerging Forces* (CONEFO) pada 1965; Konferensi Internasional Anti-Pangkalan Militer Asing (KIAPMA) pada 1965; Pendirian Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), pada 1965; Wawasan Nusantara pada 1965 dan Rencana Konferensi Tiga Benua (Trikontinental) yaitu Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang belum sempat dilaksanakan akibat peristiwa politik pada 1965.

Melalui KAA dan GNB, Indonesia terlibat dalam berbagai prakarsa penyelesaian persoalan-persoalan dunia. Prakarsa-prakarsa ini dilanjutkan dengan pengiriman Pasukan Garuda sebagai bagian dari Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kontingen Garuda (KONGA) I ditugaskan di Mesir pada 1957. Dengan kepemimpinan aktif Indonesia di KAA, legitimasi Indonesia semakin kuat. Soekarno sebagai pimpinan KAA menggunakan legitimasi yang kuat ini untuk melakukan aksi-aksi diplomasi luar negeri ke Amerika Serikat dan Uni Soviet pada 1956. Ia juga menggunakan aksi-aksi diplomasi itu untuk kepentingan nasional Indonesia, dalam hal kampanye internasional pembebasan Irian Barat, wilayah Indonesia yang waktu itu masih menjadi koloni Belanda. Kepiawaian diplomasi Soekarno ini ditunjukkan dengan menegaskan sikap Indonesia tentang perdamaian dunia. Pada saat bersamaan Soekarno menegaskan sikapnya terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi akibat kolonialisme dan imperialisme. Dengan tindakan-tindakan diplomasi ini, Soekarno mengintegrasikan diplomasi luar negeri dan diplomasi pertahanan bagi pembebasan Irian Barat.

Perhatian besar Indonesia terhadap berbagai ketidakadilan dan ketimpangan dunia misalnya tampak dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Dalam pidato di hadapan Sidang Umum PBB pada 1961, Menteri Luar Negeri Soebandrio menyerukan:

“In Algeria, the colonial war has entered its seventh year. The people of Algeria are fighting for their freedom and independence, and will continue the fight until victory is theirs. This is a reality that

France must accept. Certainly, for our part, we will not rest until this criminal bloodshed and terror, perpetrated to preserve the old, established the order, are halted. We will continue to give our support to the Provisional Government of Algeria, as well as all possible aid. We pray only that victory will be theirs soon” (Soebandrio, 1961).⁵¹

Konsistensi Soekarno dalam melawan imperialisme dan kolonialisme Barat yang bersifat ke dalam adalah perjuangan pembebasan Irian Barat. Irian Barat digambarkan oleh Soekarno bahwa tanpanya, Indonesia ibarat tubuh tanpa ujung jemari.⁵² Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya Irian Barat, wilayah dan penduduknya, bagi Indonesia. Klaim Soekarno terhadap Irian Barat merujuk pada sejarah bahwa Irian Barat adalah bagian dari Hindia Belanda. Oleh karenanya Irian Barat dengan sendirinya adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Namun dalam perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada akhir 1949, Pemerintah Belanda mengingkari kesepakatan untuk menyerahkan wilayah Irian Barat dengan alasan penduduk Irian Barat adalah ras Melanesia yang berbeda dengan ras penduduk Indonesia pada umumnya. Selain itu budaya penduduk Irian Barat juga berbeda.⁵³ Pemerintahan Soekarno tidak patah semangat. Dengan strategi diplomasi, strategi geopolitik (dengan manajemen geostrategi), dan langkah-langkah militer yang efektif, Irian Barat diintegrasikan kembali ke wilayah Republik Indonesia tanpa peperangan berarti pada 1 Mei 1963. Setelah Irian Barat dibebaskan dari kolonialisme Belanda dan menjadi provinsi NKRI melalui perjuangan Trikora (Tri Komando Rakyat), Indonesia diseret dalam sengketa antara Filipina dan Malaysia terhadap wilayah Sabah jajahan Inggris. Sengketa ini terjadi dalam era dekolonisasi negara-negara jajahan. Pada saat ketegangan terjadi, muncul pemberontakan pembebasan nasional di Brunei yang dipimpin A. M. Azahari yang mendeklarasikan dirinya sebagai Perdana Menteri Republik Kalimantan Utara pada 8 Desember 1962. Atas pemberontakan ini Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman menuduh Soekarno berada di balik

51 Soebandrio. (1961). Pidato Menteri Luar Negeri Soebandrio di hadapan Sidang Umum PBB pada tahun 1961.

52 Ganis Harsono (1985). *Cakrawala Politik Era Soekarno*. Jakarta: Inti Idayu Press.

53 John Manangsang Wally (2018). *Dunia dalam Genggaman Papua sebuah Fenomena Geopolitik Global*. Jayapura: Yayasan Gratia Papua Jayapura.

pemberontakan tersebut. Tuduhan ini memperluas sengketa hingga ke Indonesia.

Presiden Filipina Macapagal berinisiatif mengadakan pertemuan tiga negara pada 16 September 1963 untuk meredam ketegangan. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia (Maphilindo) untuk menyelesaikan sengketa dengan nilai-nilai dan tradisi Asia yaitu melalui dialog dan menolak intervensi asing. Namun Singapura merasa terkepung dan terancam dengan Perjanjian Maphilindo hingga Inggris melakukan campur tangan dalam konflik tersebut. Singapura adalah wilayah penting bagi kepentingan geopolitik Inggris di Asia Tenggara. Inggris menekan Perdana Menteri Malaysia keluar dari kesepakatan Maphilindo dan membentuk Federasi Malaya. Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaya yang menurutnya adalah Neo-kolonialisme dan Neo-imperialisme yang mengancam Indonesia.

Bagi Soekarno Federasi Malaya adalah ancaman serius kepentingan dan keamanan nasional Indonesia, terutama dengan kehadiran pangkalan militer asing di Singapura yang sejak awal ditentang Soekarno. Protes Soekarno menimbulkan ketegangan antara Perdana Menteri Malaysia dengan Presiden Soekarno.

Pembunuhan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada tahun 1963, mitra dekat Presiden Soekarno, mengubah peta geopolitik dunia, termasuk berimbas pada geopolitik kawasan Asia Tenggara. Hubungan Soekarno dengan Presiden Lyndon Johnson, pengganti Kennedy, tidak sebaik hubungannya dengan Presiden Kennedy. Ini menyebabkan Soekarno kehilangan mitra strategis untuk mengimbangi dominasi Inggris atas pembentukan Federasi Malaya.

Kebijakan luar negeri Lyndon Johnson terhadap Indonesia bertolak belakang dengan Kennedy. Terutama setelah Johnson mengemukakan teori Domino Asia. Teori ini menjelaskan kejatuhan satu negara Asia Tenggara ke tangan komunis akan menjalar ke negara-negara lain di kawasan tersebut. Merujuk pada teori ini, hubungan dekat Soekarno dengan Blok Timur (Komunis) akan membahayakan kepentingan ekonomi-politik Amerika Serikat di Asia Tenggara. Pada saat yang sama, dalam konflik melawan Malaysia, Soekarno mengubah program nuklir damai yang semula digunakan untuk riset, dan pembangkit listrik, menjadi program nuklir untuk pertahanan melalui pengembangan bom atom.

Perubahan kebijakan nuklir untuk pertahanan oleh Soekarno mencemaskan bagi Amerika Serikat dan sekutunya pada era Perang Dingin. Program senjata nuklir Soekarno waktu itu sebenarnya hendak digunakan untuk dua kepentingan yakni konfrontasi dengan Malaysia dan untuk menjaga keseimbangan perdamaian dunia akibat perseteruan Blok Barat dan Blok Timur.⁵⁴

Merujuk pada Teori Domino dan kecemasan Amerika Serikat pada Soekarno dan program nuklirnya, Amerika Serikat dan sekutunya di Asia Tenggara mulai melancarkan penghancuran kekuasaan Soekarno. Ini bersamaan dengan tindakan Soekarno secara diam-diam mengirim 200 fisikawan nuklir Indonesia ke Tiongkok. Amerika Serikat menjalankan aksi subversif sebagai kebijakan politik luar negeri terhadap Indonesia.⁵⁵ Politik subversi Amerika Serikat di Indonesia tergambar dalam peristiwa Gerakan Satu Oktober 1965 (Gestok 1965) yang berakhir dengan penggulingan Presiden Soekarno. Kejatuhan Soekarno sekaligus mengakhiri cita-cita politik internasional Soekarno tentang pembentukan tata dunia baru yang bebas dari Neo-kolonialisme dan imperialisme.

Jatuhnya kekuasaan Soekarno berdampak pada berhentinya studi pemikiran Geopolitik Soekarno. Pemikiran Geopolitik Soekarno sebelumnya menjadi rujukan pengambilan kebijakan luar negeri dan pertahanan menghadapi politik global dan regional. Namun 1990-an studi Geopolitik Indonesia mulai dilakukan, salah satunya oleh Dino Patti Djalal.⁵⁶ Studi Djalal yang sangat dipengaruhi pemikiran Orde Baru ini mengajukan anti-tesis terhadap pemikiran Geopolitik Soekarno. Dalam studinya tersebut Djalal melakukan kritik keras terhadap konsep Wawasan Nusantara yang dinilainya utopis, romantis, dan simbolik. Menurut Djalal, Soekarno tidak berupaya memproyeksikan Wawasan Nusantara sebagai simbol pemersatu. Sebaliknya pilihan instrumen simbolik Soekarno lebih condong pada konsep-konsep politik yang abstrak, yaitu Pancasila, Manipol USDEK (Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar 1945,

54 Wawancara Huang Shuhai (2022).

55 Audrey R. Kahin and George McT. Kahin (1995). *Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia*. New York: The New Press.

56 Dino Patti Djalal (1990). *Geopolitical Concept and Maritime Territorial Behavior in Indonesian Foreign Policy. MA Thesis*, University of Simon Fraser, Canada; Baca juga: Dino Patti Djalal (1996). *The geopolitics of Indonesia's maritime territorial policy*. Jakarta : CSIS.

Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia), Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme), Djarek (Djalannya Revolusi Kita), Resopim (Revolusi, Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional), dan Oldefos-Nefos (*Old Established Forces – New Emerging Forces*), yang menyebabkan konsep Wawasan Nusantara menjadi rumit dan kering.

Setelah kekuasaan Orde Baru berakhir pada 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang merupakan transisi menuju demokrasi. Ini membuka ruang kebebasan kembalinya studi-studi Geopolitik Indonesia yang sempat berhenti. Studi Geopolitik Indonesia pasca Orde Baru misalnya dilakukan Laksmana.⁵⁷ Studi Geopolitik Laksmana berangkat dari perspektif geopolitik bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah kepulauan yang luas ini berimplikasi pada dua sisi mata uang: sebagai ketangguhan dan sekaligus kerentanan. Oleh karena itu, menurut Laksmana, Geopolitik Indonesia didasarkan pada tiga blok bangunan Trinitas Strategis yaitu geostrategi (dimensi militer dan keamanan), geoekonomi (dimensi sumber daya dan ekonomi), dan geopolitik (dimensi sosial dan politik).

Hendrajit dan kawan-kawan juga melakukan studi Geopolitik Indonesia pasca Orde Baru yang menjelaskan adanya pergeseran sentral geopolitik dunia dari *Heartland* ke Asia Pasifik dan Indonesia akibat dari meningkatnya ketegangan hubungan politik, militer dan ekonomi antara Tiongkok dan Amerika Serikat (dan sekutunya).⁵⁸ Pergeseran tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap geopolitik di Asia Pasifik terutama di Laut China Selatan (LCS) dan Selat Malaka. Perubahan geopolitik ini menjadikan posisi Indonesia sangat strategis, karena Indonesia menguasai Selat Sunda sebagai jalur alternatif pelayaran perairan internasional.

57 Evan A. Laksmana (2011). The Enduring Strategic Trinity: Explaining Indonesia's Geopolitical Architecture. *Journal of the Indian Ocean Region* 7(1).

58 Hendrajit et al. (2018). Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional dari *Heartland* ke Asia Pasifik: Apa Geopolitik *Leverage* Indonesia? *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 3 (6), pp. 721-732

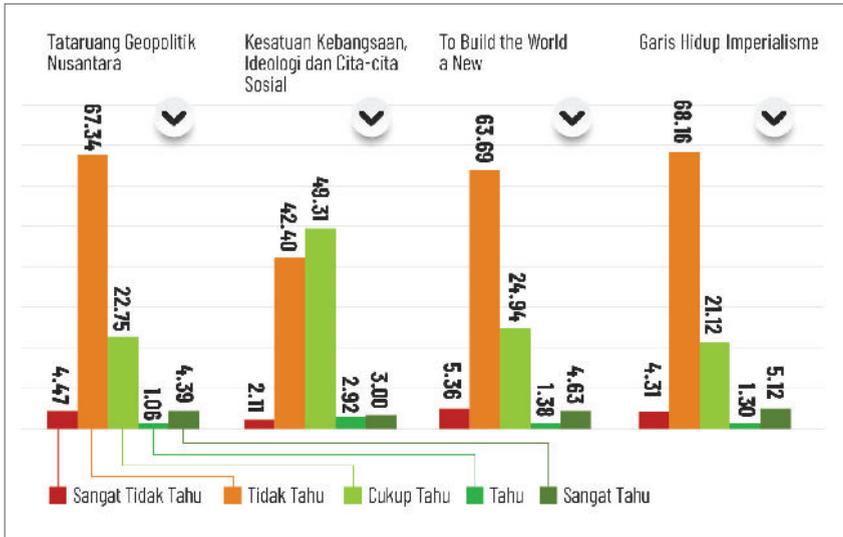
Menurut Hendrajit dan kawan-kawan, jika Malacca Dilemma⁵⁹ terjadi yakni di mana Selat Malaka dan LCS menjadi medan perang maka Selat Sunda akan menjadi jalur alternatif terdekat yang dapat menjadi jalur geopolitik yang akan dikontrol Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Siapa yang mampu mengontrol jalur Selat Sunda di wilayah laut Indonesia, akan menguasai *pivot* (permainan kunci) geopolitik dunia. Geopolitik kawasan laut ini dalam perspektif pemikiran Geopolitik Soekarno bahwa Indonesia adalah salah satu *pivot* dunia masih sangat relevan (Soekarno, 1929).

Namun demikian proses de-Soekarnoisasi⁶⁰ yang berlangsung selama 32 tahun secara signifikan sangat mempengaruhi hilangnya memori masyarakat tentang besarnya gagasan dan kontribusi Soekarno, baik di panggung politik dalam negeri maupun politik internasional. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian tentang kognisi masyarakat tentang Soekarno pada 2021. Survei dilakukan terhadap 1.231 responden yang tersebar di 34 provinsi dengan teknik pengambilan sampel *multi stage random sampling*. Hasil penelitian pendahuluan sebagaimana terdapat di Grafik 1 dan 2 menunjukkan cukup tingginya ketidaktahuan masyarakat tentang besarnya gagasan dan kontribusi Soekarno. Kognisi masyarakat terhadap gagasan Soekarno seperti tata ruang Geopolitik Nusantara; pidato *To Build the World Anew*; peran Soekarno dalam KAA, GNB, pembebasan Irian Barat, dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika jauh lebih rendah dibandingkan kognisi Soekarno sebagaimana terlihat pada Grafik 1.1.⁶¹

59 *The Malacca Dilemma* dicetuskan oleh Presiden Hu Jintao pada 2003 untuk dilema yang dihadapi China di perairan Selat Malaka. Pertumbuhan ekonomi China menyebabkan ketergantungannya pada minyak sangat besar. China adalah importir minyak terbesar dunia. Sebagian besar impor minyak China dikirim dari Timur Tengah dan Afrika yang pengapalannya harus melalui Selat Malaka yang sempit di antara Indonesia dan Malaysia. Ini merupakan selat strategis bagi China namun juga menimbulkan kecemasan jika musuh memblokir selat ini.

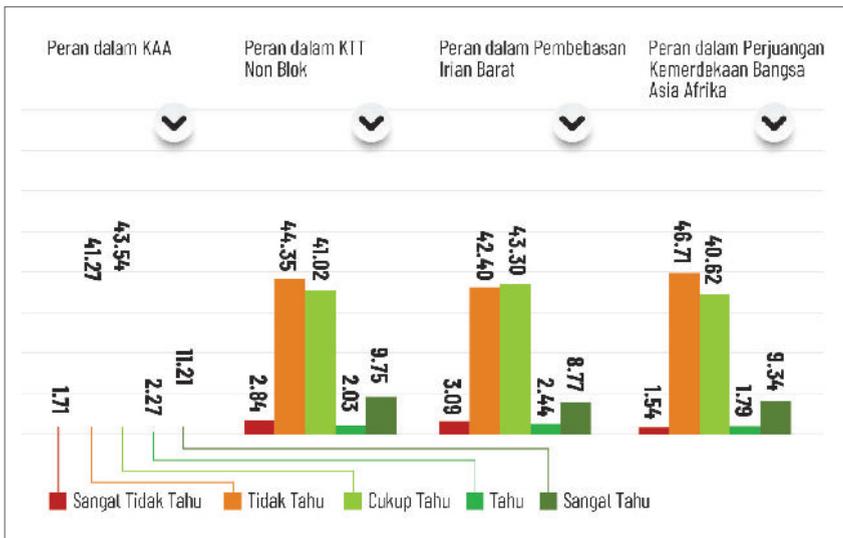
60 De-Soekarnoisasi adalah kebijakan politik Orde Baru yang secara sistematis menyikatkan pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran Soekarno, termasuk memangkas mata rantai kesetiaan para pendukung dan pengagum Soekarno. Dimulai sejak 1966 hingga 1998. Baca: Herbert Feith (1968). *Suharto's Search for a Political Format*. *Indonesia*. 6 (6): 88–105. Cornell Paper.

61 Hasto Kristiyanto. (2021). *Penelitian Pendahuluan: Kognisi Masyarakat tentang Soekarno*. Jakarta: Laporan Penelitian UNHAN dan RISET.



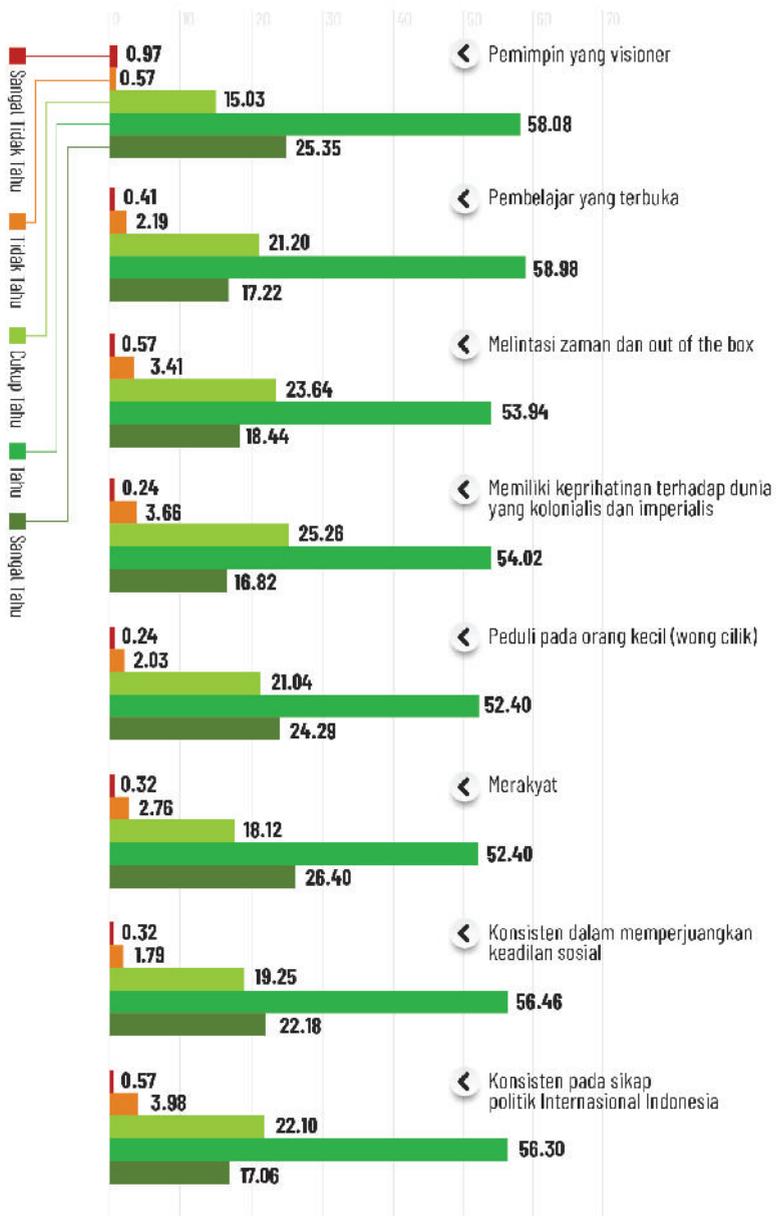
Grafik 1.1. Kognisi Masyarakat tentang Gagasan-gagasan Besar Soekarno

Sumber: Kristiyanto (2021)



Grafik 1.2. Kognisi Masyarakat tentang Kontribusi dan/atau Peran Soekarno

Sumber: Kristiyanto (2021)



Grafik 1.3. Kognisi Masyarakat tentang Figur dan/atau Karakteristik Soekarno

Sumber: Kristiyanto (2021)

Hasil penelitian tersebut selaras dengan upaya merekonstruksi pemikiran Geopolitik Soekarno dalam menjawab perkembangan dan konstelasi geopolitik dunia yang semakin kompleks, terutama ketika dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis dan proyeksi tantangan dan ancaman yang bersifat asimetris. Atas dasar hal tersebut, diskursus pemikiran Geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara memiliki posisi yang penting untuk dikaji secara komprehensif. Kajian tersebut tidak hanya melihat perspektif historis terkait dengan dialektika pemikiran Geopolitik Soekarno, namun juga dibahas peta jalan pemikiran geopolitik khas Indonesia, baik yang berkaitan dengan kepentingan nasional, pertahanan negara, maupun tawaran solutif terhadap berbagai persoalan geopolitik dunia.

1.4 Fokus Kajian: Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negara

Pemikiran Geopolitik Soekarno berhubungan dan memiliki relevansi dengan pertahanan negara. Soekarno (1965) menyatakan bahwa pertahanan negara hanyalah dapat sempurna semaksimal mungkin apabila berdiri di atas karakteristik daripada bangsa dan tanah air yang di dalamnya terkandung unsur geopolitik.⁶² Warisan Soekarno tentang geopolitik dan pertahanan negara di antaranya: Pancasila sebagai ideologi geopolitik Indonesia (1945); Pembebasan Irian Barat (1963); Peran sertanya bagi kemerdekaan Maroko (1956), Tunisia (1956), dan Aljazair (1962); KIAPMA (1965); Pendirian Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) 20 Mei 1965; dan Wawasan Nusantara (1965) sebagai pijakan kebijakan politik dalam dan luar negeri.

Doktrin Kebijakan Luar Negeri Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) pada masa pemerintahan Jokowi periode pertama, dapat dipandang sebagai penjabaran peran strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik. Kebijakan ini sejalan dengan pandangan pemikiran Geopolitik Soekarno yang

62 Soekarno (1965). *Pertahanan Negara Dapat Berhasil Maksimal Jika Berdasarkan Geopolitik*. Sari Amanat Presiden Soekarno pada Peresmian Lemhannas di Istana Negara, Jakarta, 20 Mei 1965.

mengandung beberapa dimensi pokok geografis seperti kewilayahan dan tanah air yang bersifat permanen dalam sistem internasional. Selain itu, terdapat pula dimensi ideologis berdasarkan Pancasila yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila dalam pandangan Soekarno juga sebagai ideologi geopolitik sebagai basis kebijakan luar negeri dan pertahanan negara Indonesia.

Warisan konsep Soekarno tentang geopolitik dan relevansinya terhadap pertahanan negara sangat penting dalam menghadapi dinamika kontemporer geopolitik kawasan dan dunia yang sangat kompleks. Hal ini ditandai dengan adanya *trajectory* multipolar dan aliansi-aliansi pragmatis yang merupakan perwujudan pertarungan abadi Neo-liberalisme dan Neo-realisme. Dalam diskursus geopolitik kontemporer ini, pemikiran Geopolitik Soekarno hadir sebagai *alternative of view* yang mendorong tatanan dunia baru yang penuh kedamaian (*peaceful coexistence*), tidak invasif dan tidak ekspansionis.

Dalam urgensi merekonstruksi pemikiran Geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara, penulis mengetengahkan enam fokus kajian, yaitu:

- a. Biografi dan sintesis pemikiran Geopolitik Soekarno;
- b. Konstruksi teori Progressive Geopolitical Coexistence (PGC);
- c. Pengaruh pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap kepentingan nasional;
- d. Pengaruh pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap dunia;
- e. Pengaruh dan dampak pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap pertahanan negara era Soekarno; dan
- f. Relevansi dan implementasi pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap kebijakan pertahanan pasca-Soekarno.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika buku ini terdiri atas delapan bab: satu bab catatan pembuka; dua bab berisi uraian tentang sintesis pemikiran dan konstruksi teori Geopolitik Soekarno; satu bab tentang pengaruh pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap kepentingan nasional;

satu bab tentang pengaruh pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap dunia; satu bab tentang pengaruh dan dampak pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap pertahanan negara era Soekarno; satu bab tentang relevansi dan implementasi pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap kebijakan pertahanan pasca-Soekarno; dan satu bab catatan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tulisan.

Bab 1 Merekonstruksi Pemikiran Geopolitik Soekarno: berisi tentang pengantar; definisi dan ruang lingkup geopolitik; diskursus perkembangan geopolitik dari klasik hingga kontemporer; merekonstruksi pemikiran Geopolitik Soekarno; fokus kajian: pemikiran Geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara; dan sistematika penulisan.

Bab 2 Biografi dan Sintesis Pemikiran Geopolitik Soekarno. Bab ini terdiri dari pengantar; biografi, situasi politik, dan cara pandang Soekarno tentang dunia; tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran Geopolitik Soekarno; kritik-kritik Soekarno atas teori geopolitik barat; serta arah, ideologi, dan karya-karya pemikiran Geopolitik Soekarno.

Bab 3 Konstruksi Teori *Progressive Geopolitical Coexistence* (PGC): Pertautan Geopolitik, Kepentingan Nasional, dan Pertahanan Negara. Pada bab ini diketengahkan pembahasan mulai dari pengantar; *body of knowledge* dan tujuh variabel Geopolitik Soekarno; posisi pemikiran Geopolitik Soekarno dalam peta Geopolitik Klasik dan Kontemporer; operasionalisasi 7 variabel Geopolitik Soekarno, kepentingan nasional, dan pertahanan negara; pengukuran 7 variabel Geopolitik Soekarno, kepentingan nasional, dan pertahanan negara; dan *progressive geopolitical coexistence* sebagai konstruksi pemikiran Geopolitik Soekarno.

Bab 4 Pengaruh Pemikiran Geopolitik Soekarno Terhadap Kepentingan Nasional. Bab ini diawali pengantar; konsep dan dimensi kepentingan nasional; pengaruh pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap kepentingan nasional, diantaranya dapat dilihat dari pembebasan Irian Barat, koridor pembangunan nasional, pelembagaan pertahanan Negara: Darat, laut, dan angkasa, serta koridor kepentingan nasional.

Bab 5 Pengaruh Pemikiran Geopolitik Soekarno Terhadap Dunia. Pembahasan pada bab ini menyetengahkan bahasan tentang pengantar; pasifik sebagai *pivot* dunia; Pancasila sebagai *lifeline* dunia baru; Konferensi Asia-Afrika, Gerakan Non-Blok, dan

kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika; Tatanan Dunia Baru: dunia tanpa imperialisme dan kolonialisme; dan PGC sebagai *alternative of view* dalam sistem internasional.

Bab 6 Pengaruh dan Dampak Pemikiran Geopolitik Soekarno Terhadap Pertahanan Negara Era Soekarno. Terdiri dari pengantar; konsep keamanan dan pertahanan Negara; pengaruh pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap pertahanan Negara yang berimplikasi kepada (1) tingginya indeks pertahanan Negara, (2) kemandirian pertahanan Negara, dan (3) keikutsertaan dalam misi perdamaian dunia; dan ditutup dengan pembahasan tentang dampak pemikiran Geopolitik Soekarno: disegani dunia dan sekaligus sebagai ancaman.

Bab 7 Relevansi dan Implementasi Pemikiran Geopolitik Soekarno Terhadap Kebijakan Pertahanan Pasca-Soekarno. Pada bab ini berisi pembahasan dari (1) pengantar; (2) implementasi pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap pertahanan: dari Era Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo Periode Pertama; (3) relevansi pemikiran Geopolitik Soekarno dalam konteks empiris; dan (4) pemikiran Geopolitik Soekarno sebagai peta jalan desain pertahanan Negara.

Bab 8 Pengarusutamaan Geopolitik Soekarno dalam Pertahanan Negara: terdiri dari pengantar; pengaruh dan relevansi Geopolitik Soekarno; pengarusutamaan Geopolitik Soekarno bagi pertahanan Negara; rekomendasi akademis dan praktis dari pemikiran Geopolitik Soekarno.



BAB 2

BIOGRAFI DAN SINTESIS PEMIKIRAN GEOPOLITIK SOEKARNO

Bab ini akan menjelaskan biografi dan sintesis pemikiran Geopolitik Soekarno. Konstruksi pemikiran Geopolitik Soekarno tidak dapat dilepaskan dari kontekstualitas Indonesia dan bangsa-bangsa Asia-Afrika saat itu, namun demikian dampak dan relevansinya masih terasa dan signifikan hingga saat ini. Pemikiran Geopolitik Soekarno mempunyai ciri khas karena ia lahir dari alam pikir nusantara, situasi sosial masyarakat Indonesia modern yang baru saja merdeka, dan Asia-Afrika yang umumnya masih mengalami penjajahan. Realitas inilah yang membingkai dan mensintesis pemikiran Geopolitik Soekarno yang berbeda dengan pemikiran Geopolitik Klasik, bahkan jauh mendahului pemikiran Geopolitik Kontemporer.

Berangkat dari konteks tersebut, bab ini tidak hanya menyajikan biografi Soekarno yang menarik untuk dibahas, akan tetapi juga pembahasan tentang situasi politik dan cara pandang Soekarno tentang dunia; tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran Geopolitik Soekarno; kritik-kritik Soekarno atas teori geopolitik barat; serta arah, ideologi, dan karya-karya pemikiran Geopolitik Soekarno sebagai diskursus yang menarik untuk kita baca.

2.1 Biografi, Situasi Politik, dan Cara Pandang Soekarno tentang Dunia

Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901, dengan nama Koesno. Soekarno lahir dari keluarga plural. Ayahnya Raden Soekemi Sosrodihardjo seorang bangsawan Jawa, seorang guru dan

penganut theosofi. Ibunya Ida Ayu Nyoman Rai bangsawan kerajaan Singaraja, Bali. Hubungan Soekarno dan ibunya sangat dekat. Pendidikan dari ibunya menekankan pentingnya budi pekerti dan jiwa kesatria dalam para tokoh cerita pewayangan, yang lekat dengan perjuangan hak-hak rakyat tertindas. Dari kisah pewayangan itu, kesadaran dan semangat perjuangan Soekarno untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penindasan terbentuk. Dari ayahnya, Soekarno mendapatkan pembelajaran tentang karakter, keterbukaan, kecintaan pada alam dan pemahaman terhadap nilai keutamaan *tat twam asi*, yang artinya aku adalah engkau, yang melandasi kuatnya komitmen Soekarno terhadap kelestarian alam atau ekologi. Sementara itu dari pengasuhnya, Sarinah menginspirasi Soekarno untuk mencintai dan mengasihi orang kecil, kepedulian terhadap *wong cilik*.⁶³



Gambar 2.1. Presiden Soekarno Memperjuangkan Kemerdekaan Bangsa Asia Afrika dalam Pidatonya pada Konferensi

Sumber: Dokumen Museum KAA, Bandung, Diakses (2021)

Soekarno lahir dan besar di tengah situasi sosial masyarakat Indonesia, Asia, dan Afrika di masa penjajahan Barat. Soekarno menyaksikan dan mengalami penjajahan di Indonesia dan negara-

63 Adams, Cindy. (2011). *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat*. Yogyakarta: Yogyakarta Media Pressindo.

negara Asia-Afrika. Kesadaran ini yang kemudian membentuk alam pikir pemikiran Geopolitik Soekarno yang anti kolonialisme dan imperialisme. Kritik Soekarno terhadap Geopolitik Barat yang ekspansionis dan ekspansif, ditunjukkan dengan sikapnya yang mengedepankan pentingnya kerja sama antar negara-negara terjajah. Berawal dari sini, sebagian besar hidup Soekarno dihabiskan bagi perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia sekaligus solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk meraih kemerdekaan dan memiliki kesamaan derajat di mata dunia.

Tradisi intelektual pemikiran Geopolitik Soekarno tidak terlepas dari proses dialektika yang penuh dengan pembelajaran hidup. Setiap peristiwa direfleksikan secara kritis terhadap hubungan kausalitasnya sehingga terbangun nilai-nilai hidup yang membawa pengaruh dalam setiap pemikiran dan tindakannya. Menurut Megawati, dialektika Soekarno merupakan metode berpikir (*denk methode*) yang dibangun dari tesis, anti-tesis dan sintesis yang berasal dari alam pikir rakyat dan masyarakat dunia.⁶⁴ Dialektika pertama muncul karena adanya pemahaman Soekarno terhadap kebesaran sejarah Nusantara, tradisi, adat-istiadat, keluhuran budi pekerti, termasuk pemahamannya atas tata kelola pemerintahan dan strategi kerajaan-kerajaan menjaga keutuhan wilayah kedaulatannya. Bung Karno di dalam buku yang berjudul “Di Bawah Bendera Revolusi” (1964) menyatakan:

“...Jikalau kita mempelajari dan mengagumi Sriwijaya dan Mataram dan Majapahit dan Banten dan Melayu dan Singasari, tetapi kita tidak menangkap dan meneruskan api yang bernyalanyala dan berkobar di dalam jiwa-Sriwijaya, jiwa-Mataram, jiwa-Majapahit, jiwa-Banten, jiwa-Melayu itu, kita pun hanya mewariskan abu saja, mewariskan barang yang mati, mewariskan barang yang tiada harga.”⁶⁵

Soekarno beruntung hidup di antara peristiwa-peristiwa besar dunia yang memberikan pengaruh pada dirinya sejak muda.⁶⁶ Pada masa 5 tahun sebelum Soekarno lahir, terjadi eksekusi terhadap

64 Wawancara Megawati Soekarnoputri, April 2022.

65 Soekarno (1964). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.

66 Benedict R. O' G. Anderson (2002). Bung Karno and the Fossilization of Soekarno's Thought. *Indonesia*, Vol. 074, October 2002. Cornell University Southeast Asia Program.

Jose Rizal tokoh nasional Filipina yang ditembak mati oleh tentara kolonialis Spanyol yang menjajah negaranya. Jose Rizal dikenal sebagai pahlawan nasional Filipina dianggap sebagai pionir dari pejuang pergerakan pembebasan Asia, yang memberikan pengaruh pada spirit Soekarno muda ketika membaca kisah perlawanan Jose Rizal. Begitu pula peristiwa kemenangan Jepang atas Rusia ketika Soekarno berusia empat tahun, yakni pada 1904-1905. Kemenangan ini menjadi tonggak bersejarah karena untuk pertama kalinya Jepang sebagai bangsa Asia, bangsa kulit berwarna berhasil menaklukkan dominasi bangsa Eropa, bangsa kulit putih. Keseluruhan peristiwa sejarah tersebut mengilhami Soekarno bahwa Jepang dengan modernisasi Restorasi Meiji berhasil menempatkan diri sejajar dengan bangsa Eropa.

Kekayaan alam pikir Soekarno juga diwarnai pemikiran dan pergerakan berbagai tokoh dunia antara lain Mahatma Gandhi dengan konsep "*my nationalism is humanity*"; ketokohan Sun Yat Sen sebagai bapak pendiri Nasionalisme Tiongkok; revolusi Kebudayaan Kemal Pasha Attaturk di Turki; dan meletusnya Revolusi Pertama kaum Marxis di St Petersburg; Kesemuanya ini menjadi bagian penting di dalam pematangan pemikiran Soekarno.

Perubahan konstelasi politik dunia terjadi ketika Jerman berhasil menginvasi Belanda pada 1940, Perang Pasifik yang berkobar antara 1941-1945 sebagai representasi fasisme Jepang melawan Sekutu. Perang Pasifik melibatkan Hindia Belanda dalam perang dunia. Berbagai peristiwa dunia dan pergulatannya dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional, serta gagasan pentingnya pembaharuan dunia memberikan dampak pada proses perjalanan tradisi intelektual pemikiran Geopolitik Soekarno dan semangat perlawanannya kepada kolonialisme dan imperialisme.

Dialektika kedua, ketika melihat problematika dan permasalahan dalam suatu fenomena yang terjadi, Soekarno memahaminya dengan menggunakan pisau analisis materialisme historis, islamisme, nasionalisme, dan sosialisme.⁶⁷ Pengejawantahan dari pisau analisisnya yang kritis tersebut, Soekarno memosisikan manusia Indonesia sebagai fokus utama dengan perhatian begitu besar terhadap kemanusiaan (*humanity*) sebagaimana pandangan

67 Soekarno (1964). Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, Suluh Indonesia Muda (1928). Dalam, *Di Bawah Bendera Revolusi I*. Jakarta: Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi.

Jean Jaures.⁶⁸ Dialektika kedua ini dimatangkan oleh Soekarno ketika bertemu dengan seorang petani miskin yang bernama Marhaen. Petani tersebut memiliki alat produksi berupa tanah dan cangkul, namun mengapa ia miskin? Dalam pandangan Soekarno, sosok petani Marhaen mewakili jutaan petani miskin. Soekarno mengonstruksikan kemiskinan petani, buruh, nelayan, dan kaum miskin lainnya akibat tata pergaulan hidup yang menghisap manusia Indonesia. Tata pergaulan hidup eksploitatif tersebut terjadi akibat kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Konstruksi pemikiran Soekarno tersebut dituangkan dalam konsep filsafatnya yang disebut *Marhaenisme*. *Marhaen* gambaran seorang petani kecil, buruh, nelayan, dan kaum miskin lainnya yang menjadi fokus teori pembebasan Soekarno.

Dalam teori ini, kaum Marhaen harus dibangkitkan kesadarannya melalui pendidikan politik yang kemudian diorganisir agar menjadi kekuatan untuk menghadapi kolonialisme dan imperialisme. Dalam teori ini pula, dengan kemerdekaan bangsa itu cita-cita manusia merdeka, adil, sejahtera, dan damai dapat dicapai.⁶⁹ Selanjutnya kemerdekaan dari kolonialisme dan imperialisme menjadi kunci perjuangan kaum marhaen. Soekarno mengejawantahkan konsep manusia Marhaen dan kemanusiaan (*humanity*) ke dalam ide, imajinasi, semangat (*geist*) yang mengerucut pada ideologi dan konsep nasional Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.⁷⁰

Konsistensi Soekarno yang anti kolonialisme dan imperialisme menjadi *geist* dalam tradisi intelektualnya yang terus mempengaruhi kebijakan politiknya pasca-Indonesia merdeka. Tradisi intelektual pemikiran Geopolitik Soekarno dibangun dari ide dan tindakan sebagai nilai dasar yang dituangkannya menjadi Kepentingan Nasional dan Pertahanan Negara. Keduanya menjadi instrumen yang sangat strategis dalam melihat hubungan antara kondisi internasional

68 Soekarno (1945). Wilayah Indonesia Merdeka. Pidato Soekarno di hadapan Sidang BPUPK, 11 September 1945.

69 Safroedin Bahar dan Ananda B. Kusuma (1995). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

70 Soekarno (1964). Di Bawah Bendera Revolusi. *Op. Cit.*

atau *world view*, nasional atau *national view*, dan masyarakat atau *society view*. Terkait hal ini, Megawati Soekarnoputri mengatakan:

“.....Moralitas pemimpin itu ukurannya sederhana, yaitu ditandai satunya kata dan perbuatan. Bung Karno sejak awal bertekad menjadikan kemerdekaan Indonesia untuk membangun persaudaraan dunia. Indonesia itu kan taman sari dunia. Indonesia harus berkehidupan dalam percaturan dunia global. Indonesia harus eksis ke dalam dan keluar. Ke dalam prinsip sebagai negara berdaulat itulah yang harus dipegang. Bertindak keluar membangun suatu tatanan dunia baru.

Bung Karno selalu memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang betul-betul beliau cintai sampai akhir hayatnya. Bagi Bung Karno di dalam perjuangan itu ada kesabaran revolusioner.”⁷¹

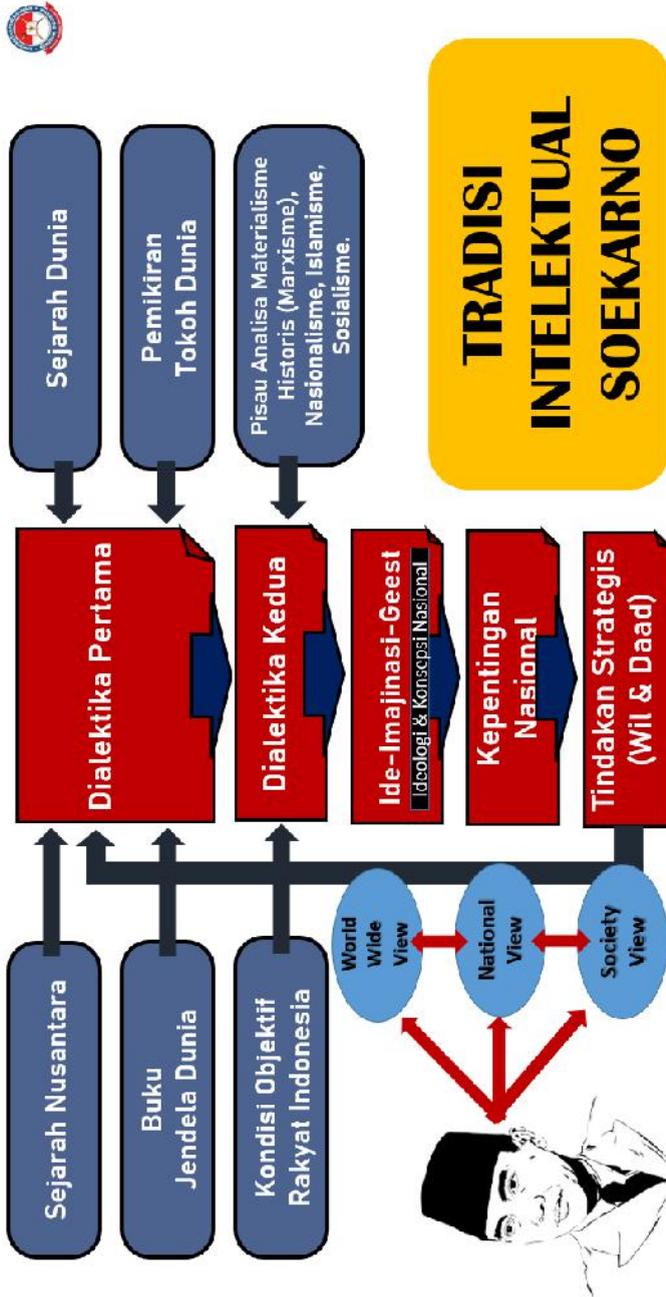
Dengan ide yang menciptakan daya imajinasi geopolitik tersebut, Soekarno menciptakan *geest*. Semangat ini yang menjadi energi perjuangan Soekarno. Perpaduan antara ide, daya imajinasi, dan *geest* melahirkan tindakan strategis yang menggambarkan tekad atau *will* dan tindakan atau *daad* Soekarno di dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia. Lihat Gambar 2.2.

Pemikiran Geopolitik Soekarno merupakan muara antara kekuatan teoritis dengan empiris dalam tradisi intelektual Soekarno. Bangunan masyarakat Indonesia, sejarah peradaban dan Pancasila adalah akar pemikiran Geopolitik Soekarno. Merujuk pada tradisi intelektual itu, sebagaimana tampak pada Gambar 2.2., Soekarno mengidentifikasi Wawasan Nusantara sebagai cita-cita dan tujuan nasional yang merupakan satu kesatuan Tanah Air, *geografische constellatie*, sebagai imajinasi geopolitik dan *pivot area* dalam terminologi Khanna (2016)⁷² dan Sengupta (2019).⁷³ Imajinasi pemikiran Geopolitik Soekarno juga tampak melalui konsepsi tata dunia baru atau *to Build the World Anew*.

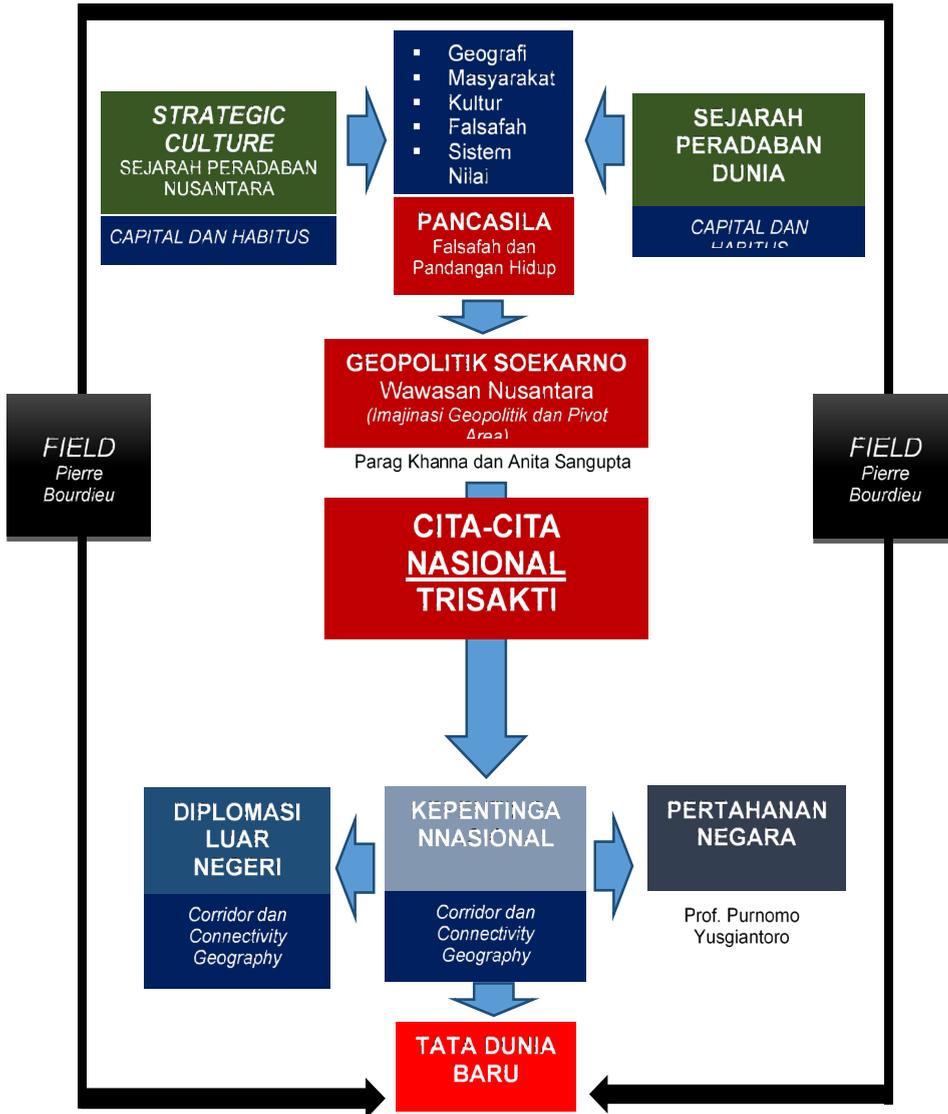
71 Wawancara Megawati Soekarnoputri, April 2022.

72 Parag Khanna (2016). *Op. Cit.*

73 Anita Sengupta (2009). *Op. Cit.*



Gambar 2.2. Tradisi Intelektual Soekarno
Sumber: diolah oleh Peneliti (2021-2022)



Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Geopolitik Soekarno

Sumber: dikonseptualisasikan oleh Peneliti (2021)

Operasionalisasi Wawasan Nusantara sebagai cita-cita nasional diwujudkan dengan keterhubungan modal (*capital*) dan habitus dari:

- a. Kekayaan peradaban nusantara (*strategic culture*) dan sejarah peradaban dunia;
- b. Diplomasi luar negeri; dan
- c. Koridor atau *field* kepentingan nasional dan pertahanan negara.⁷⁴

Secara khusus, Khanna menjelaskan bahwa dalam membangun koridor geopolitik dipengaruhi dimensi ekonomi dan pertahanan, sementara itu, Soekarno dalam pidato tahun 1965 mengajak bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk membentuk Dewan Ekonomi Asia Afrika sebagai respons atas terbentuknya Pasaran Bersama Ekonomi dan *Council for Mutual Economic Assistance* (COMECON).

Menurut Soekarno Pertahanan Negara menyatu dengan geopolitik dan mengandalkan pentingnya sains dan teknologi. Pandangan ini sejalan dengan konsepsi Yusgiantoro yang menekankan pentingnya pendekatan geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi dalam pertahanan negara dijabarkan melalui strategi, doktrin, postur pertahanan dan kemandirian industri pertahanan, menjadi satu kesatuan konsep dengan mengedepankan pentingnya sains dan teknologi.⁷⁵

2.2 Tokoh-tokoh yang Mempengaruhi Pemikiran Geopolitik Soekarno

Pemikiran Geopolitik Soekarno seperti ditulis di atas, menjadi pemikiran yang kuat berkat pergulatan teoritis dan empiris dengan para pemimpin besar dunia. Pendidikan Geopolitik Soekarno dimulai dari keluarga dan berlanjut pada tokoh-tokoh besar nasional dan internasional, baik bertemu langsung maupun diperoleh melalui

⁷⁴ Pierre Bourdieu (2003). *Méditations Pascallienes*, 2nd ed. Paris: Seuil.

⁷⁵ Yusgiantoro, Purnomo. (2000a). *Ekonomi Pertahanan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Lihat juga Yusgiantoro, Purnomo. (2000b). *Ekonomi Energi: Teori dan Praktik*. Jakarta: LP3ES. Purnomo Yusgiantoro. (2015). *Sistem Pertahanan Negara*. Jakarta: UNHAN; Juniawan Priyono dan Purnomo Yusgiantoro. (2017). *Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi*. Universitas Pertahanan (Unhan) Press, Bogor.

buku-buku bacaan. Soekarno belajar kepada HOS Tjokroaminoto di Surabaya, seorang aktivis politik, pendiri Sarekat Dagang Islam (1911), yang kemudian berganti-nama menjadi Sarekat Islam pada 1921. Berawal dari sini, Soekarno berkenalan dan menimba ilmu geopolitik kepada K.H. Ahmad Dahlan, Dr. Radjiman Wedyodingrat, RMP Sosrokartono, Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi.⁷⁶ Kesadaran Geopolitik Soekarno mulai terlihat dari pidato politik pertamanya, di klub diskusi sekolah. Soekarno berpidato dalam bahasa Indonesia, yang pada saat itu tidak lazim dan melanggar aturan yang dibuat penjajah Belanda. Namun Soekarno mengabaikannya, katanya:

“... Tanah kebangsaan kita ini dulu pernah bernama Nusantara. Nusa berarti pulau. Antara berarti di antara. Nusantara berarti ribuan pulau-pulau ini, dan banyak di antara pulau-pulau ini lebih besar daripada seluruh negeri Belanda. Jumlah penduduk negeri Belanda hanya segelintir jika dibandingkan dengan penduduk kita. Bahasa Belanda hanya dipergunakan oleh enam juta orang. Mengapa suatu negeri kecil yang terletak di sebelah sana dari dunia ini menguasai suatu bangsa yang dulu pernah begitu perkasa, sehingga dapat mengalahkan Kubilai Khan yang kuat itu? ... Belanda berkulit putih. Kita sawo matang. Rambut mereka pirang dan keriting. Kita punya lurus dan hitam. Mereka tinggal ribuan kilometer dari sini. Mengapa kita harus berbicara bahasa Belanda? (Adams, 2011).⁷⁷

Pendalaman pemikiran Geopolitik Soekarno bergerak dari satu pemikiran ke pemikiran lainnya mempengaruhi corak perjuangan politik Soekarno. Realitas sebagai warga jajahan atau *onderdaan* yang hidup di bawah sistem kolonial yang diskriminatif baik secara ras maupun kelas, dan analisis kritis atas pemikiran Karl Marx membantu Soekarno memahami kontradiksi yang terjadi. Kontradiksi tidak hanya terjadi antar kelas dalam masyarakat, namun juga tampak dalam kontradiksi hubungan antar-bangsa. Sebagaimana diakuinya, Soekarno membaca Karl Marx sejak usia enam belas tahun. Dalam diskursus pemikiran saat itu, teori analisis sosial dan perjuangan kelas tengah marak dibaca dan didiskusikan oleh para tokoh pergerakan bangsa. Soekarno tidak sendiri, sederet

⁷⁶ Wawancara Megawati Soekarnoputri, April 2022; Guntur Soekarnoputra, Januari 2022.

⁷⁷ Cindy Adams (2011). *Op. Cit.*

nama tokoh pergerakan lainya seperti Mohammad Hatta, Tan Malaka, Sutan Sjahrir, dan HOS Tjokroaminoto juga membaca Karl Marx yang menyediakan perangkat pisau analisis atas situasi masyarakat dan membongkar cara-cara kapitalisme bekerja.⁷⁸

Dunia memang terbelah di masa itu. Dalam Kongres Komintern (Komunis Internasional) II pada 1920, Vladimir Ilyich Lenin membentuk komisi untuk menelaah persoalan-persoalan nasional dan kolonial. Dalam laporan tersebut Lenin membagi dunia ke dalam dua kategori bangsa, yaitu sejumlah besar bangsa-bangsa tertindas (koloni) dan sejumlah kecil bangsa penindas (kolonialis) yang menguasai kemakmuran secara besar dan angkatan bersenjata yang kuat.⁷⁹ Dalam Pledoi Indonesia Menggugat tahun 1930, Soekarno menjelaskan perbedaan kesadaran masyarakat di negeri-negeri imperialis dengan negeri-negeri terjajah:⁸⁰

“...PNI Oleh karena itu, tak berhenti-hentinya menyuburkan nyuburkan semangat rakyat itu. Semangat tiap-tiap rakyat yang disengsarakan oleh suatu keadaan, baik rakyat proletar di negeri-negeri industri, maupun rakyat di tanah-tanah jajahan, adalah semangat ingin merdeka: Nah, kami menyuburkan semangat ingin merdeka itu pada rakyat Indonesia. Kami menyuburkannya tidak terutama dengan keinsafan kelas sebagai pergerakan kaum buruh umumnya, tetapi terutama dengan keinsafan bangsa, dengan keinsafan nasionaliteit, dengan nasionalisme.

Sebab tiap-tiap rakyat yang dikuasai oleh bangsa lain, tiap-tiap rakyat jajahan, tiap-tiap rakyat yang saban hari, saban jam, merasakan imperialisme bangsa lain, tiap-tiap rakyat yang diperintahi secara jajahan demikian itu, adalah berbudi akal nasionalistis. Rasa pertentangan, yang di Eropa atau di Amerika, berwujud rasa pertentangan kelas, oleh karena kaum yang berkuasa dan kaum yang dikuasai di sana terdiri dari satu bangsa, satu kulit, satu rasa, rasa pertentangan itu di suatu negeri jajahan adalah menyatu dengan pertentangan nasionalistis. Bukan terutama rasa

78 Budi Setiyono dan Bonnie Triyana (2014). *Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno, 30 September 1965, Pelengkap Nawaksara*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

79 Vladimir Lenin (1965). *Lenin's Collected Works, 4th English Edition*. Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 31, pp 213-263.

80 Soekarno (1930). *Indonesia Menggugat*. Pidato Pembelaan pada Persidangan di Landraad, Bandung, 22 Desember 1930.

pertentangan si buruh terhadap si kapitalistis, bukan terutama rasa pertentangan kelas yang kita alami dalam suatu negeri jajahan, tetapi, rasa pertentangan si hitam terhadap si putih, si Timur terhadap si Barat, si terjajah terhadap si penjajah”.

Soekarno, dengan pengetahuan tentang situasi bangsa Indonesia pada era kolonial juga sebagai hasil elaborasi berbagai pemikiran, menyebarkan kesadaran kepada masyarakat mengenai situasi di bawah kolonialisme dan sekaligus menggalang kekuatan massa. Dua metode perjuangan politik Soekarno bisa dikenali dalam dua istilah yang sering digunakan dalam tulisan atau pidato-pidatonya, yakni *machtsvorming* (penyusunan kekuatan dan/atau kekuasaan) dan *machtsaanwending* atau pendayagunaan kekuasaan.⁸¹

Penyusunan kekuatan untuk merebut kekuasaan bisa pula diartikan sebagai strategi pembangunan kekuatan massa untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Dalam gagasan Soekarno, jika kekuasaan kolonialisme dapat ditumbangkan akan memberikan ruang luas untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu pendayagunaan kekuasaan digunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dalam alam kemerdekaan. Di situ *machtsweending* penting untuk memperkuat kapasitas bangsa yang baru merdeka dan memiliki kedudukan setara dalam hubungan internasional.

Buku *Der Weg Zur Macht* (Jalan Menuju Kekuasaan) karya Karl Kautsky (1909) memberi Soekarno perspektif lain dalam panggung pemikiran Karl Marx. Kautsky menjelaskan bahwa perubahan bisa dilakukan secara bertahap (evolusioner) tanpa harus melakukannya secara drastis melalui revolusi yang penuh kekerasan dan pertumpahan darah. Kautsky mencontohkan bagaimana penemuan mesin uap mampu mendorong berbagai perubahan setelahnya secara bertahap. Dia mengkritik praktik revolusi Bolshevik Lenin yang menurutnya hanya menggantikan kediktatoran Tsaris.⁸²

Terlepas dari perdebatan dua tokoh kiri tersebut, Soekarno membaca karya Kautsky untuk memahami teori pembentukan kekuasaan. Dalam pidatonya di Jakarta, 8 September 1966, Soekarno mengatakan mempelajari buku tersebut secara serius. “Kitabnya Karl

81 Wawancara Guntur Soekarnoputra, Januari 2022.

82 Karl Kautsky (1920). *Der Weg Zur Macht*. Bloch, Germany.

Kautsky itu boleh dikatakan kadang-kadang, tidur pun saya bawa. *Saking wah*, berisikan pengajaran-pengajaran yang tinggi untuk menyusun *macht*.”⁸³

Imajinasi Soekarno tentang kekuasaan terbentuk dari keinginannya membentuk masyarakat baru tanpa eksploitasi atas satu bangsa terhadap bangsa lain dan eksploitasi satu manusia terhadap manusia lainnya. Dalam kesadarannya sebagai bagian dari masyarakat jajahan, Soekarno mengikat solidaritas kebangsaan Indonesia tidak atas identitas eksklusif yang bersifat primordial, namun sebagai sebuah realitas sosial dan kultural. Soekarno mengakui bahwa perbedaan adalah inheren di tengah massa. Atas realitas sosial ini, Soekarno dalam berbagai tulisannya membagi rakyat Indonesia di dalam tiga spektrum kekuatan politik: Nasionalisme, Islam dan Marxisme.⁸⁴

Soekarno menganjurkan ketiga golongan tersebut bersatu dalam satu kesadaran kebangsaan yang baru: Indonesia. Kekuatan revolusioner dari ketiganya dipandang sebagai cara yang paling tepat untuk menandingi kolonialisme. *Samenbundelling van alle revolutionaire krachten*, menyatukan seluruh kekuatan revolusioner di dalam satu ikatan. Dalam ikatan itu pula muncul kesadaran kemanusiaan yang baru, yang mampu melepaskan diri dari belenggu kolonialisme yang menindas kehidupan manusia.

Aspek kemanusiaan yang membentuk pemikiran Soekarno dipengaruhi oleh faktor kultural dan intelektual. Secara kultural, Soekarno lahir dan besar dalam tradisi multikultural-sinkretik. Sementara secara intelektual, Soekarno melakukan pengembaraan literatur melalui beberapa karya pemikir humanis, antara lain Jean Jaures, seorang pemikir sosialis Prancis yang terkenal dengan ucapannya “*Ce n’est pas un socialisme, sans l’humanisme*”, tidak ada sosialisme tanpa humanisme. Soekarno menyadari bahwa gagasan kemanusiaan beririsan dengan konsep kosmopolitanisme, yang justru menegasi prinsip-prinsip solidaritas kebangsaan dan kenegaraan. Kebangsaan Indonesia terbentuk dari konsekuensi historis kolonialisme dan imperialisme Belanda. Dari Sun Yat Sen, Soekarno memetik gagasan mengenai pembentukan negara-bangsa

83 Soekarno (1965). *Pertahanan Negara Dapat Berhasil Maksimal Jika Berdasarkan Geopolitik*. *Loc. Cit.*

84 Soekarno (1964). *Di Bawah Bendera Revolusi*. *Op. Cit.*

yang merdeka. Tiongkok lepas dari belenggu feodalisme kekaisaran dan Indonesia terbebas dari kolonialisme. Keduanya terikat dalam satu orientasi pembebasan manusia dari kondisi yang menindas.

Ajaran Sun Yat Sen tentang tiga prinsip rakyat, *San Min Chu I*, meliputi *Min Tsen* (Nasionalisme), *Min Chu* (Demokrasi) dan *Min Sheng* (Sosialisme) menjadi rujukan Soekarno menyusun prinsip-prinsip negara-bangsa Indonesia. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan riwayat berdirinya Tiongkok dan pandangan dunia (*Weltanschauung*) Sun Yat Sen yang menjadi landasan filosofis berdirinya negara Tiongkok modern. Dalam pidatonya Soekarno mengatakan:

“.... Di dalam tahun 1912 Sun Yat Sen mendirikan negara China merdeka, tetapi „Weltanschauung”nya telah dalam tahun 1885, kalau saya tidak salah, dipikirkan, dirancangan. Di dalam buku „The three people’s principles” *San Min Chu I*, - Mintsu, Minchuan, Min Sheng, - nasionalisme, demokrasi, sosialisme,- telah digambarkan oleh doktor Sun Yat Sen *Weltanschauung* itu, tetapi baru dalam tahun 1912 beliau mendirikan negara baru di atas „Weltanschauung” *San Min Chu I* itu, yang telah disediakan terdahulu berpuluh-puluh tahun”.⁸⁵

Soekarno juga membangun argumentasinya tentang landasan sebuah negara merdeka sebelum bangsa Indonesia merdeka. Sebagaimana Sun Yat Sen mengemukakan Tiga Prinsip Rakyat sebagai dasar berdirinya Tiongkok, Soekarno pun menyampaikan gagasannya tentang falsafah dasar yang diusulkannya untuk diberi nama Pancasila. Falsafah dasar tersebut merupakan refleksi kritis atas pentingnya filsafat sedalam-dalamnya bagi Indonesia merdeka dan sekaligus pandangan hidup bangsa terhadap struktur dunia yang tidak adil akibat penjajahan. Dengan demikian falsafah bangsa yang digali dari bumi Indonesia tersebut juga sebagai jawaban bangsa Indonesia atas situasi politik internasional pasca Perang Dunia II.

Dalam pandangan Soekarno, kemerdekaan Indonesia sebagai momentum melawan akar persoalan dunia yang disebabkan kolonialisme dan imperialisme. Imperialisme tidak bisa dipersonifikasi pada subjek tertentu, melainkan suatu nafsu untuk menguasai

85 Soekarno (1945). *Lahirnya Pancasila*. Pidato Soekarno di hadapan Sidang BPUPK, 1 Juni 1945.

ekonomi dan politik bangsa atau negeri lain. Dalam pleidoinya di hadapan pengadilan kolonial Belanda, Soekarno mengutip pemikir sosialis Otto Bauer mengenai ekspansi kapitalisme yang didorong oleh hasrat meningkatkan akumulasi kapital dan menciptakan pasar baru pada negeri lain. Soekarno menolak identifikasi kapitalisme dan imperialisme pada ras atau bangsa tertentu karena kesemuanya berakar dari suatu paham, suatu nafsu, suatu hasrat yang menurutnya terdapat pada semua bangsa. Dengan mengutip pendapat J.S. Bartsra dalam buku *Geschiedenis van het Moderne Imperialisme 1880-1906*⁸⁶ dan Otto Bauer, Soekarno mengatakan:

“...Imperialisme-tua atau imperialisme-modern, – bagaimana juga kita bulak-balikkan, dari mana juga kita pandang, – imperialisme tetap suatu paham, suatu nafsu, suatu zucht, suatu lust, suatu streven, suatu stelsel dan bukan amtenar B.B, bukan pemerintahan, bukan gezag, bukan bangsa Belanda, bukan bangsa asing manapun juga, - pendek kata bukan lichaam, bukan manusia, bukan benda atau materie!”⁸⁷

Proses kelahiran negara-bangsa di dunia pada abad ke 20 tidak terlepas dari perkembangan kapitalisme di Eropa yang memuncak menjadi imperialisme yang ekspansif. Eksploitasi tersebut menghasilkan keuntungan berlipat ganda bagi imperium namun mendatangkan berbagai persoalan pada negeri-negeri jajahan. Hasrat ekspansionis yang eksploitatif tersebut memicu solidaritas kesamaan nasib yang menurut Soekarno, mengutip Ernest Renan, mengikat satu masyarakat ke dalam satu nasib yang sama sehingga melahirkan kesepakatan untuk hidup bersama.

Namun Soekarno melihat konsep Renan secara kritis dengan mengatakan bahwa hasrat untuk hidup bersama pada sebuah masyarakat, tidak serta merta pantas disebut bangsa. Kesadaran bersifat etnosentrisme tidak selalu menjadi faktor penting di dalam pembentukan sebuah bangsa. Dalam konteks yang sama Soekarno juga memandang secara kritis teori kebangsaan menurut Otto Bauer yang menyebutkan bahwa homogenitas karakter pada suatu masyarakat atau *charakter gemeinschaft* belum tentu menjadi faktor utama kemunculan sebuah bangsa.

86 J.S. Bartstra (1880/1906). *Geschiedenis van het moderne imperialisme*. Haarlem : De Erven F. Bohn.

87 Soekarno (1930). *Loc. Cit.*

Soekarno menunjukkan Indonesia sebagai contoh bagaimana keberagaman etnis dan ras bisa terikat ke dalam satu hasrat untuk hidup bersama. Ia merujuk kepada teori ruang hidup (*lebensraum*) Karl Haushofer, salah seorang pencetus Teori Geopolitik kelahiran Bavaria, Jerman, 27 Agustus 1869.⁸⁸ Kelompok rakyat membutuhkan ruang untuk hidup bersama karena mereka saling membutuhkan. Bagi Soekarno, teori *lebensraum* masih memiliki celah karena dapat digunakan oleh negara-negara imperialis untuk memperluas ruang hidupnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Jenghis Khan dan Adolf Hitler.⁸⁹

Soekarno mengelaborasi beberapa teori kapitalisme, imperialisme, dan asal-usul kemunculan negara-bangsa di dunia dan menyesuakannya dengan kondisi objektif di Indonesia. Rumusan formula tersebut terdapat dalam Pancasila, sebagai norma dasar atau *grundnorm* dan landasan falsafah atau *philosophische grondslag* berdirinya negara-bangsa Indonesia. Dengan rumusan Pancasila, heterogenitas kelompok rakyat yang terikat pada solidaritas etnis dan ras bisa dipersatukan di dalam ruang hidup bersama bernama Indonesia.

Dari tokoh-tokoh besar dunia tersebut Soekarno juga mengambil rumusan penting bagi pemikiran geopolitiknya. Terkait dengan konstruksi tujuh variabel geopolitiknya, belajar dari Marx, Soekarno mendapatkan pentingnya perjuangan politik dan SDA dan/atau ekonomi untuk kemanusiaan. Telaah penting terhadap aspek teritorial, geopolitik, militer didapatkan dari Jenghis Khan. Dari Karl Kautsky, Soekarno meminjam metode perjuangan politiknya yaitu *machtsvorming* (penyusunan kekuatan/kekuasaan) dan *machtsaanwending* (pendayagunaan kekuasaan). Dari sisi Geopolitik Kautsky memandang pentingnya demografi, teritorial, SDA, dan Politik. Soekarno juga dipengaruhi Jean Jaures yang membentuk pandangannya tentang perjuangan kemanusiaan sebagai esensi pokok prinsip koeksistensi damai. Dari Mackinder dan Mahan Soekarno mematangkan konsep tanah air sebagai satu kesatuan geopolitik. Pandangan masa depan dunia di Pasifik tidak terlepas dari koreksi *geographical pivot* di Eurasia sebagaimana dimaksudkan Mackinder. Dari Haushofer aspek teritorial, SDA, militer, politik,

88 Andreas Dorpalen (1984). *The World of General Haushofer*. Farrar & Rinehart, Inc., New York

89 Jorg Michael Dostal (2016). Review on The Demon of Geopolitics: How Karl Haushofer Educated Hitler and Hess. *timehighereducation.com*, 19 May; Imam Totok Raharjo dan Suko Sudarsono. (2010). *Bung Karno: Masalah Pertahanan-Keamanan*. Jakarta: Grasindo.

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi perhatian penting Soekarno. Berikut iniringkasan tujuh variabel Soekarno di antara pemikir-pemikir besar yang mempengaruhinya. Hal tersebut dapat dilihat pada uraian Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Landasan Teoretis Tujuh Variabel Pemikiran Geopolitik Soekarno

NO	TOKOH	PEMIKIRAN UTAMA	PERGUMULAN	VARIABEL						
				DEM	TER	SDA	MIL	POL	KOE	TEK
1	Jengish Khan	Geopolitik Mongolia	Teoritis							
2	Ernest Renan	Bangsa	Teoritis							
3	Otto Bauer	Bangsa	Teoritis							
4	Karl Marx	Marxisme	Teoritis							
5	Karl Haushofer	Geopolitik: <i>Geopolitik des Pazifischen Ozeans</i>	Teoritis							
6	Mahan	Geopolitik: <i>Sea Power</i>	Teoritis							
7	MacKinder	Geopolitik: <i>Heartland Theory</i>	Teoritis							
8	Hector Charles Bywater	Geopolitik: <i>Sea Power in the Pacific dan The Great Pacific War</i>	Teoritis							
9	Ernest Reinhard	Geopolitik: <i>Die Imperialistische Politik im fernen Osten</i>	Teoritis							
10	Jean Jaures	<i>Humanite</i>	Teoritis							
11	Vladimir Ilyich Lenin	<i>Imperialism, the Highest Stage of Capitalism</i>	Teoritis							
12	Karl Kautsky	<i>Der Weg zur Macht, (The Road to Power)</i>	Teoritis							
13	Sun Yat Sen	San Min Chu-I	Teoritis							
14	Ki Hajar Dewantara	Trikon: Kontinuitas, Konvergensi, Konsentris	Empiris							
15	Nikita Khrushchev	Koeksistensi damai	Empiris							
16	Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, dan John F. Kennedy	Koeksistensi damai	Teoritis-Empiris							
17	Ho Chi Minh	Geopolitik Vietnam	Empiris							
18	Mao Zedong	Geopolitik RRC	Empiris							

NO	TOKOH	PEMIKIRAN UTAMA	PERGUMULAN	VARIABEL						
				DEM	TER	SDA	MIL	POL	KOE	TEK
19	HOS Tjokroaminoto	Politik Kebangsaan Sosialisme Islam	Empiris							
20	Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi	Geopolitik Hindia Belanda	Empiris							
21	Tan Malaka	Madilog	Empiris							
22	Soekarno	Geopolitik untuk kepentingan nasional dan pertahanan	Sintesis							

Sumber: diolah dari Soekarno, 1930, 1945, 1957, 1964, 1965; ÓTuathail, 1996, 1998; Sempa, 2002; Cohen, 2003; Adams, 2011; Prasetya, 2017; 2019; Wawancara Mendalam dengan Guntur Soekarnoputra, 31 Januari 2022. Simposium Nasional “Relevansi Pemikiran Geopolitik Soekarno bagi Kepentingan Nasional dan Pertahanan Negara”, 19 Februari 2022

2.3 Kritik-kritik Soekarno atas Teori Geopolitik Barat

Soekarno tidak hanya terpengaruh oleh pemikiran geopolitik dunia, tetapi mampu mensintesis gagasan-gagasan pemikir dunia tersebut ke dalam konteks Indonesia. Soekarno dengan *genuine* memformulasikan Geopolitik Barat, Asia, dan Indonesia sebagai geopolitik khas yang kritis. Berangkat dari sini, Soekarno mengkritisi pandangan-pandangan pemikir Barat, diantaranya: Ernest Renan, Otto Bauer, Karl Haushofer, Mahan, Mckinder, dan lainnya. Soekarno mengkritisi teori bangsa dari Ernest Renan dan Otto Bauer. Keduanya menurut Soekarno, masih belum melihat aspek manusia dengan tanah airnya serta faktor pembentuk suatu bangsa lainnya yaitu unsur-unsur budaya.⁹⁰ Bagi Ernest Renan bangsa ialah jiwa, suatu asas rohani. Bangsa merupakan sebuah hasil proses historis dari serangkaian kejadian yang menyatu. Maka menurut Renan, bangsa adalah suatu solidaritas dalam skala besar setiap hari (*de tous les jours*) yang terbentuk karena adanya kesadaran bahwa

90 Soekarno. (1945). *Lahirnya Pancasila*. Op. Cit.

orang telah berkorban banyak di masa lalu dan bersedia untuk kembali berkorban di masa mendatang. Bangsa terbentuk bukan karena kesatuan rasial, bahasa, agama, kepentingan bersama, dan perbatasan wilayah. Bangsa itu adalah *Le désir d'être ensemble*, kehendak akan bersatu.⁹¹

Sementara itu menurut Otto Bauer (1924) bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki karakter (watak) yang sama yang terbentuk karena adanya perasaan senasib yang sama (*Gemeinschaft*).⁹² Soekarno menyadari bahwa pada saat kedua Ernest Renan dan Otto Bauer memformulasikan teori terbentuknya suatu bangsa memang masih belum berkembang geopolitik yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi manusia dan relasi antara manusia dengan tempat atau letak tanah dan air (geografi) beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya serta berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupannya yaitu aspek politik, ekonomi dan kultur. Soekarno mengembangkan teori bangsa dari pemikiran Renan dan Bauer dengan mensintesakannya dengan ilmu geopolitik. Menurut Soekarno:

“...Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan Gemeinschaft-nya dan perasaan orangnya, L’ame et le desir”.

Soekarno mengoreksi definisi Otto Bauer maupun Ernest Renan dengan menambahkan unsur geopolitik:

“... Bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang, menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T, tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya!”⁹³

Pemaknaan tentang geopolitik dan proses pembangunan bangsa yang dimaknai oleh Soekarno sebagai totalitas, dan dipertegas Soekarno pada pidato 17 Agustus 1963, yang menyatakan:

91 Ernest Renan (1994). *What is a Nation? (1882)*. UK: Routledge.

92 Otto Bauer (2015). *Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie*. Scholar's Choice.

93 Soekarno (1945). *Wilayah Indonesia Merdeka*. Pidato Soekarno di hadapan Sidang BPUPK, 11 September 1945.

“Dari Sabang sampai Merauke”, empat perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. “Dari Sabang sampai Merauke” bukanlah sekadar menggambarkan satu geographisch begrip. “Dari Sabang sampai Merauke” bukanlah sekadar satu “geographical entity”. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu “national entity”. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan, satu “state entity” yang bulatkuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologis, satu “ideological entity” yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, satu entity of social-consciousness like a burning fire. Dan sebagai yang sudah saya katakan dalam pidato-pidato saya yang lalu, social consciousness kita ini adalah bagian daripada social consciousness of man. Revolusi Indonesia adalah kataku tempohari congruent dengan the social conscience of man!”⁹⁴

Bangsa Indonesia yang hidup di antara dua benua dan dua samudera dalam teori Geopolitik Haushofer berada posisi silang (*cross-position*). Menurut Soekarno, bangsa-bangsa yang berada pada posisi silang, selalu menjadi bangsa yang penting dan strategis dalam bidang politik, ekonomi dan militer. Soekarno mencontohkan posisi strategis Mesir Kuno pada era Firaun. Mesir berada pada posisi silang di antara benua utara dengan Afrika, antara lautan Merah dan lautan tengah. Begitu juga dengan Panama yang menghubungkan Amerika Utara dengan Amerika Selatan dan Samudera Pasifik dengan Samudera Atlantik sejak ribuan tahun menduduki posisi silang yang sangat strategis. Tidak heran menurut Soekarno, peradaban bangsa Aztek yang berkembang di kawasan tengah Meksiko sejak ratusan tahun sudah mempunyai kultur yang tinggi.⁹⁵

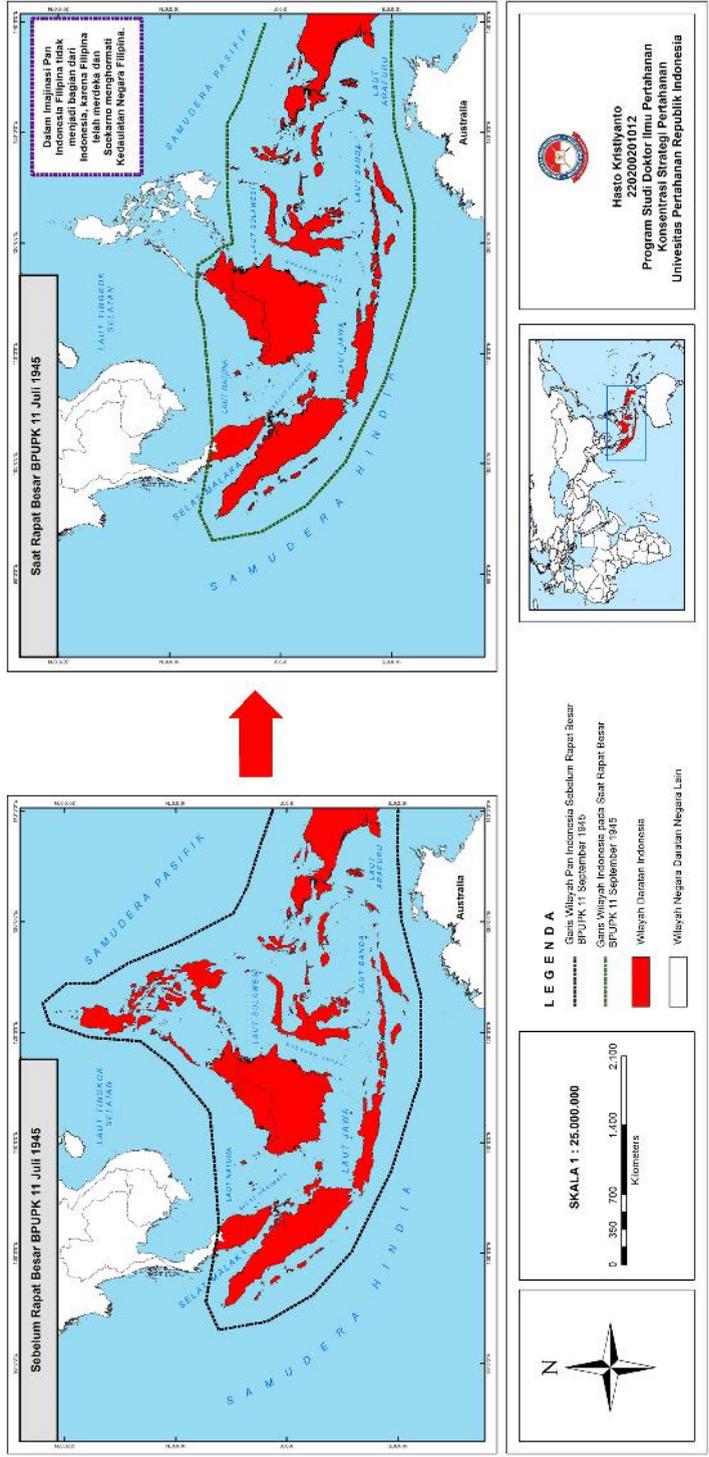
Pandangan Geopolitik Karl Haushofer sangat berpengaruh di kalangan militer Jerman dan Jepang.⁹⁶ Akhir 1930-an, dua institusi bergengsi di Jepang yakni Chiseigaku Kyokai (Institusi Geopolitik

94 Soekarno (1963). *Genta Suara Republik Indonesia (Gesuri)*. Amanat Presiden RI Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-18, Jakarta, 17 Agustus 1963.

95 Soekarno. (1963). *Pahamilah Kondisi Obyektif Bangsa Kita*. Pidato di hadapan Mahasiswa yang akan Mengadakan *Study Tour* ke Sumatera di Istana Negara, Jakarta, 9 Juli 1963.

96 Gerry van Klinken (2010). *5 Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen*. Yogyakarta : LKiS.

PERBANDINGAN IMAJINASI SOEKARNO TENTANG PETA INDONESIA



Gambar 2.4. Imajinasi Soekarno: Pan-Indonesia

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

Jepang) dan Taiheyo Kyokai (Masyarakat Pasifik) mensponsori karya-karya Haushofer untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Bahkan *Die Geopolitik des Pazifischen Ozeans* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang telah dipublikasikan sebanyak tiga kali oleh penerbit bergengsi di Jepang yaitu Iwanami Shoten dan Dai-Ichi Shobo.⁹⁷ Karl Haushofer dalam perjalanannya mengilhami pecahnya Perang Pasifik.

Soekarno memberi catatan kritis pada pandangan Geopolitik Karl Haushofer, Mahan, MacKinder, Hector Charles Bywater dan Ernest Reinhard yang dinilainya memberi sumbangan besar pada lahirnya ekspansi kolonialisme dan imperialisme. Soekarno membuat peta garis hidup imperialisme untuk menggambarkan secara riil ekspansi Barat yang diilhami oleh geopolitik yang bersifat ekspansionis dan invasif. Garis Hidup Imperialisme menggambarkan realitas penjajahan bangsa-bangsa Asia Afrika. Garis Hidup Imperialisme tersebut menjadi dasar pentingnya menggalang solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika melalui KAA.

Menurut Soekarno anti-tesis atas Geopolitik Barat yang ekspansionis-invasif yang melahirkan imperialisme dan kolonialisme adalah nasionalisme. Namun nasionalisme yang lahir di negeri terjajah tidak identik dengan nasionalisme yang lahir di negara-negara kolonialisme yaitu di benua Eropa yang bertendensi sovistik. Nasionalisme yang lahir di negeri-negeri terjajah, menurut Soekarno mempunyai tendensi humanistik atau berperikemanusiaan yang tidak menginginkan terjadinya eksploitasi suatu bangsa terhadap bangsa lain, maupun eksploitasi manusia terhadap manusia lain. Menurut Soekarno, nasionalisme yang dimaksud adalah nasionalisme yang bercita-cita mewujudkan kesejahteraan bersama atau Sosio-Nasionalisme. Melalui Sosio-Nasionalis, Soekarno berharap akan tercipta tatanan dunia baru yang kokoh, kuat dan sehat, di mana semua bangsa dapat hidup dalam suasana damai dan penuh dengan rasa persaudaraan.

Kritik Soekarno terhadap Geopolitik Barat juga disampaikan melalui kesenian. Soekarno mencintai karya seni sebagai manifestasi filsafat budaya Indonesia yang menjunjung tinggi relasi antara manusia dan alam. Menurut Soekarno, manusia yang mampu

97 Christian W. Spang (2006). *Japanese-German Relations, 1895-1945*. London: Routledge.

bersahabat dengan alam merupakan pahlawan. Pandangannya ini tidak terlepas dari ajaran ibunya tentang *Trihita Karana* bahwa manusia akan berbahagia apabila mampu menjaga keseimbangan dengan Sang Pencipta, dengan sesamanya, serta dengan seluruh alam semesta dan seisinya.⁹⁸ Hal ini sekaligus kritik tentang bagaimana pandangan Geopolitik Barat dalam memperlakukan sumber daya alam yang eksploitatif. Demi kepentingan kaum imperialis, kolonialis, dan kapitalis, sumber daya alam dieksploitasi tanpa henti. Dengan pandangan ini jelaslah mengapa ekologi merupakan hal yang penting bagi Soekarno dalam bangunan geopolitiknya. Soekarno mengatakan:

*“SDA harus dikelola oleh anak bangsa. Hutan Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia tidak boleh dieksploitasi oleh kaum kapitalis.”*⁹⁹

*“Sebab kapitalisme sebagai suatu napsu untuk menimbun kekayaan, pada akhirnya menciptakan suatu tata pergaulan hidup yang menghisap. Indonesia merdeka itu nanti sebagai cita-cita untuk melenyapkan kapitalisme itu.”*¹⁰⁰

Selera Soekarno dalam seni pun sangat erat hubungannya dengan pembebasan kaum yang tertindas. Seperti halnya kecintaan Soekarno terhadap wayang yang tidak hanya sebatas panggung hiburan, namun memberi inspirasi bagi dirinya tentang tugas dan kewajiban sebagai pemimpin. Pandangannya ini berseberangan dengan pemikiran Geopolitik Barat yang bertindak dengan dipengaruhi oleh pandangan yang hanya mengedepankan rasio dan material.

2.4 Arah, Ideologi, dan Karya-karya Pemikiran Geopolitik Soekarno

Arah pemikiran Geopolitik Soekarno adalah tatanan dunia baru yang hidup dalam suasana damai dan penuh dengan rasa

98 Wawancara Megawati Soekarnoputri, April 2022.

99 Wawancara Sidarto Danusubroto, Februari 2022.

100 Wawancara Megawati Soekarnoputri, April 2022.

persaudaraan sebagai tugas seluruh umat manusia.¹⁰¹ Tatanan dunia baru yang lepas dari kolonialisme dan imperialisme. Sejak masa pergerakan kemerdekaan, pada saat Soekarno masih remaja menjelang usia kedua puluh satu, Soekarno sudah bercita-cita tentang dunia tanpa imperialisme, kolonialisme dan kapitalisme, "Apa gunanya kita punya pemerintah sendiri, jika ia masih dikuasai oleh penganut-penganut kapitalisme dan imperialisme".¹⁰² Dalam Pledoi Indonesia Menggugat (1930)¹⁰³ maupun dalam Mencapai Indonesia Merdeka (1933)¹⁰⁴ terlihat dalam pemikiran Soekarno bahwa cita-cita bangsa Indonesia bukan hanya mencapai kemerdekaan saja, tetapi juga menciptakan masyarakat Indonesia yang bebas dari imperialisme dan kapitalisme.

Menurut Soekarno, berbagai ketegangan dan konflik dunia terjadi akibat penjajahan. Maka Soekarno konsisten menekankan perlunya persatuan bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin untuk terwujudnya cita-cita dunia tanpa imperialisme, kolonialisme dan kapitalisme. Konsistensi Soekarno menghadapi penjajahan dapat dilihat dari dukungan Indonesia pada perjuangan rakyat Kashmir dan Pakistan, perjuangan rakyat Palestina, perjuangan rakyat Aljazair dan seluruh negara Asia Afrika dan Amerika Selatan yang berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan.

Menurut Soekarno setiap pemikiran dan ideologi tidak bisa ditelan mentah-mentah. Ini berkaitan dengan perbedaan kebudayaan, geografis, kondisi sosial dan sejarah, atau lebih sering dengan apa yang disebut sebagai *strategic culture*. *Strategic culture* ini dalam diri Soekarno lahir sebagai sintesis antara peradaban Nusantara dan dunia dalam kesadaran tentang apa dan siapa bangsa Indonesia dan di mana letaknya. *Strategic culture* melahirkan konsep berkaitan dengan perspektif bangsa terhadap keamanan ataupun cara mempertahankan diri.¹⁰⁵

Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan landasan

101 Soekarno (1960). *Membangun Dunia Kembali (To Build the World Anew)*. Pidato Presiden Republik Indonesia di muka Sidang Umum P B.B. ke-XV tanggal 30 September 1960. Jakarta: Kepustakaan Presiden, Perpustakaan RI.

102 Bernard Dahm (1987). *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES.

103 Soekarno (1930). *Loc. Cit.*

104 Soekarno (1964). *Mencapai Indonesia Merdeka (1933)*. Dalam, *Di Bawah Bendera Revolusi I*. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.

105 Wawancara Megawati Soekarnoputri, April 2022.

filosofis dan *strategic culture* yang mendasari proses pembangunan bangsa atau *nation-building*.¹⁰⁶ Maka ideologi pemikiran Geopolitik Soekarno merujuk pada Pancasila (1945, 1965). Pancasila merupakan sintesis sekaligus solusi dari berbagai pandangan dan ideologi dunia. Pancasila juga merupakan landasan bagi kebijakan politik luar negeri Soekarno menghadapi pertarungan ideologis Perang Dingin. Pada era Perang Dingin, dunia dihantui pertarungan ideologi Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Dalam pidatonya di KTT GNB I dan II, Soekarno mengatakan bahwa distingsi ideologi bukan sumber konflik. Soekarno di depan peserta KTT GNB I mengatakan:

“..... *Pendapat dunia sekarang ini ingin meyakinkan kita, bahwa sumber sebenarnya dari ketegangan dan perselisihan adalah sengketa ideologi antara negara-negara besar. Saya rasa tidak benar.*”¹⁰⁷

Pada KTT GNB II sekali lagi Soekarno meyakinkan kepada para pemimpin dunia kedua dan ketiga yang berbeda dalam keyakinan ideologi mereka. Soekarno mengatakan, “Dalam abad kita ini ideologi-ideologi tidak akan membawa pertikaian negara-negara besar pada peperangan dunia. Apa yang membahayakan perdamaian dunia ialah pertikaian tentang kepentingan-kepentingan nasional di bidang internasional.”

Meskipun perbedaan ideologi bukan sebagai sumber konflik, namun menghadapi dua kutub penganut antara *Declaration of Independence* dan *Communist Manifesto*, Soekarno menawarkan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia yang dapat menjadi dasar piagam universal untuk kesejahteraan, perdamaian dan persaudaraan dunia. Menurut Soekarno konsekuensi penerimaan Pancasila adalah membentuk persahabatan antarbangsa di dunia atas dasar saling menghormati terhadap pandangan filsafat masing-masing bangsa guna membentuk suatu dunia baru tanpa kolonialisme dan imperialisme.

Pandangan Soekarno yang kritis dan melampaui zamannya sangat konsisten dengan ideologi Pancasila dan arah perkembangan zaman yang menurutnya bersifat siklikal. Dari konteks inilah

106 Soekarno (1963). Genta Suara Republik Indonesia (Gesuri). *Loc. Cit.*

107 Soekarno

kemudian Soekarno merumuskan gagasan-gagasannya melalui karya-karya geopolitiknya. Karya-karya tersebut termanifestasikan melalui seni, buku, pidato, maupun catatan-catatan kroniknya. Salah satu karya seni dan catatan kronik Soekarno yang menjadi kritik atas hegemoni, imperialisme, dan kolonialisme Barat adalah 12 Karya Sandiwara (Tonil) dan Surat-Surat dari Ende. Kecintaan Soekarno terhadap seni memiliki makna yang mendalam sebagai media perjuangan, pembebasan kaum tertindas, sekaligus kritis terhadap Barat. Misalnya wayang, menurut Soekarno wayang tidak hanya sebatas panggung hiburan, namun memberi inspirasi bagi dirinya sebagai pemimpin. Sementara itu, catatan kroniknya dapat dilihat dari Buku yang ditulis oleh Guntur Soekarnoputra dengan judul “*Bapakku, Kawanku, Guruku*”.¹⁰⁸

Sumber penelitian geopolitik Soekarno berasal dari 11 buku primer; 19 buku sekunder; 234 pidato Soekarno berdasarkan hasil telaah dari 723 pidato Soekarno dan 72 foto.

Tabel 2.2 Pidato Soekarno yang Terkait dengan Pemikiran Geopolitik

NO	PIDATO	TANGGAL	VARIABEL									
			DEM	TER	SDA	MIL	POL	TEK	KOE	KEP	PER	
1	Lahirnya Pancasila	1 Juni 1945										
2	Ilmu dan Amal, Pidato ketika menerima gelar Dr HC dalam Ilmu Hukum dari UGM, Yogyakarta	19 September 1951										
3	Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru	16 April 1955										
4	Susunlah Konstitusi Jang Benar-Benar Konstitusi Res Publica. Pidato Presiden Republik Indonesia Pada Waktu Membuka Konstituante.	10 November 1956										
5	Rapat Umum Menentang Bom Atom dan Hidrogen	12 Juni 1958										

108 Wawancara Guntur Soekarno Putra, Januari 2022.

NO	PIDATO	TANGGAL	VARIABEL									
			DEM	TER	SDA	MIL	POL	TEK	KOE	KEP	PER	
6	Amanat P.J.M. Presiden Soekarno pada Sidang Penutup Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional Pertama	8 Agustus 1958										
7	Pidato pada pembukaan Perguruan Tinggi Udayana	29 September 1958										
8	Angkatan Perang Bersiaplah	5 Oktober 1958										
9	Bangsa Indonesia cinta akan perdamaian	23 Oktober 1958										
10	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	28 Oktober 1958										
11	Rapat Umum di Saparua	8 November 1958										
12	Sambutan dalam jamuan kenegaraan bersama Presiden India Rajendra Prasad	8 Desember 1958										
13	Pidato untuk menghormati kedatangan Presiden India Rajendra Pasad	18 Desember 1958										
14	Pembukaan Gedung Wisma Nusantara	19 Desember 1958										
15	Pidato menyambut kedatangan Presiden Yugoslavia Joseph Broz-Tito	23 Desember 1958										
16	Pernyataan persahabatan dengan Yugoslavia	28 Desember 1958										
17	Kongres Palang Merah Indonesia	9 Februari 1959										
18	Pidato menyambut kedatangan Ho Chi Minh, pemimpin Vietnam	27 Februari 1959										
19	Pidato sambutan dalam makan malam bersama Ho Chi Minh	28 Februari 1959										
20	Peresmian Pembukaan ITB	2 Maret 1959										
21	Pidato pada jamuan makan malam balasan yang diberikan oleh Ho Chi Minh	7 Maret 1959										
22	Tundukkan Musuh dengan <i>School Of Life</i> Tundukkan Musuh Dengan <i>School of Life</i>	26 Maret 1959										
23	Pidato Presiden pada Malam Upacara Ulang Tahun Badan Kerja Sama Kesenian Mahasiswa Indonesia	16 April 1959										
24	Pidato Presiden pada Hari AURI yang ke XIII di Lapangan Terbang Kemayoran	17 April 1959										
25	Pembukaan Waduk Tjatjaban	19 Mei 1959										

NO	PIDATO	TANGGAL	VARIABEL										
			DEM	TER	SDA	MIL	POL	TEK	KOE	KEP	PER		
26	Pidato Presiden pada Kedatangan Kembali di Tanah Air Sesudah Perjalanan Muhibah Keluar Negeri Istana Merdeka	29 Juni 1959											
27	Dekrit Presiden Republik Indonesia	5 Juli 1959											
28	Pidato Presiden pada Upacara Pelantikan Anggota-Anggota Kabinet Kerja Istana Merdeka	10 Juli 1959											
29	Keterangan Presiden/Perdana Menteri di Depan Sidang pleno DPR	24 Juli 1959											
30	Jawaban Presiden RI Terhadap Pidato J.M. Dendevyn Sarab Dubes Mongolia	15 Agustus 1959											
31	Pelantikan Anggota DPAS, Dewan Perancang Nasional, dan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur-Aparatur Negara	15 Agustus 1959											
32	Penemuan Kembali Revolusi Kita	17 Agustus 1959											
33	Pidato Presiden pada Aubade yang diperdengarkan oleh 10.000 Orang Pelajar Jakarta Istana Merdeka	17 Agustus 1959											
34	Pidato Presiden pada Rapat Raksasa di Medan dalam Perjalanan dari Kutaradja ke Tandjung Pinang	7 September 1959											
35	Pelantikan Duta Besar Turki serta Cekoslavia dan Hungaria.	21 September 1959											
36	Kehormatan Prajurit, Kehormatan Warga Negara yang Disempurnakan	5 Oktober 1959											
37	Pidato Presiden Soekarno Sebagai Perjamuan Negara untuk Delegasi Rencana Colombo	10 November 1959											
38	Penyerahan Panji Korps Komando Angkatan Laut oleh Presiden Istana Merdeka	15 November 1959											
39	Amanat Presiden Berhubung Dengan Pernyataan Negara Dalam Keadaan Perang	16 Desember 1959											

NO	PIDATO	TANGGAL	VARIABEL										
			DEM	TER	SDA	MIL	POL	TEK	KOE	KEP	PER		
40	Pidato Pembukaan Gedung UGM Bulaksumur Yogyakarta	19 Desember 1959											
41	Keadaan keamanan negara	19 Desember 1959											
42	Ilmu adalah Anak Zaman. Kuliah umum di depan para mahasiswa Jakarta di Istana Negara	7 Januari 1960											
43	Amanat Penegasan Presiden di depan Sidang Istimewa Depernas	9 Januari 1960											
44	Abdikanlah Hidupmu Kepada Indonesia, Kuliah umum di hadapan mahasiswa Jakarta Raya di Istana olahraga senayan	10 Januari 1960											
45	Pidato Presiden di Musyawarah Nasional Perdamaian Bandung	25 Januari 1960											
46	Wejangan Presiden Kepada Para Hakim, Jaksa, Polisi, serta Petugas dari Jawatan Bea Cukai dan Imigrasi	27 Januari 1960											
47	Amanat Presiden pada Upacara Pelantikan Perwira Cadangan Wajib Militer Darurat	29 Januari 1960											
48	Amanat Presiden pada Pemanangan Tiang Panjang Pertama Stadion Utama Asian Games Senayan	8 Februari 1960											
49	Pidato Bung Karno Terhadap Raja dan Ratu Thailand pada Jamuan Makan Malam	9 Februari 1960											
50	Pidato Presiden pada Rapat Rak-sasa Kedadatangan PM Uni Soviet Nikita Khrushchov	22 Februari 1960											
51	Pidato Presiden Kunjungan PM Khrushchov ke Pulau Bali	25 Februari 1960											
52	Amanat Presiden pada Resepsi Peringatan Setengah Abad Hari Wanita Sedunia	8 Maret 1960											
53	Amanat Paduka Presiden pada Penaikan Pangkat Komodor RE Martadinata Menjadi Laksamana Muda	6 Mei 1960											
54	Pidato Presiden pada Pertemuan dengan para Peserta Sayembara Proyek Tugu Nasional	27 Juni 1960											
55	Pidato pada Musyawarah Dinas Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan para Gubernur	28 Juni 1960											

NO	PIDATO	TANGGAL	VARIABEL											
			DEM	TER	SDA	MIL	POL	TEK	KOE	KEP	PER			
56	Amanat Presiden pada Penyerahan Bintang Lenin untuk Perdamaian	28 Juni 1960												
57	Amanat Presiden pada Wingday AURI Lapangan Terbang Adisutjipto Yogyakarta	30 Juni 1960												
58	Amanat Presiden pada Upacara Pancawarsa Kepolisian Negara di Alun-Alun Lor Yogyakarta	1 Juli 1960												
59	Koperasi adalah Wahana ke Alam Sosialisme	12 Juli 1960												
60	Ceramah Presiden pada Malam Pertemuan para Pengajar dan Penjabat Dept Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan	20 Juli 1960												
61	Pidato Presiden pada Pertemuan Ramah Tamah dengan para Dokter Hewan Seluruh Indonesia	31 Juli 1960												
62	Amanat Presiden pada Sidang Pleno Istimewa Depernas di Bandung	13 Agustus 1960												
63	Amanat Negara pada Pembukaan Sidang DPRGR Diucapkan oleh Presiden Soekarno	16 Agustus 1960												
64	Jalannya Revolusi Kita	17 Agustus 1960												
65	Amanat Presiden pada Upacara Pelantikan Soekarno sebagai Dubes RRT	22 Agustus 1960												
66	Pidato Presiden Soekarno pada Peserta Konferensi WHO untuk Asia Tenggara	28 Agustus 1960												
67	Amanat Presiden pada Waktu Pelantikan Pengurus Besar Front Nasional	8 September 1960												
68	Pidato Presiden di Lapangan Terbang Kemayoran Sebelum Keberangkatan Beliau ke Sidang Umum PBB	26 September 1960												
69	<i>To Build A World A New.</i> Pidato Presiden Majelis Umum PBB ke-15	30 September 1960												
70	Pidato Presiden Setibanya Kembali di Tanah Air dari Misi ke Sidang Umum PBB Kemayoran Airport Jakarta	15 Oktober 1960												
71	Wejangan Presiden pada Peresmian Pemancangan Dasar Pabrik Pupuk di Palembang Sumatera Selatan	4 November 1960												

NO	PIDATO	TANGGAL	VARIABEL											
			DEM	TER	SDA	MIL	POL	TEK	KOE	KEP	PER			
72	<i>Speech By President at A Return Dinner Given By President Ayub Khan Of Pakistan</i>	7 Desember 1960												
73	Pidato Presiden pada <i>Indonesian Floating Fair</i> Sebelum Keberangkatannya Keluar Negeri dengan Kapal Tampo Mas Tanjung Priok Jakarta	14 Desember 1960												
74	Pidato Jawaban Presiden RI atas Pidato Abdol Ahad Dara Dubes Iran untuk Indonesia Pada Upacara Penyerahan Surat Kepercayaan	27 Desember 1960												
75	Amanat Presiden pada Upacara Pelantikan Wakil-Wakil Ketua DPR-GR	5 Januari 1961												
76	Pidato Presiden pada Upacara Hari Armada ALRI di Darmaga AL Surabaya	6 Januari 1961												
77	Pidato Presiden pada Upacara Peresmia Pusat Hidrolistik Cikalong Bandung	17 Januari 1961												
78	Pidato Presiden pada Apel Besar di Lapangan Tegallega Bandung	18 Januari 1961												
79	Pidato Presiden di hadapan para Peserta Seminar Wanita Tani	19 Januari 1961												
80	Pidato Presiden pada Pelantikan Panitia Penampung Orang Asing	8 Maret 1961												
81	Amanat Perintah Presiden dimuka para Wakil Organisasi-Organisasi Kepanduan Seluruh Indonesia	9 Maret 1961												
82	Amanat Presiden pada Sidang Pleno Pengurus Besar Front Nasional Ke-II	10 Maret 1961												
83	Amanat Presiden pada Konferensi Kepala-Kepala Perwakilan RI se Asia Pasifik dan Afrika Timur Tengah	4 April 1961												
84	Pidato Presiden pada Pelantikan Iwa Kusumasumantri sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dalam Kabinet Kerja	5 April 1961												

NO	PIDATO	TANGGAL	VARIABEL										
			DEM	TER	SDA	MIL	POL	TEK	KOE	KEP	PER		
85	Amanat Presiden Dihadapan para Olahragawan Peserta Training Centres untuk Pertandingan Thomas Cup 1961 Asian Games 1962 di Gedung OR Siliwangi Bandung	9 April 1961											
86	<i>Speech By President at The Opening Of The Asian-African Solidarity Council Conference Bandung</i>	10 April 1961											
87	<i>Speech By President Before Council For World Affairs Los Angeles</i>	21 April 1961											
88	Pidato Menyambut Batalion Garuda II dari Kongo	24 Mei 1961											
89	Amanat pada Pelantikan Badan Kerja Depernas oleh Paduka Presiden RI Gedung Depernas Jakarta	2 Juni 1961											
90	Amanat pada Presiden Djuanda Pada Pembukaan Kursus Pemandu Pariwisata Dewan Tourisme Indonesia di Hotel Duta Indonesia Jakarta	20 Juni 1961											
91	Usaha Indonesia dalam membangun hubungan dengan negara lain	2 Juli 1961											
92	Pidato pada Rapat Raksasa di Lapangan Merdeka Medan	30 Juli 1961											
93	Revolusi–Sosialisme Indonesia–Pimpinan Nasional (Resopim)	17 Agustus 1961											
94	Pidato Presiden pada Waktu Penyerahan Jabatan Presiden RI kepada J Leimena Wakil I Menteri Pertama	28 Agustus 1961											
95	Persahabatan, Perdamaian, dan Keadilan Sosial di antara Bangsa-Bangsa. Pidato Presiden Soekarno pada Konperensi Negara-negara Nonblok 1 di Beograd	1 September 1961											
96	Pidato Presiden pada Waktu Tiba Kembali di Tanah Air dari Menghadiri KTT Negara Non Blok di Beograd	21 September 1961											
97	Pidato Presiden pada Penerimaan Kembali Pimpinan Negara RI dari pada Presiden J Leimena	26 September 1961											
98	Pidato Presiden pada Pembukaan PON V Bandung	30 September 1961											

NO	PIDATO	TANGGAL	VARIABEL										
			DEM	TER	SDA	MIL	POL	TEK	KOE	KEP	PER		
99	Pidato Presiden pada Aubade Anak-Anak Sekolah untuk Menghormat Kunjungan Presiden Zawadzky dari Polandia	6 Oktober 1961											
100	<i>Farewel Speech By President at The Departure Of President Aleksander Zawadzki Of Poland</i>	11 Oktober 1961											
101	Pidato Presiden pada Pencangkulan Pertama Musim Penanaman Padi 1961 dihadapan para Petani Rengasdengklok Karawang	13 Oktober 1961											
102	Pidato Presiden pada HUT BRI-MOB Ke-XV	14 November 1961											
103	Ceramah Presiden di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat Bandung	30 November 1961											
104	Amanat Presiden kepada para Peserta Konferensi Gula	12 Desember 1961											
105	Sambutan Presiden pada Peresmian Gedung Departemen Perindustrian Rakyat	18 Januari 1962											
106	Pidato Presiden pada Upacara Pelantikan Laksamana Muda Omar Dhani menjadi KSAU dan Perintah Harian Presiden Panglima Tertinggi	22 Januari 1962											
107	Pidato Presiden pada Penyerahan Hasil Pelelangan Perhiasan untuk <i>Fonds</i> Pembebasan Irian Barat	27 Maret 1962											
108	Amanat Presiden pada Hari Peringatan Dwi Windhu AURI dan Penerbangan Nasional	9 April 1962											
109	Pidato Presiden pada Rapat Rak-sasa Gubernur Palembang	10 April 1962											
110	Amanat PYM Presiden Mengenai Padi Gotong Royong	22 April 1962											
111	Amanat Peringatan Hari 1 Mei 1962	1 Mei 1962											
112	Tugas Kita: Angkatan Perang Yang Kuat. Amanat pada upacara pelantikan para penerbang AURI	16 Mei 1962											
113	Tugas Kita: Angkatan Perang yang Kuat	19 Mei 1962											
114	Amanat Peringatan Ulang Tahun ke-435 Jakarta	22 Juni 1962											

NO	PIDATO	TANGGAL	VARIABEL											
			DEM	TER	SDA	MIL	POL	TEK	KOE	KEP	PER			
115	Ini Puncak Kegegagempitaan Revolusi. Amanat pada pelantikan Kasad baru, dua orang duta besar dan seorang duta	23 Juni 1962												
116	Amanat Pelantikan Panitia Begera Mengenai Peninjauan Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum	2 Juli 1962												
117	Tahun Kemenangan (Takem)	17 Agustus 1962												
118	Doa Restu PYM Presiden Kepada para Training Centre Asian Games ke-IV	22 Agustus 1962												
119	Ilmu Teknik Harus Mengabdikan Masyarakat Adil Makmur, Pidato ketika menerima DR HC dalam Ilmu Teknik dari ITB	13 September 1962												
120	Kumpulkan Ilmu Pengetahuan untuk Pembangunan. Amanat pada Hari Sarjana	29 September 1962												
121	Pidato Presiden Soekarno pada Pelantikan Dewan Pengawas dan Dewan Pimpinan Lembaga Kantor Berita Nasional	16 Oktober 1962												
122	<i>Speech to H.E President of Mexico Senor Don Adolpo Lopez Mateoz</i>	19 Oktober 1962												
123	Abadikan Ilmu Pengetahuan Kepada Tanah Air dan Bangsa, Amanat pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional di Yogyakarta	22 Oktober 1962												
124	Persembahkan Hidupmu Kepada Tanah Air dan Bangsa, Ceramah di hadapan para mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Sitinggil	22 Oktober 1962												
125	Pidato pada Resepsi Pembukaan Kongres (PGR)	26 November 1962												
126	Pidato PYM Presiden Soekarno pada Rapat Raksasa Kunjungan Pangeran Norodom Sihanouk	30 November 1962												
127	Tanpa Angkatan Bersenjata, Tidak Satu Pun Negara Selamat! Amanat kepada para siswa Sesoad di Istana Bogor	15 Desember 1962												
128	Pidato Presiden Soekarno pada Musjawarah Besar Persatuan Karjawan Perusahaan Negara	16 Desember 1962												
129	Pidato Presiden Soekarno pada Rapat Raksasa di Surabaya (Trikora)	19 Desember 1962												

NO	PIDATO	TANGGAL	VARIABEL											
			DEM	TER	SDA	MIL	POL	TEK	KOE	KEP	PER			
130	Buruh dan Tani Soko Guru Pembangunan Sosialisme, Amanat Presiden/Panglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi dan Bapak Marhaenisme pada Kongres PETANI di Semarang	20 Desember 1962												
131	Pidato PYM Presiden pada Malam Amal Konperensi Wartawan Asia Afrika	29 Desember 1962												
132	Pidato Presiden Soekarno pada Konferensi Wartawan Asia Afrika	29 Desember 1962												
133	Pidato Presiden Soekarno pada Waktu Kedatangan PYM Presiden Cekoslowakia Antonin Novotny	12 Januari 1963												
134	Amanat kepada Putra dan Putri dari Irian Barat	26 Januari 1963												
135	Pidato pada Upatjara Pemberian Bintang Djasa kepada Para Geriljawan dalam Membebaskan Irian Barat	13 Februari 1963												
136	Pidato pada peringatan 100 tahun Palang Merah Indonesia	8 Maret 1963												
137	Amanat pada Resepsi Pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia Istana Negara	12 Maret 1963												
138	Amanat pada Penutupan Konferensi Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia (IPPI)	25 Maret 1963												
139	Pidato pada Jamuan Makan Kenegaraan dengan Li Shaochi	19 April 1963												
140	Amanat pada Pemantjangan Tiang Pertama Gedung Departemen Store Sarinah	23 April 1963												
141	<i>Speech at the Opening of the Preparatory Conference of the Games of the New Emerging Forces</i>	27 April 1963												
142	Pidato pada Rapat Raksasa di lapangan Merdeka untuk menyambut kembalinya Irian Barat ke dalam kekuasaan Indonesia.	1 Mei 1963												
143	Pidato pada Upatjara Pembubaran Komando Mandala di Makasar	6 Mei 1963												
144	Amanat pada Kongres Wani di Senajan Gelora Bung Karno	13 Mei 1963												
145	Pidato pada Rapat Raksasa di Bandung	20 Mei 1963												

NO	PIDATO	TANGGAL	VARIABEL									
			DEM	TER	SDA	MIL	POL	TEK	KOE	KEP	PER	
146	Pidato pada Malam Tasyakur Irian Barat	2 Juni 1963										
147	Amanat pada Penutupan Peringatan Hari Bank	6 Juni 1963										
148	Angkatan Bersenjata Kompak, Tugas-Tugas Sukses! Amanat pada Hari Kepolisian	1 Juli 1963										
149	Amanat pada Mukhtamar Sarjana-sarjana Pertanian dan Kehutanan	20 Juli 1963										
150	Genta Suara Revolusi Indonesia	17 Agustus 1963										
151	Pidato pada Pemancangan Tiang Pertama Gedung Herbarium	19 Agustus 1963										
152	Amanat pada Upacara Pengnugrahan Duaja Cakrabirawa	9 September 1963										
153	Pidato pada Misi Kesenian Thailand	13 September 1963										
154	Amanat pada Resepsi Pembukaan Musyawarah Nasional Maritim	23 September 1963										
155	Amanat pada Hari Angkatan Perang ke-18	5 Oktober 1963										
156	Pidato pada Upatjara Peresmian Pembukaan Jalan Jakarta	21 Oktober 1963										
157	Pidato pada Pawai Adat untuk Menghormati Presiden Republik Federasi Jerman	1 November 1963										
158	Amanat pada Pembukaan Markas Besar Ganefo di Senajan	4 November 1963										
159	Pidato pada Waktu Menerima Tanda Pengayoman Hukum	7 November 1963										
160	Amanat pada Peringatan Hari Pahlawan di Gelora Bung Karno	10 November 1963										
161	Pidato pada Penutupan Ganefo I di Stadion Utama GBK	22 November 1963										
162	Pidato pada Peletakan Batu Pertama Gedung Kantor Pusat Pos dan Telegraf	26 November 1963										
163	Pidato pada Pelantikan Saudara Adam Malik menjadi Menteri Perdagangan	4 Desember 1963										
164	Pidato pada Kongres Para <i>Ingenieur</i> dan Pemberian Gelar Pembangunan Agung	12 Desember 1963										

NO	PIDATO	TANGGAL	VARIABEL											
			DEM	TER	SDA	MIL	POL	TEK	KOE	KEP	PER			
165	Amanat pada Pembukaan Musjawarah Besar Angkatan 45 di Istana Negara	19 Desember 1963												
166	Pidato pada Pelantikan Saudara A.M Hanafi menjadi Duta Besar RI untuk Cuba	19 Desember 1963												
167	Anggota Angkatan Perang Yang Baik, Cinta Tanah Air. Amanat pada pelantikan para taruna AMN menjadi perwira di Magelang	23 Desember 1963												
168	Pidato pada Malam Amal Mengumpulkan Dana Mendirikan Rumah Sakit Kanker	11 Februari 1964												
169	Amanat pada Malam Peringatan Hari Wanita Internasional	9 Maret 1964												
170	Amanat pada Penutupan Konperensi Presidium Kabinet Kerja	16 Maret 1964												
171	Angkatan Darat, Berikan Sumbangan Bersejarah dalam Perjuangan Kita. Amanat pada konferensi para panglima Kodam seluruh Indonesia di Markas Besar Ganefo Senayan	17 Maret 1964												
172	Amanat pada malam menjelang Festival Film Asia Afrika	18 Maret 1964												
173	Amanat pada Pelantikan Anggota-anggota Dewan Produksi Nasional	26 Maret 1964												
174	Amanat Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI pada Hari Peringatan Penerbangan Nasional	9 April 1964												
175	Amanat pada Apel Besar Sukarelawan Berhubung Dengan Konfrontasi	13 April 1964												
176	Amanat pada Perayaan Peringatan Hari 1 Mei di GBK	1 Mei												
177	Amanat pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Istana Olahraga	2 Mei 1964												
178	Amanat Presiden pada Appel Besar Sukarelawan Pengganyangan Malaysia	3 Mei 1964												
179	Amanat pada atlet Thomas Cup	5 Mei 1964												
180	Amanat pada Pemberian Restu Kepada Team Ekspedisi	7 Mei 1964												
181	Amanat pada Hari Kebangkitan Nasional dan Peresmian Brigade Tempur	20 Mei 1964												

NO	PIDATO	TANGGAL	VARIABEL										
			DEM	TER	SDA	MIL	POL	TEK	KOE	KEP	PER		
182	Kerjakanlah Kewajiban Tanpa Menghitung Akibatnya. Amanat pada malam resepsi para Sarjana Hukum ABRI di Istana Bogor	31 Mei 1964											
183	Amanat pada Peringatan Hari Lahirnja Pancasila di Gedung Departemen Luar Negri	1 Juni 1964											
184	Amanat Kepada Peserta Kongres Kerja Lembaga Pembina	18 Juli 1964											
185	Pidato Menerima Team Operasi Baruna	29 Juli 1964											
186	Amanat pada Malam Tirakatan/ Kebangkitan AURI	30 Juli 1964											
187	Syarat Mutlak Bangsa yang Kuat, Mental yang Berdebar-Debar. Amanat pada Pelantikan Perwira-perwira ALRI di halaman Istana Negara	15 Agustus 1964											
188	Pidato pada Pembukaan Jalan-silang Monumen Nasional	16 Agustus 1964											
189	Tahun Vivere Pericoloso (Tavip)	17 Agustus 1964											
190	Amanat pada Pawai Adat di Bali Berkenaan Dengan Kunjungan Tamu Agung Pangeran Norodom Sihanuk	20 Agustus 1964											
191	<i>Speech at the Afro-Asian Congress of Pediatrics</i>	25 Agustus 1964											
192	Amanat pada Pemancangan Tiang Bendera Pertama di Gedung Planetarium	3 September 1964											
193	Amanat pada Peresmian Pangkalan Udara di Angkatan Laut di Waru	10 September 1964											
194	Amanat pada Pelantikan Brigadir Jendral Sukandro	14 September 1964											
195	Era Konfrontasi. Pidato Presiden Soekarno pada Konperensi Negara-negara Nonblok II di Kairo	6 Oktober 1964											
196	Pidato pada Waktu Tamu Agung dari Mali	8 November 1964											
197	Amanat pada Peringatan Hari Pahlawan	10 November 1964											
198	Amanat dihadapan Awak Kapal Dewa Ruci dan Kader Revolusi	12 November 1964											

NO	PIDATO	TANGGAL	VARIABEL										
			DEM	TER	SDA	MIL	POL	TEK	KOE	KEP	PER		
199	Pidato Dihadapan Para Utusan Jang Telah Kembali dari New York	21 November 1964											
200	Amanat pada Kongres Jalasnastri di GBK	23 November 1964											
201	Pidato pada Peringatan Ulang Tahun Ganefo	25 November 1964											
202	Pidato pada Pelantikan Panitia Galangan Kapal "Carya Putra Dockyard"	3 Desember 1964											
203	Amanat pada Musyawarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	14 Desember 1964											
204	Amanat pada Sarjana-sarjana Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan	14 Desember 1964											
205	Amanat pada Musyawarah Gerakan Transmigrasi	28 Desember 1964											
206	Amanat Presiden pada Proklamasi Buta Huruf Seluruh Indonesia	31 Desember 1964											
207	Amanat Presiden pada Upacara Peletakan Batu Pertama Proyek Reaktor Atom di Tangerang	16 Januari 1965											
208	Pidato Presiden pada Waktu Pemberian Bintang Jasa Dokter-dokter dari RRT	16 Januari 1965											
209	Pidato Presiden Soekarno pada Upacara Pelantikan Dubes Belanda	17 Januari 1965											
210	Amanat Presiden di Hadapan Semua Peserta Musyawarah Besar Kekeluargaan AKRI	6 Maret 1965											
211	Amanat Presiden pada Upacara Pembukaan SESKOAL	19 Maret 1965											
212	Amanat Presiden pada Pertemuan dengan Usahawan Perkebunan Swasta	22 Maret 1965											
213	Pokok Kemerdekaan Adalah Tanggung Jawab. Amanat di hadapan para wakil veteran seluruh Indonesia di Istana Bogor	27 Maret 1965											
214	Pidato Presiden pada Jamuan Makan Balasan dari PM Kim Il Sung	14 April 1965											

NO	PIDATO	TANGGAL	VARIABEL										
			DEM	TER	SDA	MIL	POL	TEK	KOE	KEP	PER		
215	Pidato Presiden pada Rapat Rak-sasa Dasawarsa Asia Afrika	19 April 1965											
216	Pidato Presiden pada Pemancangan Tiang Pertama Rumah Sakit Kanker	20 Mei 1965											
217	Amanat Presiden pada Pere-smian Lembaga Pertahanan Nasional	20 Mei 1965											
218	Amanat Presiden Soekarno pada Rapat para Panglima Angkatan Darat Seluruh Indonesia	28 Mei 1965											
219	Kuliah Presiden pada Lembaga Pertahanan Nasional	31 Mei 1965											
220	Amanat Presiden pada Peletakan Batu Pertama Gedung Veteran	9 Juni 1965											
221	Menuju <i>Self Supporting</i> di Lapangan Sandang dan Pangan	10 Juni 1965											
222	Amanat Presiden pada Semua Tingkat Pengurus Front Nasional	3 Agustus 1965											
223	Tahun Berdikari (Takari)	17 Agustus 1965											
224	Amanat Presiden pada Peman-cangan Tiang Pertama Pabrik Listrik Tenaga Uap	23 Agustus 1965											
225	Amanat Presiden pada Pelanti-kan Majelis Pendidikan Nasional	11 September 1965											
226	Amanat Presiden pada Musya-warah Besar Sandang ke-1	16 September 1965											
227	Amanat Presiden pada Para Sar-jana Pertanian dan Sarjana Kimia	26 September 1965											
228	Amanat Presiden kepada Seluruh Rakyat Indonesia Berhubung dengan Peristiwa Gerakan 30 September disiarkan lewat RRI	3 Oktober 1965											
229	Republik Indonesia Tidak Gugur. Amanat pada pelantikan Mayor Jendral Soeharto menjadi Ment-eri/Panglima Angkatan Darat di Istana Negara	16 Oktober 1965											
230	Amanat Presiden pada Sidang Panca Tunggal Seluruh Indonesia	23 Oktober 1965											
231	Pegang Garis Revolusi Kita! Amanat di hadapan para pangli-ma empat Angkatan seluruh In-donesia dan para wartawan luar dan dalam negeri di Istana Bogor	20 November 1965											

NO	PIDATO	TANGGAL	VARIABEL									
			DEM	TER	SDA	MIL	POL	TEK	KOE	KEP	PER	
232	Revolusi Adalah Inspirasi dari Masyarakat. Amanat di hadapan para anggota Golongan Karya Front Nasional di Istana Bogor	11 Desember 1965										
233	Angkatan Bersenjata, Alat Kekuasaan Negara. Amanat di hadapan para panglima seluruh Indonesia	12 Maret 1966										
234	Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah (Jas Merah)	17 Agustus 1966										

Sumber: ANRI diolah oleh Peneliti (2022)

Di antara karyanya yang menjelaskan dengan komprehensif tentang landasan dan cakupan pembahasan geopolitik ialah Panca Azimat Revolusi:

- a. Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme,
- b. Lahirnya Pancasila,
- c. Manipol-USDEK, tahun 1959;
- d. Trisakti, tahun 1964; dan
- e. Berdikari (Berdiri di atas Kaki Sendiri), tahun 1965.

Dalam karyanya tentang Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, Soekarno memandang bahwa ketiga faham tersebut merupakan roh perjuangan bagi bangsa Asia yang terjajah. Penyatuan ketiga faham tersebut memiliki tugasnya masing-masing, dan ditegaskan¹⁰⁹:

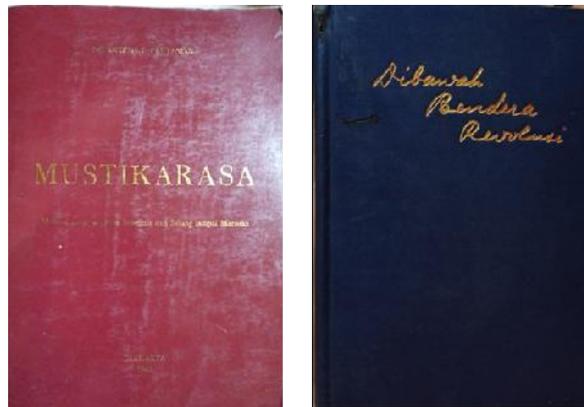
“Dapatkah dalam tanah jajahan pergerakan Nasionalisme itu dirapatkan dengan pergerakan Islamisme yang pada hakekatnya tiada bangsa, dengan pergerakan Marxisme yang bersifat perjuangan Internasional? Dapatkah Islamisme itu, ialah suatu agama, dalam politik jajahan bekerja bersama-sama dengan Nasionalisme yang mementingkan bangsa, dengan materialismenya Marxisme yang mengajar perbendaan?”

Dalam pidato Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menegaskan bahwa Pancasila lahir dari pengetahuan

109 Soekarno, (1964). Di Bawah Bendera Revolusi. *Op. Cit.*

geopolitik. Dalam proses itu Soekarno memiliki peran yang sangat penting di dalam merumuskan Pancasila sebagai ideologi geopolitik dunia. Buku karya pemikiran Geopolitik Soekarno lainnya adalah:

- a. Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia, 1947;
- b. Di Bawah Bendera Revolusi, 1959;
- c. Mustika Rasa: Resep Masakan Indonesia Warisan Soekarno, 1967 (Pemrakarsa); dan
- d. Soekarno dan ABRI: Kumpulan Pidato Bung Karno di hadapan ABRI, 1989 (Dikumpulkan Penerbit).



Gambar 2.5. Buku *Mustika Rasa* dan *Di Bawah Bendera Revolusi*

Sumber: Dokumentasi oleh Peneliti, 2021.

Sedangkan pidato-pidato Soekarno yang memuat pemikiran geopolitik sebanyak 234 pidato. Di antara pidato-pidato tersebut, yaitu:

- a. “*Unity in Diversity Asia Africa*”, pidato pada Konferensi Asia Afrika, 18 April 1955;
- b. “Membangun Dunia Kembali” (*To Build the World Anew*), pidato di Sidang Umum PBB ke-XV pada 30 September 1960; dan
- c. “*New Emerging Forces*”, pidato di KTT Non-Blok tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia.

BAB 3

KONSTRUK TEORI *PROGRESSIVE GEOPOLITICAL COEXISTENCE* : PERTAUTAN GEOPOLITIK, KEPENTINGAN NASIONAL, DAN PERTAHANAN NEGARA

Bab ini membahas tentang konstruk teoretik Geopolitik Soekarno yang diberi nama *Progressive Geopolitical Coexistence (PGC)*. Pembahasan mencakup *body of knowledge*; Tujuh variabel Geopolitik Soekarno; Posisi pemikiran Geopolitik Soekarno dalam peta geopolitik klasik dan kontemporer; Operasionalisasi 7 variabel Geopolitik Soekarno, Kepentingan Nasional, dan Pertahanan Negara; Pengukuran 7 variabel geopolitik Soekarno, kepentingan nasional, dan pertahanan negara; dan *Progressive Geopolitical Coexistence* sebagai konstruksi pemikiran Geopolitik Soekarno.

Selanjutnya seberapa penting kedudukan konstruk teori PGC menjadi diskursus dalam perkembangan geopolitik kontemporer serta pengaruhnya terhadap kepentingan nasional dan pertahanan negara.

3.1 *Body of Knowledge* dan Tujuh Variabel Geopolitik Soekarno

Epistemologi pemikiran Geopolitik Soekarno merupakan sintesis antara pemikiran asli Soekarno dengan pemikiran Geopolitik Barat dan pemikiran Geopolitik Timur. Latar belakang yang mempengaruhi pemikiran Geopolitik Soekarno adalah imperialisme, kolonialisme dan Perang Dingin. Dalam *setting* situasi ini Soekarno menjadikan Pancasila sebagai *lifeline* bagi dunia yang bebas dari perang. Pancasila juga merupakan roh zaman (*zeitgeist*) dari alam pikir Nusantara.

Berangkat dari pijakan tersebut Soekarno mendefinisikan Geopolitik Indonesia sebagai *geografische constellatie, archipelago country*. Indonesia merupakan negara kepulauan, tanah air yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang terletak di antara dua benua dan dua samudera. Dalam perspektif negara kepulauan, daratan kepulauan dengan seluruh keunikannya disatukan oleh lautan menjadi satu kesatuan wilayah Indonesia. Posisi strategis negara kepulauan yang diapit antara dua benua dan dua samudera tersebut secara alamiah membawa dampak sosial sebagai konsekuensi logis dalam lanskap geopolitik.¹¹⁰

Lingkungan eksternal sekelilingnya bersifat dinamis dengan intensitas pengaruh yang tidak bisa diabaikan.¹¹¹ Dalam realitas yang dinamis tersebut pemikiran Geopolitik Soekarno diwujudkan dalam Deklarasi Djuanda dengan laut sebagai pemersatu daratan kepulauan Indonesia. Prinsip-prinsip *Archipelago Country* disampaikan Soekarno dalam pidatonya pada hari Armada, 6 Januari 1961¹¹² dan Rapat Panglima ALRI, 17 Juni 1965, berikut:¹¹³

“...Tradisi kuno kita ialah... menguasai lautan, bahwa negara kita hanya bisa menjadi besar dan kuat jikalau ada persatuan perhubungan penguasaan yang mudah dari lautan... kita di dalam zaman dahulu itu adalah bangsa yang menguasai laut, laut adalah al bahar. Kita bangsa pelaut karena kita menguasai laut..... Saya telah jelaskan bahwa geopolitisch bedien... bangsa Indonesia harus jadi bangsa maritim... geografi kita, itu sebagian dari geopolitik, menunjukkan tanah air kita adalah satu kepulauan, archipelago... untuk itu maka saya bangunkan Kompartemen Maritim dengan ada Departemen Perhubungan Laut, ada Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut, Departemen Perindustrian Maritim, untuk membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan kuat. Manakala kita menjadi satu negara maritim... bangsa maritim yang

110 A. Evan Laksmna, (2011). The Enduring Strategic Trinity: explaining Indonesia's Geopolitical Architecture. *Journal of the Indian Ocean Region*, volume 7, no. 1, pp. 95-116

111 R.M. Sunardi (2004). *Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Kuatemit Adidarma

112 Soekarno. (1961). *Amanat Pada Hari Armada di Dermaga Angkatan Laut di Surabaya*, 6 Januari 1961.

113 Soekarno. (1965). *Amanat Presiden Soekarno pada Rapat Panglima ALRI di Jakarta*, 17 Juni 1965.

kuat... jikalau kita mempunyai Angkatan Laut sebagai military power,... nation building bahari... bukan hanya perhubungan laut saja, bukan saja usaha yang efektif untuk menggali segala kekayaan daripada laut, perikanan dan pengolahan laut, bukan hanya usaha-usaha untuk mengadakan perlengkapan-perengkapan industriil daripada kemaritiman, tidak! Di samping itu harus ada Angkatan Laut sebagai military power yang sekuat-kuatnya... Kepercayaan bangsa Indonesia bahwa seorang Raja Indonesia hanyalah bisa kuat, jikalau kawin dengan Nyi Roro Kidul. Lantas saya ceritakan itu sekedar satu simbolik. Arti yang dalam ialah, bahwa hanya jikalau Sang Raja, Sang Ratu atau kerajaan atau negara itu 'kawin' dengan laut, barulah bisa menjadi satu negara atau raja yang kuat”.

Pemaknaan tentang pemikiran Geopolitik Soekarno sebagai *archipelago country* juga disampaikan oleh Soekarno pada pidato 17 Agustus 1963. Soekarno mengatakan:

“Dari Sabang sampai Merauke, –empat perkataan ini bukanlah sekedar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar menggambarkan satu geographisch begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan, satu state entity yang bulat-kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologis, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, –satu entity of social-consciousness like a burning fire. Dan sebagai yang sudah saya katakan dalam pidato-pidato saya yang lalu, social consciousness kita ini adalah bagian daripada social consciousness of man. Revolusi Indonesia adalah kataku tempo hari congruent dengan the social conscience of man!”¹¹⁴

Konsep pemikiran Geopolitik Soekarno adalah geopolitik sebagai kesatuan kebangsaan, kenegaraan, tekad atau ideologis, dan satu kesatuan cita-cita sosial atau *social consciousness of man*. Tujuan Geopolitik Soekarno adalah mewujudkan internasionalisme, perikemanusiaan, persahabatan antar-bangsa, perdamaian dunia

114 Soekarno (1963). Genta Suara Republik Indonesia (Gesuri). *Loc. Cit.*

dan keadilan bagi seluruh warga dunia. Menurut Soekarno tujuan-tujuan geopolitik tersebut hanya dapat dicapai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memegang teguh sikap internasionalisme. Prinsip ini disampaikan Soekarno dalam Sidang PBB, 30 September 1960 sebagai berikut:

“Antara Nasionalisme dan Internasionalisme tidak ada perselisihan atau pertentangan. Memang benar, bahwa internasionalisme tidak akan dapat tumbuh dan berkembang selain di atas tanah yang subur dari nasionalisme. Bukankah Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu merupakan bukti yang nyata dari hal ini? Dahulu ada Liga Bangsa-Bangsa. Kini ada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nama-nama itu sendiri menunjukkan bahwa bangsa-bangsa menginginkan dan membutuhkan suatu badan internasional, di mana setiap bangsa mempunyai kedudukan yang sederajat. Internasionalisme sama sekali bukan kosmopolitanisme, yang merupakan penyangkalan terhadap nasionalisme, yang anti-nasional dan memang bertentangan dengan kenyataan.”¹¹⁵

Dalam Geopolitik Soekarno, internasionalisme, dan kemanusiaan memiliki peran utama mewujudkan perdamaian dunia. Internasionalisme berperan sebagai pengikat rasa untuk saling memiliki dan bertanggung jawab terhadap perdamaian negara lain. Rasa tanggung jawab ini bersifat universal mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan sebagai satu kesatuan kebangsaan, kenegaraan, tekad serta ideologis dan cita-cita sosial. Soekarno mengajak delegasi Konferensi Asia Afrika pada 1955 untuk melakukan “Paksaan Moril Bangsa-Bangsa”, sebuah gerakan geopolitik global yang bertujuan mewujudkan perdamaian dunia:

“Apa yang dapat kita perbuat? Kita dapat berbuat banyak! Kita dapat menyuntikkan suara budi kita ke dalam urusan-urusan duniawi. Kita dapat memobilisir semua kekuatan spirituil, moril dan politis dari Asia dan Afrika untuk kepentingan perdamaian. Ya, kita! Kita bangsa-bangsa Asia dan Afrika, berkekuatan 1.400.000.000 jiwa, jauh melebihi setengahnya jumlah penduduk dunia. Kita dapat menggerakkan apa yang saya namakan Paksaan Moril Bangsa-Bangsa untuk kepentingan perdamaian. Kita dapat menunjukkan

115 Soekarno (1960). *Membangun Dunia Kembali (To Build the World Anew)*. *Loc. Cit.*

kepada minoritas di dunia, yang hidup di ketiga benua lainnya itu, bahwa kita golongan mayoritas, adalah properdamaian, bukannya pro perang, dan bahwa kekuatan apa saja yang ada pada kita akan selalu kita pertaruhkan di pihak perdamaian.”¹¹⁶

Persahabatan antar bangsa tersebut menembus sekat ideologi, ras, agama, budaya dan politik, sebagaimana diungkapkan oleh Soekarno dalam biografinya “Aku menyukai orang Timur, aku menyukai orang Barat...”. Dalam pandangannya, kepentingan nasional masing-masing negara dibangun melalui persahabatan antar bangsa. Bagi Soekarno, “*nasionalisme* tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam *taman* sarinya *internasionalisme*”.

Pemikiran Geopolitik Soekarno lahir dari tradisi pemikiran kritis. Kritiknya terhadap pemikiran Geopolitik Barat muncul dari pengalamannya sendiri yang hidup sebagai bangsa terjajah. Dialektikanya secara kritis mengungkapkan kelemahan Geopolitik Barat yang ekspansionis dan invasif. Kritiknya atas Geopolitik Barat digambarkan Soekarno dengan membuat peta Garis Hidup Imperialisme yang terbentang dari selat Gibraltar, melalui Lautan Tengah, Terusan Suez, Lautan Merah, Lautan Hindia, Lautan China Selatan sampai ke Lautan Jepang. Daratan-daratan sebelah-menyebelah garis hidup yang panjang itu sebagian besar adalah tanah jajahan. Rakyatnya tidak merdeka. Hari depannya terabaikan kepada sistem asing. Sepanjang garis hidup itu, sepanjang urat nadi imperialisme itu, dipompakan darah kehidupan kolonialisme.

Soekarno mengajak negara-negara yang masuk dalam garis hidup tersebut untuk maju bersama dan merdeka sebagai sesama warga dunia. Keterlibatan Soekarno terlihat dalam kebijakan diplomasi skala dunia di antaranya KAA, Konferensi Dokter Anak Asia Afrika, Konferensi Perempuan Asia Afrika, dan Konferensi Pemuda Asia Afrika; Konferensi Islam Asia-Afrika (1964); GNB; Ganefo; Poros Jakarta-Peking; serta Jakarta-Vietnam. Inilah *field* dan koridor pemikiran Geopolitik Soekarno.

Dengan pemikiran kritis tersebut, metodologi pemikiran Geopolitik Soekarno dikonstruksikan dengan menghadirkan ruang

116 Soekarno (1955). *Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru*. Pidato Presiden Soekarno pada Konferensi Asia Afrika, Bandung, 18 April 1955.

lingkup geopolitik yang terdiri atas tujuh variabel yang meliputi aspek:

- a. Demografi dengan indikator kependudukan, gizi, kesehatan, Sosial dan Budaya;
- b. Teritorial mencakup indikator konsep tanah air, iklim, dan tata ruang geopolitik nusantara;
- c. Sumber Daya Alam (SDA) mencakup indikator *state driven economic* dan ekologi;
- d. Militer dengan indikator intelijen dan kekuatan alutsista;
- e. Politik mencakup indikator ideologi, hukum, dan diplomasi;
- f. Koeksistensi damai dengan indikator meliputi tidak ekspansif dan kerja sama-aliansi; dan
- g. Sains dan Teknologi, indikatornya meliputi pendidikan, *city of intellect*, dan ilmu dasar.

Arah kajian geopolitik dalam skala makro bertujuan agar Asia – Pasifik menjadi *pivot* dunia (1935). Dalam skala messo bertujuan agar Nusantara sebagai *pivot* Asia-Pasifik (1952), KIAPMA (1965). Dalam skala mikro tata ruang geopolitik nusantara menempatkan Jawa-Bali sebagai pusat riset, lumbung pangan, dan pusat kekuatan Angkatan Darat; Kalimantan sebagai pusat pemerintahan dan kekuatan Angkatan Udara; Sulawesi sebagai lumbung pangan; Sumatera sebagai pusat perkebunan; dan Irian Barat sebagai pusat kekuatan Angkatan Laut.¹¹⁷ Guna mendukung koridor strategis tersebut perguruan tinggi ditempatkan sebagai *city of intellect*.

Fokus pemikiran Geopolitik Soekarno ialah kepentingan nasional dan pertahanan negara. Tujuan pemikiran Geopolitik Soekarno selalu diselaraskan dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia, salah satunya tentang pembebasan Irian Barat. Soekarno menghubungkan geopolitik dengan pembangunan pertahanan negara.¹¹⁸ Soekarno sadar bahwa faktor geopolitik suatu negara akan menentukan sistem pertahanan negara. Ketika Soekarno diasingkan ke Bengkulu, dalam surat kabar *Pemandangan* yang dipublikasikan

¹¹⁷ Soekarno (1964). Di Bawah Bendera Revolusi. *Op. Cit.*

¹¹⁸ Soekarno (1965). Pertahanan Negara Dapat Berhasil Maksimal Jika Berdasarkan Geopolitik. *Loc. Cit.*

pada 1941, Soekarno memperhatikan pentingnya letak geografis suatu negara dalam sistem pertahanan militer dengan membandingkan posisi India, Jerman, dan Jepang.

Keseluruhan pemikiran Geopolitik Soekarno menjadi penanda kebangkitan bangsa-bangsa Asia Afrika. Dalam tulisannya "*Suluh Indonesia Muda*", tahun 1928, Soekarno menghendaki terjadinya persatuan bangsa-bangsa Asia untuk melawan penjajahan. Asia memiliki potensi dan kekuatan besar yang mampu bersaing di dalam konstelasi geopolitik dunia. Menurut Soekarno, "Pan Asiatisme ini pasti dapat hidup dan bangkit di dalam pergerakan kita. Sebab persatuan nasib antara bangsa-bangsa Asia pastilah melahirkan persatuan perangai; persatuan nasib pastilah melahirkan persatuan rasa".¹¹⁹ Pandangan ini didasarkan pada kemenangan Jepang atas Uni Soviet, dalam peperangan Teluk Tushima.

Menurut James R. Rush, Soekarno sebagaimana pemimpin-pemimpin besar di Asia, semangat perjuangannya tumbuh seiring dengan kesadarannya terhadap penjajahan.¹²⁰ Kaum imperialis telah memporandakan tanah kelahirannya, menghisap hasil buminya, demi kepentingan kapitalisme. Eksploitasi yang tiada henti, menjadikan bangsa-bangsa Asia hidup dalam kesengsaraan. Tokoh-tokoh pemimpin Asia Afrika juga tumbuh dalam hibriditas pemikiran yang kompleks. Kesadaran ini, yang kemudian membentuk pemikiran Geopolitik Soekarno. Soekarno menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya membutuhkan dorongan dari dalam negara itu sendiri, namun membutuhkan solidaritas dari bangsa-bangsa yang senasib dengannya.

Keinginan persatuan bangsa-bangsa Asia-Afrika juga merupakan representasi penerimaan masyarakat dunia terhadap pemikiran Geopolitik Soekarno. Konsep mengenai penyatuan perbedaan latar belakang, geografis, dan ideologi, kemudian disarikan sebagai acuan untuk membuat kebijakan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pemikiran Geopolitik Soekarno adalah *novelty* dari pemikiran geopolitik dunia yang bebas dari penjajahan. Berdasarkan penjelasan di atas, *body of knowledge* pemikiran

119 Soekarno (1964), Di bawah Bendera Revolusi. *Op. Cit.*

120 James R. Rush (2014). "Soekarno: Anticipating an Asian Century" in Ramachandra Guha (Ed.) *Makers of Modern Asia*. Cambridge, Massachusetts, London: Belknap Press Of Harvard University Press.

Geopolitik Soekarno selengkapnya dapat dilihat di dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Ringkasan *Body of Knowledge* Pemikiran Geopolitik Soekarno

NO	ASPEK	SUBSTANSI
1	Epistemologi geopolitik	Sintesis antara pemikiran <i>genuine</i> Soekarno dengan pemikiran geopolitik Barat dan pemikiran geopolitik Timur
2	Latar/ <i>Setting</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Imperialisme dan Kolonialisme • Perang Dingin
3	Ideologi geopolitik	Pancasila
4	Nama geopolitik	Nusantara (<i>Archipelago Country</i>) atau <i>Geografische constellatie</i> sebagai asset vital.
5	Konsep geopolitik	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai satu kesatuan kebangsaan • Sebagai satu kesatuan kenegaraan • Sebagai satu kesatuan tekad atau ideologis • Sebagai satu kesatuan cita-cita sosial (<i>social consciousness of man</i>)
6	Tujuan geopolitik	<ul style="list-style-type: none"> • Kemanusiaan • Internasionalisme • Persahabatan antar-bangsa • Perdamaian dunia • Keadilan bagi seluruh penduduk dunia.
7	Mazhab geopolitik	Kritis
8	Kritik atas Teori Geopolitik Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Ekspansionis, Invasif - Soekarno membuat peta Garis Hidup Imperialisme • Garis Hidup Imperialisme terbentang mulai selat Gibraltar, melalui Lautan Tengah, Terusan Suez, Lautan Merah, Lautan Hindia, Lautan China Selatan (Sekarang LCS) sampai ke Lautan Jepang. Daratan-daratan sebelah-menyebelah garis hidup yang panjang itu sebagian besar adalah tanah jajahan. Rakyatnya tidak merdeka. Hari depannya terabaikan kepada sistem asing. Sepanjang garis hidup itu, sepanjang urat nadi imperialisme itu, dipompakan darah kehidupan kolonialisme.

NO	ASPEK	SUBSTANSI
9	Field atau Koridor geopolitik	<i>Strategic Culture</i> dalam berdiplomasi; Konferensi Asia-Afrika, Konferensi Dokter Anak Asia Afrika, Konferensi Perempuan Asia Afrika, dan Konferensi Pemuda Asia Afrika; Konferensi Islam Asia-Afrika (1964); Gerakan Non Blok; Ganefo; Poros Jakarta-Peking; Jakarta-Vietnam;
10	Variabel/Ruang lingkup geopolitik	
	a. Demografi	Kependudukan, Gizi, Kesehatan, Sosial dan Budaya
	b. Teritorial	Konsep Tanah Air, Iklim, dan Tata Ruang Geopolitik Nusantara
	c. SDA	<i>State Driven Economic</i> dan Ekologi
	d. Militer	Intelijen dan Kekuatan Alutsista
	e. Politik	Ideologi, Hukum, dan Diplomasi
	f. Koeksistensi Damai	Tidak Ekspansif, Kerja sama dan Aliansi
	g. Sains dan Teknologi	Pendidikan, <i>City of Intellect</i> , dan Ilmu Dasar
11	Aras Kajian geopolitik	
	a. Makro	Asia – Pasifik <i>pivot</i> dunia (1935)
	b. Messo	Nusantara sebagai <i>pivot</i> Asia – Pasifik (1952), KIAPMA (1965)
	c. Mikro	Tata ruang geopolitik nusantara: Jawa-Bali sebagai pusat riset, lumbung pangan, dan pusat kekuatan Angkatan Darat; Kalimantan sebagai pusat pemerintahan dan kekuatan Angkatan Udara; Sulawesi sebagai lumbung pangan; Sumatera sebagai pusat perkebunan; dan Irian Barat sebagai pusat kekuatan Angkatan Laut
12	Fokus geopolitik	Perjuangan kepentingan nasional dan pertahanan negara

Sumber: diolah oleh Peneliti (2021-2022)

3.2 Posisi Pemikiran Geopolitik Soekarno dalam Peta Geopolitik Klasik dan Kontemporer

Kajian lebih lanjut terhadap pemikiran Geopolitik Soekarno sebagai *alternative of view* dapat dilihat pada Tabel 3.2. Pemosisian pemikiran Geopolitik Soekarno di antara pemikir geopolitik klasik dan kontemporer dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya:

Pertama, *setting* atau latar. Konsepsi *geographical pivot* yang berada di Eurasia dalam teori Mackinder digunakan sebagai basis intelektual bagi kebijakan luar negeri Inggris untuk membendung pengaruh Jerman di Eropa Timur. Dengan adanya *geographical pivot* ini, maka kebijakan kolonialisasi Inggris dan sekaligus penguasaan jalur perdagangan difokuskan pada pencegahan Jerman dan Rusia di dalam menguasai kawasan Eurasia. Demikian pula dengan Mahan yang melakukan analisis pertarungan kolonialisme Perancis dan Inggris. Inggris menampilkan penguasaan jalur perdagangan laut sebagai bagian dari hegemoninya dan melihat wilayah kolonial sebagai bentuk perluasan mata rantai produksi dan pasar. Sementara Perancis lebih mendorong penguasaan wilayah kolonial pada watak eksploitatifnya bagi kepentingan hegemoni Perancis. Hal yang berbeda ditunjukkan pada teori geopolitik kontemporer Parag Khanna dan Anita Sengupta di mana sebagai latar belakang adalah terjadinya revolusi industri 4.0. Teori ini menekankan pentingnya *connectography* di dalam mengurangi pertarungan geopolitik. Anita Sengupta dengan berdasarkan analisisnya atas teori Mackinder mengembangkan *connectography* Parag Khanna dalam imajinasi geopolitik. Persamaan kedua teori tersebut menempatkan instrumen ekonomi melalui perang dagang, penguasaan koridor, dan jalur perdagangan strategis bagi pembangunan kekuatan perekonomian negara. Aktor dalam geopolitik klasik terpusat pada negara, sementara geopolitik kontemporer bersifat *multi-actors*, baik negara, institusi bisnis (korporasi), maupun Lembaga non-pemerintah yang disatukan oleh kepentingan nasionalnya. Adanya aktor yang berbeda ikut mengubah tentang cara membangun hegemoni dari penguasaan teritorial menjadi penguasaan perdagangan dunia.

Meskipun dari latar belakang teori Geopolitik Soekarno tidak jauh berbeda dengan geopolitik klasik dan memiliki perbedaan yang begitu tajam dengan geopolitik kontemporer, namun geopolitik klasik dan kontemporer tetap menampilkan cirinya sebagai kekuatan kapitalisme global. Dalam pandangan Soekarno struktur kapitalisme selalu menciptakan krisis karena sebagai daya penggerak adalah nafsu untuk menimbun kapital. Kapitalisme dalam pandangan Soekarno ini terjadi pada masa pre-Columbian, Columbian, dan post-Columbian sebagaimana dijelaskan Mackinder. Namun di dalam era revolusi industri 4.0

yang menjadi latar belakang geopolitik kontemporer, tetap terjadi hegemoni kekuatan kapitalisme, hanya lain bentuk dan sifatnya. Atas dasar hal tersebut teori Geopolitik Soekarno ditinjau dari *setting* atau latar belakangnya menjadi *alternative of view* karena Soekarno selalu konsisten untuk keluar dari polarisasi yang terjadi dalam sistem internasional akibat kapitalisme dan kolonialisme dalam seluruh aspeknya. Dalam upaya ini, Soekarno menampilkan pandangan geopolitiknya yang khas yang digerakkan oleh nilai-nilai kemanusiaan dan internasionalisme tanpa adanya ekspansi wilayah negara dengan mengedepankan kepemimpinan strategik sebagai motor penggerakannya.

Kedua, paradigma dan konsepsi geopolitik. Dalam pandangan Bertil Haggman, geopolitik klasik sebagaimana tampak pada teori Mackinder dan Mahan digerakkan mazhab klasik yang menjadikan negara sebagai organisme yang membutuhkan ruang hidup untuk menjaga keberlangsungannya; sedangkan di dalam geopolitik kontemporer, aspek geografi tidak lagi menjadi faktor dominan, terutama dengan peran geopolitik ekonomi, *energy security* dan dipacu kemajuan teknologi.¹²¹ Faktor ini mendorong terjadinya pergeseran konsepsi penguasaan dari teritorial atau geografis menjadi penguasaan ekonomi. Konsepsi pemikiran Geopolitik Soekarno bersifat kritis. Pandangan geopolitiknya tidak hanya berbicara fenomena politik atas cara pandang geografis, namun mengintegrasikan geografi, manusia, semangat, jiwa bangsa, hingga seluruh sumber daya ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan suatu bangsa. Keseluruhan elemen geopolitik yang komprehensif ini oleh kepemimpinan strategik ditransformasikan menjadi *power* yang bertujuan untuk mengubah tata dunia sekaligus mengoreksi konsepsi geopolitik klasik. Konsepsi *power* melalui kepemimpinan strategik inilah yang memperkuat teori Geopolitik Soekarno sebagai *alternative of view*.

Konsepsi Parag Khanna dan Anita Sengupta yang mengedepankan hegemoni suatu negara di dalam penguasaan jalur perdagangan serta pentingnya konektivitas dan interaksi perdagangan tersebut mampu mereduksi berbagai persoalan geopolitik. Orientasi konsepsi geopolitik kontemporer bertujuan

121 Bertil Haggman (2007). Rudolf Kjellén and modern Swedish geopolitics. *Geopolitics*, Vol. 3, No. 2, pp. 99-112, Tylor and Francis.

memperkuat daya penguasaan global melalui kekuatan perdagangan, keuangan, *supply chain*, keunggulan teknologi, dan penguasaan jalur perdagangan. Konsepsi teori ini tidak dapat terlepas dari wataknya yang eksploitatif di dalam memaksimalkan *business value*. Konsepsi Geopolitik Soekarno justru sebaliknya. Kerja sama internasional dalam kerja sama perekonomian untuk mendorong *fair trade* yang dimulai dari kawasan Asia Afrika. Hal ini tercermin pada komunike politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam KAA Bandung 1955 yang antara lain berbunyi:¹²²

“Kerjasama Ekonomi: Konferensi Asia-Afrika lebih lanjut merekomendasikan bahwa: Negara-negara Asia-Afrika harus mendiversifikasi perdagangan ekspor mereka dengan mengolah bahan mentah mereka, jika memungkinkan secara ekonomi, sebelum diekspor; pameran perdagangan intra-regional harus dipromosikan dan didorong untuk pertukaran delegasi perdagangan dan kelompok pengusaha; pertukaran informasi dan sampel harus didorong dengan tujuan untuk mempromosikan perdagangan intra-regional; dan fasilitas normal harus disediakan untuk perdagangan transit negara-negara yang terkurung daratan. [...] Kerjasama Budaya: Tidak Ada Rasa Rivalitas. Bukan dari rasa eksklusivitas atau persaingan dengan kelompok bangsa lain dan peradaban dan budaya lain, Konferensi memandang perkembangan kerjasama budaya di antara negara-negara Asia dan Afrika. Sesuai dengan tradisi lama toleransi dan universalitas, Konferensi percaya bahwa kerjasama budaya Asia dan Afrika harus dikembangkan dalam konteks kerjasama dunia yang lebih luas”.

Berdasarkan penjelasan di atas, konsepsi Geopolitik Soekarno melalui kerja sama perekonomian, menjadi *alternative of view*.

Ketiga, tujuan dan ruang lingkup. Dalam pandangan teori klasik penguasaan hegemoni negara dilakukan melalui penggunaan kekuatan militer dan kendali kekuatan laut sebagai wahana di dalam mengontrol jalur perdagangan dunia. Dalam cara pandang geopolitik kontemporer, pengarusutamaan koridor ekonomi dinilai mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan,

122 Chris Alden, Sally Morphet and Marco Antonio Vieira (2010). *The South in World Politics*. Palgrave Macmillan.

dan konektivitas perdagangan yang diikuti distribusi kemakmuran. Langkah yang ditempuh dengan memanfaatkan jalur produksi dan distribusi yang didukung infrastruktur, terutama moda transportasi, komunikasi, dan energi. Dalam pemikiran Geopolitik Soekarno, tujuan kerja sama internasional adalah membangun persahabatan dan tata dunia yang berkeadilan. Dengan demikian dari aspek tujuan, pemikiran Geopolitik Soekarno menjadi berbeda dengan tujuan geopolitik klasik dan kontemporer. Perbedaan tujuan ini menjadikan ruang lingkup pemikiran juga berbeda. Dalam geopolitik klasik, keunggulan geopolitik menjadi *power* yang tercermin dari kekuatan militer suatu negara, sedangkan dalam geopolitik kontemporer kendali atas rantai pasokan dan *logistical space* diterjemahkan menjadi *power*. Dalam pemikiran Soekarno, tujuan geopolitik tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup geopolitik yang mencakup demografi, teritorial, SDA, militer, politik, koeksistensi damai, serta sains dan teknologi. Ketujuh faktor geopolitik inilah yang menjadi *instrument of national power*.

Keempat, tinjauan terhadap arah perubahan geopolitik, pemikiran Soekarno berbeda dengan geopolitik klasik yang berorientasi pada penguasaan wilayah dan perekonomian. Perbedaan yang sama juga terdapat dalam geopolitik kontemporer yang hanya sekedar bertujuan untuk mengurangi ketegangan geopolitik ataupun mencegah perang. Terhadap tendensi ke arah perubahan ini, pemikiran Geopolitik Soekarno bersifat abadi untuk membangun tata dunia yang bebas dari penjajahan. Syaratnya setiap bangsa yang merdeka memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan menjamin keberadaannya sebagai anggota PBB yang memiliki hak dan kewajiban sama bagi peningkatan taraf kehidupan dan martabat umat manusia. Berikut ini tabel posisi pemikiran Geopolitik Soekarno dalam peta geopolitik klasik dan kontemporer.

Tabel 3. 2. Posisi Pemikiran Geopolitik Soekarno dalam Peta Geopolitik Klasik hingga Kontemporer

ASPEK GEOPOLITIK	SIR HALFORD MACKINDER	ALFRED THAYER MAHAN	PARAG KHANNA	ANITA SENGUPTA	SOEKARNO
SETTING/ LATAR	<ul style="list-style-type: none"> Jalur perdagangan - Jalur Sutra Imperialisme dan Kolonialisme 	<ul style="list-style-type: none"> Perbandingan kolonialisasi yang dilakukan Inggris dengan kolonialisasi yang dilakukan Perancis Kompetisi Amerika Serikat dan Inggris 	<ul style="list-style-type: none"> Revolusi Industri 4.0 Era VUCA Globalisasi Perang Dagang 	<ul style="list-style-type: none"> Revolusi Industri 4.0 Era VUCA Globalisasi Perang Dagang 	<ul style="list-style-type: none"> Imperialisme dan Kolonialisme Perang Dingin
MAZHAB/ PARADIGMA	Klasik	Klasik	Kritis/Ekonomi Politik	Kritis/Ekonomi Politik	Kritis
KONSEPSI	<ul style="list-style-type: none"> Lensa geopolitik berbasis geografis Penguasaan wilayah Eropa Timur Heartland World Island Tiga periode masa Imperialisme 	<ul style="list-style-type: none"> Unsur Pendukung kekuatan laut suatu negara Penguasaan jalur perdagangan Penguasaan Laut 	<ul style="list-style-type: none"> Dunia satu melalui jalur perdagangan Konektivitas dan interaksi negara-negara Devolusi negara Agregasi negara 	<ul style="list-style-type: none"> Wilayah Asia bersatu melalui jalur perdagangan Konektivitas dan interaksi negara-negara Pivot Area yang bergeser ke Kawasan Asia-Pasifik 	<ul style="list-style-type: none"> Satu kesatuan kebangsaan Satu kesatuan kenegaraan Satu kesatuan tekad atau ideologis Satu kesatuan cita-cita social (social consciousness of man)
TUJUAN	Menguasai dunia dengan menguasai wilayah Eropa Timur, intelijen, penguasaan wilayah daratan dunia.	<ul style="list-style-type: none"> Pendekatan ekonomi dan konflik Keuangan Kontrol atas Laut 	<ul style="list-style-type: none"> Tata Global dunia baru Penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesatuan visi membangun infrastruktur regional Global Connectivity Governing Connectivity Alternative Corridors 	<ul style="list-style-type: none"> Kemanusiaan, Internasionalisme, dan perikemanusiaan, perdamaian dunia, persahabatan antar bangsa, keadilan antar bangsa, bebas dari pengisapan antar bangsa dan antar manusia.
RUANG LINGKUP	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan Geographical Pivot 	<ul style="list-style-type: none"> Strategic Values Power Concentration Sea Communications 	<ul style="list-style-type: none"> Rantai pasokan kontemporer Zona Geografis 	<ul style="list-style-type: none"> Logistical Spaces sebagai terjemahan baru dari Power 	<ul style="list-style-type: none"> Demografi Teritorial SDA

Lanjutan

ASPEK GEOPOLITIK	SIR HALFORD MACKINDER	ALFRED THAYER MAHAN	PARAG KHANNA	ANITA SENGUPTA	SOEKARNO
(SUBJECT MATTER)	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi Pivot dunia Militer Perang Imperialisme 	<ul style="list-style-type: none"> Command <i>the sea</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Zona Fungsional Kawasan Asia - Afrika - Timur Tengah Transformasi geopolitik ke geo-ekonomi dan geo-teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> Strategic Interest Connectivity <i>initiative</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Militer Politik Ko-Eksistensi Damai Sains dan Teknologi
AGEN/MOTOR PENGGERAK	<ul style="list-style-type: none"> Actor State-otoritas kekuasaan 	<ul style="list-style-type: none"> Actor State Financial Actor 	<ul style="list-style-type: none"> Multi Actors Relasi Complex mobility 	<ul style="list-style-type: none"> Multi Actors Relasi Imagining spaces through mobility 	<ul style="list-style-type: none"> Ide – Kepemimpinan Strategik
TENDENSI KE ARAH PERUBAHAN	<ul style="list-style-type: none"> Menghalau laju penguasaan Rusia atas wilayah Asia Inggris sebagai penguasa dunia 	<ul style="list-style-type: none"> Transfer of Power dari Inggris ke Amerika Serikat Pertarungan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah perang untuk kepentingan nasional dengan bersekutu dalam bidang ekonomi Relokasi atas bencana yang diakibatkan perubahan iklim Dunia terhubung secara fisik maupun virtual 	<ul style="list-style-type: none"> The New Silk Road and Indian Initiative Indefikasi the new pivotal position Asia secara bersama menghadapi Geopolitical Uncertainty 	<ul style="list-style-type: none"> Dunia tanpa imperialisme dan kolonialisme Kesederajatan di mata dunia
PERSPEKTIF ANALISIS	<ul style="list-style-type: none"> Security dan Defense analysis 	<ul style="list-style-type: none"> Security dan Defense analysis 	<ul style="list-style-type: none"> Geografi politik, geopolitik dan ekonomi politik 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dari teori <i>heartland</i> dan <i>connectography</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Siklus dialektis Mikro, Meso, dan Makro

Sumber: diolah dari Soekarno, 1930, 1945, 1957, 1964, 1965; Mahan, 1890; Mackinder, 1904; Ó Tuathail, 1996; Khanna, 2016; 2019; dan Sengupta, 2009, 2016

3.3 Operasionalisasi 7 Variabel Geopolitik Soekarno, Kepentingan Nasional, dan Pertahanan Negara

Menurut Soekarno, geopolitik adalah konsep tentang kesatuan tanah dan air (Nusantara) sebagai *geografische constellatie*. Variabel pemikiran Geopolitik Soekarno mencakup tujuh unsur penting yaitu demografi, teritorial, SDA, militer, politik, koeksistensi damai, serta sains dan teknologi. Tujuan dari pemikiran Geopolitik Soekarno tersebut melingkupi aspek kemanusiaan, Internasionalisme, perdamaian dunia, persahabatan antar-bangsa, keadilan antar-bangsa, serta bebas dari pengisapan antar-bangsa dan antar-manusia.

Meminjam terminologi Karl Hermann Höhn, tujuh variabel Geopolitik Soekarno selaras dengan konstruksi geopolitik kritis yang dalam ruang lingkungannya mengkaji ruang atau teritorial, kependudukan, sumber daya alam, organisasi, militer, ekonomi, sains dan pendidikan.¹²³ Sejalan dengan Höhn, Teixeira dan Dias menjelaskan bahwa ruang lingkup kajian geopolitik kritis dan menambahkannya dengan kajian posisi/batas (*boundaries*), transportasi, iklim, sosial ekonomi dan struktur politik, teknologi, dan ideologi.¹²⁴ Selanjutnya Jo Sharp menjelaskan bahwa kajian atas geopolitik kritis dibangun dari pendekatan post-struktural dan diskursus-diskursus tentang identitas.¹²⁵

Berikut ini operasionalisasi dari ketujuh variabel Geopolitik Soekarno, yaitu:

a. Demografi (X_1)

1) Deskripsi Teoretik

Kata demografi pertama kali digunakan oleh Achille Guillard pada tahun 1885, dalam bukunya yang berjudul *Éléments de Statistique Humaine ou Démographie Comparée*.¹²⁶ Demografi berasal dari kata *demos* yang berarti penduduk dan

123 Karl Hermann Höhn (2011). *Op. Cit.*

124 Aurora A.C. Teixeira and Mariana Dias (2013). *Op. Cit.*

125 Jo Sharp (2021). *Op. Cit.*

126 Achille Guillard (1885). *Éléments de Statistique Humaine ou Démographie*. Paris: Guillaumin et Cic Libraires.

grafein yang berarti gambaran. Dengan demikian demografi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari penduduk atau manusia terutama tentang kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Shryock dan Siegel dalam *The Methods and Materials of Demography* membagi pengertian demografi dalam arti sempit dan luas. Secara sempit demografi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jumlah, distribusi, struktur, dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan dalam arti luas, demografi mencakup semua karakteristik penduduk termasuk di dalamnya etnik, budaya, sosial, dan ekonomi.¹²⁷ Dari beberapa teori tersebut, maka sintesis dari teori variabel demografi adalah terkait dengan jumlah penduduk, pangan, gizi dan sosial budaya, yang merupakan kekuatan dari suatu negara dalam menghadapi pertarungan revolusi melawan imperialisme dan kapitalisme barat sehingga berimplikasi pada kedaulatan dan pertahanan negara.

- 2) Definisi Konseptual
Demografi terkait dengan jumlah penduduk, pangan, gizi, kesehatan, dan sosial budaya merupakan kekuatan suatu negara dalam menghadapi pertarungan revolusi melawan imperialisme dan kapitalisme barat sehingga berimplikasi pada kedaulatan dan pertahanan negara.¹²⁸
- 3) Definisi Operasional
Demografi dalam penelitian ini merujuk pada konsep

127 HS. Shryock & JS. Siegel. (1976). *The Methods and Materials of Demography*. San Diego: Academic Press.

128 Soekarno (1952). *Soal Pangan adalah Soal Hidup Matinya Bangsa*. Pidato Presiden Soekarno di Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia, Baranangsiang, Bogor, 27 April 1952; Soekarno (1963). *Pahamilah Kondisi Obyektif Bangsa Kita*. Pidato di hadapan Mahasiswa yang akan Mengadakan *Study Tour* ke Sumatera di Istana Negara, Jakarta, 9 Juli 1963; Soekarno (1964). *Soal Transmigrasi adalah Soal Mati Hidup Bangsa Indonesia*. Pidato Presiden Soekarno pada Musyawarah Gerakan Transmigrasi, di Istana Bung Karno, Jakarta, 28 Desember 1964; dan Soekarno (1964). Di bawah Bendera Revolusi. *Op. Cit.*

demografi menurut Soekarno yang mencakup indikator tentang kependudukan, gizi, kesehatan, sosial, dan budaya.

4) Kisi-kisi Demografi

Tabel 3.3. Kisi-kisi Instrumen Demografi

NO	VARIABEL	INDIKATOR	NO. ITEM	SKALA PEN-GUKURAN	ANALISIS DATA
1	Demografi	1. Kependudukan 2. Gizi 3. Kesehatan 4. Sosial 5. Budaya	1 2 3, 4, 5 6 7	Thurstone	Deskriptif dan <i>Structural Equation Model (SEM)</i>

Sumber: diolah oleh Peneliti (2021)

b. Teritorial (X_2)

1) Deskriptif Teoretik

Asas teritorial adalah asas yang mewajibkan suatu negara yang terlibat dalam hubungan internasional tetap berkuasa diteritorinya (wilayah). Asas teritorial menyatakan bahwa suatu negara dapat mengatur masalah perdata dan pidana dalam batas kedaulatannya, yang berarti negara lain tidak boleh mencampuri dan melanggar batas wilayah suatu negara.¹²⁹ Teori Richard Foley menyatakan bahwa suatu negara mendapatkan kedaulatan dalam suatu wilayah karena ia mampu menciptakan dan mempertahankan tertib sosial dan meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk yang tinggal di area kekuasaan negara bersangkutan.¹³⁰ Teori lain dari David Miller menjelaskan hak kedaulatan teritorial terdiri atas tiga unsur, yaitu kedaulatan hukum,

129 Silmi Nurul Utami. (1 April 2021). "Asas-Asas Hubungan Internasional", (Serafica Gischa, Ed.) Kompas.com.

130 Richard Foley. (2007). Plato's undividable line contradiction and method in Republic VI. *Journal of the History of Philosophy*, 46 (1) 1-23.

ekonomi, dan perbatasan.¹³¹ Ilmuwan lain, Anna Stilz mengatakan hak kedaulatan teritori sebuah negara terdiri dari lima pilar, yakni kedaulatan politik, budaya, ekonomi, perbatasan, dan hukum.¹³² Dari berbagai teori tersebut dapat dibuat sintesis bahwa teritorial mengarah kepada suatu pengertian bahwa hanya negara yang berhak untuk menyanggah keistimewaan teritorial, yang berarti negara berhak mengatur dan memanfaatkan seluruh sumber daya/kekayaan alam yang terkandung di dalam, dan dapat diekstrak dari perut bumi yang menjadi teritorinya.

2) Definisi Konseptual

Teritorial merupakan satu kesatuan tanah air dari Sabang sampai Merauke dan Wawasan Nusantara sebagai *geografische constellatie*, bukan sekedar ilmu bumi, melainkan wilayah yang berdaulat dengan batas-batas wilayah yang jelas dan diakui secara *de facto-de jure*.¹³³

3) Definisi Operasional

Teritorial dalam penelitian ini merujuk pada konsep teritorial menurut Soekarno yang mencakup indikator tentang Konsep Tanah Air, Iklim, dan Tata Ruang Geopolitik Nusantara.

4) Kisi-kisi Teritorial

131 David Miller. (2012). Territorial rights concept and justification. *Political Studies* 60(2) 252-268.

132 Anna Stilz. (2011). Nations, States, and Territory. *Ethics*, Vol. 121(3), pp. 572-601.

133 Soekarno (1945) *Lahirnya Pancasila*. Pidato Soekarno di hadapan Sidang BPUPK, 1 Juni 1945; Soekarno (1945). *Wilayah Indonesia Merdeka*. Pidato Soekarno di hadapan Sidang BPUPK, 11 September 1945; dan Soekarno (1960). *Laksana Malaikat yang Menyerbu dari Langit. Jalannya Revolusi Kita (JAREK)*. Pidato Presiden Soekarno pada HUT Kemerdekaan RI ke-15, Jakarta, 17 Agustus 1960.

Tabel 3.4. Kisi-kisi Instrumen Teritorial

NO	VARIABEL	INDIKATOR	NO. ITEM	SKALA PEN-GUKURAN	ANALISIS DATA
1	Teritorial	1. Konsep Tanah Air 2. Iklim 3. Tata Ruang Geopolitik Nusantara	8, 9, 10 11, 12, 13, 14	<i>Thurstone</i>	Deskriptif dan <i>Structural Equation Model</i> (SEM)

Sumber: diolah oleh Peneliti (2021)

c. Sumber Daya Alam (X_3)

1) Deskripsi Teoretik

Menurut Chapman, sumber daya alam adalah hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang diperlukannya. Terdapat tiga definisi sumber daya alam yakni persediaan total (*total stock*), sumber daya (*resources*), dan cadangan (*reserve*).¹³⁴ Sedangkan menurut Isard sumber daya alam secara umum adalah keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kesejahteraannya.¹³⁵ Menurut Soerianegara sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup.¹³⁶ Dari beberapa teori tentang sumber daya alam tersebut, maka sintesis dari sumber daya alam adalah modal pokok dalam pembangunan ekonomi berdikari yang dikelola oleh bangsa sendiri untuk kepentingan nasional guna mencapai kemakmuran rakyat. Sumber daya alam Indonesia dengan segala kekayaan bagaikan “zamrud khatulistiwa”, termasuk

¹³⁴ I. Soerianegara. (1977). *Pengelolaan Sumber Daya Alam bagian I*. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.

¹³⁵ Soerianegara. (1977). *Ibid.*

¹³⁶ Soerianegara. (1977). *Ibid.*

hutan-hutan Indonesia yang menjadi salah satu paru-paru dunia tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan karena dapat menghancurkan sistem ekologi, baik nasional maupun global.

2) Definisi Konseptual

Sumber Daya Alam merupakan modal pokok dalam pembangunan ekonomi berdikari yang dikelola oleh bangsa sendiri untuk kepentingan nasional guna mencapai kemakmuran rakyat. Sumber Daya Alam Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia “zamrud khatulistiwa” tidak boleh dieksploitasi secara berlebih yang dapat menghancurkan sistem ekologi.¹³⁷

3) Definisi Operasional

Sumber daya alam dalam penelitian ini merujuk pada konsep Soekarno bahwa SDA sebagai modal pokok pembangunan ekonomi berdikari. Indikator SDA dalam penelitian ini mencakup *state driven economic* dan ekologi.

4) Kisi-kisi Sumber Daya Alam

Tabel 3.5. Kisi-kisi Instrumen Sumber Daya Alam

NO	VARIABEL	INDIKATOR	NO. ITEM	SKALA PEN-GUKURAN	ANALISIS DATA
1	Sumber Daya Alam	1. <i>State Driven Ekonomi</i> 2. Ekologi	15,16, 17, 18	<i>Thurstone</i>	Deskriptif dan <i>Structural Equation Model (SEM)</i>

Sumber: diolah oleh Peneliti (2021)

¹³⁷ Soekarno (1963). *Deklarasi Ekonomi*. Pidato Presiden Soekarno di Istana Merdeka, Jakarta, 28 Maret 1963; Soekarno (1964). *Tahun Vivere Pericoloso (TAVIP)*. Pidato Presiden Soekarno pada Proklamasi Kemerdekaan RI ke-19, di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 1964; dan Soekarno (1965). *Tahun Berdikari (TAKARI)*. Pidato Presiden Soekarno pada HUT Kemerdekaan RI ke-20, di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 1965.

d. Militer (X₄)

1) Deskripsi Teoretik

Kata Militer berasal dari bahasa Yunani “*Miles*” berarti orang yang bersenjata dan siap bertempur yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara.¹³⁸ Menurut Sianturi, kata militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan suatu Negara, maka kekuatan militer mutlak diperlukan oleh setiap Negara, kekuatan militer juga merupakan sebuah identitas bagi Negara.¹³⁹ Sementara itu, pengertian Militer Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Militer dapat berfungsi sebagai alat negara yang menjunjung tinggi supremasi sipil. Militer juga dapat didefinisikan sebagai organisasi yang diberi wewenang oleh negara untuk menggunakan kekuatan, termasuk kekuatan menggunakan senjata dalam mempertahankan bangsanya ataupun untuk menyerang negara lain.¹⁴⁰ Sedangkan menurut Sayidiman Suryahadriprojo, militer berkaitan dengan kekuatan bersenjata yang bertugas menjaga kedaulatan negara.¹⁴¹ Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa militer adalah segala

138 Moch Faisal Salam. (2004). *Peradilan militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

139 S.R. Sianturi. (2010). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

140 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

141 Sayidiman Suryahadriprojo. (1999). *Membangun peradaban Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

sesuatu yang terkait dengan intelijen dan kekuatan angkatan perang darat, laut, dan angkasa yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara melalui perjuangan rakyat semesta dengan semangat patriotisme, anti imperialisme dan kolonialisme guna mewujudkan tata dunia baru yang bebas dari pengisapan antar manusia dan bangsa. Intelijen dan kekuatan angkatan perang darat, laut, dan angkasa ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara melalui perjuangan rakyat semesta dengan semangat patriotisme, anti imperialisme dan kolonialisme guna mewujudkan tata dunia baru yang bebas dari pengisapan antar manusia dan bangsa.

2) Definisi Konseptual

Intelijen dan kekuatan angkatan perang darat, laut, dan angkasa ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara melalui perjuangan rakyat semesta dengan semangat patriotisme, anti imperialisme dan kolonialisme guna mewujudkan tata dunia baru yang bebas dari pengisapan antar manusia dan bangsa.¹⁴²

3) Definisi Operasional

Militer dalam penelitian ini merujuk pada konsep militer menurut Soekarno, dimana militer dibangun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Indikator militer mencakup intelijen dan kekuatan alutsista.

4) Kisi-kisi Militer

142 Soekarno (1950). *Angkatan Perang Bersiaplah*. Pidato Presiden Soekarno pada Hari Angkatan Perang, Jakarta, 5 Oktober 1950; Soekarno (1961). *Amanat Pada Hari Armada di Dermaga Angkatan Laut*, di Surabaya, 6 Januari 1961; Soekarno (1962). *Untuk Menjadi Bangsa yang Jaya, Kuasailah Angkasa*. Amanat Presiden Soekarno pada Dwiwindu Angkatan Udara RI dan Hari Penerbangan Nasional di Lapangan Terbang Kemayoran Jakarta, 9 April 1962; Soekarno (1962). *Dalam Konstelasi Dunia Sekarang Tanpa Angkatan Bersenjata, Tidak Satupun Negara Selamat*. Amanat Presiden Soekarno pada Siswa Seskoad, di Istana Bogor, 15 Desember 1962; dan Soekarno (1965). *Amanat Presiden Soekarno pada Rapat Panglima ALRI*, di Jakarta, 17 Juni 1965.

Tabel 3.6. Kisi-kisi Instrumen Militer

NO	VARIABEL	INDIKATOR	NO. ITEM	SKALA PENGUKURAN	ANALISIS DATA
1	Militer	1. Intelijen 2. Kekuatan Alutsista	19, 20, 21, 22, 23, 24	Thurstone	Deskriptif dan Structural Equation Model (SEM)

Sumber: diolah oleh Peneliti (2021)

e. Politik (X_3)

1) Deskriptif Teoretik

Politik biasanya berkaitan dengan pemerintahan, yaitu tentang bagaimana cara pemerintah mengatur negara serta membuat aturan dan hukum. Pencetus konsep politik adalah Plato dan Aristoteles. Menurut teori klasik Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Sedangkan menurut Heywood politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamendemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.¹⁴³ Teori politik lain yang disampaikan oleh Gabriel A. Almond adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu di mana kendali ini didukung melalui instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.¹⁴⁴ Dari beberapa teori tersebut, dapat dibuat sistesis bahwa politik merupakan sarana pembentukan kekuasaan (*machtsvorming*) dan penggunaan kekuasaan (*mactswending*) untuk kesejahteraan rakyat dan perdamaian dunia.

143 Andrew Heywood. (1997). *Politics*. London: Macmillan Press.

144 Gabriel A. Almond. (1969). *Political Theory and Political Science*. New York: McGraw Hill.

- 2) Definisi Konseptual
Politik merupakan sarana pembentukan kekuasaan (*machtsvorming*) dan penggunaan kekuasaan (*mactswending*) untuk kesejahteraan rakyat dan perdamaian dunia. Politik bersendikan pada ideologi Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia untuk mencapai dunia yang lebih damai dan berkeadilan.¹⁴⁵
- 3) Definisi Operasional
Politik dalam penelitian ini merujuk pada konsep politik menurut Soekarno yang mencakup indikator tentang ideologi, hukum, dan diplomasi.
- 4) Kisi-kisi Politik

Tabel 3.7. Kisi-kisi Instrumen Politik

NO	VARIABEL	INDIKATOR	NO. ITEM	SKALA PENGUKURAN	ANALISIS DATA
1	Politik	1. Ideologi 2. Hukum 3. Diplomasi	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35	<i>Thurstone</i>	Deskriptif dan <i>Structural Equation Model (SEM)</i>

Sumber: diolah oleh Peneliti (2021)

¹⁴⁵ Soekarno (1945) *Lahirnya Pancasila*. *Loc. Cit.*; Soekarno (1945). *Hukum Progresif*. Pidato Soekarno di depan Sidang Pleno BPUPK ke-2, 10 Juli 1945; (1956). *Susunlah Konstitusi Jang Benar-Benar Konstitusi Res Publica*. Pidato Presiden Republik Indonesia pada waktu membuka Konstituante, Jakarta, 10 Nopember 1956; Soekarno (1960). *Laksana Malaekat yang Menyerbu dari Langit. Jalannya Revolusi Kita (JAREK)*. *Loc. Cit.*; Soekarno (1960). *Membangun Dunia Kembali (To Build the World Anew)*. *Loc. Cit.*; (1961). Soekarno (1961) *Persahabatan, Perdamaian, dan Keadilan Sosial di antara Bangsa-bangsa*. Pidato Presiden Soekarno pada KTT GNB I, Beograd, Yugoslavia, 1 September 1961; Soekarno (1963). *Amanat Presiden Soekarno pada Resepsi Pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia*, di Istana Negara, Jakarta, 12 Maret 1963; dan Soekarno (1964). *Tahun Vivere Pericoloso (TAVIP)*. *Loc. Cit.*

f. Koeksistensi Damai (X_6)

1) Deskripsi Teoretik

Koeksistensi damai adalah teori yang dikembangkan dan diterapkan oleh Uni Soviet di berbagai titik selama perang dingin dalam konteks kebijakan luar negeri dan diadopsi oleh negara sosialis sekutu Soviet bahwa mereka dapat hidup berdampingan secara damai dengan blok kapitalis (negara sekutu AS). Ini bertolak belakang dengan prinsip kontradiktif antagonis bahwa sosialisme dan kapitalisme tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan damai. Kebijakan koeksistensi damai juga diterapkan oleh RRC pada tahun 1950an dalam perjanjian antara Cina-India mengenai wilayah Tibet, yang melahirkan lima prinsip koeksistensi damai. Ketika terjadi perundingan antara RRC dengan Soviet, kedua negara sama-sama menggunakan kebijakan koeksistensi damai, walaupun kedua negara mempunyai tujuan yang berbeda dalam menerapkan kebijakan koeksistensi damai.¹⁴⁶ Istilah koeksistensi damai dalam pemikiran geopolitik Soekarno berbeda dengan konteks Uni Soviet maupun RRC. Koeksistensi damai dalam pemikiran geopolitik Soekarno bersumber dari falsafah bangsa Pancasila. Berdasarkan beberapa teori tersebut, maka sintesis dari teori koeksistensi damai adalah hidup berdampingan secara damai, membangun kerja sama, dan aliansi strategis dengan menghormati kemerdekaan dan kedaulatan setiap bangsa. Dalam memperjuangkan koeksistensi damai tetap berpegang teguh pada prinsip anti kolonialisme, anti imperialisme, dan tidak invasif.

2) Definisi Konseptual

Koeksistensi damai ialah hidup berdampingan secara damai, membangun kerja sama, dan aliansi strategis

¹⁴⁶ *Wladyslaw W. Kulski. (1959). Peaceful Coexistence: An Analysis of Soviet Foreign Policy. Chicago: Henry Regnery Company.*

dengan menghormati kemerdekaan dan kedaulatan setiap bangsa. Dalam memperjuangkan koeksistensi damai tetap berpegang teguh pada prinsip anti kolonialisme, anti imperialisme, tidak *invasive*.¹⁴⁷

3) Definisi Operasional

Koeksistensi damai dalam penelitian ini secara operasional menggunakan konsep koeksistensi damai dari Soekarno yang mencakup indikator tidak ekspansif dan kerja sama-aliansi.

4) Kisi-kisi Koeksistensi Damai

Tabel 3.8. Kisi-kisi Instrumen Koeksistensi Damai

NO	VARIABEL	INDIKATOR	NO. ITEM	SKALA PENGUKURAN	ANALISIS DATA
1	Koeksistensi Damai	1. Tidak Ekspansif 2. Kerja sama dan Aliansi	36, 37 38, 39, 40	<i>Thurstone</i>	Deskriptif dan <i>Structural Equation Model</i> (SEM)

Sumber: diolah oleh Peneliti (2021)

g. Sains dan Teknologi (X_7)

1) Deskripsi Teoretik

Sains (*science*) diambil dari kata latin “*scientia*” yang artinya adalah pengetahuan. Kata “sains” berasal dari kata *natural science*. *Natural* berarti alamiah dan berhubungan dengan alam, sedangkan *science* berarti ilmu pengetahuan, sehingga *natural science* dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang alam atau ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Sementara itu, teknologi berasal dari kata *techne* dan *logia*, yang berarti seni kerajinan. Dari

¹⁴⁷ Soekarno (1955). *Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru*. Pidato Presiden Soekarno pada Konferensi Asia Afrika, Bandung, 18 April 1955; Soekarno (1960). *Membangun Dunia Kembali (To Build the World Anew)*. *Loc. Cit.*; Soekarno (1961) *Persahabatan, Perdamaian, dan Keadilan Sosial di antara Bangsa-bangsa*. *Loc. Cit.*; dan Soekarno (1964). *Era Konfrontasi*. Pidato Presiden Soekarno pada KTT GNB II di Kairo, Mesir, 6 Oktober 1964.

kata *techne* kemudian lahirlah perkataan *technikos* yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu. Menurut Walter Buckingham teknologi adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan ke dalam seni industri serta oleh karenanya mencakup alat-alat yang memungkinkan terlaksananya efisiensi tenaga kerja menurut keragaman kemampuan.¹⁴⁸ Menurut Liang Gie teknologi merupakan suatu sistem adaptasi yang efisien untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan akhir dari teknologi adalah untuk memecahkan masalah-masalah material manusia, atau untuk membawa pada perubahan-perubahan praktis yang diimpikan manusia.¹⁴⁹ Dari beberapa teori tersebut, maka sintesis dari variabel sains dan teknologi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan alat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia, kemanusiaan, kesejahteraan, dan perdamaian dunia dengan mengedepankan nalar dan budi sebagai elemen penting *nation and character building*. Konsepsi dan Infrastruktur sains teknologi dibangun melalui penguatan ilmu dasar, ilmu terapan, ilmu yang berorientasi pada kesejahteraan, *core competent* bidang pendidikan, dan *city of intellect*.

2) Definisi Konseptual

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan alat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia, kemanusiaan, kesejahteraan, dan perdamaian dunia dengan mengedepankan nalar dan budi sebagai elemen penting *nation and character building*. Konsepsi dan Infrastruktur sains teknologi dibangun melalui penguatan ilmu dasar, ilmu terapan,

148 Walters Buckingham. (1961). *Automation: its impact on business and people*. New York: Harper.

149 The Liang Gie. (1987). *Pengantar Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi.

ilmu yang berorientasi pada kesejahteraan, *core competent* bidang pendidikan, dan *city of intellect*.¹⁵⁰

3) Definisi Operasional

Sains dan teknologi dalam penelitian ini secara operasional menggunakan konsep sains dan teknologi dari Soekarno yang mencakup indikator pendidikan, *city of intellect*, dan ilmu dasar.

4) Kisi-kisi Sains dan Teknologi

Tabel 3.9. Kisi-kisi Instrumen Sains dan Teknologi

NO	VARIABEL	INDIKATOR	NO. ITEM	SKALA PENGUKURAN	ANALISIS DATA
1	Sains dan Teknologi	1. Pendidikan 2. <i>City of Intellect</i> 3. Ilmu Dasar	41, 42, 43, 44 45, 46 47, 48	<i>Thurstone</i>	Deskriptif dan <i>Structural Equation Model (SEM)</i>

Sumber: diolah oleh Peneliti (2021)

h. Kepentingan Nasional (Y)

1) Deskripsi Teoretik

Kepentingan nasional dibangun dari konsep dinamis dan memiliki beragam paradigma mulai dari realis, neo realis, hingga kritikal. Menurut Nuechterlein terdapat empat dimensi yang mempengaruhi

150 Soekarno (1951) *Ilmu dan Amal*. Pidato Presiden Soekarno ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 19 September 1951; Soekarno (1953). *Kota Mahasiswa Djakarta*. Pidato pada Penganjangan Kota Mahasiswa, Universitas Indonesia Kampus Rawamangun, Rawamangun, Jakarta, 15 September 1953; Soekarno (1961) *Milikilah Dedication of Life*. Pidato Presiden Soekarno di hadapan para mahasiswa Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 7 April 1961; Soekarno (1962). *Kumpulkan Ilmu Pengetahuan Untuk Pembangunan*. Amanat Presiden Soekarno Pada Hari Sarjana di Istana Olahraga Bung Karno, Senayan, 29 September 1962; dan Soekarno (1962). *Abdikan Ilmu Pengetahuan Kepada Tanah Air dan Bangsa*. Pidato Presiden Soekarno pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, Yogyakarta, 22 Oktober 1962.

kepentingan nasional, yaitu: kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tata internasional, dan kepentingan ideologi.¹⁵¹ Couloumbis dan Wolfe membagi kepentingan nasional menjadi enam strata kepentingan, yaitu: kepentingan vital atau primer (*primary interest*), kepentingan sekunder (*secondary interest*), kepentingan permanen (*permanent interest*), kepentingan tidak tetap (*variabel interest*), kepentingan umum (*general interest*), dan kepentingan khusus (*specific interest*).¹⁵² Sedangkan menurut Groom dan Light, konsep kepentingan nasional terkait dengan politik luar negeri, maka harus melihat isu-isu global dan pendekatan global sebagai pendekatan strategis.¹⁵³

2) Definisi Konseptual

Merujuk pada Nuechterlein, Couloumbis dan Wolfe, maupun Groom dan Light konsep kepentingan nasional ialah kepentingan suatu negara yang mencakup dimensi kepentingan nasional dengan segala stratanya, isu, dan pendekatan kepentingan negara tersebut dalam rangka menjaga keamanan dan pertahanan negara.¹⁵⁴

3) Definisi Operasional

Kepentingan nasional dalam penelitian ini ialah kepentingan suatu negara yang mencakup dimensi kepentingan nasional dengan segala stratanya, isu, dan pendekatan kepentingan negara tersebut dalam rangka menjaga keamanan dan pertahanan negara. Indikator dimensi kepentingan negara mencakup

151 Donald E. Nuechterlein (1976). *Op. Cit.*

152 Theodore A. Couloumbis and James H. Wolfe (1990). *Op. Cit.*

153 A.J.R. Groom and Margot Light (eds) (1994). *Op. Cit.*

154 Donald E. Nuechterlein. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies* 2 (3) 1976. pp. 246-266; Theodore A. Couloumbis and James H. Wolfe (1990). *Introduction to international relations: power and justice*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall; A.J.R. Groom and Margot Light (eds) (1994). *Contemporary International Relation, A Guide to Theory*. Printer, London.

pertahanan, ekonomi, tata internasional, dan ideologi. Indikator kepentingan nasional meliputi:

- a) Pertahanan
- b) Keamanan
- c) Demokrasi
- d) Ideologi
- e) Hukum
- f) Kebijakan
- g) Ekonomi
- h) SDA

Sementara itu, indikator isu dan pendekatan ialah isu global dan pendekatan global.

4) Kisi-kisi Kepentingan Nasional

Tabel 3.10. Kisi-kisi Instrumen Kepentingan Nasional

NO	VARIABEL	INDIKATOR	NO. ITEM	SKALA PEN-GUKURAN	ANALISIS DATA
1	Kepentingan Nasional	1. Pertahanan 2. Keamanan 3. Demokrasi 4. Ideologi 5. Hukum 6. Kebijakan 7. Ekonomi 8. SDA	49 50 51 52 53 54 55 56,57, 58, 59, 60,61, 62,63, 64	<i>Thurstone</i>	Deskriptif, Ekonometrika, dan <i>Structural Equation Model (SEM)</i>

Sumber: diolah oleh Peneliti (2021)

i. Pertahanan Negara (Z)

1) Deskripsi Teoretik

Menurut Yusgiantoro pertahanan negara bisa kuat bila ditopang dengan ketahanan energi. Baginya pertahanan perlu ditunjang oleh energi dan kehadiran energi juga perlu ditunjang oleh pertahanan, terutama di daerah perbatasan yang memiliki isu sensitif. Energi dan pertahanan dapat saling menguatkan dengan bersinergi, misalnya dengan melibatkan

dua kebijakan strategis, yaitu kebijakan energi nasional dan pertahanan negara.¹⁵⁵ Yusgiantoro juga menjelaskan pentingnya pemahaman tentang teori ancaman dalam kerangka konsep pertahanan negara, di mana menurut Yusgiantoro sejak 1990-an terjadi perubahan yang signifikan. Pemahaman atas ancaman yang bersifat aktual maupun potensial menjadi landasan bagi segala upaya penangkalan (*deterrence*).¹⁵⁶ Menghadapi ancaman yang semakin kompleks tersebut, Yusgiantoro menekankan pentingnya membangun kapabilitas pertahanan negara. Ini dilakukan dengan mendorong kemandirian nasional dengan membangun industri pertahanan yang tangguh. Dalam konsepnya, industri pertahanan dibangun dengan menekankan pentingnya kontribusi industri pertahanan bagi perekonomian nasional.

2) Definisi Konseptual

Merujuk pada Yusgiantoro pertahanan negara memiliki relevansi dengan konsep geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi. Pertahanan negara berkorelasi dengan kekuatan ekonomi, energi, dan kemampuan dalam membaca ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar.¹⁵⁷

3) Definisi Operasional

Pertahanan negara dalam penelitian mencakup pemahaman terhadap konsep ekonomi, energi, dan ancaman yang sejalan dengan konsep pemikiran Geopolitik Soekarno. Indikator pertahanan negara mencakup:

a) Strategi

155 Purnomo Yusgiantoro (2000) dan (2015). *Op. Cit.*

156 Purnomo Yusgiantoro (2000) dan (2015). *Op. Cit.*

157 Purnomo Yusgiantoro. (2000). *Op. Cit*; Purnomo Yusgiantoro. (2000b). *Op. Cit.* Purnomo Yusgiantoro. (2015). *Op. Cit*; Juniawan Priyono dan Purnomo Yusgiantoro. (2017). *Op. Cit.*

- b) Doktrin
 - c) Postur
 - d) Industri pertahanan
- 4) Kisi-kisi Pertahanan Negara

Tabel 3.11. Kisi-kisi Instrumen Pertahanan Negara

NO	VARIABEL	INDIKATOR	NO. ITEM	SKALA PEN-GUKURAN	ANALISIS DATA
1	Pertahanan	1. Strategi 2. Doktrin 3. Postur 4. Industri Pertahanan	65 66 67 68,69, 70,71, 72,73	<i>Thurstone</i>	Deskriptif, Ekonometrika, dan <i>Structural Equation Model</i> (SEM)

Sumber: diolah oleh Peneliti (2021)

3.4 Pengukuran 7 Variabel Geopolitik Soekarno, Kepentingan Nasional, dan Pertahanan Negara

Pembuktian kuantitatif terkait relevansi dan signifikansi konstruk PGC serta pertautannya dengan kepentingan nasional dan pertahanan negara dilakukan dengan metode deskriptif dan *Structural Equation Model* (SEM). Tujuh variabel pemikiran Geopolitik Soekarno sebagai variabel eksogen, kepentingan nasional sebagai variabel *intervening* dan pertahanan negara sebagai variabel endogen. Pada konteks ini, responden yang menjadi sasaran ialah dosen Program Studi Sejarah, Geografi, Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Hubungan Internasional, Pertahanan, dan Geopolitik yang tersebar di 120 kampus di 31 provinsi dengan jumlah sebanyak 1.274 orang. Dari hasil olah data terdapat 49 data *outlier*, sehingga data yang digunakan sebanyak 1.225.

Pengolahan data dilakukan dengan empat tahapan yaitu:

- a. Pengujian validitas dan reliabilitas
- b. Deskripsi data

- c. Pengujian korelasi tujuh variabel dengan pemikiran Geopolitik Soekarno
- d. Pengujian hipotesis dengan *Structural Equation Model* (SEM).

3.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Suatu studi akan mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan jika memiliki kuesioner yang andal dan konsisten atau valid dan reliabel. Guna mencapai hal tersebut dilakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap kepentingan nasional dan pertahanan negara. Jumlah sampel yang digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas sebanyak 100 responden, jumlah ini sudah cukup karena lebih besar dari ketentuan jumlah sampel minimal sebesar 30 responden.

Pengujian validitas item pernyataan setiap variabel eksogen maupun endogen menggunakan rumus *Pearson Product Moment*¹⁵⁸, pengujian dilakukan terhadap nilai korelasi antara item pernyataan dengan variabel laten. Hasil uji validitas kuesioner terhadap 7 variabel Geopolitik Soekarno, kepentingan nasional, dan pertahanan negara memiliki nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05 atau *r* hitung lebih besar dari *r* tabel yakni sebesar 0,195, sehingga diputuskan untuk menolak H_0 . Kesimpulan pada nilai tersebut berarti semua item pernyataan valid atau mampu merefleksikan masing-masing variabel eksogen dan endogen.

Tabel 3.12. Pengujian Validitas Variabel Pemikiran Geopolitik Soekarno Terhadap Kepentingan Nasional dan Pertahanan

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Tingkat Hubungan	Keterangan
DEMOGRAFI				
Q1	0,573	0,195	Sedang	Valid
Q2	0,897	0,195	Sangat Kuat	Valid

158 Ronald E. Walpole. (1992). *Pengantar Statistika*, Terbitan ke-3. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Tingkat Hubungan	Keterangan
Q3	0,863	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q4	0,879	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q5	0,845	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q6	0,895	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q7	0,882	0,195	Sangat Kuat	Valid
TERITORIAL				
Q8	0,889	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q9	0,946	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q10	0,874	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q11	0,872	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q12	0,915	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q13	0,866	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q14	0,805	0,195	Sangat Kuat	Valid
SUMBER DAYA ALAM				
Q15	0,881	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q16	0,667	0,195	Kuat	Valid
Q17	0,887	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q18	0,899	0,195	Sangat Kuat	Valid
MILITER				
Q19	0,819	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q20	0,833	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q21	0,825	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q22	0,899	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q23	0,808	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q24	0,848	0,195	Sangat Kuat	Valid
POLITIK				
Q25	0,839	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q26	0,875	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q27	0,897	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q28	0,858	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q29	0,872	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q30	0,876	0,195	Sangat Kuat	Valid

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Tingkat Hubungan	Keterangan
Q31	0,886	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q32	0,809	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q33	0,938	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q34	0,906	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q35	0,833	0,195	Sangat Kuat	Valid
KOEKSISTENSI DAMAI				
Q36	0,911	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q37	0,814	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q38	0,912	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q39	0,911	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q40	0,893	0,195	Sangat Kuat	Valid
SAINS DAN TEKNOLOGI				
Q41	0,854	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q42	0,85	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q43	0,864	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q44	0,768	0,195	Kuat	Valid
Q45	0,875	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q46	0,899	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q47	0,905	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q48	0,842	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q49	0,874	0,195	Sangat Kuat	Valid
KEPENTINGAN NASIONAL				
Q50	0,825	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q51	0,698	0,195	Kuat	Valid
Q52	0,808	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q53	0,803	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q54	0,787	0,195	Kuat	Valid
Q55	0,848	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q56	0,839	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q57	0,778	0,195	Kuat	Valid
Q58	0,775	0,195	Kuat	Valid
Q59	0,894	0,195	Sangat Kuat	Valid

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Tingkat Hubungan	Keterangan
Q60	0,833	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q61	0,775	0,195	Kuat	Valid
Q62	0,808	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q63	0,847	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q64	0,894	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q65	0,839	0,195	Sangat Kuat	Valid
PERTAHANAN				
Q66	0,884	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q67	0,834	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q68	0,83	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q69	0,887	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q70	0,906	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q71	0,917	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q72	0,889	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q73	0,91	0,195	Sangat Kuat	Valid
Q74	0,823	0,195	Sangat Kuat	Valid

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022).

Sementara itu pengujian reliabilitas dilakukan terhadap setiap variabel. Hasil pengujian reliabilitas dengan menggunakan *alpha cronbach*¹⁵⁹ menyatakan bahwa semua variabel yang digunakan dalam studi ini, yaitu demografi, teritorial, sumber daya alam, militer, politik, koeksistensi damai, sains dan teknologi, serta kepentingan nasional dan pertahanan memiliki nilai *alpha cronbach* lebih besar dari 0,6. Dapat disimpulkan bahwa tujuh variabel independen pemikiran Geopolitik Soekarno, variabel kepentingan nasional, dan variabel pertahanan negara sudah reliabel.

159 Sugiyono (2007). *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan RdanD*. Bandung: Alfabeta.

Tabel 3.13. Pengujian Reliabilitas Variabel Pemikiran Geopolitik Soekarno bagi Kepentingan Nasional dan Pertahanan

No	Variabel	Alpha Cronbach's	Tingkat Hubungan	Reliabilitas
1	Demografi	0,924	Sangat Tinggi	Reliabel
2	Teritorial	0,950	Sangat Tinggi	Reliabel
3	Sumber Daya Alam	0,858	Sangat Tinggi	Reliabel
4	Militer	0,926	Sangat Tinggi	Reliabel
5	Politik	0,968	Sangat Tinggi	Reliabel
6	Koeksistensi Damai	0,929	Sangat Tinggi	Reliabel
7	Sains dan Teknologi	0,952	Sangat Tinggi	Reliabel
8	Kepentingan Nasional	0,965	Sangat Tinggi	Reliabel
9	Pertahanan Negara	0,961	Sangat Tinggi	Reliabel

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

3.4.2 Deskripsi Data

Secara deskriptif relevansi dan signifikansi konstruk PGC (tujuh variabel geopolitik: Demografi/DEM, Teritorial/TER, Sumber Daya Alam/SDA, Militer/MIL, Politik/POL, Koeksistensi Damai/KOE, dan Sains dan Teknologi/TEK) serta pertautannya dengan kepentingan nasional dan pertahanan negara dapat dilihat dari rangkuman sebaran data berikut ini (Tabel 3.14).

Tabel 3.14. Sebaran Rata-Rata pada Setiap Variabel

Item	Banyak Responden	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DEM	1225	4	9	8,02	0,817
TER	1225	4	9	8,01	0,836

Item	Banyak Responden	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SDA	1225	4	9	7,93	0,951
MIL	1225	1	9	7,83	1,119
POL	1225	4	9	8,03	0,873
KOE	1225	4	9	7,93	0,945
TEK	1225	4	9	7,99	0,848
KEP	1225	5	9	8,03	0,815
PER	1225	5	9	8,12	0,817

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

Dari Tabel 3.14 diketahui sebaran rata-rata pada setiap variabel menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel tertinggi terdapat pada variabel Pertahanan yang memiliki nilai rata-rata 8,12 dan standar deviasi 0,817. Di urutan kedua, terdapat dua rata-rata nilai variabel yang sama, yaitu pada variabel Kepentingan Nasional (nilai rata-rata 8,03 dan standar deviasi 0,815) dan variabel Politik (nilai rata-rata 8,03 dan standar deviasi 0,73). Sementara itu, variabel Militer memiliki nilai rata-rata terendah dengan nilai 7,83 dan standar deviasi 1,119. Selain penyajian sebaran rata-rata pada setiap variabel, disajikan juga sebaran rata-rata berdasarkan indikator (Tabel 3.15).

Tabel 3.15. Sebaran Rata-Rata setiap Indikator

Variabel	Indikator	Jumlah Resp.	Mean	Std. Deviation
Demografi	KEP	1225	7,7837	1,36353
	GIZ	1225	8,2539	0,98934
	KES	1225	6,2133	0,80804
	SOS	1225	8,2367	1,04449
	BUD	1225	8,2024	1,04779

Variabel	Indikator	Jumlah Resp.	Mean	Std. Deviation
Teritorial	KON	1225	8,2196	0,93232
	IKL	1225	7,9706	1,23502
	TTR	1225	8,1589	0,88078
SDA	SDE	1225	8,2539	1,14191
	EKO	1225	8,1278	0,88190
Militer	INT	1225	8,1911	0,94482
	ALT	1225	8,1411	0,88147
Politik	IDE	1225	8,1528	0,88791
	HKM	1225	8,1610	0,89571
	DIP	1225	8,1541	0,88888
Koeksistensi Damai	TEK	1225	8,1582	0,89218
	KAL	1225	8,1582	0,89218
Sains dan Teknologi	PND	1225	8,1564	0,89110
	COI	1225	8,1569	0,89158
	ILD	1225	8,1568	0,89132
Kepentingan Nasional	PRT	1225	8,1569	0,89135
	KEM	1225	8,1568	0,89136
	DEM	1225	8,1568	0,89142
	IDN	1225	7,9967	1,19229
	HKN	1225	8,1771	1,14495
	KEB	1225	8,1102	0,86433
	EKN	1225	8,1436	0,96490
	SUM	1225	8,1272	,90270

Variabel	Indikator	Jumlah Resp.	Mean	Std. Deviation
Pertahanan	STR	1225	8,1272	0,90270
	DOK	1225	8,0800	1,07640
	POS	1225	8,1040	0,87409
	IND	1225	8,1040	0,87409

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

Dilihat dari Tabel 3.15, pada variabel Demografi, nilai rata-rata tertinggi adalah indikator Gizi (GZI) dengan nilai 8,2539 dan indikator terendah adalah kesehatan yang memiliki nilai rata-rata 6,2133. Untuk variabel Teritorial, indikator Konsep Tanah Air (KON) merupakan yang tertinggi dengan nilai mencapai 8,2196 dan indikator terendahnya adalah Iklim (IKL) dengan nilai rata-rata 7,9706. Adapun pada variabel Sumber Daya Alam, indikator *State Driven Economic* (SDE) memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 8,2196 dan indikator Ekologi (EKO) memiliki nilai rata-rata terendah, hanya 7,9706.

Di dalam variabel Militer, indikator Inteligen (INT) menempati nilai rata-rata tertinggi 8,1911 dan Kekuatan Alutsista (ALT) menjadi indikator terendah, dengan nilai rata-rata 8,1411. Sementara itu, pada variabel Politik, indikator Hukum (HKM) mendapat rata-rata nilai tertinggi dengan 8,1610 dan indikator Ideologi (IDE) adalah yang terendah 8,1528. Sedangkan variabel Koeksistensi Damai, terdapat nilai rata-rata yang sama antara indikator Tidak Ekspansif (KAL) dan indikator Kerja Sama dan Aliansi (KAL) dengan nilai rata-rata 8,1582.

Adapun variabel Sains dan Teknologi, indikator tertinggi adalah *City of Intellect* (COI), memiliki nilai rata-rata 8,1569 dan terendah indikator Pendidikan (PND) rata-rata nilai 8,1564. Indikator tertinggi dalam variabel Kepentingan Nasional adalah indikator Pertahanan (PRT) dan memiliki nilai rata-rata 8,1569. Sementara indikator Ideologi (IDN) memiliki nilai rata-rata terendah dengan 7,9967. Sedangkan pada variabel Pertahanan, indikator Strategi

(STR) mendapat nilai tertinggi sebesar 8,1272 dan indikator Doktrin sebagai indikator terendah dengan nilai rata-rata 8,0800.

3.4.3 Hubungan Tujuh Variabel dengan Pemikiran Geopolitik Soekarno

Tujuh variabel pemikiran Geopolitik Soekarno merupakan ruang lingkup dari *body of knowledge* pemikiran Geopolitik Soekarno. Tujuh variabel tersebut mencakup DEM, TER, SDA, MIL, POL, KOE, dan TEK. Sub bab ini secara khusus menjelaskan konstruk pemikiran Geopolitik Soekarno dalam konteks tujuh variabel/faktornya dengan menggunakan analisis korelasi. Hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:

$$H_0 : \rho_i = 0, i = 1, 2, 3, \dots, 7$$

$$H_0 : \rho_i \neq 0, i = 1, 2, 3, \dots, 7$$

Kriteria pengujian tolak H_0 jika nilai $r_{hitung} \geq r_{tabel}$. Artinya terdapat korelasi antar variabel/faktor dengan pemikiran Geopolitik Soekarno atau faktor-faktor tersebut mampu merefleksikan pemikiran Geopolitik Soekarno.

Hasil perhitungan diperoleh nilai korelasi secara berurutan DEM, TER, SDA, MIL, POL, KOE dan TEK sebesar 0,815, 0,842, 0,206, 0,915, 0,915, 0,853, dan 0,846. Nilai korelasi faktor-faktor tersebut termasuk kategori sangat kuat karena terletak pada interval 0,8 – 1,0. Selain itu terdapat satu nilai korelasi termasuk kategori rendah, yaitu faktor SDA. Uji korelasi antara faktor-faktor dengan pemikiran Geopolitik Soekarno dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dan r_{tabel} . Berdasarkan tabel 18, diperoleh nilai r_{hitung} pada semua faktor pemikiran Geopolitik Soekarno yang lebih besar dari r_{tabel} 0,056 atau nilai signifikansi lebih kecil dari *alpha* 0,05. Dari *output* SPSS diperoleh taraf signifikansi 0,000 untuk semua faktor, artinya ketujuh variabel/faktor tersebut terbukti membangun konstruk pemikiran Geopolitik Soekarno.

Urutan hubungan berdasarkan nilai korelasi dari yang paling besar yaitu militer dan politik sebesar 0,915, koeksistensi damai sebesar 0,853, sains dan teknologi sebesar 0,846, teritorial sebesar 0,842, demografi sebesar 0,815 dan yang paling rendah yaitu sumber daya alam sebesar 0,206, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.16. Hubungan 7 Variabel dengan Pemikiran Geopolitik Soekarno

Faktor	r Hitung	r Tabel	Tingkat Hubungan	Signifikansi
DEM	0,815	0,056	Sangat Kuat	Signifikan
TER	0,842	0,056	Sangat Kuat	Signifikan
SDA	0,206	0,056	Rendah	Signifikan
MIL	0,915	0,056	Sangat Kuat	Signifikan
POL	0,915	0,056	Sangat Kuat	Signifikan
KOE	0,853	0,056	Sangat Kuat	Signifikan
TEK	0,846	0,056	Sangat Kuat	Signifikan

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

3.4.4 Structural Equation Model (SEM)

Selain diuji secara deskriptif, pembuktian kuantitatif terkait relevansi dan signifikansi konstruk PGC serta pertautannya dengan kepentingan nasional dan pertahanan negara juga diuji dengan SEM untuk melihat model hubungan keeratan dan kausalitas. Proses perhitungan data untuk menguji hipotesis menggunakan bantuan AMOS (*Analysis of Moment Structure*) yang sering digunakan untuk penelitian sosial termasuk strategi pertahanan.¹⁶⁰

- a. Pengujian model pengukuran
- b. Estimasi parameter dan pengujian hipotesis model persamaan struktural pertama
- c. Respesifikasi model persamaan struktural pertama
- d. Estimasi parameter dan pengujian hipotesis model persamaan struktural kedua
- e. Pengujian kebaikan model persamaan struktural kedua.¹⁶¹

¹⁶⁰ David W. Kaplan (2000). *Structural Equation Modeling: Foundations and Extensions*. Thousand Oaks: Sage Publications.

¹⁶¹ Augusty Tae Ferdinand (2006). *Structural Equation Modelling Dalam Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

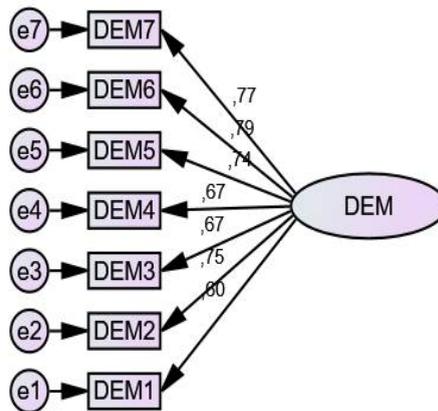
3.4.4.1 Pengujian Model Pengukuran

3.4.4.1.1 *Convergent Validity*

Pengujian model pengukuran dimaksudkan untuk mengukur hubungan setiap pernyataan atau indikator terhadap variabel sebagai uji validitas. Dilakukan dengan melihat nilai muatan faktor melalui pengujian hipotesis yang diajukan. Ketentuan pengujian, jika nilai muatan faktor *standardized estimates* model persamaan pengukuran lebih besar dari nilai kritik 0.6, tolak H_0 atau pernyataan atau indikator merefleksikan variabel laten.

3.4.4.1.2 Demografi

Variabel Demografi dibangun oleh lima indikator yang dikembangkan menjadi tujuh pernyataan. Lima indikator tersebut meliputi Kependudukan (Q_1), Gizi (Q_2), Kesehatan (Q_3 , Q_4 , dan Q_5), Sosial (Q_6), dan Budaya (Q_7). *Output* hasil perhitungan muatan faktor pada model pengukuran demografi terlihat dalam Bagan 3.1.



Bagan 3.1. Model Pengukuran Demografi

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

Adapun hipotesis yang diuji untuk model pengukuran demografi sebagai berikut.

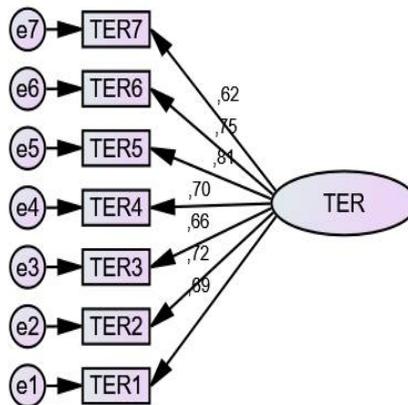
$$H_0 : \rho_i = 0, i = 1, 2, 3, \dots, 7$$

$$H_0 : \rho_i \neq 0, i = 1, 2, 3, \dots, 7$$

Berdasarkan bagan 3.1, diperoleh nilai muatan faktor secara berurutan DEM1, DEM2, DEM3, DEM4, DEM5, DEM6 dan DEM7 sebesar 0.60, 0.75, 0.67, 0.67, 0.74, 0.79 dan 0.77 yang lebih besar dari 0.6 sehingga putusan tolak H_0 . Hal ini mengindikasikan bahwa semua indikator mampu merefleksikan variabel laten demografi.

3.4.4.1.3 Teritorial

Variabel Teritorial dibangun oleh tiga indikator yang dikembangkan menjadi tujuh pernyataan. Tiga indikator tersebut meliputi indikator Konsep Tanah Air (Q8 dan Q9), indikator Iklim (Q10), dan indikator Tata Ruang Geopolitik Nusantara (Q11, Q12, Q13, Q14). *Output* hasil perhitungan muatan faktor pada model pengukuran teritorial tercatat dalam Bagan 3.2.



Bagan 3.2. Model Pengukuran Teritorial

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

Adapun hipotesis yang diuji untuk model pengukuran teritorial sebagai berikut.

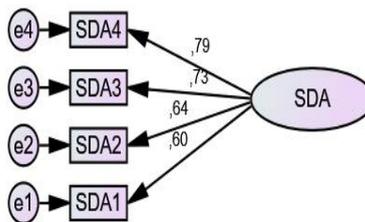
$$H_0 : \rho_i = 0, i = 1, 2, 3, \dots, 7$$

$$H_0 : \rho_i \neq 0, i = 1, 2, 3, \dots, 7$$

Berdasarkan Bagan 3.2, diperoleh nilai muatan faktor secara berurutan TER1, TER2, TER3, TER4, TER5, TER6 dan TER7 sebesar 0.69, 0.72, 0.66, 0.70, 0.84, 0.75 dan 0.62 yang lebih besar dari 0.6 sehingga putusan tolak H_0 . Hal ini mengindikasikan bahwa semua indikator mampu merefleksikan variabel laten teritorial.

3.4.4.1.4 Sumber Daya Alam

Variabel SDA dibangun oleh dua indikator yang dikembangkan menjadi empat pernyataan. Dua indikator tersebut meliputi *State Driven Economic* (Q15) dan indikator Ekologi (Q16, Q17, dan Q18). *Output* hasil perhitungan muatan faktor pada model pengukuran SDA tercatat dalam Bagan 3.3.



Bagan 3.3. Model Pengukuran SDA

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

Adapun hipotesis yang diuji untuk model pengukuran SDA sebagai berikut.

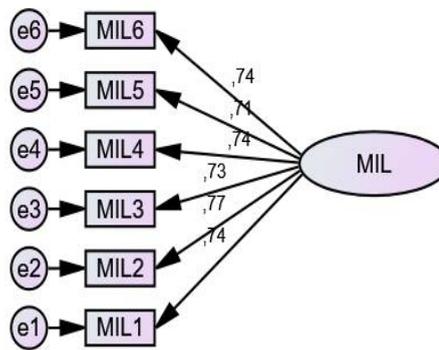
$$H_0 : \rho_i = 0, i = 1, 2, 3, 4$$

$$H_0 : \rho_i \neq 0, i = 1, 2, 3, 4$$

Berdasarkan Bagan 3.3, diperoleh nilai muatan faktor secara berurutan SDA1, SDA2, SDA3 dan SDA4 sebesar 0.60, 0.64, 0.73 dan 0.79 yang lebih besar dari 0.6 sehingga putusan tolak H_0 . Hal ini mengindikasikan bahwa semua indikator mampu merefleksikan variabel laten SDA.

3.4.4.1.5 Militer

Variabel Militer dibangun oleh dua indikator yang dikembangkan menjadi enam pernyataan. Dua indikator tersebut meliputi indikator Intelijen (Q19 dan Q20) dan Kekuatan Alutsista (Q21, Q22, Q23, dan Q24). Hasil perhitungan muatan faktor pada model pengukuran militer sebagaimana dalam Bagan 3.4.



Bagan 3.4. Model Pengukuran Militer

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

Adapun hipotesis yang diuji untuk model pengukuran militer sebagai berikut.

$$H_0 : \rho_i = 0, i = 1, 2, 3, \dots, 6$$

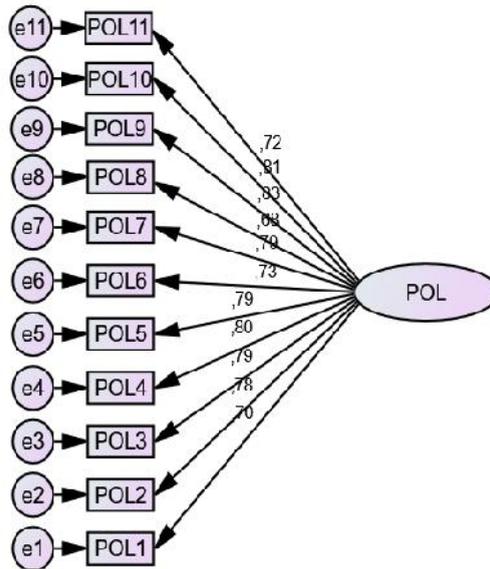
$$H_0 : \rho_i \neq 0, i = 1, 2, 3, \dots, 6$$

Berdasarkan Bagan 3.4, diperoleh nilai muatan faktor secara berurutan MIL1, MIL2, MIL3, MIL4, MIL5 dan MIL6 sebesar 0.74, 0.77, 0.73, 0.74, 0.71 dan 0.74 yang lebih besar dari 0.6 sehingga memutuskan tolak H_0 . Hal ini mengindikasikan bahwa semua indikator mampu merefleksikan variabel laten militer.

3.4.4.1.6 Politik

Variabel Politik dibangun oleh tiga indikator yang dikembangkan menjadi sebelas pernyataan. Tiga indikator tersebut

meliputi indikator Ideologi (POL1, POL2, dan POL3), indikator Hukum (POL4, POL5, dan POL6), dan indikator Diplomasi (POL7, POL8, POL9, POL10, dan POL11). Hasil perhitungan muatan faktor pada model pengukuran politik tertera dalam Bagan 3.5.



Bagan 3.5 Model Pengukuran Politik

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

Adapun hipotesis yang diuji untuk model pengukuran politik sebagai berikut.

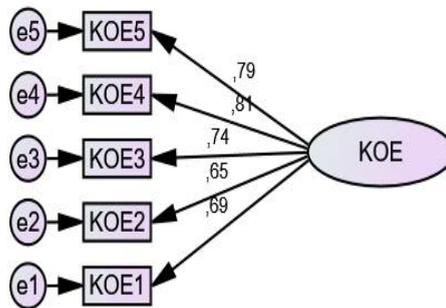
$$H_0 : \rho_i = 0, i = 1, 2, 3, \dots, 11$$

$$H_0 : \rho_i \neq 0, i = 1, 2, 3, \dots, 11$$

Berdasarkan Bagan 3.5, diperoleh nilai muatan faktor secara berurutan POL1, POL2, POL3, POL4, POL5, POL6, POL7, POL8, POL9, POL10, dan POL11 sebesar 0,70, 0,78, 0,79, 0,80, 0,79, 0,73, 0,79, 0,68, 0,83, 0,81 dan 0,72 yang lebih besar dari 0,6 sehingga memutuskan tolak H_0 . Hal ini mengindikasikan bahwa semua indikator mampu merefleksikan variabel laten politik.

3.4.4.1.7 Koeksistensi Damai

Variabel Koeksistensi damai dibangun oleh dua indikator yang dikembangkan menjadi lima pernyataan. Dua indikator tersebut meliputi indikator Tidak Ekspansif (KOE1 dan KOE2) dan indikator Kerja sama dan Aliansi (KOE3, KOE4, dan KOE5). Hasil perhitungan muatan faktor pada model pengukuran koeksistensi damai tertera dalam Bagan 3.6.



Bagan 3.6. Model Pengukuran Koeksistensi Damai

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

Adapun hipotesis yang diuji untuk model pengukuran koeksistensi sebagai berikut.

$$H_0 : \rho_i = 0, i = 1, 2, 3, \dots, 5$$

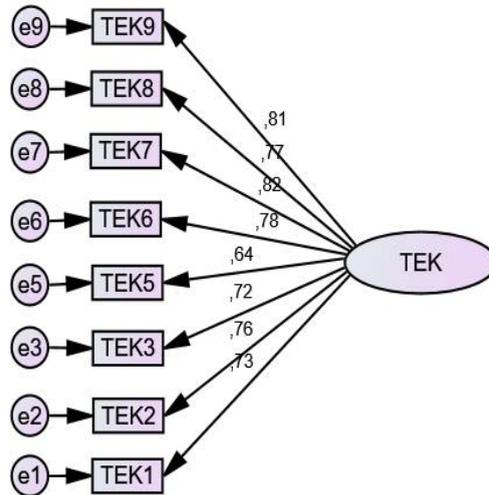
$$H_0 : \rho_i \neq 0, i = 1, 2, 3, \dots, 5$$

Berdasarkan Bagan 3.6, diperoleh nilai muatan faktor secara berurutan KOE1, KOE2, KOE3, KOE4, KOE5 sebesar 0,69, 0,65, 0,74, 0,81 dan 0,79 yang lebih besar dari 0,6 sehingga putusan tolak H_0 . Hal ini mengindikasikan bahwa semua indikator mampu merefleksikan variabel laten koeksistensi damai.

3.4.4.1.8 Sains dan Teknologi

Variabel Sains dan Teknologi dibangun oleh tiga indikator yang dikembangkan menjadi delapan pernyataan. Tiga indikator

tersebut meliputi indikator Pendidikan (TEK1, TEK2, dan TEK3), *City of Intellect* (TEK5 dan KTEK6), dan Ilmu Dasar (TEK7 dan TEK8). Hasil perhitungan muatan faktor pada model pengukuran sains dan teknologi tertera dalam Bagan 3.7.



Bagan 3.7. Model Pengukuran Sains dan Teknologi

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

Adapun hipotesis yang diuji untuk model pengukuran sains dan teknologi sebagai berikut.

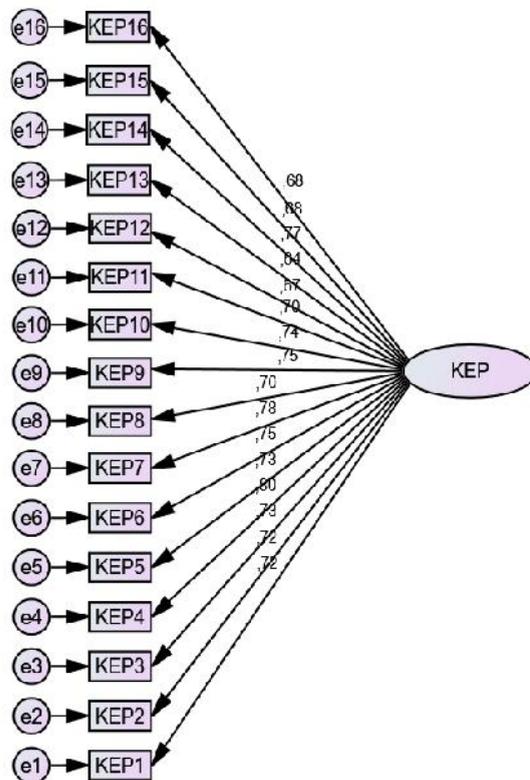
$$H_0: \rho_i = 0, i = 1, 2, 3, \dots, 8$$

$$H_0: \rho_i \neq 0, i = 1, 2, 3, \dots, 8$$

Berdasarkan Bagan 3.7, diperoleh nilai muatan faktor secara berurutan TEK1, TEK2, TEK3, TEK5, TEK6, TEK7 dan TEK8 sebesar 0.73, 0.76, 0.72, 0.64, 0.78, 0.82, 0.77 dan 0.81 yang lebih besar dari 0.6 sehingga putus tolak H_0 . Hal ini mengindikasikan bahwa semua indikator mampu merefleksikan variabel laten sains dan teknologi.

3.4.4.1.9 Kepentingan Nasional

Variabel Kepentingan Nasional dibangun oleh delapan indikator yang dikembangkan menjadi 16 pernyataan. Delapan indikator tersebut meliputi indikator Pertahanan (KEP1, KEP2, dan KEP3), Keamanan (KEP4, dan KEP5), Demokrasi (KEP6, dan KEP7), Ideologi (KEP8), Hukum (KEP9), Kebijakan (KEP10, KEP11, dan KEP12), Ekonomi (KEP13, KEP14) dan SDA (KEP15 dan KEP16). Hasil perhitungan muatan faktor pada model pengukuran kepentingan nasional tertera dalam Bagan 3.8.



Bagan 3.8. Model Pengukuran Kepentingan Nasional

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

Adapun hipotesis yang diuji untuk model pengukuran kepentingan nasional sebagai berikut.

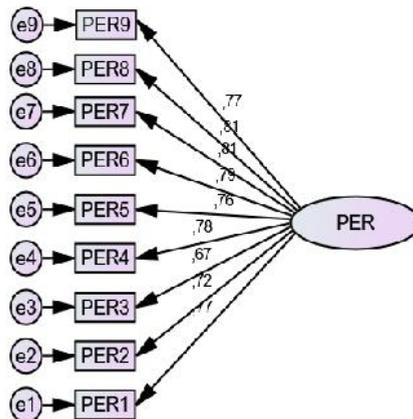
$$H_0 : \rho_i = 0, i = 1, 2, 3, \dots, 16$$

$$H_0 : \rho_i \neq 0, i = 1, 2, 3, \dots, 16$$

Berdasarkan Bagan 3.8, diperoleh nilai muatan faktor secara berurutan KEP1, KEP2, KEP3, KEP4, KEP5, KEP6, KEP7, KEP8, KEP9, KEP10, KEP11, KEP12, KEP13, KEP14, KEP15 dan KEP16 sebesar 0,72, 0,72, 0,73, 0,80, 0,73, 0,75, 0,78, 0,70, 0,75, 0,74, 0,70, 0,67, 0,64, 0,77, 0,68 dan 0,68 yang lebih besar dari 0.6 sehingga memutuskan tolak H_0 . Hal ini mengindikasikan bahwa semua indikator mampu merefleksikan variabel laten kepentingan nasional.

3.4.4.1.10 Pertahanan

Variabel Pertahanan dibangun oleh empat indikator yang dikembangkan menjadi sembilan pernyataan. Empat indikator tersebut meliputi indikator Strategi (PER1, PER2, dan PER3), Doktrin (PER4), Postur (PER5 dan PER6) dan Industri Pertahanan (PER7, PER8 dan PER9). Hasil perhitungan muatan faktor pada model pengukuran pertahanan tercatat dalam Bagan 3.9.



Bagan 3.9. Model Pengukuran Pertahanan

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

Adapun hipotesis yang diuji untuk model pengukuran pertahanan sebagai berikut.

$$H_0 : \rho_i = 0, i = 1, 2, 3, \dots, 9$$

$$H_0 : \rho_i \neq 0, i = 1, 2, 3, \dots, 9$$

Berdasarkan Bagan 3.9, diperoleh nilai muatan faktor secara berurutan PER1, PER2, PER3, PER5, PER6, PER7, PER8 dan PER9 sebesar 0,77, 0,72, 0,67, 0,78, 0,76, 0,79, 0,81, 0,81 dan 0,77 yang lebih besar dari 0,6 sehingga putuskan tolak H_0 . Hal ini mengindikasikan bahwa semua indikator mampu merefleksikan variabel laten pertahanan.

3.4.4.2 Estimasi Parameter dan Pengujian Hipotesis Model Persamaan Struktural Pertama

Pengujian analisis SEM dilakukan melalui dua tahapan pemodelan yaitu model pertama yang melibatkan tujuh variabel bebas, variabel intervening Kepentingan Nasional dan Pertahanan dengan 1274 responden sementara itu model kedua hanya melibatkan 1225 responden. Dari kedua model diperoleh model terbaik yang memiliki kriteria *goodness of fit* yang layak serta koefisien determinasi yang cukup tinggi. Dalam hal ini peneliti fokus untuk membahas model kedua yang dinyatakan layak.

Pengujian koefisien estimasi parameter pengaruh langsung enam variabel eksogen terhadap kepentingan nasional secara parsial dari model struktural pertama dilakukan melalui pengujian hipotesis berikut.

$$H_0 : \beta_i \leq 0, i = 1, 2, 3, \dots, 6$$

$$H_1 : \beta_i > 0, i = 1, 2, 3, \dots, 6$$

dengan:

β_1 : koefisien pengaruh DEM terhadap KEP

β_2 : koefisien pengaruh TER terhadap KEP

β_3 : koefisien pengaruh SDA terhadap KEP

β_4 : koefisien pengaruh POL terhadap KEP

β_5 : koefisien pengaruh KOE terhadap KEP

β_6 : koefisien pengaruh TEK terhadap KEP

Ketentuan pengujian, jika nilai $sig \leq \alpha = 0,05$, tolak H_0 atau koefisien penduga signifikan pada taraf nyata α . Berdasarkan tabel nilai estimasi parameter, koefisien pengaruh enam variabel eksogen terhadap variabel endogen kepentingan nasional secara berurutan DEM, TER, SDA, POL, KOE dan TEK sebesar 0,003, -0,074, 0,202, 0,073, 0,267 dan 0,466. Nilai *P-value* SDA, KOE dan TEK sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05, tolak H_0 . Hal ini berarti variabel SDA, KOE dan TEK berpengaruh terhadap kepentingan nasional pada taraf nyata 5%. Sedangkan variabel lain pengaruhnya tidak signifikan secara statistik.

Selanjutnya pengujian koefisien pengaruh bersama 7 variabel pemikiran Geopolitik Soekarno dan variabel *intervening* kepentingan nasional terhadap pertahanan, dilakukan melalui pengujian hipotesis berikut.

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5 = \mu_6 = \mu_7 = \mu_8 = 0$$

H_1 : minimal ada satu nilai μ yang tidak sama dengan nol

dengan:

- μ_1 : koefisien pengaruh DEM terhadap PER
- μ_2 : koefisien pengaruh TER terhadap PER
- μ_3 : koefisien pengaruh SDA terhadap PER
- μ_4 : koefisien pengaruh MIL terhadap PER
- μ_5 : koefisien pengaruh POL terhadap PER
- μ_6 : koefisien pengaruh KOE terhadap PER
- μ_7 : koefisien pengaruh TEK terhadap PER
- μ_8 : koefisien pengaruh KEP terhadap PER

Hasil estimasi parameter DEM, TER, SDA, MIL, POL, KOE, TEK dan KEP terhadap pertahanan secara berurutan sebesar 0,141, 0,145, -0,131, 0,114, -0,074, -0,110, 0,078 dan 0,897. Nilai *P-value* DEM, TER, SDA, MIL dan KEP lebih kecil dari taraf alpha 5%, kemudian POL dan KOE signifikan pada taraf nyata 10%, dan TEK signifikan pada taraf nyata 20%. Artinya, variabel DEM, TER, SDA, MIL dan KEP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertahanan pada taraf nyata 5%. Berdasarkan hasil estimasi parameter terdapat beberapa koefisien bertanda negatif serta tidak

signifikan. Hal ini belum sesuai dengan temuan analisis kualitatif CDA dan fenomenologi. Oleh karena itu, perlu penanganan lebih lanjut melalui respesifikasi model persamaan struktural pertama.

Tabel 3.17. Estimasi Parameter dan Pengujian Parameter Model Pertama

Variabel	Estimasi Parameter	Standar Error	Construct Reliability	P-value
KEP ← DEM	,003	,039	0,078	0,938
KEP ← TEK	,466	,046	10,155	0,000
KEP ← TER	-,074	,056	-1,335	0,182
KEP ← SDA	,202	,056	3,626	0,000
KEP ← POL	,073	,040	1,850	0,064
KEP ← KOE	,267	,055	4,834	0,000
PER ← DEM	,141	,042	3,322	0,000
PER ← TEK	,078	,058	1,348	0,178
PER ← KEP	,897	,077	11,656	0,000
PER ← TER	,145	,061	2,395	0,017
PER ← SDA	-,131	,065	-2,002	0,045
PER ← POL	-,074	,044	-1,702	0,089
PER ← MIL	,114	,042	2,704	0,007
PER ← KOE	-,110	,063	-1,760	0,078

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

3.4.4.3 Pengujian Kebaikan Model Persamaan Struktural Pertama

Model struktural pertama pemikiran Geopolitik Soekarno dalam penelitian ini dibangun oleh 7 variabel eksogen demografi, teritorial, sumber daya alam, militer, politik, koeksistensi damai, serta sains dan teknologi. Kemudian pertahanan sebagai variabel endogen serta kepentingan nasional sebagai variabel *intervening*. Arah pengaruh yang dibentuk sesuai dengan teori hasil temuan analisis kualitatif CDA dan Fenomenologi, yaitu 7 variabel eksogen berpengaruh langsung terhadap pertahanan, selain itu terdapat enam

variabel eksogen kecuali militer yang memiliki pengaruh melalui kepentingan sebagai pengaruh tidak langsung terhadap pertahanan. Pengujian kebaikan model persamaan struktural pertama pemikiran Geopolitik Soekarno menggunakan kriteria *goodness of fit*.

Hasil perhitungan nilai *goodness of fit* sebagaimana tercatat dalam Tabel 3.18. Model layak jika sebagian besar kriteria pengujian sudah memenuhi *cut off value*. Ketentuan pengujian, *Chi square* jika nilai X^2_{hitung} kecil atau $< X_{tabel}$, CMIN/DF jika ≥ 5 , GFI jika $\geq 0,90$, RMSEA jika $\leq 0,08$, AGFI $\geq 0,90$, TLI jika $\geq 0,95$, NFI jika $\geq 0,90$, PNFI jika 0,60-0,90 dan PGFI jika $\geq 0,95$. Berdasarkan hasil estimasi parameter, diperoleh nilai X^2_{hitung} sebesar 12,791 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,404, artinya kriteria belum fit. Nilai CMIN/DF sebesar 5,07 lebih besar dari 5, artinya sudah fit. Nilai GFI sebesar 0,76 lebih kecil 0,90, artinya belum fit. Nilai RMSEA sebesar 0,06 lebih kecil 0,08, artinya sudah fit. Dapat disimpulkan, model belum fit secara keseluruhan baik model struktural maupun model pengukuran secara bersama atau *absolut fit measures* belum terpenuhi.

Kemudian, nilai AGFI sebesar 0.74 lebih kecil dari 0,90, artinya belum fit. Nilai TLI sebesar 0,86 lebih kecil dari 0,95, artinya belum fit. Nilai NFI sebesar 0,84 lebih kecil dari 0,90, artinya belum fit. Dapat disimpulkan, bahwa belum mampu membandingkan model yang diajukan dengan model lain yang dispesifikasi oleh peneliti atau model *unincremental fit measures*.

Tabel 3.18. Goodness of Fit Model Struktural Pertama

<i>Goodness of Fit Index</i>	<i>Cut off Value Ideal</i>	Nilai Hitung	Keterangan
<i>Chi Square</i>	Kecil	12791 > 2404	Belum Layak
CMIN/DF	≥ 5	5,07	Layak
GFI	$\geq 0,90$	0,76	Belum Layak
RMSEA	$\leq 0,08$	0,06	Layak
AGFI	$\geq 0,90$	0,74	Belum Layak

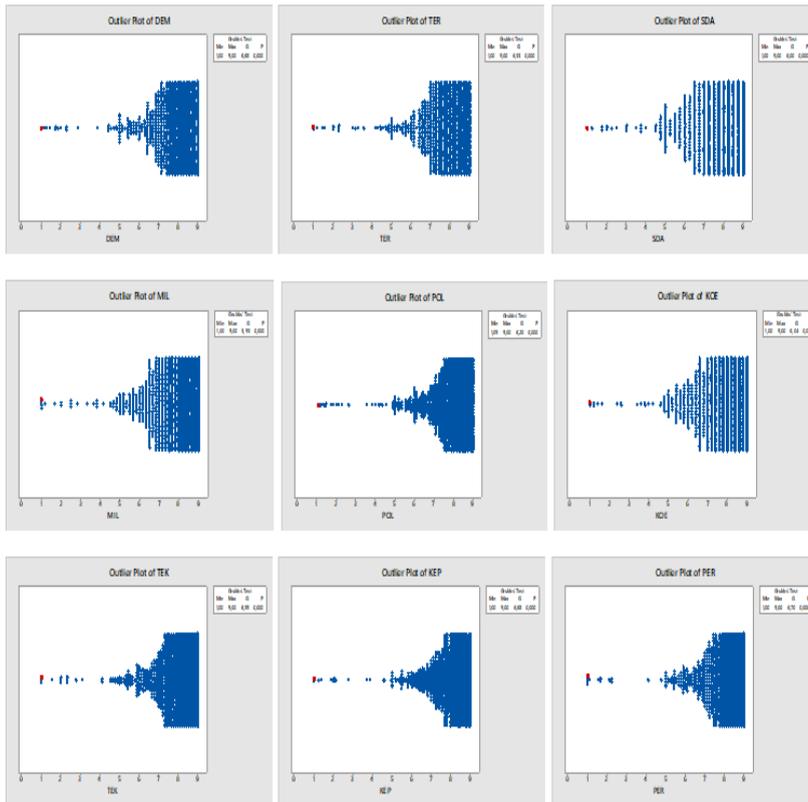
<i>Goodness of Fit Index</i>	<i>Cut off Value Ideal</i>	Nilai Hitung	Keterangan
TLI	$\geq 0,95$	0,86	Belum Layak
NFI	$\geq 0,90$	0,84	Belum Layak
PNFI	0,60-0,90	0,8	Layak
PGFI	$\geq 0,95$	0,71	Belum Layak

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

Kriteria *Goodness of Fit Index* selanjutnya adalah PNFI sebesar 0,80 terletak dalam *cut off value* 0,60-0,90, artinya sudah fit dan PGFI sebesar 0,71 lebih kecil dari 0,95, artinya belum fit. Hal ini, menunjukkan bahwa *parsimonious fit measures* belum terpenuhi sehingga belum mampu mendiagnosis *overfitting* data yang memiliki banyak koefisien. Dapat disimpulkan bahwa model persamaan struktural pertama pemikiran Geopolitik Soekarno belum mampu mengukur kesesuaian *input* observasi atau sesungguhnya matriks kovarian dengan prediksi dari model yang diajukan dengan kata lain model belum layak untuk digunakan. Oleh karena itu, akan dilakukan respesifikasi model pertama dengan mengeluarkan beberapa pengamatan yang bersifat *outlier* dari model.

3.4.4.4 Respesifikasi Model Persamaan Struktural Pertama

Perbaikan terhadap model pertama dilakukan dengan mengeluarkan *outlier* dari model, berdasarkan hasil eksplorasi data pemikiran Geopolitik Soekarno melibatkan variabel eksogen dan endogen. *Scatterplot output* Minitab mengindikasikan terdapat 49 pengamatan yang teridentifikasi sebagai *outlier* tercatat dalam Gambar 3.1. Keberadaan *outlier* dalam model yang sangat sensitif terhadap pengamatan lain akan menyebabkan estimasi parameter model persamaan struktural menjadi bias serta sukar untuk mencapai ukuran kebaikan model.



Gambar 3.1. Scatterplot Mendeteksi Outlier

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

3.4.4.5 Estimasi Parameter dan Pengujian Hipotesis Model Persamaan Struktural Kedua

Proses estimasi parameter pada tahap ini merupakan estimasi terhadap model struktural pertama yang sudah direspesifikasi. Pengujian pengaruh enam variabel eksogen terhadap kepentingan nasional dan pengaruh langsung tujuh variabel pemikiran Geopolitik Soekarno serta satu variabel kepentingan nasional terhadap pertahanan negara dalam model struktural kedua dilakukan secara parsial.

Tabel 3.19. Estimasi Parameter dan Pengujian Hipotesis (Model Kedua)

Variabel			Estimasi Parameter		Standar Error	Construct Reliability	P-value
			Un standardized	Standardized			
KEP	←	TEK	0,269	0,279	0,023	11,709	0,000
KEP	←	KOE	0,145	0,166	0,021	6,905	0,000
KEP	←	POL	0,252	0,270	0,025	10,125	0,000
KEP	←	SDA	0,125	0,150	0,018	6,943	0,000
KEP	←	TER	0,085	0,086	0,024	3,543	0,000
KEP	←	DEM	0,051	0,052	0,022	2,332	0,020
PER	←	POL	0,099	0,106	0,024	4,035	0,000
PER	←	MIL	0,015	0,019	0,011	1,398	0,162
PER	←	SDA	0,023	0,028	0,017	1,356	0,175
PER	←	KEP	0,513	0,513	0,028	18,576	0,000
PER	←	TER	0,136	0,136	0,023	5,947	0,000
PER	←	DEM	0,068	0,069	0,021	3,256	0,001
PER	←	KOE	0,026	0,030	0,020	1,297	0,195
PER	←	TEK	0,097	0,101	0,023	4,244	0,000

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

3.4.4.6 Pengaruh Geopolitik Soekarno Terhadap Kepentingan Nasional dan Pertahanan Negara

Berdasarkan Tabel 3.19., relevansi dan signifikansi konstruk PGC terhadap kepentingan nasional dan pertahanan negara dilakukan dengan pengujian hipotesis berikut.

$$H_0 : \beta_i \leq 0, i = 1, 2, 3, \dots, 14$$

$$H_0 : \beta_i > 0, i = 1, 2, 3, \dots, 14$$

dengan:

β_1 : koefisien pengaruh DEM terhadap KEP

β_2 : koefisien pengaruh TER terhadap KEP

β_3 : koefisien pengaruh SDA terhadap KEP

- β_4 : koefisien pengaruh POL terhadap KEP
- β_5 : koefisien pengaruh KOE terhadap KEP
- β_6 : koefisien pengaruh TEK terhadap KEP
- β_7 : koefisien pengaruh DEM terhadap PER
- β_8 : koefisien pengaruh TER terhadap PER
- β_9 : koefisien pengaruh SDA terhadap PER
- β_{10} : koefisien pengaruh MIL terhadap PER
- β_{11} : koefisien pengaruh POL terhadap PER
- β_{12} : koefisien pengaruh KOE terhadap PER
- β_{13} : koefisien pengaruh TEK terhadap PER
- β_{14} : koefisien pengaruh KEP terhadap PER

Ketentuan pengujian, jika nilai $sig \leq \alpha = 0,05$, tolak H_0 , artinya koefisien estimasi parameter memiliki pengaruh yang signifikan pada taraf nyata $\alpha=0,05$, Berdasarkan Tabel 3.19, koefisien demografi terhadap kepentingan nasional sebesar 0,052 dengan *p-value* 0,020 lebih kecil dari α sebesar 0,05, tolak H_0 . Artinya koefisien demografi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan nasional pada taraf nyata 5%. Koefisien teritorial terhadap kepentingan nasional sebesar 0,086 dengan *p-value* 0,000 lebih kecil dari α sebesar 0,05, tolak H_0 . Artinya koefisien teritorial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan nasional pada taraf nyata 5%. Koefisien sumber daya alam terhadap kepentingan nasional sebesar 0,150 dengan *p-value* 0,000 lebih kecil dari α sebesar 0,05, tolak H_0 . Artinya koefisien sumber daya alam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan nasional pada taraf nyata 5%.

Koefisien politik terhadap kepentingan nasional sebesar 0,270 dengan *p-value* 0,000 lebih kecil dari α sebesar 0,05, tolak H_0 . Artinya koefisien politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan nasional pada taraf nyata 5%. Koefisien koeksistensi damai terhadap kepentingan nasional sebesar 0,166 dengan *p-value* 0,000 lebih kecil dari α sebesar 0,05, tolak H_0 . Artinya koefisien koeksistensi damai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan nasional pada taraf nyata 5%. Koefisien sains dan teknologi terhadap kepentingan nasional sebesar 0,279 dengan

p-value 0,000 lebih kecil dari α sebesar 0,05, tolak H_0 . Artinya koefisien sains dan teknologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan nasional pada taraf nyata 5%. Koefisien demografi terhadap pertahanan sebesar 0,069 dengan *p-value* 0,001 lebih kecil dari α sebesar 0,05, tolak H_0 . Artinya koefisien demografi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertahanan pada taraf nyata 5%.

Koefisien teritorial terhadap pertahanan sebesar 0,136 dengan *p-value* 0,000 lebih kecil dari α sebesar 0,05, tolak H_0 . Artinya koefisien teritorial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertahanan pada taraf nyata 5%. Koefisien sumber daya alam terhadap pertahanan sebesar 0,028 dengan *p-value* 0,175 lebih besar dari α sebesar 0,05, akan tetapi lebih kecil dari α sebesar 0,20, maka tolak H_0 . Artinya koefisien sumber daya alam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertahanan pada taraf nyata 20%. Koefisien militer terhadap pertahanan sebesar 0,019 dengan *p-value* 0,162 lebih besar dari α sebesar 0,05, akan tetapi lebih kecil dari α sebesar 0,20, tolak H_0 . Artinya koefisien militer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertahanan pada taraf nyata 20%. Koefisien politik terhadap pertahanan sebesar 0,106 dengan *p-value* 0,000 lebih kecil dari α sebesar 0,05, maka tolak H_0 . Artinya koefisien politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertahanan pada taraf nyata 5%. Koefisien koeksistensi damai terhadap pertahanan sebesar 0,030 dengan *p-value* 0,195 lebih besar dari α sebesar 0,05, akan tetapi lebih kecil dari α sebesar 0,20, tolak H_0 . Artinya koefisien koeksistensi damai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertahanan pada taraf nyata 20%. Koefisien sains dan teknologi terhadap pertahanan sebesar 0,101 dengan *p-value* 0,000 lebih kecil dari α sebesar 0,05, maka tolak H_0 . Artinya koefisien sains dan teknologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertahanan pada taraf nyata 5%. Koefisien kepentingan nasional terhadap pertahanan sebesar 0,513 dengan *p-value* 0,000 lebih kecil dari α sebesar 0,05, maka tolak H_0 . Artinya koefisien kepentingan nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertahanan pada taraf nyata 5%.

3.4.4.7 Pengujian Keباikan Model Persamaan Struktural Kedua

Pengujian kebaikan model persamaan struktural kedua pemikiran Geopolitik Soekarno menggunakan kriteria *goodness of fit* dan koefisien determinasi dengan *chi square*.

3.4.4.7.1 *Goodness of Fit Index*

Pengujian kebaikan model persamaan struktural kedua pemikiran Geopolitik Soekarno menggunakan kriteria *goodness of fit* dan koefisien determinasi dengan *chi square*. Keباikan model persamaan struktural kedua pemikiran Geopolitik Soekarno secara simultan dapat ditentukan berdasarkan beberapa nilai *goodness of fit* yang tercantum dalam Tabel 3.20. Berdasarkan Tabel 3.20, diperoleh nilai X^2_{hitung} sebesar 2,799 yang lebih kecil dari X_{tabel} sebesar 3,841, artinya kriteria sudah fit. Nilai GFI sebesar 0,999 lebih besar 0,90, artinya sudah fit. Nilai RMSEA sebesar 0,039 lebih kecil 0,08, artinya sudah fit. Dapat disimpulkan, model sudah fit secara keseluruhan baik model struktural maupun model pengukuran secara bersama atau *absolut fit measures*.

Kriteria yang lain AGFI sebesar 0,976 lebih besar dari 0,90, artinya sudah fit. Nilai TLI sebesar 0,992 lebih besar dari 0,95, artinya sudah fit. Nilai NFI sebesar 1,000 lebih besar dari 0,90, artinya sudah fit. Dapat disimpulkan, bahwa sudah mampu membandingkan model yang diajukan dengan model lain yang dispesifikasi oleh peneliti atau model *incremental fit measures*.

Kriteria *Goodness of Fit Index* selanjutnya adalah PNFI sebesar 0,85 terletak dalam *cut off value* 0,60-0,90, artinya sudah fit dan PGFI sebesar 0,022 lebih kecil dari 0,95, artinya belum fit. Hal ini, menunjukkan bahwa *parsimonious fit measures* sudah terpenuhi sehingga mampu mendiagnosa *overfitting* data yang memiliki banyak koefisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model persamaan struktural kedua pemikiran Geopolitik Soekarno mampu mengukur kesesuaian *input* observasi atau sesungguhnya matriks kovarians dengan prediksi dari model yang diajukan sudah layak untuk digunakan.

Tabel 3.20. Goodness of Fit Model Struktural Kedua

Goodness of Fit Indeks	Cut off Value	Nilai Hitung	Keterangan
<i>Chi Square</i>	Kecil	2,799 < 3,841	Layak
<i>P-value</i>	Besar	0,094 > 0,05	Layak
GFI	≥ 0,90	0,999	Layak
RMSEA	≤ 0,08	0,039	Layak
AGFI	≥ 0,90	0,976	Layak
TLI	≥ 0,95	0,992	Layak
NFI	≥ 0,90	1,000	Layak
PNFI	0,6-0,9	0,850	Layak
PGFI	≥ 0,95	0,022	Belum Layak

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

3.4.4.7.2 Koefisien Determinasi

Ukuran kelayakan model struktural kedua pemikiran Geopolitik Soekarno juga menggunakan pengujian koefisien determinasi melalui R^2 atau *chi-square*. Diperoleh nilai R^2 model persamaan struktural kepentingan nasional sebesar 0,754. Artinya 75% rata-rata keragaman kepentingan nasional yang dapat dijelaskan secara langsung oleh demografi, teritorial, SDA, politik, koeksistensi damai, dan sainsstek. Selanjutnya nilai R^2 model persamaan struktural pertahanan sebesar 0,781. Hal ini berarti, 78% rata-rata keragaman pertahanan negara yang mampu dijelaskan oleh demografi, teritorial, SDA, militer, politik, koeksistensi damai dan sainsstek baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kepentingan nasional. Penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa model SEM pemikiran Geopolitik Soekarno yang dibangun termasuk kategori baik dengan tingkat kepercayaan sebesar 78%, mengingat keseluruhan konstruksi teoritis pertahanan negara berdasarkan pemikiran Soekarno pada masa kepemimpinan Soekarno. Dalam situasi sekarang berbagai variabel yang belum menjadi cakupan dalam model struktural saat ini, yakni sebesar 22% dapat berasal dari faktor kekinian yang belum teridentifikasi pada masa Soekarno seperti misalnya *hybrid war*, *complex terrain*, *joint warfare*, sistem *cyber*, *revolution in military*

affairs, integrasi kemajuan teknologi informasi dalam pusat komando pertahanan melalui *command, control, communications, computers, cyber-defense, combat systems, intelligence, surveillance, and reconnaissance* (C6ISR) dan berbagai gambaran *future war* lainnya.

3.5 Progressive Geopolitical Coexistence sebagai Konstruksi Pemikiran Geopolitik Soekarno

3.5.1 Intisari Pembuktian Kuantitatif PGC

Secara metodologis, PGC merupakan inti pemikiran Geopolitik Soekarno yang diperas dari CDA dan fenomenologi. Pengukuran secara statistik dilakukan untuk memberikan bobot lebih pada bangunan teoretik Geopolitik Soekarno. Seperti dijelaskan pada sub bagian pengukuran di atas, hasil perhitungan nilai korelasi dan pengujian signifikansi, variabel DEM terhadap pemikiran Geopolitik Soekarno memiliki nilai korelasi sebesar 0,815 yang termasuk kategori sangat kuat dan signifikan. Adapun hasil perhitungan nilai korelasi dan pengujian signifikansi pada variabel TER terhadap pemikiran Geopolitik Soekarno mempunyai nilai korelasi sebesar 0,842 yang juga masuk ke dalam kategori sangat kuat dan signifikan. Demikian juga dengan variabel SDA terhadap pemikiran Geopolitik Soekarno mempunyai nilai korelasi sebesar 0,206 termasuk kategori rendah tetapi signifikan. Variabel MIL dan POL memiliki nilai korelasi yang sama sebesar 0,915 yang berarti mempunyai hubungan yang sangat kuat dan signifikan. Sedangkan untuk variabel KOE dan TEK masing-masing mempunyai nilai korelasi sebesar 0,853 dan 0,846 masuk ke dalam katagori sangat kuat dan signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Geopolitik Soekarno dibangun berdasarkan tujuh variabel yaitu DEM, TER, SDA, MIL, POL, KOE dan TEK.

Berdasarkan hasil uji empirik tujuh variabel terhadap teori Geopolitik Soekarno dengan analisis SEM, dapat disusun model persamaan berikut:

$$\text{PGC} = 0.175 \text{ DEM} + 0.178 \text{ TER} + 0.110 \text{ SDA} + 0.165 \text{ MIL} + 0.292 \text{ POL} + 0.136 \text{ KOE} + 0.200 \text{ TEK.}$$

Artinya jika variabel Politik naik satu satuan, maka PGC akan bertambah sebesar 0.292 dengan catatan variabel lainnya bernilai tetap. Demikian pula logika yang sama dapat diterapkan dalam perhitungan variabel yang lain. Melalui persamaan ini dapat dijelaskan bahwa PGC dikonstruksi dari tujuh variabel yaitu demografi, teritorial, sumber daya alam, militer, politik, koeksistensi damai, serta sains dan teknologi.

Teori Geopolitik Soekarno ditinjau dari strategi berdasarkan pembuktian kuantitatif menunjukkan faktor politik, sains dan teknologi, teritorial dan demografi merupakan faktor yang sangat penting. Di antara keempat variabel ini, menjadi skala prioritas Soekarno di dalam melakukan diplomasi internasional dan sekaligus memperkuat kapabilitas militer dan penguasaan teknologi. Sedangkan sumber daya alam selama masa Soekarno, dijaga kelestariannya untuk dapat dikelola secara berdikari setelah kapasitas demografi nasional di dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dicapai. Dari persamaan itu juga terlihat bahwa variabel teritorial sebagai instrumen geopolitik akan sangat ditentukan pengaruhnya berdasarkan keenam variabel lainnya.

Dengan mengingat bahwa seluruh variabel memiliki korelasi dan pengaruh yang positif terhadap Geopolitik Soekarno, maka geopolitik sebagai *instrument of national power*, dapat ditingkatkan efektivitasnya berdasarkan signifikansi korelasi dari tujuh variabel tersebut. Namun demikian dalam operasionalisasinya, PGC sebagai *instrument of national power* selalu mengabdikan pada kepentingan nasional sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi.

3.5.2 Intisari PGC dalam Pembuktian Fenomenologis

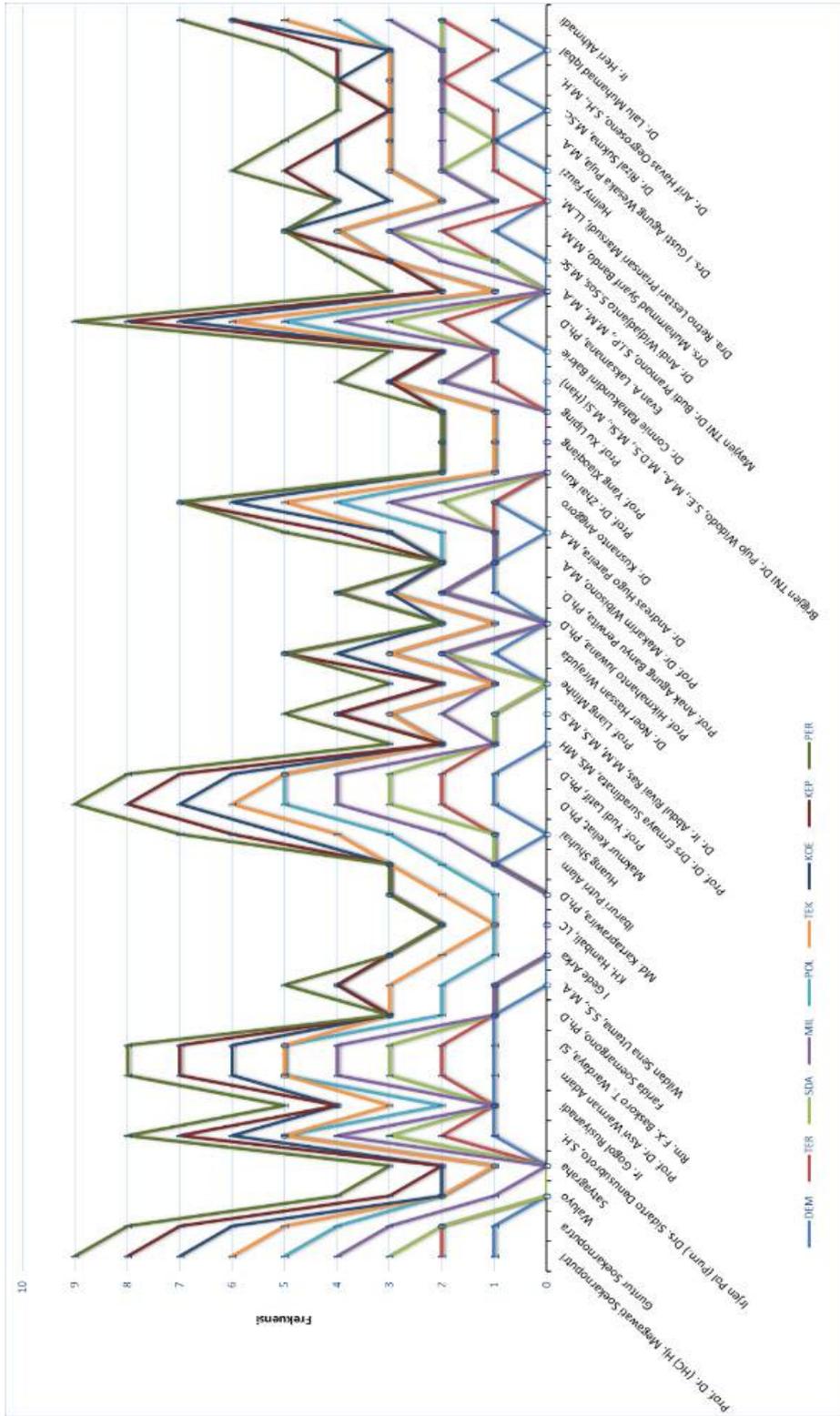
Selain pembuktian secara kuantitatif, intisari PGC juga dapat dilihat dari hasil pembuktian secara fenomenologis melalui *life history* dan wawancara mendalam kepada para pakar. Hasilnya tergambaran tujuh variabel pemikiran Geopolitik Soekarno dengan bantuan Ms. Excel dan Nvivo. Berikut adalah hasil pemetaan 7 variabel pemikiran Geopolitik Soekarno dari para informan.

Tabel 3.21. Tujuh Variabel Pemikiran Geopolitik Soekarno dalam Pembuktian Fenomenologis

NO	INFORMAN AHLI	VARIABEL									
		DEM	TER	SDA	MIL	POL	TEK	KOE	KEP	PER	
1	Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri										
2	Guntur Soekarnoputra										
3	Waluyo										
4	Satyagraha										
5	Irjen Pol (Purn.) Drs. Sidarto Danusubroto, S.H.										
6	Ir. Gogol Rusiyandi										
7	Prof. Dr. Asvi Warman Adam										
8	Rm. F.X. Baskoro T. Wardaya, SJ										
9	Farida Soemargono, Ph.D										
10	Wildan Sena Utama, S.S., M.A.										
11	I Gede Arka										
12	KH. Hambali, LC										
13	Md. Kartaprawira, Ph.D										
14	Ibaruri Putri Alam										
15	Huang Shuhai										
16	Makmur Keliat, Ph.D										
17	Prof. Yudi Latif, Ph.D										
18	Prof. Dr. Drs Ermaya Suradinata, MS. MH										
19	Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, M.Si										
20	Prof. Liang Minhe										
21	Dr. Noer Hassan Wirajuda										
22	Prof. Hikmahanto Juwana, Ph.D										
23	Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D.										
24	Prof. Dr. Makarim Wibisono, M.A.										
25	Dr. Andreas Hugo Pareira, M.A										

NO	INFORMAN AHLI	VARIABEL									
		DEM	TER	SDA	MIL	POL	TEK	KOE	KEP	PER	
26	Dr. Kusnanto Anggoro										
27	Prof. Dr. Zhai Kun										
28	Prof. Yang Xiaoqiang										
29	Prof. Xu Liping										
30	Brigjen TNI Dr. Pujo Widodo, S.E., M.A., M.D.S., M.Si., M.Si (Han)										
31	Dr. Connie Rahakundini Bakrie										
32	Evan A. Laksmana, Ph.D										
33	Mayjen TNI Dr. Budi Pramono, S.I.P., M.M., M.A.										
34	Andi Widjadjanto S.Sos, M.Sc										
35	Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.										
36	Dra. Retno Lestari Priansari Marsudi, LL.M.										
37	Helmy Fauzi										
38	Drs. I Gusti Agung Wesaka Puja, M.A.										
39	Dr. Rizal Sukma, M.Sc.										
40	Dr. Arif Havas Oegroseno, S.H., M.H.										
41	Dr. Lalu Muhamad Iqbal										
42	Ir. Heri Akhmadi										

Sumber: diolah oleh Peneliti (2021-2022)



Gambar 3.2. Tujuh Variabel Pemikiran Geopolitik Soekarno dalam Pembuktian Fenomenologis

Sumber: diolah oleh Peneliti (2021-2022)

3.5.3 PGC sebagai *State of the Art* Pemikiran Geopolitik Soekarno

State of the art dari konstruksi pemikiran Geopolitik Soekarno mengerucut ke dalam istilah *Progressive Geopolitical Coexistence* (PGC). Istilah *coexistence* dalam studi ini berbeda dengan *coexistence* yang merujuk pada *peaceful coexistence* dalam konteks pemikiran Lenin, Stalin, Khrushchev, maupun Bertrand Russell. *Coexistence* dalam pemikiran Geopolitik Soekarno bersumber dari falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. PGC dikonstruksikan dari tujuh variabel yang terbukti secara teoretis maupun empiris. Bangunan PGC sebagai konstruksi dari tujuh variabel saling mewarnai, berpengaruh satu sama lain, dan komprehensif. PGC dapat menjadi pisau analisis kebijakan pertahanan negara dan alat di dalam mengonstruksikan kepentingan nasional Indonesia, serta penggunaan tujuh variabel sebagai *instrument of national power*.

PGC menggambarkan keseluruhan pandangan Geopolitik Soekarno yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian dunia, dan bagaimana bangsa-bangsa bisa hidup berdampingan dengan damai, tanpa ancaman perang. PGC didasarkan pada enam prinsip. Pertama, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan/Internasionalisme, Nasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan Sosial menjadi bagian dari Piagam PBB. Kedua, PBB harus memastikan setiap bangsa merdeka memiliki kedudukan sederajat, setara, dan melihat realitas bangkitnya negara-negara sosialis baru. Atas dasar ini Soekarno (1960) mengusulkan agar *privilege* hak veto yang diberikan kepada negara Perancis, Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia harus dicabut. Masa depan dunia tidak bisa ditentukan oleh empat negara yang terbukti tidak mampu mengambil kesepakatan atas uji coba senjata nuklir. Ketiga, mekanisme pengambilan keputusan PBB harus didasarkan pada penguatan *deliberative democracy*, dengan mengedepankan pendekatan konsensus. Keempat, Markas besar PBB dipindahkan ke negara netral, yakni negara yang tidak memihak pada Blok Barat maupun Blok Timur. Kelima, bahwa dunia akan damai apabila bebas dari kolonialisme dan imperialisme. Dan, keenam, pentingnya

solidaritas antar bangsa untuk mengedepankan koeksistensi damai (*peaceful coexistence*).

Relevansi dari bangunan PGC di dalam implementasi kebijakan luar negeri dan pertahanan memiliki sifat progresif dan revolusioner. Progresif dimaknai berkemajuan, maju terus menerus, dan revolusioner dalam pengertian membongkar, menjebol, membangun, *shaping and reshaping*, serta menghendaki perubahan secara terus menerus. Revolusioner juga dimaknai Soekarno untuk merombak sistem dari tatanan lama menuju tatanan baru.¹⁶² Dalam PGC yang didasarkan pada nilai kemanusiaan atau internasionalisme, Soekarno menempatkan konsepsi kemanusiaan dalam perspektif progresif-revolusioner. Dari perspektif ke dalam, kemanusiaan dimaknai sebagai upaya agar kemerdekaan Indonesia dapat membebaskan bangsa Indonesia dari sistem penjajahan, baik mentalitas terjajah, sistem pemerintahan kolonial, sistem budaya, dan sistem ekonomi yang menghisap. Dalam perspektif ke luar, nilai kemanusiaan dimaknakan sebagai internasionalisme dengan bertindak keluar, di dalam membangun tatanan dunia baru yang bebas dari berbagai bentuk penjajahan. Internasionalisme dalam pengertian Soekarno dinyatakan dengan penegasan bahwa Indonesia adalah Taman Sari Dunia.

Seluruh prinsip perdamaian abadi yang dikonsepsikan dalam bangunan Geopolitik Soekarno termanifestasi dalam semangat koeksistensi damai. Dengan demikian *state of the art* pemikiran Geopolitik Soekarno merupakan bauran substansi antara progresif-revolusioner, perdamaian dunia, solidaritas, dan kesetaraan global yang ditandai dengan hidup berdampingan secara damai.

162 Soekarno (1957). *Menggalang Massa Aksi Revolusioner Menuju Masyarakat Adil dan Makmur. Shaping and Reshaping Indonesia*. Pidato Presiden Soekarno tentang Marhaenisme pada malam peringatan 30 tahun berdirinya PNI pada 3 Juli 1957.

BAB 4

PENGARUH PEMIKIRAN GEOPOLITIK SOEKARNO TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL

Kepentingan nasional mendapatkan posisi penting dalam konsepsi Geopolitik Soekarno. Melalui pemikiran geopolitiknya kepentingan nasional Indonesia, pertahanan negara ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara, serta menjaga ketertiban dunia. Salah satu pengaruh penting dari pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap kepentingan nasional ialah terselenggaranya KAA; Komunike politik tentang pembebasan Irian Barat, kemerdekaan Maroko, Tunisia, Aljazair, dan Palestina serta ketegasan sikap yang anti kolonialisme dan imperialisme. Keberhasilan penyelenggaraan KAA menjadi faktor penting bagi terwujudnya Deklarasi Djuanda. Hasilnya wilayah Indonesia naik 2.5 kali lipat tanpa melalui perang.

Pertautan dan pengaruh pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap kepentingan nasional juga dapat dilihat dari koridor pembangunan nasional, pelebagaan pertahanan Negara: Darat, laut, dan angkasa, serta koridor kepentingan nasional. Kesemuanya ini, dapat kita baca dan telaah secara komprehensif melalui pembahasan berikut ini.

4.1. Konsep dan Dimensi Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional dinamis dan memiliki beragam paradigma mulai dari realis, neo-realis, hingga kritisal. Dalam perkembangannya konsep kepentingan nasional kental dipengaruhi

oleh perspektif realis, salah satu tokohnya Hans Morgenthau meneruskan pemikiran kalangan realis klasik seperti Thucydides, Machiavelli dan Thomas Hobbes. Kalangan realis percaya bahwa negara harus mengikuti kepentingan nasionalnya yang didefinisikan sebagai *power*. Morgenthau menegaskan untuk memahami hubungan internasional menjadi masuk akal, kepentingan nasional harus berbasiskan *power*. Morgenthau menyatakan hanya ada tiga program kebijakan luar negeri yang terbuka untuk suatu negara, yaitu berjuang untuk mempertahankan negara, meningkatkan *power*, atau menunjukkan *power*.¹⁶³

Menurut Morgenthau *power* adalah hubungan psikologis antara negara-negara. Artinya negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya untuk memenuhi kebutuhan negara itu sendiri membutuhkan negara lain dalam pemenuhannya. Berkaitan dengan hal ini untuk mencapai tujuan negaranya, negara harus berinteraksi dalam sistem internasional. Di sini negara sebagai aktor utama harus memiliki kekuasaan mengingat kepentingan nasional yang diperjuangkannya tidak akan bisa dicapai tanpa adanya kekuasaan. Dengan demikian kepentingan nasional adalah tujuan negara untuk mempertahankan dan menambah kekuasaan ke negara lain.¹⁶⁴

Sementara itu kalangan teoritis kritis melihat konsep kepentingan nasional dengan cara yang berbeda dengan kalangan realis. Kalangan teoritis kritis tidak percaya dengan adanya konsep kepentingan nasional yang disimpulkan oleh kalangan realis.¹⁶⁵ Para teoritis kritis menilai bahwa kaum realis terlalu naif dan berlebihan apabila memandang negara sebagai aktor satu-satunya yang mempunyai hak untuk merumuskan kepentingan nasional. Di sisi lain kaum teori kritis menunjukkan bahwa keberadaan "negara" itu sendiri merupakan sintesis kulminasi atas kontestasi berbagai kepentingan sosial dan pertarungan struktur kelas dalam masyarakat. Kalangan kaum teori kritis mempertanyakan dasar pengambilan keputusan luar negeri terhadap siapa yang membuat

163 Hans J. Morgenthau (1973). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 5th ed., New York: A. Knopf, Inc.

164 David W. Clinton (1986). The National Interest: Normative Foundations. *The Review of Politics*, Vol. 48 No.4 1986. pp. 495-519.

165 Scott Burchill (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. New York: Palgrave Macmillan.

dan kepentingan siapa yang mereka wakili. Dengan kata lain, kepentingan siapa yang didefinisikan oleh kepentingan nasional suatu negara. Hal ini mengimplikasikan adanya pandangan yang melihat kepentingan nasional dalam cara pandang ekonomi-politik.

166

Atas pendekatan ekonomi-politik, para teoritisi kritis memandang penguasaan sumber daya atau *resource* tidak dapat dimonopoli termasuk oleh negara sekalipun, melainkan harus dikelola bersama-sama. Namun demikian para teoritisi kritis tetap menempatkan pentingnya aset vital untuk dapat dijaga negara. Sementara itu negara juga berkepentingan mencari kekuasaan atau pengaruh. Dengan kata lain konsep kepentingan nasional sejalan dengan tujuan dan cita-cita nasional dalam mencapai kesejahteraan ekonomi maupun keamanan negara.¹⁶⁷

Menurut Nuechterlein terdapat empat dimensi yang mempengaruhi kepentingan nasional, yaitu: Pertama, kepentingan pertahanan, yakni untuk melindungi keselamatan segenap warga negara dan kedaulatan wilayah dari segala bentuk ancaman. Kedua, kepentingan ekonomi, yakni upaya untuk memajukan kesejahteraan umum melalui berbagai hubungan kerja sama ekonomi dengan negara lain. Ketiga, kepentingan tata internasional, yakni untuk menjaga stabilitas sistem politik-ekonomi internasional yang mendukung kepentingan nasional. Keempat, kepentingan ideologi, yakni untuk melindungi ideologi negara dari ancaman propaganda ideologis negara lain.¹⁶⁸

Terdapat enam strata yang membagi kepentingan nasional, yaitu: Pertama, kepentingan vital atau primer (*primary interest*) merupakan kepentingan nasional yang memberikan perlindungan pada kedaulatan dalam negara yang termasuk di dalamnya wilayah, identitas politik, budaya, dan keberlangsungan hidup dari ancaman eksternal. Kepentingan vital atau primer ini tidak dapat

166 Scott Burchill (2005), *Ibid.* lihat juga, Ahmad Rizky Mardhatillah Umar (2014). Book Review: The National Interest in International Relations Theory, in *Indonesian Journal of International Studies* (IJIS) Vol.1 No.2 December 2014. pp. 185-190.

167 Felix E. Oppenheim (1987). National Interest, Rationality, and Morality. *Political Theory* Vol. 15 No. 3 1987. pp. 369-389. Lihat juga, Miroslav Nincic (1999). The National Interest and Its Interpretation. *The Review of Politics*, Vol. 61 No. 1 1999 pp. 29-55. Dibahas juga oleh Scott Burchill (2005), *Op. Cit.*

168 Donald E. Nuechterlein (1976). *Op. Cit.*

diganggu gugat sehingga negara secara total mempertahankan untuk pencapaian kepentingan ini. Kedua, kepentingan sekunder (*secondary interest*), kepentingan yang hampir sama halnya dengan kepentingan primer, akan tetapi kepentingan sekunder diarahkan keluar negara tersebut. Contohnya, melindungi warga negara dan melindungi aset-aset yang berada di luar negeri. Ketiga, kepentingan permanen (*permanent interest*), merupakan kepentingan yang tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. Keempat, kepentingan tidak tetap (*variabel interest*), merupakan kepentingan yang dilakukan secara kondisional yang berarti dianggap penting pada waktu tertentu. Kelima, kepentingan umum (*general interest*), merupakan kepentingan yang dilakukan dan diterapkan pada banyak negara atau untuk beberapa bidang seperti perdagangan, keamanan regional, internasional dan sebagainya. Keenam, kepentingan khusus (*specific interest*), merupakan kepentingan yang diterapkan pada bidang dan waktu tertentu, biasanya sebagai bentuk penekanan pada kepentingan umum.¹⁶⁹

Sementara itu menurut Groom dan Light terkait dengan politik luar negeri, konsep kepentingan nasional harus melihat isu-isu global dan pendekatan global sebagai pendekatan strategis.¹⁷⁰ Dalam hal ini setiap kalangan teori kritis dapat mendasarkan perspektifnya pada kepentingan nasional yang strategis, baik berkaitan dengan isu maupun pendekatan global. Contohnya, isu geopolitik Indonesia, isu perubahan iklim, kedaulatan pangan, dan isu-isu strategis lainnya. Merujuk pada ketiga pandangan dari Nuechterlein, Couloumbis dan Wolfe, serta Groom dan Light, konsep kepentingan nasional ialah kepentingan suatu negara yang mencakup dimensi kepentingan nasional dengan segala strata, isu, dan pendekatan kepentingan negara tersebut.

169 Theodore A. Couloumbis and James H. Wolfe (1990). *Op. Cit.*

170 A.J.R. Groom and Margot Light (eds) (1994). *Op. Cit.*

Tabel 4.1. Konsep Kepentingan Nasional

DIMENSI KEPENTINGAN NASIONAL	STRATA KEPENTINGAN						ISU GLOBAL	PENDEKATAN GLOBAL
	V/PI	SI	PI	VI	GI	SI		
Pertahanan								
Ekonomi								
Tata Internasional								
Ideologi								

Sumber: Nuchterlin, 1976; Coulombis dan Wolfe, 1999; dan Groom dan Light, 1994.

Keterangan:

V/PI : *Vital/Primary Interest*

SI : *Secondary Interest*

PI : *Permanent Interest*

VI : *Variabel Interest*

GI : *General Interest*

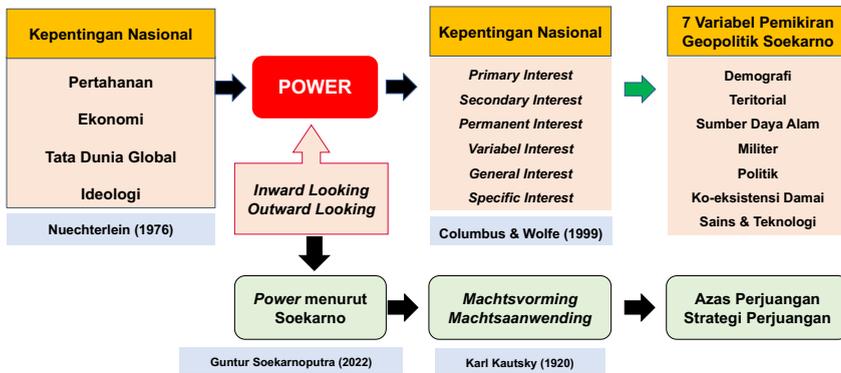
SI : *Specific Interest*

Dalam menentukan kepentingan nasional sebagai variabel *intervening*, kepentingan nasional merupakan pijakan bagi suatu negara dalam memperjuangkan kepentingannya di luar garis kedaulatan teritorialnya. Ketika berinteraksi dengan negara-negara lain, negara tidak menjadi satu-satunya aktor. Perumusan dan pendefinisian kepentingan nasional melibatkan kontestasi kepentingan yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat, sehingga melihat kepentingan nasional dalam cara pandang ekonomi-politik. Atas dasar ini dapat dilihat dari dimensi-dimensi yang mempengaruhi kepentingan nasional berdasarkan pemikiran Nuechterlein yakni kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tata internasional, dan kepentingan ideologi.¹⁷¹

Berdasarkan pemikiran terhadap kepentingan nasional dalam konstruksi pemikiran Soekarno, politik dan ideologi merupakan manifestasi dari *power*. Kekuatan nasional ini harus dipersiapkan dan disusun sebagai asas perjuangan dan strategi perjuangan dalam

171 Donald E. Nuechterlein (1976), *Loc. Cit.*

mencapai tujuan baik melihat ke dalam (domestik) maupun ke luar (luar negeri) yang dikenal dengan *machtsvorming* yang dimaknakan sebagai penggalangan kekuasaan; dan *machtsaanwending* atau penggunaan kekuasaan. Konsepsi ini dirujuk dari pemikiran Karl Kautsky (1920).¹⁷² Walaupun kedua kata ini mempunyai arti sendiri, namun Soekarno meracik, mengembangkan, dan menafsirkan ulang makna dari *machtsvorming* dan *machtsaanwending* yang dipergunakannya untuk penggalangan kekuatan rakyat bagi tercapainya cita-cita Indonesia Merdeka.¹⁷³ Keterkaitan antara teori Coulombis dan Wolfe tampak dalam keterkaitan variabel kepentingan nasional dengan tujuh variabel pemikiran Geopolitik Soekarno. Di antara keduanya dirumuskan variabel dan indikator kepentingan nasional dengan pertahanan berdasarkan strata kepentingan nasional menurut Coulombis dan Wolfe.¹⁷⁴



Gambar 4.1. Landasan Teori Kepentingan Nasional

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

¹⁷² Karl Kautsky (1920). *Terrorism and Communism: A Contribution to the Natural History of Revolution*. Cornell University Library.

¹⁷³ Wawancara Guntur Soekarnoputra, Januari 2022.

¹⁷⁴ Theodore A. Coulombis and James H. Wolfe (1990), *Op. Cit.*

4.2. Pengaruh pemikiran Geopolitik Soekarno Terhadap Kepentingan Nasional

4.2.1. Pembebasan Irian Barat

Irian Barat secara historis adalah wilayah geopolitik Nusantara. Sebelum menjadi koloni Belanda, Irian Barat merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore yang menyatakan kesetiannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wilayah Hindia Belanda, Irian Barat dengan sendirinya merupakan wilayah Indonesia yang diproklamasikan Soekarno dan Mohamad Hatta pada 17 Agustus 1945. Maka perjuangan Soekarno membebaskan Irian Barat adalah sah secara historis, perjuangan yang visioner, mengikuti kaidah hukum internasional, dan strategis dalam kerangka kepentingan nasional Indonesia.

Merujuk pada konsep kepentingan nasional Nuechterlein serta Couloumbis dan Wolfe, pembebasan Irian Barat merupakan manifestasi dari kepentingan nasional sebagai aspek kepentingan vital atau primer (*primary interest*) karena menyangkut kedaulatan wilayah dan pertahanan negara. Selain itu merujuk pada Groom dan Light perjuangan pembebasan Irian Barat dari Penjajahan Belanda juga merupakan isu global dalam rangka melepaskan dunia dari penindasan imperialisme dan kolonialisme. Ini juga sejalan dengan pemikiran Soekarno bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dalam hal pembebasan Irian Barat, Belanda mengingkari kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk menyerahkan Irian Barat pada Indonesia. Peningkaran Belanda atas Irian Barat telah terjadi sejak masa Republik Indonesia Serikat (RIS). Menurut Soekarno, Indonesia merdeka memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke dan wilayah Indonesia merdeka adalah bekas wilayah Hindia-Belanda. Soekarno dalam pidato pada Agustus 1950 menyatakan¹⁷⁵:

175 Soekarno (1950). *Dari Sabang Sampai Merauke!* Pidato Presiden Soekarno pada HUT Kemerdekaan RI ke-5, Jakarta, 17 Agustus 1950.

“Sekarang soal Irian! Ini bukanlah soal kecil, ini adalah soal yang amat besar. Saya khawatir, bahwa pihak Belanda tidak mengerti atau belum mengerti, bahwa soal Irian itu buat kita adalah soal yang amat besar. Soal Irian bukan soal ethnologi; iapun bukan soal kita ini sudah masak atau tidak. Alasan masak atau tidak itu memang selalu dikemukakan oleh kaum imperialis, dan selalu alasan itu tidak kena. Soal Irian adalah soal penjajahan atau tidak-penjajahan, soal penjajahan atau kemerdekaan. Sebagian dari tanah air kita masih dijajah oleh Belanda, ini adalah kenyataan, dan ini kita tidak mau. Kita menghendaki seluruh Tanah Air kita merdeka, seluruh tanah tumpah darah kita “dari Sabang sampai ke Merauke. ...

Seluruh, -- sekali lagi seluruh! – bekas Hindia Belanda itu, dari Sabang sampai ke Merauke, harus dimerdekakan dalam lingkungan negara Indonesia! Ini adalah kewajiban moral Belanda yang mengatakan menyerahkan kedaulatan kepada kita dengan secara mutlak, ini adalah kewajiban nasional kita yang tidak boleh ditawar-tawar! ... Masih kita mengharap yang Irian-Barat dikembalikan kepada kita dalam tahun ini. Masih kita junjung tinggi ketentuan dalam KMB, bahwa soal Irian-Barat itu harus diselesaikan dalam tahun ini juga dengan jalan perundingan. Lewat tahun ini, kedua belah pihak tidak terikat lagi kepada ketentuan KMB itu”.

Politik pembebasan Irian Barat adalah realisasi dari politik luar negeri yang berdasar kepada keputusan Sidang BPUPK pada tanggal 11 Juli 1945 dan dikukuhkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Soekarno:

*“Freedom is invisible, kemerdekaan tak dapat terbagi-bagi. Sesuatu bangsa tak dapat hidup sempurna *half slave and half-free*, -- tak dapat hidup sempurna kalau sebagian daerahnya merdeka, dan sebagian daerahnya lagi diperbudak orang. Bangsa yang masih *half-slave and half-free* sebenarnya belum merdeka sesungguhnya. Tidak ada setengah Merdeka dan tidak ada juga setengah tidak merdeka”.*¹⁷⁶

Jadi bagi Soekarno, selama Irian Barat diduduki orang lain, kita belum merdeka sepenuhnya. Ditegaskan lagi dengan pernyataan:

¹⁷⁶ Soekarno (1950), *Ibid.*

“Hapusnya penjajahan dari Irian Barat, adalah klaim kemanusiaan terhadap moral dunia. Kecuali itu, bagi bangsa Indonesia ia bukan saja satu klaim nasional, -- ia adalah juga klaim keamanan. Selama masih ada penjajahan di Sebagian dari tanah airnya, rakyat Indonesia, terutama di bagian timur Indonesia, tidak akan merasa dirinya aman. Selama Irian Barat masih berupa satu tempat berkuasanya anasir-anasir kolonial dari bekas Hindia-Belanda, selama itu rakyat Indonesia merasa dirinya terancam dari sudut itu. Ada satu negara tetangga kita yang berada jauh di sebelah selatan, yang mengatakan bahwa baginya soal Irian Barat adalah satu soal keamanan. Kita berkata, -- bagi kita soal Irian Barat adalah lebih-lebih lagi satu soal keamanan! Satu soal keamanan yang tidak secara teoritis membahayakan kita, tetapi satu soal keamanan yang direct, terus, langsung menyentuh tubuh Indonesia. Kembalinya kekuasaan di Irian Barat ke tangan bangsa Indonesia adalah dus ya klaim legal (sebab dijanjikan kepada kita satu penyerahan kedaulatan yang real, complete and unconditional, ya, klaim kemanusiaan, klaim nasional, klaim keamanan”.¹⁷⁷

Pemerintah Indonesia terus berupaya membebaskan Irian Barat melalui jalan diplomasi. Namun hingga beberapa lama perjuangan melalui berbagai jalan diplomasi, termasuk melalui PBB dinilai tidak berhasil. Akhirnya Indonesia mengambil sikap tegas dengan memilih jalan konfrontatif dan diplomasi dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada Agustus 1960. Belanda membalasnya dengan membangun sistem pertahanan di Irian Barat. Pada saat itu Amerika Serikat di bawah Presiden Eisenhower memberikan bantuan militer yang besar kepada Belanda yang menyebabkan memburuknya hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Perubahan sikap politik Amerika Serikat atas Irian Barat terjadi pada era Presiden Kennedy. Perubahan ini muncul akibat diplomasi intensif yang dilakukan oleh Soekarno dengan mengingatkan Kennedy bahwa Amerika Serikat adalah bangsa pertama di muka bumi yang memelopori perjuangan anti kolonialisme. Pembebasan Irian Barat ditempatkan oleh Soekarno sebagai bagian dari spirit nasionalisme bangsa Amerika di dalam melawan Inggris.

¹⁷⁷ Soekarno (1952). *Harapan dan Kenyataan*. Amanat Presiden Soekarno Pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di Jakarta, 17 Agustus 1952.

Dalam pidato tahunan pada 17 Agustus 1961 Soekarno menyatakan jika Belanda tidak juga menyerahkan Irian Barat secara baik-baik, Indonesia akan merebutnya dengan kekerasan.¹⁷⁸

Belanda juga melancarkan siasat baru dengan melakukan internasionalisasi isu Irian Barat dengan program dekolonisasi Irian Barat yakni memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada rakyat Irian Barat. Terkait hal ini, Soekarno mengatakan:

“Terdengarnya ini amat menarik hatisekali. Internasionalisasi, dekolonisasi, self determination, hak menentukan nasib sendiri. Tetapi kita bangsa Indonesia tidak bisa ditipu. ... Sekarang mereka bicara tentang dekolonisasi, dulu mereka berkata tidak menjalankan kolonisasi. Bahkan benar – menurut beberapa negara – bahwa Belanda tidak menjalankan kolonisasi. Sekarang mereka mengakui sebenarnya bahwa mereka mengadakan kolonisasi. Oleh karena sekarang mereka berkata dekolonisasi. Dekolonisasi artinya memberhentikan kolonisasi. Dan self determination, hak menentukan nasib sendiri, kita kenal perkataan itu. Menentukan nasib sendiri. Dulu di dalam zaman Van Mook, kita sudah kenal ini omongan menentukan nasib sendiri.

*Tetapi apa artinya? Mendirikan negara-negara bagian. Kita mengenal self determination policy daripada Van Mook. Tetapi sebagai akibat dari politiknya Van Mook ini berdirilah Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur dan lain-lain negara. Kita dipecah-belah, disobek-sobek oleh imperialisme dengan usaha zogenaamd self determination ini. Maka oleh karena itu, Saudara-saudara, tatkala saya mendengar buat pertama kali di Tokyo, bahwa Belanda akan menjalankan politik self determination, saya tolak dengan tegas, self determination ini. Dan saya berkata: kita tidak mau menerima self determination dari pihak Belanda kepada Irian Barat”.*¹⁷⁹

Selanjutnya Belanda membawa sengketa wilayah Irian Barat ke PBB namun berhasil dipatahkan oleh diplomasi Menteri Luar Negeri Soebandrio atas instruksi Soekarno. Kepada Soebandrio, Soekarno

178 Soekarno (1961). *Tri Komando Rakyat Kibarkan Sang Merah Putih Di Irian Barat*. Pidato Presiden Soekarno pada Saat Pembebasan Irian Barat, Yogyakarta, 19 Desember 1961.

179 Soekarno (1961). *Tri Komando Rakyat Kibarkan Sang Merah Putih Di Irian Barat*. *Loc. Cit.*

mengatakan "...Engkau punya tugas di New York hanyalah satu, satu, bukan dua, bukan tiga, satu, yaitu menggagalkan usul Luns (Menteri Luar Negeri Belanda) ini". Kegagalan Belanda di PBB dilanjutkan dengan langkah yang lebih agresif dengan memproklamasikan negara boneka Papua. Merespons tindakan Belanda yang membentuk negara boneka Papua, Soekarno menjalankan diplomasi internasional ke berbagai negara melakukan kampanye pembebasan Irian Barat dari kolonialisme Belanda.

Sejak lawatan internasional pertama ke Amerika Serikat di tahun 1956 hingga pidatonya di sidang PBB di New York pada 1960, Soekarno selalu menegaskan kepentingan utama Indonesia bagi kembalinya Irian Barat ke wilayah Indonesia. Pidatonya di Majelis Umum PBB menyatakan:

"Di mana terdapat imperialisme, dan di mana terdapat penyusunan kekuatan bersenjata yang serentak, keadaan memang berbahaya. Sekali lagi saya berbicara berdasarkan pengalaman. Begitu keadaannya di Irian Barat. Begitu keadaan di seperlima wilayah nasional kami yang pada dewasa ini masih tetap membungkuk di bawah belunggu imperialisme. ... Kami telah berusaha mengadakan perundingan-perundingan bilateral. Kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan bertahun-tahun. Kami telah berusaha dan tetap berusaha.

Kami telah berusaha menggunakan alat-alat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kekuatan pendapat dunia yang dinyatakan di sini. Kami telah berusaha, dan dalam hal ini pun kami tetap berusaha. Harapan lenyap; kesabaran hilang; bahkan toleransi pun mencapai batasnya. Semuanya itu kini telah habis dan Belanda tidak memberikan alternatif lainnya, kecuali memperkeras sikap kami. Jika mereka gagal untuk secara cepat menilai arus sejarah, kita tidaklah dapat dipersalahkan. Akan tetapi akibat daripada kegagalan mereka ialah timbulnya ancaman terhadap perdamaian dan, sekali lagi, hal ini menyangkut pula Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Saya katakan dengan segala kesungguhan bahwa keadaan di Irian Barat adalah keadaan yang berbahaya, suatu keadaan yang eksplosif; suatu hal yang merupakan sebab ketegangan dan suatu

ancaman bagi perdamaian. ... Ancaman terhadap perdamaian berasal langsung dari adanya imperialisme dan kolonialisme itu".¹⁸⁰

Selain jalan diplomasi, pada 19 Desember 1961 Soekarno juga menjalankan operasi militer pembebasan Irian Barat melalui aksi Trikora atau Tiga Komando Rakyat. Perjuangan Indonesia untuk merebut Irian Barat didukung oleh negara-negara Asia Afrika dan GNB termasuk Uni Soviet. Dukungan luas dari negara-negara tersebut memaksa Belanda dan sekutunya menjalankan kompromi. Pada 1961 pintu awal dialog dibuka antara Soekarno dan Kennedy yang mengharapkan dalam penyelesaian masalah Irian Barat agar dilakukan tanpa kekerasan. Kennedy menunjuk Elsworth Bunker untuk merumuskan dasar-dasar penyelesaian masalah Irian Barat yang bisa diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Kennedy mengirim adik kandungnya Robert Kennedy untuk menyampaikan rumusan tersebut kepada Soekarno pada 12 Februari 1962. Kennedy tampaknya tidak ingin sengketa Irian Barat berkembang menjadi konfrontasi negara besar di Laut Banda.

Dukungan Kennedy terhadap pembebasan Irian Barat ditunjukkan dengan adanya surat yang ditulisnya kepada Soekarno untuk menawarkan bantuan jalan penyelesaian melalui perundingan, dan pada saat yang sama menekan Belanda dan Australia agar bersikap lebih lunak. Pada Maret 1962, Amerika Serikat membuat rencana penyelesaian masalah Irian Barat yang penyerahannya akan diatur secara bertahap ke dalam kedaulatan Indonesia. Perundingan rahasia bilateral antara Indonesia dan Belanda dilakukan di Middleburg, Virginia, Amerika Serikat. Delegasi Belanda dipimpin van Royen dan Schuurman, sedangkan dari Indonesia dipimpin Adam Malik dan Sudjarwo Tjondronegoro. Adapun Bunker duduk sebagai penengah. Dalam perundingan tersebut, Amerika Serikat melakukan tekanan-tekanan tertentu kepada delegasi Belanda supaya menerima tuntutan Indonesia yaitu diperpendeknya periode peralihan menjadi Mei 1963.

Setelah dicapai kesepakatan antara Indonesia dan Belanda yang diawali dengan penyerahan terlebih dahulu pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia dan selanjutnya melalui prinsip *self determination* kepada rakyat Irian Barat, yang diikuti dengan perundingan rencana pengembalian Irian Barat oleh Soebandrio dan

180 Ganis Harsono (1985). *Cakrawala Politik Era Soekarno*. Jakarta: Inti Idayu Press.

Jenderal Hidayat. Perundingan dengan Belanda berlangsung satu minggu di Washington dan menghasilkan *preliminary understanding* antara Indonesia dan Belanda, serta satu *aide memoire* yang ditulis dan ditandatangani Sekjen PBB U Thant pada 31 Juli 1962. Isi kesepakatan tersebut sebagai berikut:

- a. Setelah perjanjian diratifikasi oleh Indonesia, Belanda dan PBB, selambat-lambatnya 1 Oktober 1962 PBB akan tiba di Irian Barat untuk menyerahkan pemerintahan dari tangan Belanda. Kekuasaan Belanda di Irian Barat berakhir pada saat bendera Belanda diturunkan dan bendera PBB dikibarkan.
- b. PBB akan memakai tenaga-tenaga Republik Indonesia (baik sipil maupun alat-alat keamanan), bersama dengan alat-alat yang sudah ada di Irian Barat yang terdiri dari putra-putra Irian Barat dan sisa-sisa pegawai Belanda.
- c. *Paratroop-paratroop* Indonesia tetap tinggal di Irian Barat, di bawah kekuasaan administrasi PBB (*at the disposal of the United Nations Administration*).
- d. Angkatan Perang Belanda mulai saat itu berangsur dipulangkan ke negeri Belanda. Yang belum pulang akan diletakkan dalam pengawasan PBB dan tidak boleh dipakai untuk operasi-operasi militer.
- e. Wilayah di antara Irian Barat dan daerah Republik Indonesia lainnya, adalah lalu lintas bebas.
- f. Pada 1 Januari 1963, atau 31 Desember 1962, bendera Sang Merah Putih secara resmi akan dikibarkan di samping bendera PBB.
- g. Pemulangan Angkatan Perang Belanda dan pegawai Belanda harus selesai pada 1 Mei 1963, dan sebentar sesudah itu Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengambil alih pemerintahan di Irian Barat dari tangan PBB.

Dalam hal *self determination* bagi rakyat Irian Barat disepakati untuk diadakan pemungutan suara pada 1969. Jadi *self determination* ini menurut Soekarno adalah “...*internal self determination*; yaitu *self determination* antara kita dengan kita sendiri, dan bukan *external self determination* yang kita tolak”. Akhirnya pada 15 Agustus 1962 di gedung PBB di New York ditandatangani perjanjian penyerahan

pemerintahan atas Irian Barat kepada Indonesia oleh perwakilan Indonesia dan Belanda yang masing-masing diwakili oleh Soebandrio dan Van Royen. Dalam Persetujuan New York tersebut pelaksana administrasi sementara adalah *United Nations Temporary Executive Administration* (UNTEA) yang akan melakukan pengalihan urusan administrasi dari Belanda kepada Indonesia atas Irian Barat sampai selesainya proses tersebut pada Mei 1963.

Setelah melalui proses diplomasi yang pelik dan aksi militer pada 4 Mei 1963 Irian Barat kembali kepada kedaulatan Indonesia. Dukungan Amerika terhadap Indonesia dibangun melalui sikap membangun saling percaya. Hal ini juga dibuktikan oleh Bung Karno ketika tahun 1962 membantu Kennedy dengan membebaskan pilot dari Angkatan Udara Amerika Serikat Allan Pope yang terlibat di dalam pemberontakan PRRI-Permesta.

Indonesia juga menerima kehadiran Korps Perdamaian (*Peace Corps*) yang merupakan proyek istimewa Kennedy untuk datang dan tinggal di Indonesia sebagai penghargaan Soekarno yang memahami gagasan Kennedy tentang *The Spirit of the New Frontier*. Meskipun banyak yang menganggap *Peace Corps* sebagai partner CIA, namun Soekarno tetap membiarkan mereka beroperasi di Indonesia sebagai bentuk *respect*-nya atas dukungan Kennedy terhadap Indonesia.

Kedekatan Soekarno terhadap Kennedy terjadi pada tahun 1961 hanya beberapa bulan setelah Kennedy dilantik menjadi presiden. Soekarno melihat Kennedy sebagai pemimpin muda progressif yang menampilkan wajah baru Amerika Serikat. Kennedy sebagai sosok humanis yang merepresentasikan nilai-nilai Partai Demokrat darimana ia berasal. Namun pada saat bersamaan Soekarno juga melihat tantangan berat yang dihadapi oleh Kennedy terhadap corak politik luar negeri Amerika Serikat yang ekspansif dan didorong oleh sayap kekuatan militer yang saat itu sedang berkonflik di kawasan Indochina. Soekarno begitu terkesan atas visi baru Amerika Serikat di bawah Kennedy. Karena itulah dalam perjalanan pulang ke tanah air, Soekarno menyampaikan kesannya terhadap Kennedy. Menurut Soekarno tentang Kennedy, "Ia adalah tokoh Amerika Serikat pertama yang menganggap saya sebagai orang... Kennedy adalah pemimpin Amerika Serikat pertama yang menyadari bahwa nasionalisme masih merupakan kubu pertahanan paling baik untuk menangkis ancaman ideologi dari luar negeri. Saya doakan tokoh muda ini panjang umurnya".

Hanya berselang dua tahun setelah pertemuan Kennedy dengan Soekarno, pada 22 November 1963, Soekarno berlinang air mata memberikan penghormatan terakhir kepada Presiden Kennedy yang mati terbunuh. “Dia orang baik,” katanya.¹⁸¹

Melalui perjuangan yang panjang dan berliku, akhirnya Soekarno bisa merayakan kembalinya Irian Barat ke pangkuan Bumi Pertiwi. Dalam kunjungannya ke Irian Barat pada 4-6 Mei 1963, dengan gembira dituturkannya keadaan tersebut:

“Pada tanggal 1 Mei 1963 jam 12.30 waktu setempat, UNTEA menyerahkan dengan resmi Pemerintahan atas Irian Barat kepada Republik Indonesia. Dengan kegembiraan yang meluap-luap saudara-saudara sebangsa kita di Irian Barat merayakan peristiwa penting, peristiwa bersejarah itu dengan berpesta-ria tujuh hari tujuh malam lamanya. Dan puncak dari segala kegembiraan mereka itu, saya saksikan sendiri sewaktu saya berkunjung ke Irian Barat dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Mei yang baru lalu.

Saya telah menyaksikan sendiri, dan dari Irian Barat sendiri telah saya laporkan kepada seluruh Rakyat Indonesia, bahwa kini sudah berkibar hanya satu bendera saja di seluruh wilayah Irian Barat, yaitu Sang Merah Putih! Kini telah utuh-lengkaplah wilayah Republik Indonesia! Telah utuh kembali wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke! Telah utuh kembali garis wilayah tanah air kita yang membentang lebih dari lima ribu mil jauhnya dari Barat sampai ke Timur!”

4.2.2. Koridor Pembangunan Nasional

Koridor pembangunan nasional merupakan *field/corridor* Geopolitik Soekarno yang lahir setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Soekarno menitikberatkan pada tiga program pemerintah, yaitu memenuhi sandang-pangan rakyat dalam waktu yang singkat; menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara; serta melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik. Dalam melaksanakan program sandang-pangan rakyat,

181 M.S. Kapitsa dan N.P. Maletin (2017). *Soekarno: Biografi Politik*. Jakarta: Ultimus. Baca juga, Ganis Harsono (1985). *Op.Cit.*

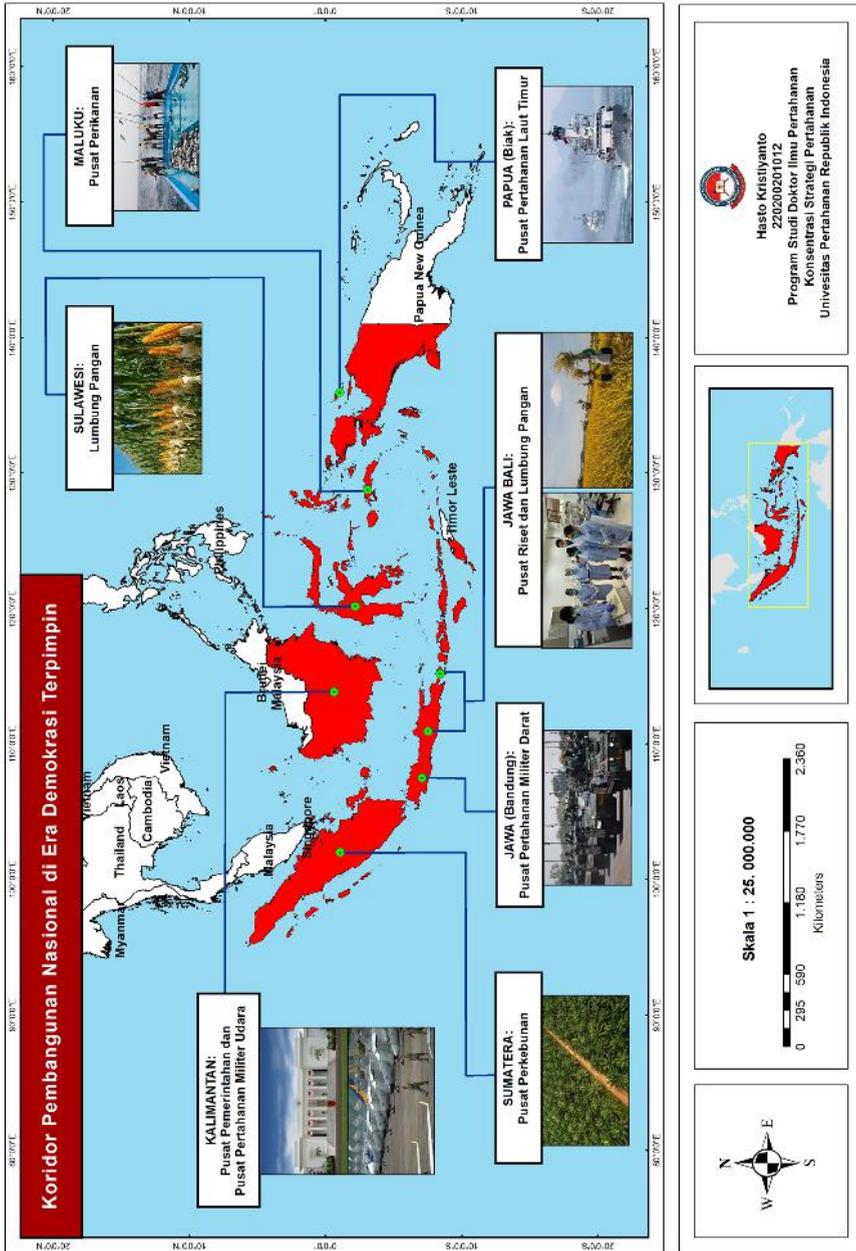
pemerintah menyempurnakan Dewan Ekonomi dan Pembangunan serta Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dibentuk pada era Kabinet Kerja. Soekarno menggagas adanya Haluan Negara yang disebut dengan Pembangunan Semesta Berencana.

Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) tahun 1961 merupakan manifestasi dari koridor pembangunan nasional. Dalam amanatnya pada Sidang Pleno Pertama Dewan Perancang Nasional (Depernas) di Istana Negara pada 28 Agustus 1959, Soekarno menyatakan bahwa dalam suatu negara harus ada pola pembangunan *planned policy* yang disusun dengan terencana. Di dalamnya tidak dirumuskan satu bidang saja melainkan perencanaan semesta. Soekarno menyebutnya dengan istilah *overall planning* yang meliputi semua bidang, ekonomi, kultur, mental, dan perencanaan di atas segala bidang. Pola pembangunan ini menurut Soekarno menjadi milik nasional yang harus diselenggarakan oleh segenap rakyat Indonesia dan seluruh lembaga negara agar hal itu menjadi satu kenyataan.¹⁸²

Pada 17 Agustus 1960 berhasil disusun PNSB oleh Depernas yang dibentuk oleh Soekarno pada tahun 1959 dan beranggotakan 80 orang yang dipimpin oleh Prof. Mohammad Yamin. Pola PNSB oleh MPRS ditetapkan menjadi GBHN melalui TAP MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 1961-1969 dan TAP MPRS Nomor IV/MPRS/1963 tentang Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan sebagai landasan bagi pembangunan yang integratif, menyeluruh, dan berkelanjutan.

PNSB merupakan rencana pembangunan nasional yang komprehensif dan merupakan hasil kerja sekitar 574 pakar dari berbagai cabang ilmu, termasuk dari perguruan tinggi. Strategi pembangunan nasional yang direncanakan oleh Depernas adalah melaksanakan rencana tersebut setahap demi setahap dan daerah demi daerah (Gambar 4.2). PNSB memberikan perhatian yang besar pada industri dasar dan industri strategis, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya. PNSB, tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga

182 Soekarno (1959). *Dewan Perantjangan Nasional (DEPERNAS)*. Pidato pada Sidang Pleno Pertama, 28 Agustus 1959.



Gambar 4.2. Koridor Pembangunan Nasional

Sumber: diolah dari Dok. Pembangunan Nasional Semesta Berencana

Rencana PNSB dibagi ke dalam dua tahap, yaitu tiga tahun pertama, Indonesia akan mencapai swasembada pangan, sandang, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya; dan pada periode lima tahun berikutnya, Indonesia akan berkembang dan tumbuh secara berkelanjutan dengan kekuatan sendiri (*self-sustained development*). Negara menjadi aktor utama dalam melakukan terobosan-terobosan pembangunan nasional yang terencana dan holistik.

PNSB merupakan penjabaran dari pemikiran Soekarno untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam PNSB dijelaskan bahwa seluruh kepulauan Indonesia adalah suatu kesatuan ekonomi yang memungkinkan pembangunan nasional sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian bangsa. Konektivitas sosial-ekonomi dan sosial-politik antarpulau dalam konsep PNSB ini merupakan pemikiran Soekarno sejak 1947. Bagi Soekarno, "*Seluruh kepulauan Indonesia membutuhkan diri satu sama lain, seluruh kepulauan Indonesia barulah dapat menjadi satu dasar ekonomis yang kuat bagi industrialisme, jika bergandengan ekonomis satu sama lain, isi mengisi satu sama lain, bantu membantu satu sama lain.*"

Laut bukan sebagai pemisah daratan melainkan yang menyatukan antarpulau di Indonesia. Keunggulan dan keragaman ekonomi di satu daerah, justru menurut Soekarno menjadi pemersatu masyarakat Indonesia. Lihat Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Konsep Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana

NO.	KATEGORI	PNSB SEBAGAI GBHN
1.	Sistematika	Terdiri dari: a. Manifesto Politik Republik Indonesia Sebagai Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara. b. Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana c. Pola Proyek d. Pola Penjelasan e. Pola Pembiayaan f. Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara Dan Haluan Pembangunan
2.	Bentuk Hukum	Ditetapkan oleh MPRS (dalam bentuk beberapa Ketetapan MPRS)
3.	Lembaga	Depernas
4.	Subjek yang diatur	Kekuasaan Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif (MPR, DPA, DPR, BPK, MA dan Departemen-departemen)
5.	Substansi Pembangunan yang diatur	Proyek A dibagi menjadi 8 bidang pembangunan, yaitu a. Mental dan rohani; b. Penelitian; c. Kesejahteraan; d. Pemerintahan; e. Keamanan dan pertahanan; f. Produksi; g. Distribusi; h. Keuangan. 1) Proyek B terdiri dari 8 proyek besar, yaitu minyak, kayu, perikanan laut, kopra, karet, timah, alumina dan pariwisata yang pembiayaannya tidak disediakan dari modal dalam negeri, tetapi dari investasi atas kekayaan alam Indonesia guna membiayai proyek A. 2) Kekurangan biaya Proyek B berasal dari pemasukan pajak pertumbuhan ekonomi yang normal (Muhaimin, 1990). Pengolahan kekayaan alam diharapkan dilaksanakan oleh Negara, dapat juga oleh perusahaan Negara bekerja sama teknis dan moneter dengan orang Indonesia maupun asing; tetapi sebisa-bisanya di bawah pimpinan dan pengawasan orang Indonesia.

Sumber: diolah dari Pembangunan Semesta (Yamin, 1961).

Pada 1963, Depernas diintegrasikan ke dalam lembaga eksekutif negara dalam bentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 12 Tahun 1963 Bapennas bertugas menyusun rencana jangka panjang dan tahunan, rencana nasional, dan daerah; mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan; serta menyiapkan *progress-report* mandataris untuk MPRS. Pada saat itu Bappenas mempunyai kedudukan yang tinggi dan diberikan kewenangan yang luas. Bapennas dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai Pimpinan Tertinggi dibantu oleh Presidium sebagai Wakil Pimpinan Tertinggi, dan Menteri Koordinator Pembangunan sebagai Koordinator serta Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pimpinan harian. Bappenas dilengkapi dengan adanya Musyawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional (Muppenas) yang terdiri atas para Menteri Koordinator, Gubernur, dan perwakilan masyarakat. Dalam relasi kerja dengan daerah, Bappenas menggunakan saluran Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (Bakopda). Setiap departemen yang ada dalam Bappenas mempunyai Badan Perencanaan dan Penelitian Departemen (Bappenas, 1964).

Berbagai pemberontakan yang muncul dan pada saat bersamaan secara berturut-turut dilakukan operasi Trikora dan Dwikora menyebabkan memburuknya perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari alokasi belanja negara sejak tahun 1961 dimana pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang berasal dari anggaran proyek-proyek PNSB untuk digunakan dalam memulihkan keamanan dalam negeri akibat pemberontakan PRRI/Permesta, DI/TII, Operasi Trikora dan Dwikora, *Asian Games*, *Games of the New Emerging Forces* (GANEF0), dan pembangunan gedung GANEF0. Pada saat bersamaan neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit sebesar 88 juta US dollar akibat dari menurunnya perdagangan internasional dan meningkatnya pembayaran jasa. Dampaknya proyek pembangunan industri PNSB tidak bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pada akhirnya pemerintah memutuskan hanya membangun beberapa proyek PNSB yang dianggap sebagai prioritas.

Dalam Sidang Umum ke-III tahun 1965 pada 16 April 1965,

MPRS merevisi PNSB melalui TAP MPRS Nomor VI/MPRS/1965 tentang “Banting Stir untuk Berdiri di Atas kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan”. Dalam kebijakan rencana pembangunan yang sudah direvisi oleh MPRS, sejumlah proyek PNSB yang akan dibangun terpaksa dikurangi, bahkan ditunda sama sekali. Proyek Banting Stir yang akan dijalankan pada tahun 1965-1968, terdiri atas sebelas kegiatan sebagai berikut:

- a. Proyek *Nation* dan *Character Building*;
- b. Proyek-proyek di bidang produksi sandang pangan;
- c. Proyek-proyek pembangunan bidang khusus pertahanan/ keamanan yang meliputi proyek-proyek prasarana, industri pertahanan, dan proyek-proyek strategis, ofensif, *aerospace*;
- d. Proyek-proyek pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan;
- e. Proyek-proyek pertambangan, industri dan tenaga listrik;
- f. Proyek-proyek industri pengolahan bahan mentah;
- g. Proyek-proyek prasarana nasional dibidang perhubungan darat, laut dan udara dan telekomunikasi serta industri-industri yang bersangkutan, di antaranya industri bahari untuk kelengkapan pelayaran rakyat;
- h. Proyek-proyek transmigrasi gaya baru;
- i. Proyek-proyek penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) di bidang teknologi, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan dan sebagainya;
- j. Proyek-proyek pendidikan tenaga kejuruan; dan
- k. Proyek-proyek PNSB yang sudah dimulai.

Rencana Pola Banting Stir atau Pola Ekonomi Perjuangan yang dijadwalkan selesai tahun 1968 tidak bisa dilanjutkan karena adanya Peristiwa G30S di akhir tahun 1965. Hal ini juga menyebabkan berakhirnya cita-cita koridor pembangunan nasional yang telah digagas Soekarno.

4.2.3. Pelembagaan Pertahanan Negara: Darat, Laut, dan Angkasa

Pelembagaan pertahanan negara merupakan *capital* geopolitik dalam pemikiran Soekarno. Terkait pelembagaan pertahanan ini, Soekarno membentuk Dewan Angkatan Laut (DAL), Dewan Maritim (DEMAR), Dewan Angkutan Darat (DAD), Dewan Penerbangan, Dewan Bahan Makanan, Dewan Pertekstilan, Dewan Perusahaan, Dewan Penempatan Sarjana, Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah, Badan Muatan Indonesia, dan Badan Penggerak Koperasi (BAPENGGKOP).

DAL dibentuk oleh pemerintah pada 31 Desember 1959 sebagai badan koordinasi yang dapat mengontrol, menertibkan, serta melancarkan bidang-bidang pekerjaan dalam sektor usaha kapal niaga, pelabuhan dan peredaran komoditas di seluruh Indonesia. DAL berpusat di Jakarta yang berwenang melakukan koordinasi dengan tujuh belas pelabuhan di seluruh, yaitu: Pelabuhan Belawan, Tanjung Pinang, Teluk Bayur, Palembang, Tanjung Priok, Semarang, Tanjung Perak, Pontianak, Banjarmasin, Tarakan, Balikpapan, Makassar, Bitung, Benoa, Ternate, Ambon, dan Kupang. Delapan bulan kemudian, DAL disempurnakan menjadi Dewan Maritim melalui Perpres Nomor 19 Tahun 1960 tentang Dewan Maritim sebagai Dewan Tertinggi di bidang kemaritiman Indonesia. Tujuannya, untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi maritim Indonesia.

Sebelumnya pada 7 April 1960, pemerintah melalui Perpres Nomor 6 Tahun 1960 juga telah membentuk Dewan Angkutan Darat (DAD) yang anggotanya terdiri dari pejabat sipil dan militer serta pihak swasta yang bergerak dalam bidang usaha pengangkutan darat. DAD ini dibentuk di tingkat pusat, maupun provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian pada 30 September 1960, pemerintah menambah keanggotaan DAD Pusat dari perwakilan Departemen Perhubungan Laut. Empat hari setelah dibentuknya DAD, pemerintah merasa perlu untuk mengkoordinasi politik penerbangan sipil dan politik penerbangan militer. Menurut pemerintah, keduanya erat kaitannya dengan politik dan ekonomi negara. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Dewan Penerbangan yang diharapkan dapat mencapai potensi udara yang sempurna. Upaya pemerintah ini dilakukan dengan mengkoordinasikan penerbangan militer, penerbangan sipil,

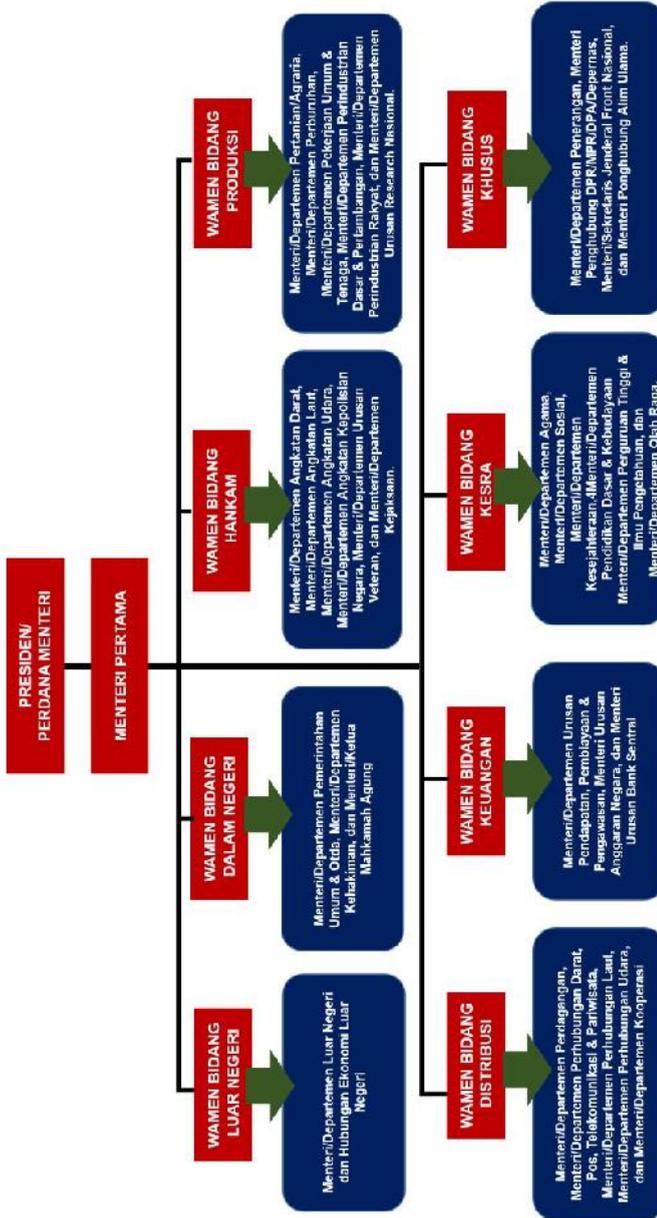
industri pesawat dan industri turunannya, serta industri bahan penggerak tenaga yang terlatih. Nantinya, Dewan Penerbangan disempurnakan oleh pemerintah pada 27 November 1963 menjadi Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia.

Presiden Soekarno juga menyempurnakan organisasi pemerintah dan aparatusnya berdasarkan saran dari Panitia *Retooling* Aparatur Negara yang diketuai oleh Nasution dan dibantu Muhammad Yamin serta Roeslan Abdulgani. Atas masukan dari Panitia *Retooling* Aparatur Negara, Presiden Soekarno pada 26 Juli 1962 dalam Perpres No. 4 Tahun 1962 Pasal 2 membentuk Kementerian Negara atau Kabinet yang terdiri dari Perdana Menteri, Menteri Pertama, beberapa Wakil Menteri Pertama, dan beberapa Menteri. Posisi Soekarno sebagai presiden sekaligus perdana menteri. Menteri Pertama bertugas dalam memimpin kabinet sehari-hari. (Gambar 4.3.).

Pada tahun yang sama, Soekarno melakukan reorganisasi angkatan perang. Atas saran dan masukan dari Ir. Juanda selaku Menteri Pertama yang dibantu oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dan Kepala Staf Angkatan Kepolisian (KSAP), perlu dilakukan integrasi seluruh angkatan perang termasuk kepolisian negara. Ir. Djuanda juga menyarankan agar adanya Panglima Angkatan Perang yang membawahi semua angkatan perang termasuk kepolisian negara.¹⁸³ Akan tetapi, Soekarno dalam hal struktur kekuasaan tertinggi dalam pertahanan dan keamanan negara tetap dipegang langsung oleh Presiden. Presiden Soekarno menginginkan adanya Panglima Tertinggi (Pangti) dibantu oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata.¹⁸⁴

183 Abdul Haris Nasution (1967). *Menegakkan Keadilan dan Kebenaran*. Seruling Masa.

184 Harold Crouch (1978). *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.



Gambar 4-3. Struktur Kabinet Soekarno Tahun 1962

Sumber: diolah dari Perpres No. 4/1962

Reorganisasi angkatan perang dan kepolisian negara ini oleh Soekarno ditetapkan melalui Keppres Nomor 225/plt/1962. Sejak saat itu, seluruh angkatan perang dan kepolisian negara terintegrasi dalam satu wadah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dalam struktur organisasi ABRI, Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata yang dibantu oleh Staf Angkatan Bersenjata yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAB). Dalam melaksanakan tugasnya, KSAB dibantu oleh Deputi Operasi, Deputi Pembinaan dan Deputi Khusus. Para kepala staf angkatan diganti-menjadi panglima.¹⁸⁵

Seluruh instrumen pertahanan negara, baik bidang politik, ekonomi, dan militer dipegang langsung oleh Soekarno sesuai dengan konsepnya mengenai Hukum Kesatuan-tiga yang berlaku universal di setiap bangsa. Hukum Kesatuan-tiga yang dimaksudkan oleh Soekarno adalah revolusi, sosialisme, dan pimpinan nasional. Dalam pidato Soekarno (1961) dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-16. Soekarno menjelaskan bahwa:

“Tidak ada satu bangsa bisa menjalankan perjuangan besar untuk merubah secara radikal satu keadaan lapuk menjadi satu keadaan baru, tanpa dipenuhinya tiga syarat ini: kesatu: Revolusi, kedua: Ideologi Nasional Progresif, ketiga: Pimpinan Nasional. Artinya: sesuatu Perjuangan Besar untuk Perubahan Besar yang radikal, harus dengan Revolusi, harus dengan Ideologi Nasional yang Progresif, harus dengan satu Pimpinan Nasional yang tegas. Sekali lagi: tidak ada Perjuangan Besar untuk Perubahan Besar yang radikal dapat berjalan baik tanpa kesatuan tiga ini! Tidak ada mungkin Perjuangan Besar itu lancar dan berhasil, tanpa Tritunggal ini. Demi keselamatannya Perjuangan, lancarnya Perjuangan, berhasilnya Perjuangan, tiga hal ini merupakanlah satu keseluruhan, satu kesatuan, satu ketunggalan, yang tak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain.

Sejarah dan praktiknya semua Perjuangan Besar di seluruh dunia menunjukkan kebenarannya hal ini. Dimana sesuatu Perjuangan Besar berhasil, di situ tampak adanya Tritunggal itu. Dimana sesuatu Perjuangan berjalan seret,

185 Saleh A. Djahhari (1997). *Sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

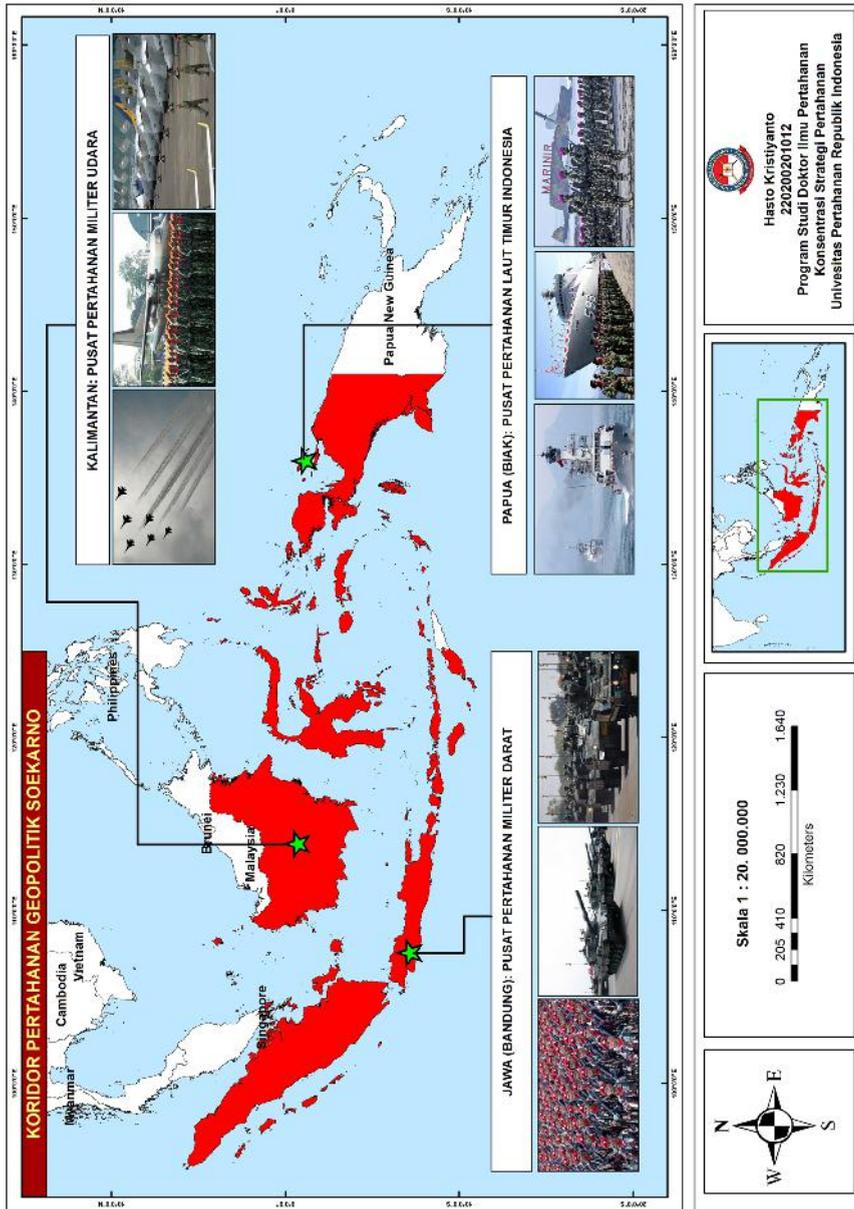
atau tidak berhasil, di situ tampak tidak dipenuhinya syarat "Tritunggal" itu. Ada bangsa yang ber-revolusi, dan juga mempunyai pimpinan nasional, tetapi tidak mempunyai konsep atau ideologi nasional, – revolusinya tak tahu arah, dan menjadi tele-tele. Ada bangsa yang ber revolusi, dan mempunyai konsep atau ideologi nasional, tetapi tidak mempunyai pimpinan nasional, di situ revolusinya seperti tentara tanpa Jenderal, dan revolusinya menjadi seperti sekadar api-mengangah di dalam sekam dan tak mencapai apa-apa kecuali asap yang mengepul ke sana-sini."¹⁸⁶

Soekarno menyadari bahwa dari perspektif geopolitik, Indonesia merupakan negara kepulauan dan dari perspektif historis, bangsa Indonesia adalah bangsa maritim. Dari dua perspektif ini, Soekarno percaya bahwa pertahanan negara Indonesia harus dibangun dengan watak bahari atau *nation-building* bahari. Soekarno berharap agar Angkatan Laut menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia. Dalam warisan Soekarno menjelang akhir kekuasaannya, Soekarno membangun Kompartemen Maritim yang terdiri dari Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut serta Departemen Perindustrian Maritim.¹⁸⁷ Perhatian Soekarno terhadap pentingnya pembangunan kemaritiman, sebenarnya sudah digagas oleh Soekarno pada 1962 dengan mencanangkan berdirinya Institut Oseanografi di Ambon. Soekarno berencana membangun Institut Teknologi Ambon sebagai pusat oseanografi terbesar di Asia Tenggara. Akan tetapi, proyek ini gagal akibat terjadinya peristiwa G30S pada 1965.

Dalam bidang kedirgantaraan, Soekarno mewariskan institusi yang merealisasikan kemandirian teknologi kedirgantaraan dan angkasa luar. Soekarno pada 1963 mendirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) melalui Keppres No. 236/1963. Pendirian Lapan bertujuan untuk membangun kekuatan pertahanan angkasa luar. Dari sinilah, Indonesia mampu mengembangkan roket secara mandiri, baik proyek yang sudah dikerjakan oleh

186 Soekarno (1961). *Revolusi-Sosialisme-Pimpinan Nasional (Resopim)*. Amanat Presiden RI Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-16, Jakarta, 17 Agustus 1961.

187 Soekarno (1965). *Amanat Presiden Soekarno pada Rapat Panglima ALRI di Jakarta*, 17 Juni 1965.



Gambar 4-4. Koridor Pertahanan Geopolitik Soekarno

Sumber: diolah dari dokumen Pembangunan Nasional Semesta Berencana (1959)

Angkatan Darat maupun Angkatan Udara yang berafiliasi dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui Proyek Ilmiah dan Militer (PRIMA) yang dibangun pada 22 September 1962. Gambar 4.4. berikut menunjukkan kekuatan koridor pertahanan Indonesia.

Warisan Soekarno lainnya adalah Lemhannas. Institusi ini didirikan oleh Soekarno berdasarkan Perpres No. 37/1964 pada 20 Mei 1965 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Struktur Lemhannas langsung berada di bawah Presiden Soekarno. Pendirian Lemhannas sudah dipersiapkan oleh pemerintah sejak 1963 untuk mendidik tenaga-tenaga pembina di tingkat nasional. Tujuan didirikannya Lemhannas untuk mengintegrasikan seluruh komponen kekuatan dan potensi nasional, baik dari sipil maupun militer, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan.

4.2.4. Koridor Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan representasi *power* yang menjadi dasar penyusunan kebijakan politik luar negeri. Dalam bangunan pemikiran Geopolitik Soekarno, kepentingan nasional sebagai *field/corridor* geopolitik. Adapun indikatornya mencakup: (1) pertahanan, (2) keamanan, (3) demokrasi, (4) ideologi, (5) hukum, (6) kebijakan, (7) ekonomi, dan (8) sumber daya alam (SDA). Hasil analisis SEM pada bangunan pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap kepentingan nasional menunjukkan hasil bahwa variabel DEM, TER, SDA, POL, KOE, dan TEK memiliki pengaruh positif yang signifikan pada taraf nyata 5% terhadap kepentingan nasional. Lebih rinci variabel DEM memiliki pengaruh sebesar 0,052, TER 0,086, SDA 0,150, POL 0,270, KOE 0,166, dan TEK 0,279. Jika kita perhatikan variabel yang memiliki pengaruh paling besar adalah TEK, POL, dan KOE.

Tabel 4.3. Estimasi Parameter dan Pengujian Hipotesis Variabel Independen terhadap Kepentingan Nasional

Variabel	Estimasi Parameter		Standar Error	Construct Reliability	P-value
	Unstandardized	Standardized			
KEP <--- TEK	0,269	0,279	0,023	11,709	0,000
KEP <--- KOE	0,145	0,166	0,021	6,905	0,000
KEP <--- POL	0,252	0,270	0,025	10,125	0,000
KEP <--- SDA	0,125	0,150	0,018	6,943	0,000

Variabel	Estimasi Parameter		Standar Error	Construct Reliability	P-value
	Unstandarized	Standarized			
KEP <--- TER	0,085	0,086	0,024	3,543	0,000
KEP <--- DEM	0,051	0,052	0,022	2,332	0,020

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

Kepentingan nasional merupakan hal-hal penting dalam siklus Geopolitik Soekarno yang harus dirumuskan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; cita-cita nasional; tujuan nasional; dan rencana strategis pembangunan nasional atau Pola Pembangunan Semesta Berencana atau GBHN. Kepentingan Nasional merupakan pernyataan strategis terhadap skala prioritas apa yang harus diperjuangkan bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai respons atas dinamika politik internasional. Demikian pula sebaliknya, terhadap dinamika politik internasional yang diwarnai pertarungan geopolitik dunia, apa kepentingan nasional Indonesia atas pertarungan geopolitik tersebut.



Gambar 4.5. *Siklus Pemikiran Geopolitik Soekarno*

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

Upaya mewujudkan kepentingan nasional Indonesia dapat bersifat ke dalam melalui diplomasi, penguatan koridor pembangunan nasional, dan pelebagaan pertahanan negara. Perjuangan kepentingan nasional yang bersifat ke luar dilakukan melalui keterlibatan secara aktif dengan membangun kerja sama atau aliansi strategis untuk menjawab berbagai persoalan dunia. Di antara bentuk kerja sama atau aliansi strategis tersebut adalah KAA, GNB yang dibangun atas kekuatan persamaan, kesedarajatan, dan keadilan. Melalui Dasasila Bandung, kerja sama bangsa-bangsa Asia Afrika menjawab dinamika pertarungan bipolar antara dua blok besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Kerja sama dan aliansi strategis secara simultan diikuti dengan diplomasi pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan postur pertahanan negara agar disegani di dunia. Hal ini merupakan satu kesatuan siklus Geopolitik Soekarno dan secara teoritis sesuai dengan pendapat Groom dan Light bahwa dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan politik luar negeri harus melihat isu-isu global dan pendekatan global sebagai pendekatan strategis.¹⁸⁸

Dalam kaitannya dengan pertahanan, kepentingan nasional merupakan instrumen untuk menjelaskan pertahanan negara. Selaras dengan hal ini, hasil pengujian model SEM, pengaruh kepentingan nasional dan pertahanan negara relevan dengan keseluruhan variabel Geopolitik Soekarno. Pengukuran pengaruh totalnya dinyatakan dengan persamaan

$$PER = 0,095 DEM + 0,180 TER + 0,105 SDA + 0,019 MIL \\ + 0,244 POL + 0,115 KOE + 0,244 TEK + 0,513 KEP$$

dengan PER sebagai pertahanan, DEM demografi, TER teritorial, SDA sumber daya alam, MIL militer, POL politik, KOE koeksistensi damai, TEK sains dan teknologi dan KEP kepentingan nasional.

Dari pengukuran tersebut, terbukti bahwa kepentingan nasional memiliki pengaruh langsung terhadap pertahanan negara. Dalam model persamaan regresi sederhana diperoleh bahwa militer memiliki

188 A.J.R. Groom and Margot Light (1994), *Op. Cit.*

pengaruh yang positif terhadap pertahanan dengan persamaan regresi $PER=0,750 MIL$. Akan tetapi ketika militer disimulasikan secara simultan dengan enam variabel geopolitik lainnya, tampak kekuatan militer dalam relevansinya terhadap pertahanan negara lebih ditentukan oleh peningkatan postur alutsistanya. Artinya, pembangunan pertahanan negara, dalam konteks peningkatan alutsista perlu menjadi prioritas kepentingan nasional Indonesia. Pada saat bersamaan upaya peningkatan tersebut perlu melibatkan pengaruh politik, sains dan teknologi, teritorial, koeksistensi damai, sumber daya alam, demografi, dan militer. Dalam praktik kebijakan pertahanan, seluruh variabel pengaruh tersebut harus disimulasikan efektivitasnya sebagai instrumen kekuatan nasional yang memperkuat pertahanan negara.

Sejalan dengan hasil pengujian tersebut, Yusgiantoro memberikan penekanan bahwa fungsi pertahanan merupakan upaya membangun penangkalan atau *deterrent*, menghadapi ancaman, militer, non-militer maupun *hybrid* yang dapat membentuk tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap kedaulatan, NKRI dan keselamatan bangsa.¹⁸⁹ Aspek teknologi, hukum dan industri pertahanan menjadi faktor penting seiring dengan pergeseran paradigma global yang berpengaruh terhadap karakteristik ancaman.

Teknologi sebagai variabel laten dipengaruhi oleh indikator yakni pendidikan, *city of intellect*, dan ilmu dasar. Variabel teknologi dari hasil penelitian kuantitatif juga menunjukkan signifikansi korelasi tertinggi, baik secara tidak langsung terhadap kepentingan nasional (0,279) maupun pengaruh secara langsung ke pertahanan (0,244). Berada di urutan kedua yakni variabel Politik yang dibentuk oleh komponen indikator diplomasi, ideologi dan hukum. Politik menjadi variabel kedua yang memiliki nilai signifikansi pengaruh tertinggi setelah teknologi baik terhadap kepentingan nasional (0,270) maupun secara langsung terhadap pertahanan (0,244). Kedua variabel baik Teknologi dan Politik (Hukum) tersebut menjadi faktor penting dalam penguatan kemandirian industri pertahanan yang juga berhubungan dengan penguatan postur pertahanan dan alutsista. Dengan demikian, penyusunan variabel pemikiran Geopolitik Soekarno dalam relasi hubungan pengaruh dengan

189 Yusgiantoro. (2000) dan (2015). *Op. Cit.*

pertahanan, juga secara tidak langsung melalui kepentingan nasional dalam kerangka strategis pembangunan kekuatan pertahanan dapat dijelaskan juga melalui teori pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Dalam kaitannya dengan pertahanan siklus pemikiran Geopolitik Soekarno menjadi relevan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang pelaksanaan kebijakannya mengabdikan pada tercapainya tujuan bernegara, yang pencapaiannya dirumuskan melalui kepentingan nasional Indonesia. Dalam siklus pemikiran Geopolitik Soekarno tersebut, diplomasi digerakkan oleh keyakinan terhadap ideologi Pancasila sebagai jawaban atas tata dunia yang diwarnai konflik dan ketakutan perang baru akibat perlombaan senjata nuklir memiliki dampak yang sangat besar. Diplomasi memiliki nilai estimasi parameter yang paling besar terhadap variabel POL. Dengan demikian dari pengujian kuantitatif, dapat ditegaskan bahwa korelasi pertahanan dengan diplomasi signifikan.

BAB 5

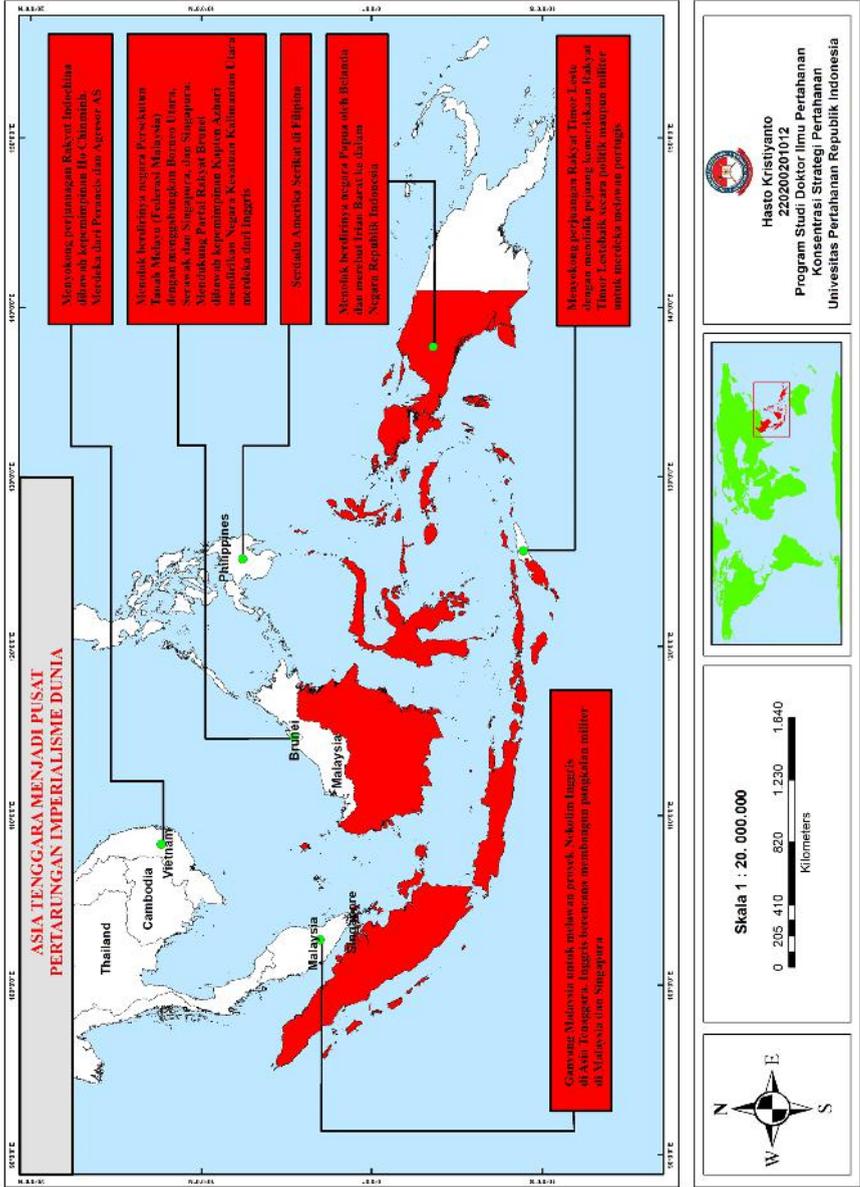
PENGARUH PEMIKIRAN GEOPOLITIK SOEKARNO TERHADAP DUNIA

Pemikiran Geopolitik Soekarno yang melampaui zamannya tidak hanya berpengaruh pada kepentingan nasional, tetapi juga berpengaruh terhadap dunia. Bab ini membahas proyeksi Soekarno tentang Pasifik sebagai *pivot* dunia; Pancasila sebagai *lifeline* dunia baru; KAA, GNB, dan Kemerdekaan Bangsa-bangsa Asia-Afrika; Tatanan Dunia Baru tanpa Imperialisme; dan PGC sebagai *alternative of view* dalam sistem internasional.

5.1 Pasifik sebagai *Pivot* Dunia

Gagasan Soekarno tentang wilayah Pasifik sebagai *pivot* dunia dipengaruhi konsep *Heartland* dari Mackinder. Soekarno merevisi posisi *pivot* dari kawasan Eurasia ke kawasan Pasifik. Melalui tulisan, pidato dan pleidoinya pada 1928, 1929 dan 1930, Soekarno menyatakan akan tiba saatnya pergeseran panggung pertarungan geopolitik dunia ke kawasan Pasifik. Soekarno mengatakan:

“..... Tidak lama lagi Samudra Pasifik menjadi merah oleh darah dan bumi di sekelilingnya menggelejar oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit, maka di saat itulah rakyat Indonesia melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka. Tidakkah negeri kita yang letaknya di pinggir benar dari lautan Teduh itu, akan terbawa-bawa dalam perkelahiannya raksasa-raksasa ini? Tidakkah kita dari sekarang harus bersedia oleh karenanya Janganlah hendaknya kita terperanjat, kalau nanti Perang Pasifik ini mengobarkan Lautan Teduh.....”



Gambar 5.1. Asia Tenggara menjadi Pusat Pertarungan Imperialisme Dunia
 Sumber: diolah oleh Peneliti (2021-2022)

Soekarno percaya Pasifik akan menjadi *pivot* dunia dan Indonesia sebagai *pivotnya*. Makna dengan menguasai dan mengontrol perairan Indonesia secara tidak langsung menguasai *pivot* dunia. Dengan demikian, pembebasan Irian Barat menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Ini untuk melengkapi keberadaan Indonesia secara teritorial (geopolitik) dan kawasan (geostrategi) berada di wilayah yang strategis.

Pandangan Soekarno bahwa Pasifik sebagai *pivot* dunia terjadi dalam situasi geopolitik saat ini,¹⁹⁰ yang antara lain ditunjukkan dengan pertarungan kepentingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat di kawasan LCS. Pertarungan kepentingan internasional di LCS mengakibatkan perubahan pusat geopolitik dari *Heartland*, Asia Pasifik hingga Indonesia.¹⁹¹ Sepanjang 2021, eskalasi konflik di LCS semakin meningkat. Inggris mengirim kapal induk ke LCS, Jepang menyatakan diri mendukung Amerika Serikat dan NATO. Bahkan Amerika Serikat mengajak Indonesia bergabung melawan hegemoni Tiongkok di kawasan ini. Situasi ini menunjukkan bahwa apa yang disebut Hendrajit dan kawan-kawan sebagai *Malacca Dilemma* semakin mungkin terjadi. Menurut Hendrajit dan kawan-kawan *Malacca Dilemma* merupakan kondisi saat krisis geopolitik di Selat Malaka dan LCS mencapai puncaknya.¹⁹² Pada saat hal itu terjadi jalur Selat Sunda (Indonesia) menjadi *pivot* geopolitik dunia seperti yang digambarkan Soekarno di artikelnya, pidato, dan pleidoinya pada 1928, 1929 dan 1930.¹⁹³

5.2 Pancasila sebagai *Lifeline* Dunia Baru

Keterlibatan Indonesia secara aktif di berbagai panggung perjuangan pembebasan bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin muncul dari pandangan geopolitik yang diilhami Pancasila. Ini merujuk pernyataan Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menegaskan, Sidang BPUPK tidak hanya membahas dasar negara, filsafat sedalam-

190 Anita Sengupta (2009). *Op. Cit.*

191 Hendrajit *et al.* (2018). Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional dari Heartland ke Asia Pasifik; Apa Geopolitik Leverage Indonesia? Populis: *Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 3 (6), pp. 721-732,

192 Hendrajit *et al.* (2018), *Ibid.*

193 Soekarno. (1929). *Loc. Cit*; Soekarno. (1930). *Loc. Cit.*

dalamnya atau suatu *philosophische grondslag* dari Indonesia Merdeka, akan tetapi suatu *weltanschauung* atau pandangan hidup bangsa Indonesia bagi dunia. Menjelaskan prinsip kemanusiaan atau Internasionalisme Soekarno mengatakan:

"Internasionalisme tidak dapat tumbuh subur, kalau tidak berakar dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat tumbuh subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya Internasionalisme (Pidato Lahirnya Pancasila, 1945)".¹⁹⁴

Prinsip-prinsip itu pada akhirnya menjadi dasar dari Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini semangat yang dipegang teguh Soekarno, sebagai strategi jalan keluar di antara bangsa-bangsa yang bertikai, terutama ketika dunia terpecah dalam faksi-faksi Perang Dingin, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Dalam Sidang Umum PBB 1960, Soekarno mengkritik pemikiran Bertrand Russell, seorang filsuf Inggris yang membagi kekuatan dunia menjadi dua poros ajaran. Soekarno (1960) menyatakan:

"Maafkan Lord Russell. Saya kira tuan melupakan adanya lebih daripada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin, yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis ataupun Declaration of American Independence."¹⁹⁵

Internasionalisme bagi Soekarno menjadi dasar yang kuat menjalin hubungan internasional sebagai *lifeline* Dunia Baru untuk mencapai kehidupan yang damai di antara sentimen politik Amerika Serikat atau Barat dan Uni Soviet. Dengan demikian Pancasila lahir sebagai bagian dari dialektika geopolitik untuk membangun persaudaraan dunia yang bebas dari berbagai bentuk penjajahan. Soekarno menganggap Pancasila sebagai jalan tengah menengarai antara sistem Barat dan sistem Komunis. Dengan posisi ideologi ini Soekarno tidak sekalipun condong hanya pada satu paham. Soekarno tetap berada di tengah, dan tetap menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan ideologi dunia. Menurut Soekarno, Pancasila menjadi titik temu dari ideologi-ideologi besar dunia. Hal ini yang

194 Soekarno (1945). Lahirnya Pancasila. *Loc. Cit.*

195 Soekarno (1960). Membangun Dunia Kembali (*To Build the World Anew*). *Loc. Cit.*

mendorong Soekarno untuk memasukkan Pancasila dalam piagam PBB pada tahun 1960. Soekarno mengatakan:

*“Indonesia tidak dipimpin oleh kedua paham itu, tidak mengikuti konsep liberal dan komunis... dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih cocok. Sesuatu itu kami namakan Pancasila. Gagasan-gagasan dan cita-cita itu, sudah terkandung dalam bangsa kami. Telah timbul dalam bangsa kami selama dua ribu tahun peradaban kami dan selama berabad-abad kejayaan bangsa, sebelum imperialisme menenggelamkan kami pada suatu saat kelemahan nasional”.*¹⁹⁶

Menurut Soekarno, Pancasila bukan sekadar konsep ideologis, namun juga panduan praktis dan jalan tengah atas sistem politik Barat versus sistem politik Komunis. Prinsip musyawarah menjadi ruh Pancasila dan terbukti efektivitasnya dalam KAA. Demikian juga prinsip ketuhanan, kemanusiaan, Internasionalisme, dan keadilan sosial menjadi dasar pijak dalam tata hubungan internasional. Atas dasar fakta empiris tersebut menghadapi bipolar dunia, Pancasila sebagai *lifeline* dunia baru sebagai *geopolitical capital* menjadi sesuatu hal yang realistis.¹⁹⁷

5.3 Konferensi Asia-Afrika, Gerakan Non-Blok dan Kemerdekaan Bangsa-Bangsa Asia Afrika

Konsep pemikiran Geopolitik Soekarno yang memiliki ciri bebas aktif, seimbang antara nasionalisme dan Internasionalisme, universalisme-humanisme, juga konsisten menyuarakan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dapat menjadi pandangan alternatif geopolitik dunia. Konsistensi ini secara historis dapat ditelusuri melalui agenda pembebasan Irian Barat dari kolonialisme Belanda, kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia-Afrika, persatuan Asia-Afrika, dan Konferensi Tri Kontinental (Asia, Afrika, dan Amerika Latin) yang belum sempat terwujud.

¹⁹⁶ Soekarno (1960), *Ibid.*

¹⁹⁷ Pierre Bourdieu (2003). *Op. Cit.*

Posisi strategis Indonesia dalam geopolitik dunia khususnya pada konteks Perang Dingin memberi keuntungan strategis. KAA, GNB, dan Kemerdekaan Bangsa-bangsa Asia Afrika menjadi *geopolitical capital* Soekarno. KAA merupakan salah satu peristiwa besar yang mengubah posisi geopolitik Indonesia sekaligus berdampak pada negara-negara pesertanya. Tidak hanya dampak politik, ekonomi dan budaya, namun juga edukasi pada praktik hubungan diplomatik negara-negara saat ini.

Dalam KAA di Bandung, perwakilan negara-negara bekas jajahan yang hadir menolak menerima asistensi dari bekas penjajah mereka. Mereka menunjukkan kemampuan mendiskusikan berbagai problem politik internasional dan memberikan pandangan terhadap situasi geopolitik global. KAA menuntut agar PBB melakukan universalisasi keanggotaannya. Seluruh negara bekas jajahan seperti Kamboja, Sri Lanka, Libya, Yordania, Nepal, dan Vietnam pantas menjadi anggota PBB, mengingat secara umum negara Asia-Afrika kurang terwakili dalam Dewan Keamanan PBB. Seruan untuk representasi Dewan Keamanan PBB yang lebih adil dalam pengambilan keputusan sidang internasional adalah ajakan untuk merespons secara serius masalah keadilan internasional, khususnya keadilan prosedural dalam pengelolaan urusan dunia.

Sebelum KAA hanya terdapat dua belas negara Asia-Afrika di PBB pada 1945. Pasca-KAA keanggotaan ini meningkat menjadi dua puluh lima negara pada 1955. Puncaknya setelah gelombang kemerdekaan Afrika pada 1960-1961, jumlah negara Asia-Afrika di PBB melonjak signifikan menjadi lima puluh tiga negara, sementara dari benua lainnya hanya berjumlah lima puluh satu negara. KAA mendorong kelompok Afro-Asia yang kemudian berubah menjadi blok Afro-Asia-Amerika Latin di PBB. Pendirian blok ini secara bertahap menjadi prestasi terpenting KAA yang menawarkan model alternatif melawan kolonialisme dan imperialisme.¹⁹⁸ Ini merupakan pencapaian penting dari gagasan genetik Pemikiran Geopolitik Soekarno.

Dalam dialektika pemikiran Geopolitik Soekarno, bangsa-bangsa yang akan merdeka dihadapkan pada dua kekuatan besar yaitu Barat dan Timur. Dua kekuatan ideologi yang saling bertentangan

198 Vijay Prashad (2007). *The Darker Nations: A People's History of the Third World*. New York and London: The New Press.

mengandung benih-benih imperialisme dan kolonialisme. Soekarno berpendapat bahwa bangsa-bangsa yang baru merdeka tidak terlibat dalam pertarungan geopolitik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip KAA. Oleh karena itu Soekarno kemudian secara aktif mendorong gerakan bangsa-bangsa yang berada di luar kedua blok yang saling bertikai itu. Atas dasar tersebut lahirlah Gerakan Non Blok (GNB) yang melakukan konferensi pertama di Beograd, Yugoslavia pada 1961.¹⁹⁹

GNB merupakan aliansi negara-negara merdeka dan berdaulat penuh yang tidak menggabungkan diri ke dalam kedua blok yang bertikai. Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GNB, Soekarno (1961) menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan politik Non-Blok dengan gambaran yang *gambaran*:

*“Janganlah ada salah paham. Non-Blok bukanlah netralitas. Ini bukan sikap pura-pura alim atau munafik dari seseorang yang menjauhkan diri dari penyakit menular. Politik Non-Blok bukanlah politik mencari posisi netral jika ada peperangan, politik Non-Blok bukanlah politik netral tanpa warna sendiri. Menjadi Non-Blok tidak berarti menjadi penyangga antar dua blok raksasa. Non-Blok adalah pengabdian yang aktif bagi cita-cita luhur kemerdekaan yang berpegang teguh pada perdamaian, keadilan sosial dan kebebasan untuk merdeka”.*²⁰⁰

GNB adalah gerakan kekuatan moral yang aksinya berdimensi luas dan mempengaruhi isu-isu geopolitik global. Perjuangan GNB dalam isu geopolitik global di antaranya perlawanan terhadap politik *apartheid* sebagai aspirasi rakyat Afrika dan mendorong kemerdekaan bangsa-bangsa Islam, termasuk Palestina. Secara ideologis GNB dengan tegas dan konsisten menentang kolonialisme dan imperialisme yang masih membelenggu negara di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Pengaruh Indonesia terhadap KAA dan GNB yang mendorong kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika tak bisa dibantah. Beberapa negara yang berhasil merdeka atas bantuan Indonesia antara lain Maroko, Tunisia, Aljazair, Sudan dan beberapa negara

199 Megawati Soekarnoputri (2012). *Gerakan Non-Blok Dahulu, Kini dan Masa Yang akan Datang*. Slovenia: Peringatan 50 Tahun Gerakan Non-Blok, 19 Mei 2012.

200 Soekarno (1961). *Persahabatan, Perdamaian, dan Keadilan Sosial di antara Bangsa-bangsa*. Pidato Presiden Soekarno pada KTT GNB I, Beograd, Yugoslavia, 1 September 1961.

lainnya. Atas jasa tersebut Soekarno dianugerahi gelar sebagai Pendekar dan Pahlawan Pembebas bangsa Islam dalam Konferensi Islam Asia-Afrika pada 1965. Semangat anti-penjajahan Soekarno bertujuan menciptakan keadilan dan menghapus penderitaan akibat sistem kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme. Soekarno melihat di balik jargon kesejahteraan dalam sistem tersebut terdapat agenda menguasai dan menguras sumber daya alam bagi kepentingan ekonomi negara maju. Hal ini yang dilakukan Inggris yang menjadikan India sebagai objek bagi perluasan pasar dan industri, Belanda yang mengeksploitasi sumber daya Hindia Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan negaranya.

Soekarno menjadikan kesuksesan pelaksanaan KAA, pembentukan GNB, dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika dari belenggu penjajahan dan eksploitasi yang dilakukan negara-negara Barat sebagai *power* atau sebagai *capital* menurut Bourdieu.²⁰¹ Soekarno berhasil membangun *inter-relationship* negara-negara yang terbelenggu dalam penjajahan negara-negara Barat, dengan merumuskan simbol-simbol kekuasaan atau *symbolics power* dalam kuatnya ikatan persatuan negara-negara bekas penjajahan dan yang masih terjajah. Soekarno secara berani menentang negara-negara Barat yang menindas hak asasi manusia. Lihat Gambar 5.2

5.4 Tatanan Dunia Baru: Dunia tanpa Imperialisme dan Kolonialisme

Menurut Bernhard Dahm,²⁰² Soekarno menjelang usia ke-21 sudah berimajinasi tentang dunia tanpa imperialisme, kolonialisme dan kapitalisme: ".....Apa gunanya kita mempunyai pemerintah sendiri, jika ia masih dikuasai oleh penganut-penganut kapitalisme dan imperialisme". Dalam Pleidoi Indonesia Menggugat (1930) maupun dalam Mencapai Indonesia Merdeka (1933), pemikiran Soekarno tentang kemerdekaan Indonesia juga ditunjukkan untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari imperialisme dan kapitalisme.

201 Bourdieu (2003). *Loc. Cit.*

202 Bernhard Dahm (1987). *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES.

Dalam upaya mewujudkan Kemerdekaan Indonesia melalui Proklamasi 17 Agustus 1945, kebijakan politik luar negeri Soekarno berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan dan lahir dari Revolusi Indonesia.

"Proklamasi tanpa Declaration berarti bahwa kemerdekaan kita tidak mempunyai falsafah. Tidak mempunyai Dasar Penghidupan Nasional, tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai arah, tidak mempunyai 'raison d'etre', tidak mempunyai tujuan selain daripada mengusir kekuasaan asing dari bumi Ibu Pertiwi. Sebaliknya Declaration tanpa Proklamasi, tidak mempunyai arti. Sebab tanpa kemerdekaan, segala falsafah, segala dasar-dan-tujuan, segala prinsip, segala "isme", akan merupakan khayalan belaka, - angan-angan kosong-melompong yang terapung-apung di angkasa raya (Soekarno, 1961)".²⁰³

Semangat Proklamasi dan Deklarasi Kemerdekaan yang ditulis dalam Pembukaan UUD 1945 memberi implikasi bagi Soekarno dan Indonesia membantu pembebasan bangsa-bangsa terjajah untuk merdeka. Maka Pancasila dan UUD 1945 menjadi rujukan utama pemikiran Geopolitik Soekarno. UUD 1945 memberi amanat bahwa tujuan kemerdekaan ialah "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Dalam UUD 1945 tersebut, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia merupakan bagian mutlak dunia dan ikut bertanggungjawab bagi ketertiban dunia.

Dalam hal Perang Dingin, dunia dihadapkan pada pertarungan ideologis bipolar. Soekarno menggambarkan situasi politik dunia internasional dengan tiga tanda fundamental: pertama, kebangkitan negara sosialis; Kedua, kemerdekaan dan emansipasi ekonomi bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin; Ketiga, perkembangan sains meningkatkan persaingan untuk memproduksi senjata yang berdampak krisis kemanusiaan (Soekarno, 1960).²⁰⁴ Menghadapi

203 Soekarno (1961). "Resopim": Revolusi-Sosialisme-Pimpinan. *Loc. Cit.*

204 Soekarno (1960). *Laksana Malaekat yang Menyerbu dari Langit. Jalannya Revolusi Kita (JAREK)*. *Loc. Cit.*

situasi dunia dewasa itu, Indonesia mengambil posisi netral sebagai representasi dari bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin. Meskipun bersikap netral terhadap kepentingan Blok Barat dan Timur, namun seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Soekarno dalam kunjungan ke Amerika Serikat pada 1956, netralitas yang dimaksudkan Indonesia dan negara-negara berkembang adalah tidak bersikap pasif terhadap kolonialisme dan imperialisme. Indonesia juga akan mendukung setiap tindakan yang dilaksanakan oleh para pemimpin dari kedua Blok yang berusaha untuk menyirnakkan bom atom dari muka bumi.²⁰⁵

Sikap Soekarno ini ditegaskan lagi dalam KTT-GNB I pada 1961. Menurut Soekarno maksud dari politik bebas tidak dimaknai sebagai politik netral yang bersikap pasif terhadap terciptanya perdamaian dunia atau hanya dijadikan sebagai negara penyangga antara kedua Blok raksasa. Berpolitik bebas menurut Soekarno berarti bersikap aktif untuk mencapai kemerdekaan atau kebebasan, perdamaian dunia, keadilan sosial dan kemerdekaan untuk merdeka. Pandangan ini dibangun atas kebutuhan yang substansial dan universal atau *the Social Consciousness of Man*. Dengan politik bebas yang aktif menurutnya akan menjadi kekuatan moral, sekaligus kekuatan politik sebagai penyeimbang dari kekuatan dua blok raksasa.

Pemikiran Soekarno di atas dirumuskan menjadi tujuan kebijakan luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif, anti-kolonialisme-imperialisme. Pemikiran Soekarno mengenai politik bebas aktif adalah: pertama politik-politik dunia yang diselaraskan sesuai kepentingan nasional yakni pembebasan Irian Barat, untuk mencapai kemerdekaan nasional yang utuh. Kedua, mewujudkan kepentingan nasional, kebijakan politik luar negeri harus berprinsip anti-kolonialisme dan imperialisme. Indonesia tidak bersikap defensif dan berjuang aktif untuk kemerdekaan nasional bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ketiga, politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk menjalin persahabatan kepada negara, sesuai nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian akan menjadi sumbangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan

205 Soekarno (1955). *Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru. Loc. Cit.*; Lihat juga, M.S. Kapitsa dan N.P. Maletin. (2017). *Loc. Cit.*

dunia. Ketiga tujuan politik luar negeri Indonesia bagi Soekarno, adalah kesatuan perjuangan untuk menciptakan tata dunia baru yang harmonis, adil, dan bebas dari eksploitasi antar-bangsa dan manusia.²⁰⁶

Politik bebas dan aktif adalah politik yang mendukung kemerdekaan terhadap imperialisme-kolonialisme. Melalui prinsip politik luar negeri yang demikian, menurut Soekarno dapat dicapai dengan menggalang kekuatan dunia, satu front internasional, sebagai bentuk resistensi terhadap penjajahan yang terjadi di muka bumi. Upaya tersebut menggunakan prinsip persamaan kedaulatan bagi semua bangsa dengan menggunakan hak asasi manusia dan hak asasi nasional, demi perlindungan dirinya dan keselamatan umat manusia.

Pidato *to Build the World Anew* pada 30 September 1960, Soekarno menekankan perdamaian dunia sebagai tugas seluruh umat manusia. Menurut Soekarno terdapat relasi yang kuat antara kolonialisme dengan perdamaian dunia baik dalam bentuk rekolonialisme maupun perlombaan senjata nuklir. Berbagai ketegangan dan konflik dunia yang terjadi pada era itu, menurutnya berakar pada kolonialisme dan imperialisme. Sebaliknya negara-negara yang baru merdeka tidak mempunyai ambisi teritorial dan kepentingan ekonomi imperialistik sehingga tidak menjadi ancaman terhadap perdamaian dunia. Di sisi lain, negara-negara besar yang memiliki senjata nuklir, berpotensi sebagai perusak perdamaian dunia.²⁰⁷

Soekarno mengkritik empat negara besar tersebut karena tidak melibatkan negara-negara yang baru merdeka dalam Konferensi Empat Negara yang begitu menentukan masa depan dunia, khususnya mengenai nonproliferasi nuklir. Soekarno juga mendesak Majelis Umum PBB agar memasukkan rencana resolusi dari Ghana, India, Republik Persatuan Arab, Yugoslavia dan Indonesia agar diadakan pertemuan antara Presiden Eisenhower dari Amerika Serikat dengan Perdana Menteri Krushchev dari Uni Soviet untuk meredakan ketegangan yang sangat membahayakan perdamaian

206 Megawati Soekarnoputri (2012). *Loc. Cit.*

207 Soekarno (1960). *Membangun Dunia Kembali (To Build the World Anew)*. *Loc. Cit.*

dunia. Soekarno berharap akan tercipta dunia baru yang kokoh, kuat dan sehat. Suatu dunia yang semua bangsanya, hidup dalam suasana damai, dan penuh dengan rasa persaudaraan.

Soekarno berharap untuk memindahkan Markas Besar PBB ke lokasi yang bebas dari suasana Perang Dingin. Selain itu organisasi dan keanggotaan Dewan Keamanan dan Lembaga-lembaga PBB lainnya harus mencerminkan bangkitnya negara-negara sosialis atau bangsa-bangsa yang baru merdeka. Oleh karena itu menurut Soekarno, Sekretariat PBB juga harus direorganisasi sesuai dengan keadaan dunia pada saat itu dengan menempatkan representasi negara sosialis, Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang baru merdeka.

Pada saat KTT GNB I, Soekarno sekali lagi mengingatkan pentingnya pembaharuan dalam struktur organisasi Dewan Keamanan, Sekretariat, dan Badan-badan PBB. Menurutnya PBB tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan bagi dua blok raksasa, tetapi menjadi pusat keseimbangan dunia dan menjadi organisasi internasional yang menjalankan asas koeksistensi damai. PBB juga diharapkan dapat menjadi alat bagi negara-negara maju untuk dapat memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang untuk mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan mereka dalam kemajuan ekonomi dan teknologi. Peran positif dan progresif PBB ini menurut Soekarno akan berimplikasi terhadap terciptanya perdamaian, keadilan dan kesejahteraan umat manusia.

Pemikiran Soekarno di atas secara konsep diwujudkan dalam bentuk *Conference of the New Emerging Forces* (CONEFO) pada 1966. Pemikiran Soekarno ini sebenarnya sudah mulai digagas pada saat KTT GNB I. Soekarno di hadapan delegasi KTT GNB I menjelaskan situasi objektif dunia internasional pada saat itu:

“...kekuatan-kekuatan baru yang bangkit itu makin lama makin kuat mendesakkan dirinya kepada dunia, sedangkan kekuatan-kekuatan yang lama masih terus berdaya upaya memelihara keseimbangan yang lama, berdasarkan pengisapan bangsa oleh bangsa, berdasarkan *exploitation de l’homme par l’homme*. Juga bukanlah suatu kebetulan, bahwa negara-negara berpolitik bebas bersekutu dengan kekuatan-kekuatan baru yang bangkit ini.”

Kekuatan-kekuatan baru yang dimaksud Soekarno dirumuskan dalam konsep *New Emerging Forces* (NEFO) berhadapan dengan kekuatan politik lama yang disebutnya *Old Emerging Forces* (OLDEFO). Negara-negara dalam kekuatan baru dihadapkan pada

rekolonialisme dan intervensi negara-negara OLDEFO dalam bentuk provokasi militer, sehingga menimbulkan pergolakan politik di dalam negeri dan perang saudara seperti yang terjadi di Afrika Selatan, Kongo, Kuba, Aljazair, Angola, Tunisia, bahkan Berlin.

Intervensi negara-negara OLDEFO ini disebut Soekarno sebagai Neokolonialisme. Dalam upaya resistensi terhadap politik neokolonialisme, negara-negara yang baru merdeka secara objektif melakukan aliansi internasional dengan negara-negara sosialis dalam blok politik NEFO. Konsep mengenai NEFO versus OLDEFO menurut Peter Kasenda (1991) merupakan upaya Soekarno untuk membangun kesadaran pentingnya membangun dunia kembali untuk mewujudkan suatu dunia yang lebih adil. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Soekarno pada saat berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1960 dan pidatonya pada KTT GNB I.

Dengan demikian imajinasi pemikiran Geopolitik Soekarno secara ontologis merupakan visi perdamaian bagi seluruh negara sebagai wujud tata dunia baru yang bebas dari segala bentuk penjajahan; merdeka dari perilaku "*l'exploitation de l'homme par l'homme*, tanpa adanya *l'exploitation de nation par nation* demi kemerdekaan bangsa dari segala bentuk penjajahan".²⁰⁸

5.5 PGC sebagai *Alternative of View* dalam Sistem Internasional

Rivalitas yang terjadi pada pertarungan politik Internasional yang tidak terselesaikan berkembang menjadi konflik terbuka seperti halnya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia membawa konsekuensi terjadinya tragedi kemanusiaan dan trauma kolektif masyarakat dunia. Cita-cita luhur untuk menjadikan dunia damai dan terbebas dari trauma akibat dari dua Perang Dunia merupakan harapan seluruh umat manusia. Dalam upaya mewujudkan cita-cita perdamaian dunia disusun program-program menuju masyarakat dunia yang satu identitas. Dari sinilah dibuat aturan dan mekanisme dalam sistem internasional untuk mewujudkan dunia yang satu identitas oleh lembaga-lembaga Internasional.

208 Soekarno (1964). Di Bawah Bendera Revolusi. *Op. Cit.*

Program dunia menjadi satu identitas ini ditandai dengan adanya *transfer of power* dari Inggris ke Amerika Serikat yang merupakan hasil dari Konferensi Bretton Woods pada 1944. Konferensi ini juga merupakan cikal bakal lahirnya *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia. Sebenarnya konferensi ini tidak hanya terfokus untuk membicarakan keuangan dan moneter dalam kaitannya dengan mata uang, namun juga lebih kepada desain besar sistem perekonomian dunia yang berada di bawah komando Amerika Serikat. Oleh karenanya, secara signifikan hasil konferensi ini memberikan jalan kepada Amerika Serikat menggantikan Inggris.

Walaupun upaya menciptakan perdamaian dunia setelah Perang Dunia Kedua dilakukan secara masif, namun perang masih terjadi di berbagai belahan dunia. Stabilitas dunia terus bergolak sampai munculnya masa Perang Dingin pada 1990-an. Pada masa Perang Dingin dunia masuk ke dalam pertarungan ideologi yang secara praktis membelah dunia kepada pertentangan dua blok besar (bipolar). Perang Dingin tidak sampai mengakibatkan meletusnya Perang Dunia Ketiga, namun dengan masifnya pengaruh dalam mencari *followers* (negara sekutu) berdampak jelas pada persaingan ekonomi dan rivalitas militer kedua belah pihak. Perang Dingin yang dimotori oleh Amerika Serikat dengan NATO dan Uni Soviet dengan Pakta Warsawa membuat intensitas ketegangan antar-negara di dunia, baik yang tergabung secara terang-terangan maupun yang malu-malu dapat dirasakan secara jelas melalui kebijakan politik luar negeri.

Runtuhnya Uni Soviet dan sistem komunismenya membuat dominasi dan hegemoni Amerika Serikat dengan NATO dalam berusaha menjadikan masyarakat dunia menjadi identitas yang satu semakin masif. Program-program penyeragaman sistem politik diberikan dalam bentuk hibah kepada negara-negara berkembang, baik yang tidak berpartisipasi kepada salah satu blok maupun bekas anggota Blok Pakta Warsawa. Demokrasi *a la* Barat dalam hal ini sistem politik yang dianut Amerika Serikat dikampanyekan sebagai sistem politik yang terbaik dan akan membawa kesejahteraan bagi para penganutnya. Para pemimpin dunia yang tidak sejalan kerap kali digambarkan sebagai pemimpin yang diktator, pelanggar HAM, dan stigma-stigma negatif lainnya.

Pasca runtuhnya Uni Soviet dunia menjadi satu identitas politik dan merepresentasikan hegemoni dari kekuatan negara-negara barat serta menandai era politik unipolar. Politik identitas unipolar merupakan penegasan nilai-nilai barat terhadap negara-negara lain di dunia. Lembaga-lembaga internasional memberikan legitimasi yang kuat atas aturan-aturan dan mekanisme dari pelaksanaan identitas politik unipolar. Atas nama mewujudkan modernitas bersama, identitas politik unipolar menunjukkan bentuk-bentuk arogansi kultural dan eksklusivitas Barat.²⁰⁹

Penguatan politik identitas unipolar terlihat saat terjadi resesi ekonomi pada 1998 yang melanda negara-negara di Kawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin. Dalam kondisi ini IMF dan Bank Dunia sebagai representasi dari identitas politik unipolar melalui formula bantuan sistem ekonomi yang diberikan mendikte kebijakan-kebijakan negara-negara yang terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung. Parameter perdagangan bebas dan ekonomi, makro maupun mikro menjadi nilai dan patokan ukuran yang baku bagi seluruh negara. Hal ini membuat masyarakat Internasional memberikan legitimasi atas hegemoni kekuatan negara-negara Barat.

Para pemikir ilmu Hubungan Internasional dari kalangan Neo-realis menyatakan bahwa kondisi dunia yang unipolar membuat dunia menjadi tidak stabil. Secara jelas menyatakan bahwa dunia akan stabil, jika hanya ada dua kekuatan besar yang mendominasi dunia. Dengan adanya *bipolarity* justru *balancing of power* akan terjadi dalam sistem politik internasional karena hanya ada dua kekuatan besar yang masing-masing menjaga stabilitas sistem internasional. Menurut Waltz stabilitas dalam sistem internasional yang bipolar dan bersifat anarkis dapat menghindari perang negara dengan kekuatan besar atau perang antar dua kutub negara berkekuatan besar.²¹⁰

Sistem internasional yang bersifat anarkis di dalamnya terdapat unit-unit yang mempunyai hukumnya sendiri-sendiri. Selanjutnya dunia secara perlahan tapi pasti akan terbagi berdasarkan kesamaan rasa senasib dan seperjuangan. Kerja sama

209 David Held, Stuart Hall and Tony McGrew (1992). *Modernity and Its Futures* (*Understanding Modern Societies*). Cambridge: Polity Press.

210 Kenneth N. Waltz (1979). *Theory of International Politics*. New York: McGraw Hill.

antar negara-negara yang pada awalnya hanya bersifat bilateral berkembang menjadi multilateral dan bergerak menuju ke arah pembentukan persekutuan yang lebih kuat hingga membentuk kutub-kutub baru. Kerja sama yang hanya berdasarkan kebutuhan masing-masing untuk memenuhi tuntutan kepentingan nasionalnya mengerucut menjadi kerja sama dan pembentukan aliansi untuk mengamankan kepentingan kolektif perjanjian yang disepakati negara-negara dengan masuk ke dalam aliansi. Berawal dari kerja sama ekonomi sampai kerja sama menjaga perdamaian kawasan secara perlahan, negara-negara yang tadinya sangat tergantung kepada segelintir kekuatan elite barat mulai percaya diri membentuk komunitas dan saling ketergantungan sesama negara anggota.

Dunia saat ini dihadapkan dengan hadirnya revolusi industri 4.0 dengan akses keterbukaan informasinya tidak terbatas. Kemudahan dan derasnya informasi memunculkan banyaknya informasi tandingan dan *hoax* yang menyesatkan dengan kemasannya menarik. Perubahan dunia yang ditandai dengan adanya *Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity* (VUCA) ini membuat masyarakat internasional tidak lagi mudah percaya dengan informasi dan aturan serta mekanisme yang dibuat oleh kekuatan dominasi politik satu identitas unipolar.

Berbagai hal terkait dengan kebocoran informasi yang bertujuan membongkar penyalahgunaan kekuasaan kaum elite dunia dalam menyeragamkan identitas masyarakat dunia melalui lembaga-lembaga internasional mendapatkan perlawanan di era VUCA. Dalam beberapa hal, penanaman kesadaran kolektif politik satu identitas unipolar tercapai, yakni nilai-nilai dan ide-ide Barat dianggap sebagai yang terbaik dan berlaku universal. Dari kelompok kiblat pemikiran Barat yang murni, pengakuan atas eksistensi suatu negara dan harga diri negara yang harus mendapatkan persetujuan barat dan sekutunya sampai penentuan nasib hidup rakyat suatu negara tidak terlepas dari cara pandang, penilaian dan nilai-nilai serta ide-gagasan Barat bahwa peradaban manusia berhenti karena sudah mencapai puncaknya di barat.²¹¹

211 Francis Fukuyama (1992). *The End of History and The Last Man*. New York: Free Press.

Meskipun teknologi informasi mampu melegitimasi politik unipolar Barat dalam menyeragamkan identitas dominansinya, namun pada saat bersamaan muncul ide atau gagasan dari individu bangsa (lokal) yang menguatkan identitas nasional. Kemunculan aktor-aktor lokal dengan identitas yang kuat secara alamiah mendapatkan legitimasi dari masyarakat internasional. Begitu pula dengan menjamurnya komunitas-komunitas sosial yang *borderless* di dunia maya yang disatukan dengan komunitas lainnya yang berbeda bangsa dan keyakinan, semakin menegaskan bahwa aspek persamaan tidak lagi relevan sebagai kesepahaman bersama.

Hadirnya internet menciptakan *borderless society* dimana interaksi antar masyarakat menjadi lintas batas, lintas kedaulatan, lintas batas keyakinan, dan lintas batas ras dan suku. Politik identitas multipolar menjadi kekuatan arus utama alternatif di bawah dominasi politik satu identitas unipolar. Rivalitas keduanya semakin tampak dengan adanya kemunculan Tiongkok dan Rusia yang berusaha eksis melawan dominasi kekuatan Barat dengan menumbuhkan kembali potensi kekuatan serta daya juang berbasis unsur-unsur lokal sekaligus menanamkan nilai-nilai kebanggaan sebagai bangsa Tiongkok dan bangsa Rusia. Masifnya pergerakan Tiongkok dan Rusia dalam bidang teknologi dan ekonomi menghantarkan mereka melawan dominasi *collective security* Amerika Serikat dan negara sekutunya, situasi ini menegaskan situasi dunia internasional kontemporer yang dihadapkan pada pilihan antara dua kutub pilihan, kutub unipolar atau kutub multipolar.

Semaraknya perjanjian-perjanjian lintas batas kewilayahan dapat dikatakan sebagai pergeseran persekutuan unipolar menuju persekutuan multipolar. Hal ini menunjukkan bahwa dunia sudah tidak lagi tergantung sepenuhnya kepada kekuatan Barat. Walaupun tentu saja dominasi kekuatan negara-negara Barat masih saja menawarkan keuntungan bila negara-negara berkembang bergabung ke dalam organisasi kerja sama yang mereka sponsori. Dalam banyak peristiwa geopolitik yang terjadi sampai hari ini, analisis terhadap kerja sama dan organisasi-organisasi yang dibalut dalam spektrum ekonomi selalu erat kaitannya dengan bidang pertahanan. Kerja sama dan organisasi adalah bukti interaksi geopolitik antar-negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya masing-masing dan memperagakan diplomasi dengan

membawa *representational force* atas kapabilitas kekuatan masing-masing negara.

Berbagai kerja sama negara-negara lintas batas kewilayahan yang pada dasarnya dibangun untuk membentuk keterbukaan global, bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Prinsip-prinsip modernitas seperti kebebasan, kerja sama, dan keterbukaan global, bertujuan membentuk adanya satu pemahaman yang seragam hingga terciptanya struktur sosial masyarakat internasional yang justru pada akhirnya bertentangan dengan prinsip dasar dari kebebasan.²¹² Dengan kata lain, modernitas membuka ruang bagi setiap negara untuk berkompetisi dalam perdagangan dan kerja sama secara bebas, serta membuat negara-negara yang lemah semakin terikat pada hegemoni barat. Contoh nyata adalah *status quo*-nya lembaga perekonomian dunia seperti Bank Dunia, IMF, dan WTO dalam memberikan formulasi resep penyelesaian masalah ekonomi. Dominasi yang tercipta ini terus dipertahankan oleh satu kelompok dominan melalui struktur sosial dunia untuk menguatkan hegemoni kapitalisme.

Setelah berakhirnya Perang Dingin pada 1990-an, Amerika Serikat dianggap telah menduduki puncak tertinggi dalam hegemoni internasional. Hal ini terlihat dari penggunaan US dollar sebagai mata uang global sebagai pengganti Poundsterling Inggris, serta pergantian organisasi dunia dari *League of Nations* (Liga Bangsa-Bangsa) menjadi *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Namun pada saat ini dominasi dan hegemoni Amerika Serikat mendapatkan perlawanan sengit dari Tiongkok. Keberhasilan Tiongkok dalam membangun kekuatan perekonomian dan keunggulan teknologinya telah berimplikasi pada kemajuan kekuatan militer Tiongkok. Kontestasi bipolar antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah ikut mendorong perubahan lingkungan strategis global sebagaimana tampak pada perebutan pengaruh di kepulauan Solomon akhir-akhir ini.

Selain itu konstelasi isu keamanan dan pertahanan global juga dapat dilihat dari pertarungan negara-negara dan aliansi di beberapa kawasan strategis. Kontelasi ini membuka ruang bagi rivalitas yang lebih daripada sekedar bipolar, tetapi mengarah

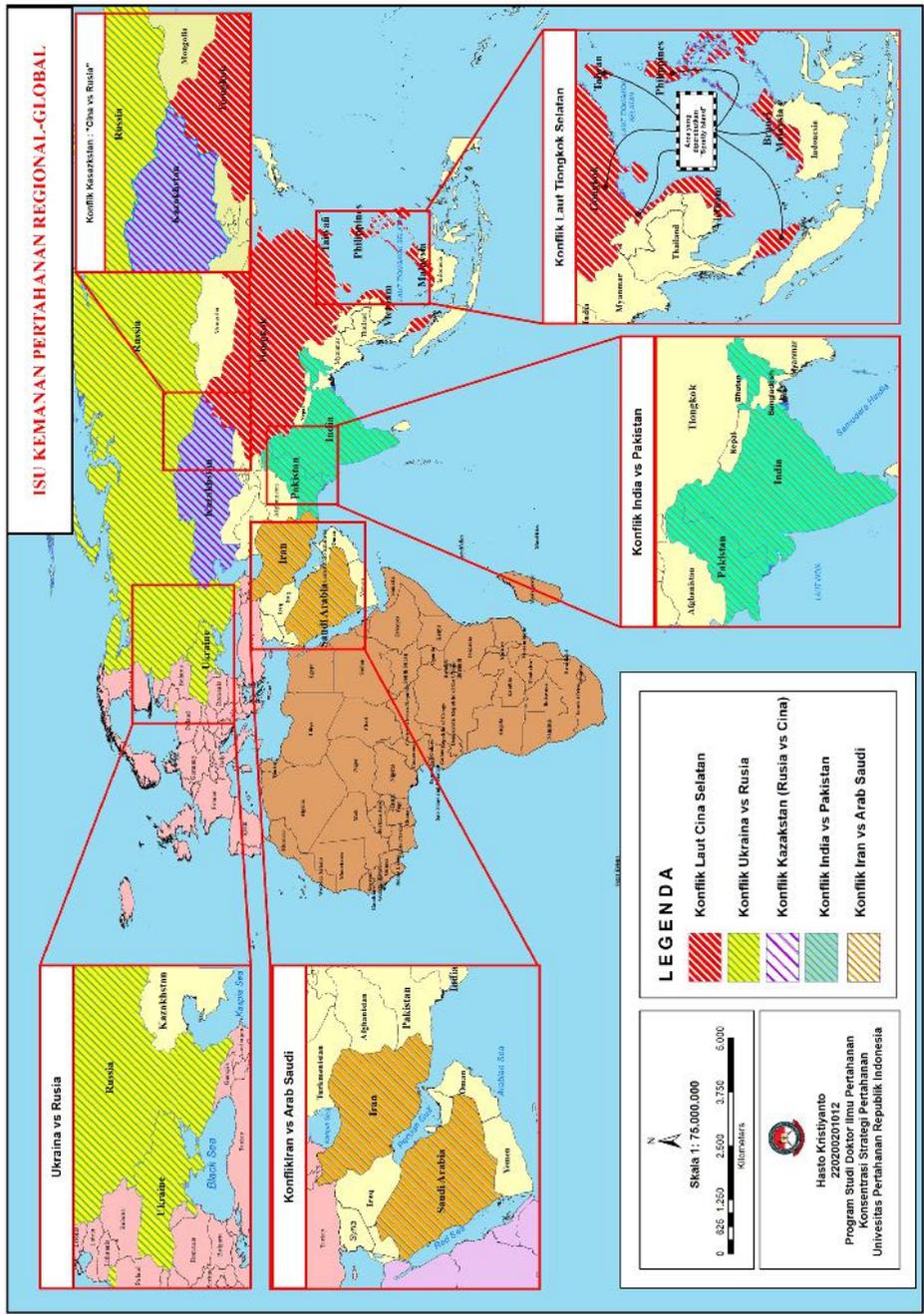
212 Alexander Dugin (2012). *The Fourth Political Theory*. Arktos Media.

pada pertarungan multipolar. Contohnya, Pertama: ketegangan di Timur Tengah antara Iran dan Arab Saudi. Ketegangan tersebut selain dipicu oleh perbedaan paham keagamaan juga dipengaruhi oleh adanya program pengembangan nuklir Iran. Kondisi tersebut dipandang Arab Saudi sebagai ancaman keamanan di regional Timur Tengah. Dalam perkembangan terakhir, Tiongkok berhasil mengambil prakarsa perdamaian antara kedua bangsa yang bertikai.

Kedua, ketegangan di Asia Tengah, yakni konflik di Kazakhstan. Konflik tersebut dipicu oleh perebutan hegemoni dan tujuan mengejar kepentingan ekonomi antara Rusia dan Tiongkok di Kazakhstan. Ketiga, konflik di kawasan Asia Selatan antara India dan Pakistan. Konflik India dengan Pakistan adalah warisan masa lalu yang berawal dari lepasnya Pakistan dari India. Kemudian berlanjut dengan isu-isu strategi mengenai sumber daya alam dan pertahanan kedua negara yang melibatkan aliansi kerja sama yang masing-masing berada dibalik kepentingan India-Pakistan. Keempat, konflik di Kawasan Laut China Selatan. Ketegangan di LCS dipicu oleh perebutan pengaruh antara Tiongkok dengan Amerika Serikat dan sekutunya dalam memperebutkan kawasan perdagangan dunia yang strategis. Kelima, Perang Rusia-Ukraina, dipicu oleh upaya perluasan hegemoni Barat melalui NATO di Ukraina. Lihat Gambar 5.3.

Berdasarkan penjelasan pada Gambar 5.3 di atas, sistem internasional selalu diwarnai pertarungan geopolitik dengan ancaman terhadap keamanan regional dan global. Dalam banyak hal tingkat intensitas pertarungan tersebut menyebabkan terjadinya perang. Dari penjelasan tersebut juga disimpulkan bahwa pertarungan geopolitik sangat dinamis dengan perubahan dunia yang tidak dapat diprediksi. Melalui studi ini ditawarkan instrumen analisis fenomena geopolitik dalam konstelasi pertarungan di sistem internasional berdasarkan teori Geopolitik Soekarno, *Progressive Geopolitical Coexistence* (PGC) sebagai *alternative of view* dalam sistem internasional.

Hubungan interaksi antarnegara di sistem internasional yang terjadi sering kali didasarkan pada kemampuan dan kapabilitas kekuatan negara-negara dengan menitikberatkan pada perjuangan kepentingan nasional yang cenderung mendesakkan kepentingan nasionalnya, sekalipun berujung pada penguasaan negara-negara



Gambar 5-3. Isu Pertahanan dan Keamanan Regional-Global
Sumber: diolah oleh Peneliti (2021)

lain baik secara politik, ekonomi, budaya, maupun politik ekspansi dan invasif terhadap kedaulatan negara lain. Realitas ini sejalan dengan filsafat dasar ilmu geopolitik klasik yaitu darwinisme sosial yang menyatakan bahwa hanya negara-negara yang mempunyai daya *survival* yang dapat tumbuh-hidup dan berkembang (*survival of the fittest*). Pemikiran Ratzel yang dituliskannya pada 1896 menjadi kenyataan. Lebih lanjut Ratzel menyatakan bahwa kemampuan suatu negara dalam mengolah kekayaan sumber dayanya, mempertahankan kekuasaan, dan otoritasnya dengan menjadikan perang sebagai mekanisme absolut menjadi persyaratan untuk tetap eksis dalam sistem internasional.²¹³

Pada saat bersamaan berbagai konflik yang terjadi seperti konflik di Timur Tengah, konflik India-Pakistan, Konflik Kazakhstan (Rusia- Tiongkok), konflik di LCS yang tidak kunjung berakhir, dan Perang Rusia-Ukraina menunjukkan realitas sistem internasional yang bersifat anarkis. PGC sebagai *alternative of view* terhadap sistem internasional yang anarkis ini dapat mengatasi dan mendorong adanya aktor internasional yang memiliki tanggung jawab utama di dalam menjaga perdamaian dunia, yaitu PBB. Agar tugas ini dapat dijalankan dengan baik diperlukan reformasi PBB yang mengedepankan kesetaraan terhadap perwakilan negara-negara merdeka, menggantikan monopoli negara pemegang hak veto. Upaya melakukan reformasi PBB inilah yang menjadi tujuan PGC dalam sistem internasional. Reformasi PBB akan semakin sempurna apabila piagam PBB mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Keyakinan Soekarno ini didukung oleh fakta empiris atas keberhasilan penggunaan Pancasila sebagai metode pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan KAA. Di sinilah teori Geopolitik Soekarno, dalam hal ini PGC terbukti sebagai *alternative of view* atas pengambilan keputusan di PBB yang dikendalikan oleh Negara pemegang hak veto.

213 Friedrich Ratzel (2020). *The History of Mankind*. Hanse Book.

BAB 6

PENGARUH DAN DAMPAK PEMIKIRAN GEOPOLITIK SOEKARNO TERHADAP PERTAHANAN NEGARA ERA SOEKARNO

Pertahanan negara mendapatkan posisi penting dalam pemikiran Geopolitik Soekarno. Dalam konsepsi ini pertahanan negara harus disusun atas cara pandang geopolitik. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Soekarno berikhtiar mewujudkan Indonesia dengan kekuatan pertahanan negara terkuat di Samudera Hindia dan sekaligus menjadi pintu gerbang kemajuan dunia di Pasifik. Atas cara pandang geopolitik ini konsepsi pertahanan negara menempatkan pentingnya kekuatan maritim, udara, darat, hingga pertahanan *outer space*.

Berkaitan dengan hal tersebut bab ini menyajikan pembahasan tentang konsep keamanan dan pertahanan negara; pengaruh pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap pertahanan negara yang berimplikasi kepada:

- a. Tingginya indeks pertahanan Negara;
- b. Kemandirian pertahanan Negara;
- c. Keikutsertaan dalam misi perdamaian dunia; dan
- d. Ditutup dengan pembahasan tentang dampak pemikiran Geopolitik Soekarno: disegani dunia dan sekaligus sebagai ancaman.

6.1 Konsep Keamanan dan Pertahanan Negara

Menurut Barry Buzan keamanan dalam arti objektif diartikan sebagai kondisi tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai yang dibutuhkan. Sedangkan dalam arti subjektif, keamanan diartikan sebagai kondisi tidak adanya ketakutan bahwa nilai-nilai tersebut akan diserang.²¹⁴ Dari konsep yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa keamanan merupakan ketiadaan ancaman dari nilai-nilai yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Konsep ancaman terhadap keamanan menurut Ullman (1983) ialah suatu kondisi yang mengancam negara dan masyarakat dalam rentang waktu yang relatif singkat, drastis, dan signifikan.²¹⁵ Dalam perkembangannya konsep keamanan mengalami proses dinamika dari perspektif tradisional hingga kontemporer.²¹⁶

Konsep keamanan dalam studi politik internasional terkait erat dengan konsep interaksi, kekuasaan, dan pertahanan. Namun demikian secara luas konsep keamanan dan pertahanan adalah dua konsep yang berbeda. Keamanan dan pertahanan memiliki kesamaan dari segi tujuan. Diskursus keamanan dan pertahanan terjadi di ruang pertahanan militer dan keamanan nasional. Kekuatan militer ditandai dengan tersedianya angkatan bersenjata dan teknologi di bidang pertahanan salah satunya adalah teknologi nuklir.²¹⁷

Menurut Yusgiantoro konsep geopolitik memiliki relevansi dengan konsep pertahanan negara. Menurutnya, studi geopolitik tak bisa dilepaskan dengan studi geostrategi dan geoekonomi. Ketiganya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kekuatan ekonomi dapat menopang kekuatan pertahanan. Negara dengan ekonomi yang kuat harus dilandasi oleh kekuatan pertahanan yang juga kuat.²¹⁸ Selain pentingnya kekuatan ekonomi, Yusgiantoro juga menekankan pentingnya kekuatan energi sebagai pertahanan negara

214 Barry Buzan (1991). *People, State, And Fear: A Agenda for Internasional Security Studies in The Post Cold Era* 2nd edition. London: Harvester Wheatsheaf.

215 Richard H. Ullman (1983). Redefining Security. *International Security*, MIT Press, Volume 8, Number 1, Summer, pp. 129-153.

216 Mark V. Kauppi and Paul R. Viotti (1999). *International Relations Theory, 5th ed.* USA: Pearson Education, Inc; Simon Dalby (2003). Calling 911: Geopolitics, Security and America's New War. *Geopolitics* 8(3):61-86; Peter Hough (2004). *Understanding Global Security*. London: Routledge.

217 Barry Buzan. (1991). *Op. Cit.*

218 Purnomo Yusgiantoro (2000). *Op. Cit.*

dalam perspektif geopolitik. Indikator pertahanan negara mencakup: (1) strategi, (2) doktrin, (3) postur, dan (4) Industri Pertahanan.²¹⁹

Menurut Yusgiantoro pertahanan negara bisa kuat bila ditopang dengan ketahanan energi. Baginya pertahanan perlu ditunjang oleh energi dan kehadiran energi juga perlu ditunjang oleh pertahanan terutama di daerah perbatasan yang memiliki isu sensitif. Energi dan pertahanan dapat saling menguatkan dengan bersinergi, misalnya dengan melibatkan dua kebijakan strategis, yaitu kebijakan energi nasional dan pertahanan negara. Pendekatan model ketahanan energi Indonesia dapat ditinjau dari empat lingkup aspek yang saling berpengaruh, yaitu aspek ketersediaan (*availability*), aspek aksesibilitas, kemudahan untuk diakses (*accessibility*), aspek keterjangkauan (*affordability*), serta aspek penerimaan masyarakat (*acceptability*).²²⁰

Di era modern perebutan sumber daya energi dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan antar-negara seperti yang tengah berlangsung di LCS. Tidak hanya letaknya yang sangat strategis bagi geopolitik, kawasan konflik LCS sangat kental dengan muatan polemik. Perdebatan atas kepemilikan serta pengelolaan sumber daya energi di LCS membuat hampir seluruh negara *claimant state* mengupayakan arah geostrategi untuk dapat bertarung dalam panggung politik yang tengah berlangsung. Selanjutnya tentang konsep pertahanan negara selain menekankan pentingnya pertahanan energi, dinamika hubungan internasional, stabilitas regional, juga perdamaian dunia.

Yusgiantoro juga menjelaskan pentingnya pemahaman tentang teori ancaman dalam kerangka konsep pertahanan negara di mana menurutnya telah terjadi perubahan yang signifikan sejak tahun 1990-an. Perubahan tersebut secara khusus ditandai dengan deklarasi perang bintang Amerika Serikat melawan Rusia yang mengedepankan kemajuan teknologi pertahanan luar angkasa. Ini secara tidak langsung mengubah paradigma konsep ancaman. Di dalam produk strategis 2010-2015 dan *Strategic Defense Review* (SDR) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) dijelaskan bahwa seluruh aktivitas, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan wilayah Negara

219 Juniawan Priyono dan Purnomo Yusgiantoro (2017). *Op. Cit.*

220 Purnomo Yusgiantoro (2000) dan (2015). *Op. Cit.*

Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan bangsa, dan menghalangi kepentingan nasional dapat dikategorikan sebagai ancaman. Pemahaman atas ancaman yang bersifat aktual maupun potensial menjadi landasan bagi segala upaya penangkalan (*deterrence*).²²¹

Berkaitan dengan persepsi ancaman dalam perspektif geopolitik, Tilman menulis bahwa terdapat lima faktor yang dapat mendorong munculnya persepsi ancaman. Pertama, dimensi geopolitik (*geopolitics dimension*). Aspek-aspek seperti posisi geografi, demografi, teritorial, dan tata ruang menjadi faktor pertama yang menentukan ancaman. Kedua, dimensi struktural (*structural dimension*). Dimensi ini misalnya menjelaskan persepsi ancaman dalam ketegangan di Korea Utara yang berakar pada struktur politik dan ideologinya. Ketiga, dimensi sejarah (*historical dimension*). Sejarah menyisakan konflik yang muatan emosionalnya terus terbawa dari generasi ke generasi. Dimensi ini menjelaskan isu ketegangan Tiongkok -Jepang yang terus berlangsung akibat sejarah penjajahan Jepang atas Tiongkok. Keempat, dimensi sosial budaya (*socio-cultural dimension*). Semakin pluralistis masyarakatnya, semakin rentan terhadap ancaman. Kelima, dimensi ekonomi (*economic dimension*) tentu dalam persepsi ancaman saat ini berhubungan dengan pertarungan geoekonomi. Lima faktor tersebut digunakan untuk memudahkan analisis dan pemetaan di lapangan terkait dengan isu-isu geopolitik saat ini baik pada level nasional, regional, maupun global.²²²

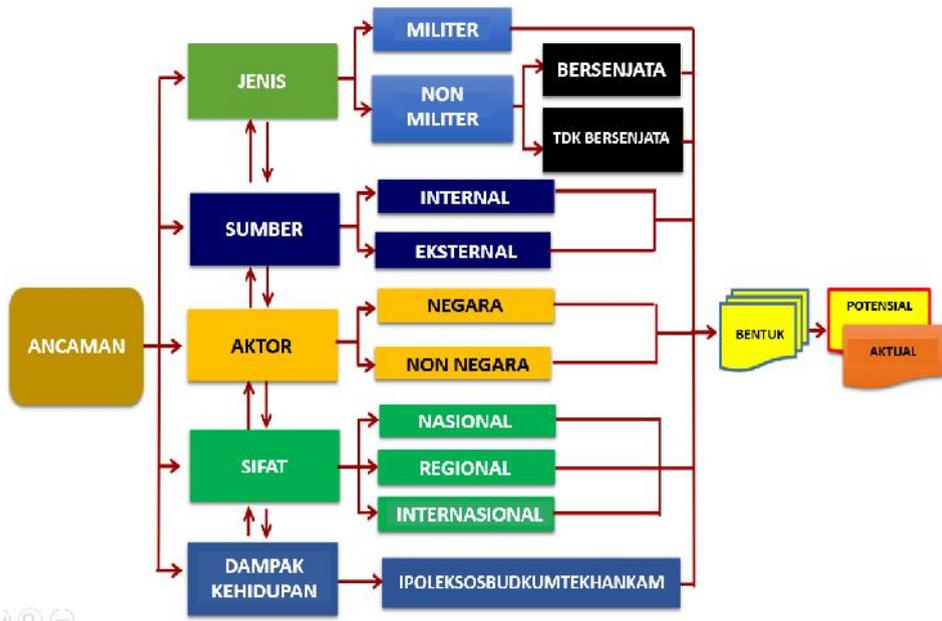
Menghadapi ancaman yang semakin kompleks tersebut, Yusgiantoro menekankan pentingnya membangun kapabilitas pertahanan negara. Ini dilakukan dengan mendorong kemandirian nasional dengan membangun industri pertahanan yang tangguh. Dalam konsepnya, industri pertahanan dibangun dengan menekankan pentingnya kontribusi industri pertahanan bagi perekonomian nasional. Di sini aspek teknologi dan hukum sangat penting untuk menjadi masing-masing gatra tersendiri dalam Pancagatra Wawasan Nusantara.

Atas dasar teori pertahanan Yusgiantoro tersebut, strategi, doktrin, postur pertahanan, dan pembangunan industri pertahanan

221 Purnomo Yusgiantoro (2000) dan (2015). *Op. Cit.*

222 Robert O. Tilman, (2019). *Southeast Asia And The Enemy Beyond: Asean Perceptions of External Threats*. London: Routledge.

dibangun dengan cara pandang geopolitik, geostrategi, dan geoeкономи. Dalam implementasinya, Yusgiantoro menaruh perhatian yang begitu besar terhadap pertahanan energi dan kapabilitas suatu bangsa di dalam merespons berbagai bentuk ancaman sekaligus memiliki daya unggul di dalam ekonomi, pemahaman hukum, dan penguasaan teknologi.



Gambar 6.1. Konsep Ancaman

Sumber: Yusgiantoro (2021)²²³

Dengan berbagai landasan teori di atas, penelitian pemikiran Geopolitik Soekarno dan implementasinya dalam pertahanan negara menjadi kebutuhan karena pentingnya korelasi antara pemikiran geopolitik dengan pertahanan. Dalam perspektif Indonesia pertahanan keamanan lebih menitikberatkan upaya pencegahan terhadap berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Dengan demikian dibutuhkan

223 Purnomo Yusgiantoro.(2021). *Kewaspadaan Nasional*. Seri Makalah Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan Diklat Pegawai KPK Tahun 2021. Sentul: 21 Juli 2021.

suatu sistem pertahanan keamanan yang bersifat semesta guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dalam satu kesatuan wilayah negara Republik Indonesia.

6.2 Pengaruh Pemikiran Geopolitik Soekarno Terhadap Pertahanan Negara

6.2.1 Tingginya Indeks Pertahanan Negara

Geopolitik Soekarno membawa implikasi penguatan angkatan bersenjata yang menentukan sistem pertahanan negara. Kesadaran ini diwujudkan pada 1957-1965 di mana kekuatan Angkatan bersenjata Indonesia menjadi yang terkuat di Asia Tenggara. Pada periode 1961 dan 1962, jumlah personil angkatan bersenjata meningkat sebesar 10% menjadi 330.000 personil.²²⁴ Dengan penguatan pertahanan dan persenjataan yang masif pada era Presiden Soekarno, menjadikan Indonesia sebagai Macan Asia dengan kekuatan pertahanan yang komprehensif.²²⁵

Penguatan kapasitas pertahanan Indonesia dapat dilihat dari pembangunan postur pertahanan Indonesia yang didasarkan pada penguatan alat utama sistem senjata (alutsista) tiga matra yaitu:

- a. Kemandirian pertahanan negara;
- b. Pengiriman personil militer dan sipil ke luar negeri; dan
- c. Diplomasi politik, ekonomi, dan militer ke negara-negara Blok Barat dan Timur.

Kekuatan diplomasi yang dilakukan Soekarno pada bidang pertahanan menghasilkan peningkatan kapasitas postur pertahanan dan alutsista. Berikut alutsista yang didapatkan Indonesia selama periode kepemimpinan Presiden Soekarno. Lihat Tabel 6.1.

224 M.C. Ricklefs (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

225 Andi Widjajanto (2022). RTD Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negara, 24 Februari 2022.

Tabel 6.1. Daftar Alutsista di Era Soekarno

NO	ALUTSISTA	ASAL NEGARA	TAHUN
1	30 unit pesawat MIG-15 UTI/Bis	Cekoslowakia	1958
2	2 kapal selam kelas <i>Whiskey</i> .	Polandia	1958
3	Buldozer dan truk berat	Amerika Serikat	1958
4	Tank-tank ringan AMX-13	Perancis	
5	Satu skadron pesawat tempur jenis De Havilland 115 Vampire	Inggris	1958
6	Seri panzer Saladin, Saraceen dan Ferret	Inggris	1958
7	20 buah pesawat pancar gas MIG17 dan 20 buah pembom jarak sedang (taktis) 1128	Uni Soviet	1959
8	18 unit pesawat anti-kapal selam jenis AS-4 Gannet	Inggris	1960
9	8 unit pesawat Hercules C-130B kargo dan 2 unit C-130B tanker	Amerika Serikat	1960
10	10 kapal selam kelas <i>Whiskey</i> dilengkapi dengan dua kapal tender	Uni Soviet	1961
11	Belasan kapal cepat roket, helikopter dan peralatan amfibi mulai dari senjata perorangan AK-47 sampai tank amfibi PT-76 dan panzer amfibi BTR-50 untuk KKO-AL yang bisa digunakan untuk kurang lebih 3 resimen	Uni Soviet	1961
12	Pesawat-pesawat pancar untuk AU, pesawat buru tempur MIG 21, pesawat pembom taktis ilyushin 28, pesawat pembom strategis TU16, pesawat angkut Antonov dan tiga satuan pertahanan udara dengan roket berserta radarnya	Uni Soviet	1961
13	Pesawat pembom TU16 dan kapal selam	Uni Soviet	1962

Sumber: diolah oleh Peneliti (2021-2022).

Soekarno menginginkan intensitas militer Indonesia menjadi satu dari beberapa kekuatan terbesar di dunia. “Tanpa Angkatan Bersenjata, negara yang berdiri tidak akan selamat”.²²⁶ Pilihan dari keinginan itu adalah menambah alutsista. Penambahan alutsista Indonesia di era Soekarno didominasi impor dari Uni Soviet

226 Imam Totok Raharjo dan Suko Sudarsono. (2010). *Op. Cit.*

yakni mencapai 65,9%, sedangkan dari Blok Barat sebesar 24%.²²⁷ Penguatan pertahanan dan pengadaan alutsista berimplikasi pada postur anggaran belanja negara. Alokasi anggaran belanja negara yang digunakan untuk pengeluaran militer pada 1960-an mencapai 70% dari pendapatan nasional.²²⁸ Sejak 1958 hingga 1965, pengeluaran pemerintah lebih banyak dialokasikan dalam operasi keamanan dalam negeri, seperti Operasi Trikora dan Operasi Dwikora. Lihat Tabel 6.2.

Tabel 6.2. Pengeluaran Pemerintah (Dalam Miliar Rupiah)

TAHUN	OPERASI KEAMANAN	OPERASI TRIKORA DAN DWIKORA	SUBSIDI PERUSAHAAN NEGARA DAN SWASTA	LAIN-LAIN
1958	5,0	-	0,9	-
1959	8,2	-	3,1	-
1960	11,3	-	5,2	-
1961	11,2	10,4	7,4	14,6
1962	12,3	23,6	9,3	2,6
1963	11,4	21,0	13,9	7,5
1964	4,2	90,5	15,6	6,1
1965	5,6	567,1	15,8	388,0

Sumber: LP3ES, 1995

Sistem persenjataan yang paling banyak diakuisisi adalah pesawat tempur dan kapal perang, seperti yang direncanakan oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas). Sistem persenjataan

227 Chairil Tangguh (2016). *Skenario Industri Pertahanan Indonesia 2029: Tantangan Menuju Kemandirian* (Tesis, Magister). Program Studi Kajian Ketahanan Nasional. Universitas Indonesia.

228 M.N. Yazid (2014). *The Indonesian Economic Development after 1965: Developmental State, Radical Politics dan Regional Cooperation*. *SOP Transaction on Economic Research*, 1 (3).

tersebut sesuai dengan kondisi geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan. Impor alutsista pada era Presiden Soekarno, dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Impor Pengadaan Alutsista Indonesia periode 1950-1965 (dalam US\$ Juta)

NO	NEGARA	PERIODE 1950-1959	PERIODE 1960-1965	TOTAL IMPOR	% TOTAL IMPOR
1	Uni Soviet	899	2,532	3,431	65.9%
2	Amerika Serikat	86	387	473	9.1%
3	Jerman Barat	194	99	293	5.7%
4	Belanda	283	0	283	5.4%
5	Italia	190	0	190	3.7%
6	Lain-lain	83	454	537	10.3%
Total		1,736	3,471	5,207	100%

Sumber: SIPRI *Arms Transfers Database* (1966).

Bagi Soekarno strategi militer merupakan bagian dari strategi holistik bangsa Indonesia menghadapi ancaman dan tantangan yang datang baik internal maupun eksternal, baik langsung maupun tidak langsung yang mengancam kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Sampai 1965, postur pertahanan militer Indonesia mengalami kemajuan luar biasa. Dalam komparasi kekuatan militer kawasan, Indonesia bukan hanya menjadi kekuatan militer terbesar di wilayah Asia Tenggara melainkan juga di benua Asia dan Afrika. Jumlah personil angkatan perang Indonesia sebanyak satu juta hanya kalah dengan RRC yang saat itu mencapai tiga juta personil. Akan tetapi dari segi alutsista Indonesia masih lebih unggul dari RRC. Dengan meningkatnya postur pertahanan dan alutsista yang dimiliki oleh Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), menurut Direktur Peralatan Angkatan Darat Brigjen R. Hartono, roket jenis *ground to ground* milik Indonesia dapat mengenai target sejauh Tanjung Pinang, Riau ke Kuala Lumpur dan Singapura.

	ALJAZAIR	ARAB SAUDI	JEPANG	ETHIOPIA	FILIPINA	INDONESIA	INDIA	JORDANIA	MUANGTHAI	MAROKO	PAKISTAN	R.P.A	R.R.T	SUDAN	IRAN	IRAK	TURKI	TUNISIA	VIETNAM UTARA	KOREA UTARA
	1	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	5	-	-	-
	2	-	5	3	5	20	10	6	4	3	5	10	12	-	5	4	12	2	2	4
	3	10	10	5	10	100	50	10	10	10	17	80	100	5	10	15	60	20	20	30
	4	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	8	-
	5	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	10	2	-	-	-	-	2	3	-	-	-	5	-	-	-
	7	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	8	40	15	10	20	10.000	7.000	25	30	30	500	600	30.000	20	20	30	70	20	7.000	6.000

Gambar 6.2. Tabel Komparasi Kekuatan Militer di Asia-Afrika

Sumber: Sketsa Massa (1965)

KETERANGAN KEKUATAN

1. Pesawat jenis pembom strategis (dalam jumlah puluhan)
2. Pesawat jenis pemburu strategis (dalam jumlah ratusan)
3. Tank modern/mobil lapis baja (dalam jumlah ribuan)
4. Peluru kendali / ground to ground to air (dalam jumlah puluhan)
5. Kapal selam (dalam jumlah puluhan)
6. Kapal perang strategis (dalam jumlah ratusan)
7. Peluru kendali dari kapal/surface to surface (dalam jumlah puluhan)
8. Kekuatan prajurit (dalam jumlah puluhan ribu)

PENJELASAN

Catatan kekuatan ini berkembang dari tahun 1960 hingga 1966 nanti, sementara kekuatan antara AB Pakistan dengan AB India dalam tahun 1965 sama-sama susut disebabkan perang perbatasan mereka. Kekuatan tentara Vietnam Utara itu termasuk mereka yang ikut memerembes ke Vietnam Selatan sebagai gerilyawan-gerilyawan.

6.2.2 Kemandirian Pertahanan Negara

Pemikiran Geopolitik Soekarno tidak hanya menjadi sebuah pergulatan filosofis dan gagasan tetapi telah dimanifestasikan di era kepemimpinannya. Banyak konsep dan kebijakan yang telah dirumuskan Soekarno menjadi arah pembangunan serta strategi Indonesia dalam menghadapi segala ancaman geopolitik global. Selain itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan segala potensi yang menguntungkan Indonesia yang dapat dilihat pada Gambar 6.3. berikut.



Gambar 6.3. Konsep Pemikiran Geopolitik Soekarno dalam Konteks Pertahanan dan Keamanan Negara

Sumber: diolah oleh Peneliti (2021-2022)

Gambar 6.3 menunjukkan bahwa pemikiran Geopolitik Soekarno berpengaruh terhadap kepentingan nasional dan pertahanan negara. Pemikiran Geopolitik Soekarno meliputi tujuh variabel: demografi, teritorial, sumber daya alam, militer, politik, sains dan teknologi, koeksistensi damai; kepentingan nasional; dan pertahanan negara yang menjadi bangunan pemikiran Geopolitik

Soekarno. Pemikiran Geopolitik Soekarno merupakan imajinasi geopolitik yang menjadi instrumen dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Aktor-aktor negara bergerak melalui lembaga kepemimpinan nasional dan merumuskan kebijakan politik luar negeri serta kebijakan pertahanan.

Aktor negara dalam proses pembuatan kebijakan tersebut berperan sebagai pemimpin nasional sekaligus aktor utama perumusan kebijakan sesuai dinamika politik yang berpotensi mengancam pertahanan negara baik pada aras global, regional, maupun nasional. Pada tataran praksis politik yang harus dilakukan aktor negara sebagai suatu perencanaan ialah menyusun *grand strategy*. Suatu desain besar tentang konsep pertahanan negara, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen: baik komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Pelaksanaan dari *grand strategy* tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing komponen dengan menyusun kebijakan teknokratik berdasarkan norma, kepentingan, dan pola aksi yang sesuai. Kebijakan teknokratik yang dibuat tetap merujuk pada ide besar imajinasi geopolitik.

Menurut Soekarno upaya membangun kemandirian pertahanan negara tidak bisa dilepaskan dari faktor geopolitik, ekonomi, dan militer. Dalam PNSB bidang Keamanan dan Pertahanan (1961) terdapat empat sasaran kebijakan, yaitu: Pertama, kebijakan pembangunan pertahanan negara ditinjau dari faktor geopolitik dilakukan dengan menyempurnakan sistem dan organisasi transportasi darat, laut, dan udara, kemandirian daerah, dan pemerataan distribusi penduduk. Kedua, memperkuat kedaulatan pangan dan bahan-bahan vital strategis lainnya yang dilakukan dengan beberapa kebijakan seperti:

- a. Riset dan penelitian dalam upaya menyempurnakan teknik dan sistem persediaan dan pengawetan bahan makanan;
- b. Penemuan dan eksploitasi sumber-sumber bahan mineral baru, serta perluasan, modernisasi, dan rehabilitasi sumber-sumber bahan mineral yang telah ada;
- c. Pemberian fasilitas untuk pengolahan bahan mentah vital untuk industri seperti timah, bauksit, dan bensin di dalam negeri;

- d. Peninjauan kembali terhadap korporasi asing yang bergerak di sektor sumber daya mineral dan perkebunan strategis; dan
- e. Penyempurnaan sistem distribusi dan penguasaan transportasi vital oleh negara, seperti transportasi minyak yang sebagian besar dimiliki oleh korporasi asing.

Ketiga, kemandirian nasional di sektor industri permesinan (peralatan otomatis), peralatan serta fasilitas pemeliharaan, dan reparasi peralatan angkatan darat, laut dan udara, persenjataan, perhubungan, obat-obatan dan bahan kimia. Selain itu juga perlunya proyek pembangunan energi listrik, pengolahan biji besi, bauksit, timah dan sumber daya alam lainnya. Keempat, pembangunan ekonomi di bidang transportasi, perhubungan, dan telekomunikasi. Di sisi lain diperlukan juga pembangunan di bidang mental dan fisik, seperti meningkatkan taraf kecerdasan dan pendidikan masyarakat, pemberantasan penyakit secara intensif, bimbingan, dan penerangan untuk memperkuat kesehatan rakyat, serta menyempurnakan transmigrasi.

Berikut adalah empat hal dalam pembangunan industri strategis di sektor pertahanan negara dalam upaya untuk memperkuat militer Indonesia yang dibangun di era Presiden Soekarno, antara lain:

- a. Industri senjata dan perlengkapan Militer;
- b. Industri Pengangkutan dan Alat-alat Besar;
- c. Industri Penerbangan; dan
- d. Badan Tenaga Atom Nasional.

6.2.2.1 Industri Senjata dan Perlengkapan Militer

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh pemerintah Kerajaan Belanda, pabrik senjata milik Belanda, *Leger Produktie Bedrijven* (LPB) diambil alih Pemerintah Indonesia. Pada 19 April 1950, pemerintah Kerajaan Belanda melalui Markas Umum KNIL menyerahkan LPB, 100 tank dan panser kepada Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Angkatan Darat (APRIS-AD). LPB diubah namanya menjadi Perusahaan Senjata dan Mesiu (PSM). Pabrik senjata ini dikelola Angkatan Darat (AD). Selain memproduksi

dan mereparasi senjata, PSM juga memproduksi kendaraan dan teknologi militer lainnya. PSM berhasil memproduksi peluru secara massal. Selain itu PSM juga berhasil memproduksi STEN gun 9mm, *Rebuild* LE 7,7mm, *Rebuild* Karabin 6,5mm menjadi 7,7mm, pistol isyarat 1inch, pesawat mortar 5cm, 6cm, dan 8cm, serta granat tangan dengan berbagai tipe seperti ofensif, defensif, gas air mata dan asap.²²⁹

Pada 1 Desember 1958, PSM berganti nama menjadi Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat (PABAL AD). Dalam upaya mendorong kemandirian pertahanan negara, selain memproduksi senjata dan amunisi, PABAL AD juga memproduksi peralatan militer lainnya. Bahkan menurut Silmy Karim, PABAL AD membangun kerja sama dengan korporasi senjata Eropa untuk membangun pabrik senjata ringan. Peningkatan kualitas SDM PABAL AD dilakukan dengan mengirim sumber daya manusia potensial ke Yugoslavia untuk mempelajari persenjataan, balistik, dan teknologi militer lainnya.²³⁰ Pimpinan PABAL AD juga melakukan pendidikan tenaga ahli bekerja sama dengan Akademi Industri Militer, Akademi Administrasi Keuangan, dan Akademi Persediaan. Kemampuan PABAL AD di bidang teknologi militer bisa dibuktikan dengan berhasilnya mengembangkan produksi Fuzes untuk granat mortar, amunisi kaliber 30M/TJ, dan 9mm MU-1 TJ.²³¹

Seiring dengan kemajuan kemampuan personil TNI Angkatan Darat dalam pengelolaan manajerial, serta penggunaan sains, dan teknologi militer, PABAL AD pada 1962 diubah namanya kembali menjadi Perindustrian TNI Angkatan Darat (PINDAD) yang langsung di bawah komando Menteri dan/atau Panglima Angkatan Darat. PINDAD merupakan badan pusat pelaksana baru dalam Departemen Angkatan Darat yang menyelenggarakan pekerjaan teknis, terutama dalam memproduksi peralatan dan perlengkapan militer. Sepanjang tahun 1962-1966, PINDAD berhasil memproduksi pistol FN-9/mm, senjata mesin ringan kaliber 7,62mm dan *Light Machine Gun*

229 Sutarto (2006). *Prabu Kresna di Pindad*. Bandung: PT Pindad (Persero).

230 Silmy Karim (2014). *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

231 Irfan Khosirun, et. al. (2013). *Pijakan untuk Kemandirian Alutsista: 30 Tahun*. Bandung: PT Pindad.

*Pistol Mitraliur 9mm*²³². Dengan kemampuan produksi Pindad dan upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian Pertahanan Negara, senjata produksi PINDAD dijadikan standar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Selain Pindad, pimpinan Markas Besar TNI AD juga memerintahkan kepada Peralatan Angkatan Darat (PERAL) untuk meneliti dan mengembangkan model senjata roket untuk digunakan dalam operasi militer Dwikora. PERAL berhasil melakukan uji coba roket Peral I pada 1963 di Batujajar. Pada 1964, PERAL juga berhasil mengembangkan *lubricant* untuk Arteleri-Kaveleri, dan *remote firing* dari 57 mm AA-gun untuk digunakan oleh Komando Pertahanan Udara AD. Berikut daftar roket yang telah berhasil diproduksi oleh PERAL sampai akhir 1963. Lihat Tabel 6.4.

Tabel 6. 4. Daftar Roket Produksi PERAL

NO	NAMA ROKET	JARAK TEMBAK
1	AY-I.C.63	9 km
2	AY-II.C.63.S	8 km
3	AY-II.C.63.F1	8 km
4	AY-II.C.63-63	25 km
5	AY-I.C.115-115	12 km
6	AY-II.C.63-15	30 km
7	AY.I.30	13 km
8	AY.II.C.130-130	25 km
9	AY.II.C.115-130	30 km

Sumber: Amrin Imran, dan kawan-kawan (1971).

6.2.2.2 Industri Pengangkutan dan Alat-alat Besar

Pada saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) menerima 1 kapal Pemburu, 4 kapal Korvet, 7 kapal komunikasi, 4 *Air Sea Rescue Boats*, 2 motor Ponton, 11 motor *boat* kecil, dan 2 kapal peronda

²³² Mabes TNI (2000). Sejarah TNI Jilid III 1960-1965. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi TNI.

pantai dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda (*Koninklijke Marine*). Dinas Penjaga Laut dan Pantai (*Zee en Kust Bewaking*) menyerahkan kepada ALRI berupa 5 *Landing Craft Tank* (LCT), kapal tipe Flores dan Semeru, 21 kapal peronda pantai dan 1 kapal gandeng. Selain itu ALRI juga mendapatkan 1 kapal gandeng, 1 kapal *supply*, 1 kapal kerja penyelaman dan 6 sekoci pekerja (*worksloep*) dari Penataran Angkatan Laut (PAL). Selain kapal perang dan senjata, ALRI juga menerima angkutan darat, gedung/kesatrian, pelabuhan-pelabuhan, dan Penataran Angkatan Laut.²³³ Sejak 1954, ALRI membeli kapal-kapal baru dari beberapa negara. Lihat Tabel 6.5.

Tabel 6.5. Daftar Kapal ALRI 1954

NO.	JENIS KAPAL	KUANTITAS	NEGARA IMPORTIR
1	Kapal penyapu ranjau	10 buah	Jerman
2	<i>Motor Torpedo Boat</i>	2 buah	Jerman
3	Kapal transport	2 buah	Jepang
4	Kapal Fregat	2 buah	Italia
5	Kapal Angkut Tank (LST)	1 buah	Amerika Serikat
6	Kapal Angkut Tank (LST)	9 buah	Yugoslavia
7	Kapal Transpor	1 buah	Inggris

Sumber: Mabes TNI (2000)

Dalam rancangan PNSB tahun 1961 direncanakan pembangunan Industri Pengangkutan dan Alat-alat Besar. Industri galangan kapal dimasukkan dalam industri pengolahan. Sementara industri pembuatan gerbong kereta api, pesawat udara, dan perakitan kendaraan bermotor dimasukkan dalam bidang distribusi dan komunikasi. Untuk itu dibangun dan direhabilitasi galangan kapal dalam bentuk *floating dock* di Tanjung Priok dan Surabaya dalam bentuk; *Graving dock* di Ujung Pandang, Belawan, dan Palembang; *Slipway* di Ujung Pandang, Padang, Pontianak dan Banjarmasin; serta *Dwarshelling* di Belawan.

²³³ Mabes TNI (2000). *Op.Cit.*

6.2.2.3 Industri Penerbangan

Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) mendapatkan pesawat dan instansi militer dari pemerintah Kerajaan Belanda pasca-pengakuan kedaulatan Indonesia. Pada Maret 1950, AURI menerima sebelas pesawat terbang yang terdiri dari tiga buah pesawat terbang *Dakota*, satu pesawat *Harvard 86*, dan 7 *Pipercup*. Kemudian pada 12 Juni 1950, AURI menerima Pangkalan Udara Andir Bandung yang diserahkan oleh Mayjen E.J. Van Kuppen kepada Mayor Udara Wiweko Supono. Pada 20 Juni 1950, AURI menerima Pangkalan Udara Cililitan, dan tujuh hari kemudian menerima Markas Besar Angkatan Udara dari pemerintah Kerajaan Belanda.²³⁴

Modernisasi dan penambahan kekuatan AURI dilakukan dengan pembelian pesawat dari luar negeri dan secara mandiri melakukan reparasi dan produksi pesawat sendiri. Sepanjang 1954-1957, AURI membeli pesawat dari negara-negara Blok Barat maupun Blok Timur untuk mengisi skuadron-skuadron AURI yang baru dibentuk. AURI membeli 16 pesawat tipe *Vampire Mark de Havilland* dari Inggris untuk digunakan oleh Skuadron XI Jet Pelatih Tempur dan membeli pesawat Helikopter *Bell Trooper 47G2* dari Amerika Serikat untuk digunakan oleh Skuadron Helikopter. AURI juga melakukan modernisasi perlengkapan, antara lain: *radio automatic direction finders, sextants, plotters, computer*, dan peta, serta mengganti-peralatan pemotretan dengan *Aerographic Camera Vertikal*. Selain itu membangun landasan terbang baru maupun merawat landasan terbang yang sudah ada, yaitu Landasan Udara Iswahyudi, Halim Perdanakusuma, dan Abdurachman Saleh.

Dalam upaya kemandirian pertahanan negara, Biro Rencana dan Konstruksi di lingkungan Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara (TRI AU) yang dibentuk pada 1946 di Yogyakarta, berhasil memproduksi enam pesawat layang jenis *glider "zogling"* yang dinamakan NWG-1 (*Nurtanio Wiweko Glider*). Pesawat produksi Indonesia ini dirancang Opsir Muda Udara II (OMU II) Nurtanio Pringgoadisurjo yang disupervisi OMU III Wiweko Supono, dan dibantu Letda Udara Tosin bin Kusen dan Letda Udara Achmad bin

234 Mabes TNI (2000), *Ibid.*

Talim serta teknisi-teknisi lainnya. Selain memproduksi pesawat layang yang digunakan untuk melakukan seleksi dan pelatihan awal calon-calon kadet penerbang TRI AU sebelum mereka dikirim ke sekolah penerbangan di India, Biro Rencana dan Konstruksi di lingkungan Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara (TRI AU) juga memproduksi pesawat terbang jenis *piper cup* dengan menggunakan mesin sepeda motor Harley Davidson 750cc buatan tahun 1928. Pesawat jenis *piper cup* ini diberi nomor registrasi RI X atau dikenal dengan sebutan pesawat WEL X (*Wiweko Experimental Lightplane*). Biro Rencana dan Konstruksi Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara (TRI AU) juga mengembangkan pembuatan helikopter yang diberi registrasi R1-H.²³⁵

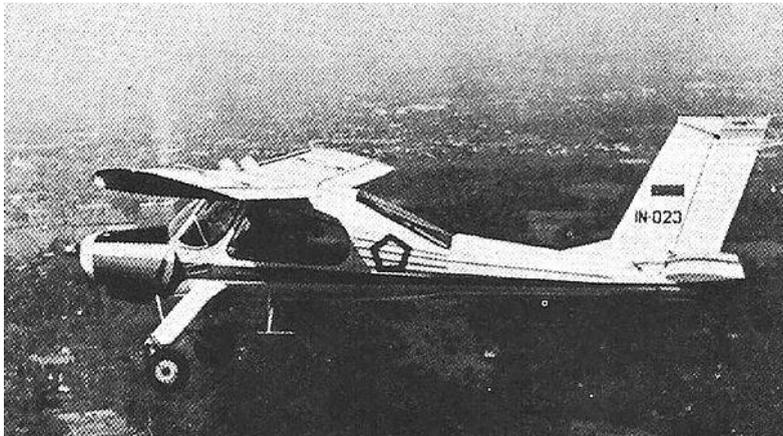
AURI melalui Depot Penyelidikan, Percobaan, dan Pembuatan (DPPP) AURI, pada 1957 berhasil memproduksi pesawat terbang Si Kumbang 200 kemudian dikembangkan menjadi Si Kumbang NU-255 (Si Kumbang II) yang sudah dianggap memenuhi syarat sebagai pesawat latih dasar.²³⁶ DPPP AURI juga berhasil memproduksi lima unit pesawat terbang “Si Belalang 90”. Pesawat ini digunakan sebagai pesawat latih bagi calon penerbang di Akademi Angkatan Udara dan Pusat Penerbangan Angkatan Darat. Selain itu DPPP AURI juga memproduksi pesawat “Si Kunang”, helikopter “Si Manyang”, dan “Si Kolentang”. Dengan keberhasilan DPPP AURI tersebut pada 1 Agustus 1960 pemerintah mendirikan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan (LAPIP) yang bertugas untuk melakukan riset dan percobaan serta memproduksi pesawat terbang.

Pada 1963, LAPIP bekerja sama dengan pabrik pesawat “Cekop” di Polandia untuk memproduksi pesawat latih belalang yang telah dirancang Nurtanio Pringgoadisurjo dan pesawat ringan serba guna berdasarkan lisensi PZL-104 *Wilga* dari Polandia yang kemudian diganti menjadi PZL-104 Gelatik oleh Presiden Soekarno, pembuatan *design office* bagi LAPIP, pendidikan para karyawan LAPIP, dan pengiriman ke luar negeri. Pada 1963, LAPIP bekerja sama dengan pabrik pesawat “Cekop” di Polandia untuk memproduksi pesawat latih Belalang yang telah dirancang Nurtanio

235 ANRI (2017). *Daftar Arsip Statis PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT IPTN) 1950 – 1988*. Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Konservasi Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta.

236 Mabes TNI (2000). *Op. Cit.*

Pringgoadisurjo dan pesawat ringan serba guna berdasarkan lisensi PZL-104 *Wilga* dari Polandia yang kemudian diganti-menjadi PZL-104 Gelatik oleh Presiden Soekarno, pembuatan *design office* bagi LAPIP, serta pendidikan para karyawan LAPIP dan pengiriman ke luar negeri. Dengan kerja sama itu LAPIP berhasil memproduksi empat puluh unit pesawat Gelatik, delapan unit pesawat latihan “Belalang 90”, dan tiga unit helikopter. Pesawat Gelatik digunakan sebagai pesawat pertanian untuk memberantas hama tanaman pangan, perkebunan kapas, dan tembakau. Pesawat Gelatik oleh pemerintah juga digunakan sebagai transportasi ringan untuk empat orang penumpang di daerah terpencil dan dapat digunakan juga sebagai pesawat ambulans.²³⁷ Pada 1966, LAPIP oleh pemerintah diubah menjadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio (LIPNUR).



Gambar 6.4. Pesawat Serbaguna Gelatik

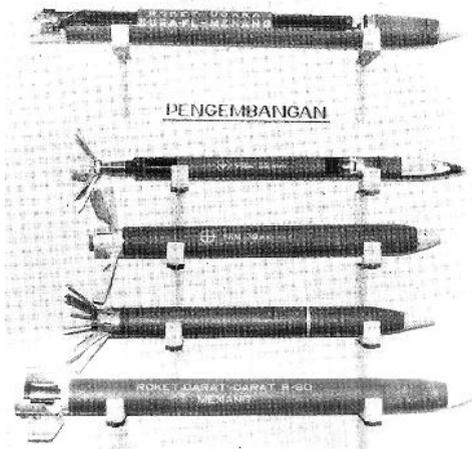
Sumber: Aviahistoria

Presiden Soekarno berharap agar Indonesia dapat mengembangkan industri pesawat terbang komersial. Pada 17 Agustus 1965, Presiden Soekarno mendirikan Komando Pelaksana Proyek Industri Pesawat (KOPELAPIP) namun cita-cita tersebut terinterupsi akibat terjadinya peristiwa politik 1965. Padahal Soekarno berharap agar

237 ANRI (2017), *Op. Cit.*

Indonesia saat itu bisa membangun pabrik pesawat *Fokker F27* Berdikari hasil kerja sama dengan pemerintah Belanda²³⁸. Pemerintah Tiongkok juga sudah bersedia akan membeli 100 unit *Fokker F27* Berdikari sebagai bentuk kepercayaan terhadap proyek KOPELAPIP.²³⁹

Selain TNI Angkatan Darat proyek produksi roket juga dikerjakan oleh AURI. Pada November 1960, pemerintah Indonesia melalui AURI merencanakan kerja sama dengan Hispano Suiza asal Swiss untuk membangun pabrik roket. Tujuan pemerintah Indonesia membangun pabrik roket adalah untuk memperkecil ketergantungan AURI terhadap roket buatan luar negeri. Raket buatan dalam negeri ini juga akan digunakan dalam Operasi Trikora dan Dwikora. AURI memproduksi roket SURA 80R kaliber 80mm. Proyek pembuatan roket ini disebut dengan Proyek Menang yang berlokasi di Pangkalan Angkatan Udara Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibat kesukaran dalam finansial AURI menutup kekurangan biaya dengan mendirikan pabrik baru, yaitu pabrik dinamit. Hasil penjualan bahan peledak ini digunakan untuk menyubsidi produksi roket oleh AURI.²⁴⁰



**Gambar 6.5. Raket Produksi
Proyek Menang**

Sumber: Aviahistoria

238 ANRI (2017), *Ibid.*

239 Sudiro Sumbodo (2018). KOPELAPIP: Ambisi Membangun Industri Penerbangan Nasional. Diakses dari: <https://aviahistoria.com/2018/10/23/kopelapip-ambisi-membangun-industri-penerbangan-nasional/>

240 Sudiro Sumbodo (2017). *Proyek Menang, Kemandirian Produksi Persenjataan Raket.* Diakses dari: <https://aviahistoria.com/2017/08/17/proyek-menang-kemandirian-memproduksi-persenjataan-roket/>.

6.2.2.4 Badan Tenaga Atom Nasional

Dengan dibentuknya Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom pada 5 Desember 1958, yang kemudian disempurnakan menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1964, Soekarno berharap agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan mereka dalam penguasaan bidang teknologi nuklir. Proyek pembangunan industri nuklir sudah dimulai sejak Indonesia melakukan perjanjian kerja sama dengan Amerika Serikat pada Juni 1960, dengan bantuan finansial dan teknis senilai 350 ribu US dolar untuk membangun proyek reaktor nuklir *Triga Mark II* di Bandung. Indonesia juga mendapat bantuan pembangunan proyek reaktor nuklir di Yogyakarta dari Uni Soviet sekitar lima juta US dolar. Bagi Indonesia maupun Uni Soviet teknologi *Triga Mark II* tidak cukup untuk memproduksi bahan material dalam pembuatan senjata nuklir. Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan RRC dalam pengembangan industri nuklir dengan mengirim tenaga-tenaga ahli nuklir dan militer ke Tiongkok untuk belajar membuat bom atom.

Keinginan Indonesia untuk memiliki senjata nuklir penting sebagai efek kejut (*deterrence effect*) bagi pertahanan Indonesia dalam menghadapi blokade Amerika Serikat dan Inggris beserta sekutunya. Menurut Cornejo dalam tesisnya berjudul “*When Soekarno Sought the Bomb: Indonesian Aspirations in the mid-1960s*”, terdapat dua alasan Indonesia memutuskan untuk memiliki senjata nuklir.²⁴¹ Pertama, faktor keamanan seperti yang diutarakan oleh Soekarno yang dimuat dalam *Berita Antara* pada 24 Juli 1965 bahwa senjata bom atom akan digunakan apabila Indonesia diserang. Pada 2 Agustus 1965, Soekarno menyatakan argumen bahwa senjata nuklir yang berada di tangan negara-negara NEFO akan digunakan untuk kepentingan perdamaian dan kemerdekaan. Berbeda halnya apabila senjata nuklir yang berada di tangan negara-

241 Robert, M. Cornejo (1999). *When Soekarno Sought the Bomb: Indonesian Nuclear Aspirations in the mid-1960s* (Thesis, Master). Naval Postgraduate School, Monterey, California, Amerika Serikat.

negara imperialis hanya akan menyebabkan bencana dan dominasi mereka terhadap negara-negara NEFO. Kedua, faktor politik dalam negeri. Dengan senjata nuklir, Soekarno mengharapkan dukungan ABRI untuk meningkatkan stabilitas dalam negeri Indonesia.

Misi proyek nuklir Soekarno pada era 1960-an sebagai kebijakan pertahanan Indonesia, menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Pada era tersebut, negara-negara di dunia merasa terancam dan dilanda kecemasan tingkat tinggi akibat kebijakan Soekarno di bidang pertahanan. Terkait kebijakan pertahanan tersebut, salah satu pelaku sejarah yang sangat dekat dengan Soekarno, Huang Shuhai menegaskan bahwa Perang Vietnam dan pembentukan Federasi Malaya memantik Soekarno membelokkan program nuklir Indonesia menjadi senjata untuk melawan ancaman asing, khususnya Inggris. Soekarno tertarik dengan uji coba bom Tiongkok pada 1964 dan menjadi rujukan untuk mengubah program nuklir Indonesia menjadi senjata.

Huang Shuhai adalah penerjemah Ketua Mao Zedong, Perdana Menteri Zhou Enlai, dan Menteri Luar Negeri Chen Yi ketika bertemu Soekarno termasuk dalam KAA 1955 di Bandung. Huang Shuhai mengisahkan bahwa Soekarno secara tertutup mengirim ahli-ahli nuklir dalam negerinya yang pernah dididik Amerika Serikat terdahulu untuk belajar ke RRC agar Indonesia mempunyai bom nuklir. Ada kurang lebih 200 ilmuwan nuklir Indonesia belajar ke RRC tentang pembuatan bom atom dan melakukan eksperimen uji coba. Bom atom itu rencananya akan diuji coba pada 5 Oktober 1965, bertepatan dengan HUT ABRI. Kondisi ini mengundang reaksi Amerika Serikat karena dianggap pemanfaatan teknologi nuklir dapat mengandung konsekuensi besar sehingga negara-negara Barat menunjukkan sikap waspada terhadap misi proyek nuklir Soekarno, terlebih mereka menganggap Soekarno didukung kuat oleh RRC.²⁴²

Berbeda dengan Amerika Serikat dan sekutunya, RRC memandang bahwa proyek nuklir Indonesia sesungguhnya bersifat damai (*Atom for Peace*). Pada awalnya Indonesia sempat melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat (Juni 1960) dalam rangka

242 Wawancara Huang Shuhai, Maret-April, 2022.

melakukan riset nuklir dalam negeri, bahkan Amerika Serikat juga mengirimkan tenaga ahli nuklirnya untuk mengajari ilmuwan-ilmuwan Indonesia melakukan pengayaan uranium. Dalam catatan yang ada, Indonesia berhasil membangun reaktor nuklir pertamanya yang diberi nama *Triga Mark II* (April 1961). Hubungan Soekarno dengan Kennedy saat itu juga terbangun baik, namun karena Kennedy terbunuh, hubungan Amerika Serikat-Indonesia menjadi kembali memburuk dan program nuklir Indonesia yang didukung Amerika Serikat gagal dikembangkan. Faktor inilah yang mempengaruhi Soekarno untuk bekerja sama dengan selain Amerika Serikat, dan RRC menjadi pilihannya. Keberanian Soekarno memperlihatkan bahwa pemikiran Geopolitik Soekarno sangat erat hubungannya dengan upaya persaingan penguasaan teknologi semasa Perang Dingin. Inilah salah satu relevansi pemikiran Soekarno dalam pertahanan negara menghadapi ekosistem keamanan dunia.²⁴³

Sementara itu menurut Liang Minhe, Profesor *Asian Studies and Geopolitics Peking University*, salah satu tujuan utama misi proyek nuklir Soekarno adalah mewujudkan negara Indonesia yang berdikari dan menciptakan perdamaian dunia. Namun cita-cita itu gagal pasca terjadinya G30S yang membuat RRC batal memberikan dukungan.

“Menurut saya ... terjadinya perubahan orientasi pengembangan nuklir Indonesia yang semula untuk perdamaian (atoms for peace) yang bergeser menjadi kepentingan kekuatan militer adalah kebijakan pertahanan yang harus dihargai karena situasi dunia saat itu. Bagi Soekarno, imperialisme dan senjata nuklir adalah kombinasi dan musuh bersama yang harus dilawan oleh negara-negara yang cinta kedamaian. Karena itu, kepemilikan senjata nuklir adalah hal yang mutlak. Sejalan dengan hal ini, pada Maret 1965, Soekarno merubah Lembaga Tenaga Atom (LTA) menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) untuk memperluas pengaruhnya dalam usaha pengembangan senjata nuklir” (Liang Minhe, Maret-April, 2022).”²⁴⁴

243 *Ibid.*

244 Wawancara Liang Minhe, Maret-April, 2022.

Jika misi nuklir ini berjalan maka Indonesia akan diperhitungkan sebagai *weapon state*. Indonesia sudah punya embrio *peaceful uses for nuclear energy* (PUNE). Namun Amerika Serikat dan Sekutunya sangat khawatir dan mengganggu upaya Soekarno tersebut sebagai ancaman yang menakutkan.²⁴⁵ Perubahan kebijakan pertahanan Soekarno yang ingin menggunakan nuklir inilah yang menjadi alasan mengapa Soekarno harus dijatuhkan.²⁴⁶

6.2.3 Keikutsertaan dalam Misi Perdamaian Dunia

Dalam rangka ikut serta memelihara perdamaian dan ketertiban dunia Indonesia mengirim pasukan ke kawasan yang berkonflik. Pengiriman pasukan militer Indonesia ke luar negeri menurut Hidayat Mukmin bukan atas prakarsa pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) melainkan atas prakarsa dan instruksi pimpinan negara. Pemerintah Indonesia mengirim pasukan militer yang tergabung dalam KONGA atau Pasukan Garuda sebagai bagian pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. Misi perdamaian dunia KONGA dikenal dengan Misi Garuda. ABRI memiliki pengalaman tempur di dalam negeri yang panjang, pendidikan militer bermutu di dalam dan luar negeri, ditambah motivasi menciptakan perdamaian dunia, hingga layak menjadi pasukan penjaga perdamaian.²⁴⁷

Pada periode Presiden Soekarno, KONGA bertugas di wilayah Mesir dan Kongo. KONGA-I merupakan kontingen pionir yang dikirim ke Mesir pada 8 Januari 1957. Misi KONGA-I di Mesir berakhir pada 6 September 1957. Pasukan perdamaian tersebut dipimpin Letkol Infanteri Hartoyo yang kemudian digantikan Letkol Infanteri Suadi Suromihardjo. KONGA-I berasal dari Resimen Infanteri-15 Tentara Territorium (TT) IV Diponegoro, dan Resimen Infanteri-18 TT V Brawijaya. Keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di Mesir didasarkan pada solidaritas Indonesia kepada Mesir, baik dari perspektif historis maupun politik luar negeri

245 Wawancara Lalu M. Iqbal, Februari, 2022.

246 Shuhai, *Loc. Cit.*

247 Hidayat Mukmin (1991). *TNI dalam Politik Luar Negeri. Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Indonesia yang anti-kolonialisme dan imperialisme. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa keputusan Gammal Abdul Nasser menasionalisasi Terusan Suez memiliki dasar legalitas yang kuat, yaitu Undang-Undang Mesir Nomor 285 Tahun 1956.²⁴⁸

Misi Garuda selanjutnya adalah Republik Kongo. Pasca-merdeka dari Belgia, Republik Kongo dilanda perang saudara akibat intervensi Belgia. *Union Minière du Haut-Katanga*, perusahaan pertambangan Belgia yang beroperasi di Provinsi Katanga mendukung Gubernur Katanga Moise Tshombe untuk memisahkan provinsi Katanga dari Republik Kongo. Belgia mengirimkan pasukan militernya ke wilayah Katanga, menurut Lusignan rakyat Republik Kongo yang berada di provinsi Katanga merasa belum merdeka sepenuhnya.²⁴⁹ Selain separatisme pemerintah Republik Kongo di bawah otoritas Perdana Menteri Patrice Lumumba dan Presiden Joseph Kasavubu juga menghadapi pemberontakan anggota pasukan militer Republik Kongo di Leopoldville yang menyebar sampai ke Camp Hardy di Thysville.

Akibat konflik di dalam negeri yang tidak kunjung usai, pemerintah Republik Kongo meminta bantuan PBB untuk memulihkan ketertiban di dalam negeri. Permintaan pemerintah Republik Kongo dikabulkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyetujui agar Belgia menarik pasukan militer mereka dari Republik Kongo. PBB juga mengirimkan pasukan perdamaian yang terdiri dari tiga belas negara termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan militer yang diberi nama KONGA-II dipimpin Letkol Solihin Gautama Purwanegara dengan jumlah pasukan 1.074 orang di bawah misi *United Nations Operation in the Congo* (UNOC). KONGA-II berasal dari Batalion 330 Kujang Siliwangi serta satu detasemen Polisi Militer dan satu Peleton KKO ALRI. KONGA-II bertugas di Kongo sejak 10 September 1960 hingga Mei 1961. Kemudian pemerintah Indonesia juga menambah jumlah pasukan sebanyak 3.457 orang di Provinsi Katanga Kongo, dengan mengirim KONGA-III yang dipimpin Brigjen TNI Kemal Idris dan Kolonel Kavaleri Sobirin Mochtar pada 1962. KONGA-III berasal dari

248 Roeslan Abdulgani (1956). *Mendajung dalam Taufan: Ichtisar dan Ichtiar Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Endang.

249 Lusignan, Bruce. (2003). *The Congo: From Leopold to Lumumba*. Whitaker R. Birt. Engr. 297B.

Batalion 531 Raiders, Kodam II Bukit Barisan dan Batalion Kavaleri 7. Misi KONGA-III berakhir pada 1963.

Selain mengirim KONGA di Timur Tengah dan Afrika kekuatan militer Indonesia juga terlibat membantu perjuangan kemerdekaan bangsa Aljazair dan Pakistan. Solidaritas Indonesia secara politik dan militer untuk bangsa-bangsa di Afrika termasuk Aljazair diperintahkan oleh Presiden Soekarno kepada Kabinet Kerja.²⁵⁰ Bantuan militer Indonesia berupa senjata, peralatan militer, dan teknis pendidikan Angkatan Laut. Misi militer Indonesia ke Aljazair dipimpin Brigadir Jenderal Suwanto yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan SESKOAD pada awal Februari 1961. Suwanto dibantu Letnan Kolonel Infanteri Sunggoro, Letnan Kolonel Pelaut Kusno, Mayor Zeni Ngadimin, Mayor Penerbang Dasijo dan Mayor Artileri E.M. Akhir. Misi Suwanto bergerak dari Kairo menuju Aljazair, Maroko, Yugoslavia dan Jerman Barat. Bantuan Indonesia untuk perjuangan kemerdekaan Aljazair sebenarnya dapat merusak hubungan Indonesia dengan Prancis. Indonesia pada saat itu menerima peralatan militer dari Prancis berupa tank AMX. Akan tetapi Soekarno berpendirian bahwa perjuangan rakyat Aljazair perlu didukung karena Aljazair sudah diblokade Prancis. Pada saat itu 35.000 gerilyawan Aljazair berhadapan dengan pasukan Prancis yang berjumlah 800.000 pasukan. Korban keganasan pasukan Prancis mencapai satu juta di antara sepuluh juta penduduk Aljazair.

Solidaritas Indonesia juga ditujukan untuk perjuangan kemerdekaan bangsa Pakistan dan Kasmir dari India. Presiden Soekarno menyerukan agar bangsa Indonesia mendukung perjuangan rakyat Kasmir dan Pakistan yang sedang menghadapi agresi India. Seruan Soekarno ini didukung masyarakat Indonesia. Bahkan Organisasi Pengusaha Sejenis (OPS) Bioskop Djakarta Raya menyerukan kepada semua anggota-anggotanya untuk memboikot film-film India yang dianggap sebagai antek neokolonialisme. Aksi pemboikotan film-film India ini juga dilakukan oleh Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialisme Amerika Serikat (PAPFIAS), Serikat Buruh Film dan Seni Drama serta organisasi massa lainnya. Demonstrasi pemboikotan film India dilakukan di depan Kedutaan Besar India di Jakarta.

250 Hidayat Mukmin (1991). *Op. Cit.*

Presiden Soekarno memerintahkan ABRI dari satuan Kapal Selam Korps Hiu Kencana TNI AL untuk segera melakukan misi militer membantu Pakistan. Misi militer ini sebenarnya untuk meredam konflik antara Pakistan dan India. Pimpinan TNI AL mempersiapkan Kapal Selam RI Nagarangsang dan Bramasta yang dilengkapi persenjataan lengkap dengan dukungan kapal perang dan pasukan Batalion Marinir. TNI AU di bawah komando Marsekal Omar Dhani mengirim sejumlah pesawat MIG-19 *Farmer* ke Pakistan. Militer Indonesia melakukan *show of force* bersama militer Pakistan di lepas pantai yang berbatasan dengan teritorial India. Tujuan *show of force* militer ini sebagai *warning* kepada Inggris yang membantu India. Dukungan Indonesia kepada Pakistan akhirnya memaksa kedua negara yang berkonflik untuk melakukan perundingan perdamaian di Thaskent, Uni Soviet, pada Januari 1966.

Dukungan Indonesia terhadap Pakistan didasarkan pada situasi aspek historis dan geopolitik. Dari aspek historis menurut B.D. Arora, Muhammad Ali Jinnah, Presiden Liga Muslim India pada 1945 memotivasi penduduk Muslim India untuk mengadakan aksi demonstrasi melawan agresi kolonial Belanda di Indonesia.²⁵¹ Seruan Muhammad Ali Jinnah menggerakkan enam ratus Tentara Inggris-India yang beragama Islam membelot dan bergabung dengan pasukan Indonesia. Dari enam ratus Tentara Inggris-India yang disersi tersebut, hanya seratus tentara yang masih selamat. Lima ratus Tentara Inggris-India lainnya gugur. Atas aspek historis tersebut, ketika Presiden Soekarno bertemu dengan Presiden Pakistan Ayub Khan pada 1964 mengatakan, “...*your dire need? it is our dire need... India’s attack on Pakistan was like an attack on Indonesia*” (...kebutuhan mendesak Anda? itu adalah kebutuhan kami yang mendesak... Serangan India ke Pakistan seperti serangan terhadap Indonesia). Sementara itu dari sisi geopolitik pada saat Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia, India sebagai salah satu negara persemakmuran dengan Inggris mengirimkan pasukannya untuk membantu Inggris dalam konfrontasi Malaysia-Indonesia. Hal inilah yang menjadikan alasan bagi Presiden Soekarno menyerukan agar bangsa Indonesia mendukung perjuangan rakyat Kasmir dan Pakistan yang sedang menghadapi agresi India.

251 B.D. Arora (1975). *Pakistan’s Role in Indian-Indonesian Relations During the Soekarno Era. Sage Journals.*

6.3 Dampak Pemikiran Geopolitik Soekarno: Disegani Dunia dan Sekaligus Sebagai Ancaman

Soekarno merupakan pemimpin yang sering kali mengajarkan pentingnya membangun bangsa yang satu, rukun dalam keberagaman, bersatu meski terpisah pulau, toleran meski berbeda suku agama, ras, ideologi, dan budaya. Penting membangun bangsa yang dapat menjaga kodratnya dalam *Bhinneka Tunggal Ika*. Akan tetapi seiring berakhirnya pemerintahan Soekarno, sejumlah gagasan serta peran Soekarno di bidang akademik dan sejarah Indonesia sering disamakan termasuk gagasan geopolitik. Konsep yang relatif tidak berubah terkait dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Meskipun ditinjau dari spirit ada perbedaan fundamental antara jaman Soekarno dan Soeharto, tetapi konsep politik bebas-aktif tetaplah relevan dengan kondisi saat ini.

Konsep pemikiran Soekarno lain yang terbukti mampu mendorong pembangunan negara adalah konsep Berdikari. Negara-negara seperti Jerman, Jepang, dan Tiongkok berhasil menjadi kekuatan ekonomi dunia melalui konsep bangga produk dalam negeri yang merupakan salah satu praksis dari konsep Berdikari. Berkaitan dengan masalah pangan, konsep kedaulatan pangan sebagaimana disampaikan Soekarno dalam buku *Mustika Rasa* juga terbukti penting menjadi solusi di tengah persoalan pandemi *Covid-19*. Konsep ini menekankan pada keberagaman konsumsi pangan yang sehat, bergizi, dan didasarkan pada keberagaman pangan serta aspek-aspek kesehatan pangan yang penting guna meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi.

Pemikiran Geopolitik Soekarno dalam praksis hubungan internasional mampu menggalang kekuatan bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan pemikiran geopolitik yang bersifat diametral dengan Barat. Pengaruh Soekarno pun semakin besar dan menakutkan Barat manakala Indonesia memiliki senjata nuklir yang telah dicanangkan oleh Soekarno pada 24 Juli 1965 di hadapan Mukhtar Muhammad. Dengan kekuatan nuklir Indonesia semakin menjadi ancaman sebagaimana dituturkan Zhoulai (2022)²⁵² penerjemah Ketua Mao Zedong. Senada dengan Zhoulai,

252 Wawancara Zhoulai, 2022.

Huang Shuhai (2022)²⁵³ menuturkan bahwa pada 1964 Soekarno tertarik dengan uji coba bom Tiongkok dan menjadi rujukan untuk mengubah nuklir Indonesia menjadi bom. Shuhai juga mengisahkan bahwa Soekarno secara tertutup mengirim kurang lebih 200 insinyur dan ilmuwan nuklir dalam negerinya yang pernah dididik oleh Amerika Serikat terdahulu untuk belajar ke RRC tentang pembuatan bom atom. Bom atom itu rencananya akan diuji coba pada 5 Oktober 1965, bertepatan dengan HUT ABRI.

Terkait hal ini, RRC memandang bahwa proyek nuklir Indonesia sesungguhnya bersifat damai (*Atom for Peace*). Sebaliknya rencana proyek nuklir Indonesia tersebut menjadi ancaman Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan tersingkirnya Soekarno, begitu banyak konsesi yang didapatkan oleh Barat atas kekayaan alam Indonesia. Pada periode pasca-jatuhnya Soekarno ini dikenal sebagai rekolonialisasi Barat, baik secara politik maupun ekonomi.

Berdasarkan penelitian ini ditemukan korelasi antara proyek de-Soekarnoisasi yang dilakukan oleh Orde Baru dalam kaitannya dengan pertarungan geopolitik perang dingin. Korelasi itu terlihat dari adanya kepentingan strategis jangka panjang Amerika Serikat dan Inggris terhadap Pasifik yang tidak mungkin dijalankan selama kepemimpinan Soekarno, mengingat keseluruhan gagasan Soekarno tentang Trisakti dan semangatnya yang anti-imperialisme dan kolonialisme menjadi batu sandungan bagi Barat di dalam mendapatkan sumber daya alam Indonesia. Demikian halnya perubahan kebijakan politik luar negeri yang di masa Soekarno begitu aktif melibatkan diri dalam berbagai persoalan dunia (*world view*), sementara di masa Soeharto bergeser hanya dengan menitikberatkan di kawasan Asia Tenggara saja.

Luasnya cakupan, dampak, dan pengaruh pemikiran Geopolitik Soekarno di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin sebagai *driving force* bagi kebangkitan negara-negara tersebut di dalam membentuk kekuatan yang dominan di PBB ditambah oleh rencana Soekarno untuk membuat bom atom benar-benar mengkhawatirkan Barat terkait dengan kepentingan strategisnya di Pasifik. Hal inilah yang menyebabkan Soekarno harus dijatuhkan.

253 Huang Shuhai (2022). *Loc. Cit.*

Upaya mematikan seluruh ide, gagasan, pemikiran, dan cita-cita Soekarno pun dilakukan dengan proyek de-Soekarnoisasi.

Perubahan juga tampak pada doktrin pertahanan negara yang menghilangkan semangat anti-imperialisme dan kolonialisme. Berbagai strategi operasi tempur baik di dalam mengatasi pemberontakan, operasi tempur Pembebasan Irian Barat, dan Operasi Dwikora yang ke semuanya merupakan operasi militer gabungan juga dijauhkan dari kajian-kajian pertahanan. Semua menjadi bukti bahwa pemikiran Geopolitik Soekarno yang menjadi roh dari kebijakan pertahanan dan diplomasi internasional dihilangkan relevansinya dengan menguburkan keseluruhan konsep pemikiran Geopolitik Soekarno tersebut.

Proyek de-Soekarnoisasi dilakukan melalui *framing media*, konspirasi dan fitnah. Secara terorganisir dan sistematis Soekarno diframing sebagai tokoh yang buruk yang sebenarnya sangat berbeda dengan kenyataannya. Bahkan hal ini sudah terjadi sejak masa Soekarno masih menjabat sebagai Presiden. Misalnya, *framing* tentang KAA oleh surat kabar *Pedoman* yang dikritik sebagai “Konferensi Abis-Abisan”. Dalam rentang waktu 1950-1965 kurang lebih terdapat 286 berita membingkai kebijakan Soekarno dalam sudut pandang (*tone*) negatif. Berita bernada negatif tersebut dimuat empat surat kabar yang memang kritis terhadap kebijakan Presiden Soekarno yaitu *Indonesia Raya*, *Abadi*, *Pedoman*, dan *Suara Merdeka*. Setelah tersingkirnya Soekarno *framing media* tentang Soekarno semakin masif memunculkan informasi bernada negatif sebagai bagian dari proyek de-Soekarnoisasi.

Selanjutnya de-Soekarnoisasi dilakukan melalui pelarangan terhadap pemikiran Soekarno termasuk berbagai proyek penggelapan sejarah seputar kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945. Demikian juga dengan Lemhannas sebagai pusat kajian Geopolitik Indonesia bagi tata dunia baru yang bebas dari penjajahan dijauhkan dari pemikiran pendirinya.

Proyek de-Soekarnoisasi dilakukan setelah tersingkirnya Soekarno dan hal tersebut menunjukkan betapa pemikiran Soekarno menjadi ancaman bagi begitu banyak pihak karena perjuangannya yang konsisten melawan berbagai bentuk penjajahan. Dengan logika tersebut dapat diimajinasikan betapa bahayanya Soekarno ketika masih hidup. Hal ini terbukti dengan berbagai percobaan pembunuhan yang dilakukan terhadap Soekarno. Pada 1960-an misalnya terjadi

berulang kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno, mulai dari tingkat baru rencana hingga sampai eksekusi sebanyak dua puluh tiga kali. Dari dua puluh tiga kali rencana pembunuhan terhadap Soekarno, terdapat tujuh kali percobaan pembunuhan yang dianggap menggemparkan dalam sejarah hidup perjuangan Soekarno. Pertama, Peristiwa Cikini yang terjadi pada Sabtu malam, 30 November 1957 menyebabkan 10 pelajar tewas dan 48 orang cedera. Peristiwa Cikini ini diotaki DI/TII. Kedua, penembakan kanon 23mm pesawat MIG 17 yang dipiloti Letnan AU Daniel Alexander Maukar ke Istana Negara pada 9 Maret 1960. Maukar mendapat pengampunan dari Presiden Soekarno dari hukuman mati menjadi hukuman delapan tahun penjara. Ketiga, pengadangan terhadap rombongan Presiden Soekarno yang dilakukan DI TII di Jembatan Rajamandala, Cianjur, Jawa Barat pada April 1960. Presiden Soekarno berhasil diselamatkan oleh pasukan pengawal Cakrabirawa. Keempat, pelemparan granat terhadap rombongan Presiden Soekarno yang dilakukan Sersan Mayor Marcus Latuperissa dan Ida Bagus Surya Tenaya di Makasar pada 7 Januari 1962. Kelima, Peristiwa Idul Adha pada 14 Mei 1962 yang dilakukan H. Mochamad Bachrum simpatisan DI TII. Keenam, penembakan mortar yang dilakukan kelompok DI/TII Kahar Muzakar pada 1960-an saat kunjungan Presiden Soekarno di Sulawesi. Ketujuh, pelemparan granat terhadap Presiden Soekarno di Cimanggis, Bogor pada Desember 1964.²⁵⁴

Willam Blum yang pernah bekerja di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengungkapkan bahwa CIA tidak hanya berencana untuk membunuh Soekarno, tetapi juga memproduksi film porno yang diperankan Soekarno palsu.²⁵⁵ Dalam catatan Blum selain upaya penggulingan terhadap Soekarno juga merinci berbagai penggulingan dan pembunuhan terhadap pemimpin negara-negara dunia ketiga.

Upaya terakhir negara-negara Blok Barat untuk menjatuhkan Soekarno dilakukan melalui Peristiwa Gerakan Satu Oktober (GESTOK) atau lebih dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September (G30S) pada 1965. Konspirasi menjatuhkan Soekarno direncanakan Amerika Serikat sejak 1964. Dalam Memorandum yang dipersiapkan

254 Historia (2018). *Mengincar Bung Besar: Tujuh Upaya Pembunuhan Presiden Soekarno*. Jakarta: Gramedia.

255 William Blum (2002). *Rogue State: A Guide to the World's Only Super Power*. London: Zed Books.

CIA untuk *State Department 248* tertanggal 18 September 1964 telah direncanakan proyek aksi tersembunyi untuk menggulingkan Presiden Soekarno²⁵⁶ yang terlihat seperti tesis Soekarno tentang G30S, yaitu *keblingernya* pimpinan PKI, kelihaiian subversi Nekolim dan adanya oknum-oknum yang tidak benar. Berikut ini petikan memorandum tersebut:

“Sehubungan dengan misi dasar program dan sebagai tambahan di sana, (kurang dari 1 baris teks sumber tidak dideklasifikasikan) kami mengajukan sebuah program aksi tersembunyi yang intensif, terbatas pada tujuan awalnya, tapi dirancang untuk ekspansi jika situasi mengizinkan...Seberapa jauh kita dapat melakukan usaha memecah PKI dan lebih penting lagi, untuk mengadu PKI dengan melawan non-komunis, khususnya Angkatan Darat? Sampai sejauh mana, jika ada, kita harus menyerang Soekarno? Apakah tidak terpikirkan untuk menggerakkan tekanan internal seperti membangkitkan kerusuhan China tahun lalu, dan di bawah syarat-syarat tertentu mungkin akan memaksa Angkatan darat untuk menanggung kekuatan besar untuk memulihkan perintah? Kita tidak ingin tampak terlalu ambisius dalam hal ini.”

Keterlibatan negara-negara asing dalam Tragedi 1965, telah banyak dikaji para peneliti dari dalam maupun luar negeri. Meskipun sampai saat ini, Tragedi 1965 masih menjadi perdebatan di antara para ahli. Dugaan akan terjadinya kejatuhan Soekarno dari kekuasaannya juga ditulis Willem Oltmans seorang jurnalis berkebangsaan Belanda yang mendukung perjuangan pembebasan Irian Barat. Informasi ini didapatkan Oltmans dari Uyeng Suwargana 1917 –1979 seorang tentara, penerbit, dan politikus Indonesia, pada saat pertemuan mereka di New York pada 1962. Pada saat pertemuan antara Oltmans dan Suwargana yang kedua kalinya di New York pada 1964, Suwargana mengatakan kepada Oltmans, “Kami akan mengisolasi Soekarno dan membiarkannya mati seperti sekuntum bunga yang tidak diberi air”.²⁵⁷ Pernyataan Suwargana

256 Joesoef Isak dan Keefer, Edward C. (Ed.) (2008). *Dokumen CIA Melacak Penggulingan Soekarno dan Konspirasi G30S 1965*. Jakarta: Hasta Mitra, hal. 175-179.

257 Willem Oltmans (2001). *Dibalik Keterlibatan CIA. Bung Karno Dikhianati*. Jakarta: Aksara Karunia.

ini menurut Oltmans benar-benar terjadi pada saat Soekarno pada 1967 hingga menjelang wafatnya pada 20 Juni 1967. Menurut kesaksian dari Ajip Rosidi dalam aksi demonstrasi Kesatuan Aksi Mahasiswa-Indonesia (KAMI), Suwargana antusias memberikan bantuan. Banyak pemimpin KAMI datang menemui Suwargana.²⁵⁸ Informasi yang didapatkan Oltmans pada 1964 tidak berbeda jauh dengan laporan pejabat Belanda di NATO pada Desember 1964 yang mengatakan bahwa Indonesia akan jatuh ke tangan Barat seperti apel busuk. Laporan ini didapatkan dari Duta Besar Pakistan di Paris yang diserahkan kepada Zulfikar Ali Bhutto, Menteri Luar Negeri Pakistan.²⁵⁹

Dugaan Oltmans (2001) semakin menguat ketika membaca reportase Gordian Troeler dalam *Der Spiegel*, Februari 1965. Troller melaporkan akan terjadi sebuah kudeta atas pemerintahan Soekarno.²⁶⁰

“Dinas rahasia Amerika mencari tokoh-tokoh yang tepat yang nantinya akan mengganti Soekarno. Perundingan dilakukan secara gencar, baik di Tokyo, Hongkong maupun Jakarta. Banyak uang yang akan disediakan bagi para perwira, tetapi juga bermiliar-miliar untuk perlengkapan dan pengembangan Angkatan Bersenjata Indonesia. Demikianlah argumen-argumen yang diajukan kepada pemuda pangkat dan kedudukan.”

Pola operasi intelijen kedua dilakukan Uni Soviet dan Cekoslowakia. Bittman mengungkapkan keterlibatan Dinas Rahasia Cekoslowakia dan KGB dalam mendorong terciptanya G30S. Dinas Rahasia Cekoslowakia menunggangi aksi-aksi politik anti-Amerika Serikat di Indonesia. Operasi intelijen mereka yang pertama disebut dengan Operasi Palmer untuk menyudutkan Bill Palmer sebagai agen CIA. Pada era 1950-1960-an, Bill Palmer sebagai kepala *American Motion Picture Association in Indonesia* (AMPAI). Pada 1 April 1965, rumah Pallmer di Puncak, Jawa Barat diokupasi oleh rakyat dan pemuda berhaluan kiri. Dalam rumah Pallmer diketemukan sebuah dokumen tentang rencana pembunuhan CIA dan Pallmer

258 Ajip Rosidi (2008). *Hidup Tanpa Ijazah: Yang Terekam dalam Kenangan Otobiografi Ajip Rosidi*. Pustaka Jaya.

259 Manai Sophiaan (2008). *Kehormatan bagi yang Berhak. Bung Karno Tidak terlibat G30S/PKI*. Jakarta: Visimedia.

260 Willem Oltmans (2001), *Op. Cit.*

terhadap Soekarno, Soebandrio, dan Ahmad Yani. Dokumen tersebut sebenarnya adalah dokumen palsu yang dicetuskan oleh Mayor Louda, perwira senior dalam Dinas Rahasia Cekoslowakia. Selain Pallmer, sukarelawan *Peace Corps* yang dibentuk oleh Kennedy dituduh sebagai agen-agen CIA. Sejak itu pemerintah Indonesia menutup AMPAI dan perpustakaan-perpustakaan *United States Information Agency* (USIA), dan menghentikan film-film impor dari Amerika Serikat.

Operasi intelijen kedua Dinas Rahasia Intelijen Cekoslowakia dan KGB dengan memproduksi dokumen palsu yang nantinya disebut dengan Dokumen Gilchrist. Dokumen palsu tersebut berupa laporan dari Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Sir Andrew Gilchrist kepada Kementerian Luar Negeri Inggris yang memuat tentang rencana intervensi militer Amerika Serikat dan Inggris terhadap Indonesia. Dokumen tersebut diterima Soebandrio sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) pada 15 Mei 1965. Kemudian Soebandrio pada 26 Mei 1965 melaporkan dokumen tersebut kepada Presiden Soekarno. Dokumen tersebut disampaikan Soekarno kepada publik internasional ketika Soekarno mengunjungi Kairo pada Juni 1965. Operasi intelijen KGB dan Dinas Rahasia Intelijen Cekoslowakia awalnya hanya untuk menunggangi aksi-aksi politik anti-Amerika Serikat untuk merebut pengaruh Indonesia, namun pada akhirnya justru dimanfaatkan Amerika Serikat dan Inggris untuk mempertajam konflik antara AD dengan PKI.

Pola operasi intelijen ketiga dilakukan Inggris. Ini diungkapkan Paul Lashmar dan James Oliver. Sejak Soekarno dianggap mengganggu kepentingan Inggris di Asia Tenggara, Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan menggelar operasi untuk menggulingkan Soekarno. Pusat perencanaan penggulingan Soekarno berada di Singapura yang bermarkas di Phoenix Parx. Phoenix Parx menjadi markas gabungan yang dioperasionalkan Kementerian Luar Negeri Inggris, Resimen *Special Air Service* (SAS) atau M16, dan CIA. Misi utama Phoenix Parx melakukan propaganda anti-Soekarno.²⁶¹

261 Paul Lashmar dan James Oliver (1999). *Britain's Secret Propaganda War 1948-1977*. Sutton Pub Ltd.

BAB 7

RELEVANSI DAN IMPLEMENTASI PEMIKIRAN GEOPOLITIK SOEKARNO TERHADAP KEBIJAKAN PERTAHANAN PASCA SOEKARNO

Pemikiran Geopolitik Soekarno memiliki relevansi dan dapat diimplementasikan bagi penguatan kebijakan pertahanan negara. PGC merupakan landasan kuat kebijakan luar negeri dan pertahanan negara dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan pengaruhnya mempengaruhi konstelasi global. Dalam spirit memahami relevansi dan implementasi tersebut, maka bab ini menyetengahkan pembahasan tentang:

- a. Implementasi pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap pertahanan: dari Era Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo Periode Pertama;
- b. Relevansi pemikiran Geopolitik Soekarno dalam konteks empiris;
- c. Pemikiran Geopolitik Soekarno sebagai peta jalan desain pertahanan Negara.

7.1 Implementasi Pemikiran Geopolitik Soekarno Terhadap Pertahanan: dari Era Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo Periode Pertama

Pemikiran Geopolitik Soekarno dalam relevansinya terhadap pertahanan, melalui uji kuantitatif digambarkan ke dalam persamaan $PER = 0.513 KEP + 0.244 POL + 0.244 TEK + 0.180 TER + 0.115$

KOE + 0.105 SDA + 0.095 DEM + 0.019 MIL. Korelasi tersebut dapat menjadi alat analisis kebijakan pertahanan baik pada masa Soekarno maupun pasca Soekarno. Substansi persamaan tersebut membuktikan pentingnya *instrument of national power*,²⁶² yang di dalam penelitian ini mencakup faktor kepentingan nasional, politik, teknologi, teritorial, koeksistensi damai, sumber daya alam, demografi, dan militer.

Selanjutnya untuk melihat relevansi dan keberlanjutan pemikiran geopolitik pasca Soekarno hingga sekarang ditampilkan perbandingan dan keberlanjutan kebijakan pertahanan Indonesia periode 1945 – 2019. Kebijakan pertahanan pasca Soekarno ditandai dengan perubahan fundamental terhadap doktrin pertahanan dan kebijakan luar negeri yang menghilangkan pernyataan anti kolonialisme dan imperialisme. Menurut Wirajuda, kalimat pertama dalam Pembukaan UUD 1945:²⁶³

“...bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”,

Menggambarkan *grounds norm* (norma dasar) bagi upaya penghapusan penjajahan di atas dunia. Sebelumnya Notonagoro menekankan pentingnya pernyataan anti kolonialisme dan imperialisme dalam doktrin pertahanan dan kebijakan luar negeri Indonesia.²⁶⁴ Menghilangkan frasa anti kolonialisme dan imperialisme dalam doktrin pertahanan dan kebijakan luar negeri sama artinya dengan menghilangkan *grounds norm* yang menjadi spirit kemerdekaan Indonesia. Pernyataan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu” menurut Notonagoro memiliki makna yang bersifat

262 *National Power* (Kekuatan Nasional) adalah istilah dalam Geopolitik dan kemudian Geoekonomi. Karl Hermann Höhn (Karl Hermann Höhn [2011]. *Geopolitics and the Measurement of National Power*, disertasi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Departemen Ilmu Sosial di Universitas Hamburg) menulis disertasi yang menjelaskan akar ilmiah dan historis dari rumus-rumus persamaan Kekuatan Nasional dengan penjelasan yang dimulai dari Geopolitik Jerman, kemudian Geopolitik Amerika dengan tokohnya Nicholas John Spykman (1893–1943) dan pendekatan Geoekonomi. Terminologi Kekuatan Nasional dan metode-metode pengukurannya diadopsi menjadi salah satu metode pengukuran Ketahanan Nasional.

263 Wawancara Noer Hassan Wirajuda, 2022.

264 Notonagoro (1951). *Pantja Sila, Dasar Fllsafat Negara Republik Indonesia*. Kementerian Penerangan R.I.

mutlak dan hakikatnya tidak bisa dihilangkan karena pernyataan tersebut menegaskan kemerdekaan Indonesia yang berbeda dengan kemerdekaan Inggris, Amerika, Prancis, dan negara-negara lain yang mengikutinya.

Semangat anti imperialisme dan kolonialisme pada masa Soekarno sangat mewarnai kebijakan pertahanan dalam dan luar negeri. Semangat anti penjajahan tersebut merupakan aktualisasi Indonesia yang berdaulat di bidang politik dan merdeka di dalam menentukan kebijakannya tanpa intervensi negara lain. Kedaulatan dalam politik yang berkaitan dengan keputusan strategis nasional menjadi ciri pokok yang membedakan masa Soekarno dan pasca Soekarno.

Dengan menggunakan *grounds norm* sebagai basis analisis relevansi pemikiran Geopolitik Soekarno pada masa Soekarno yang kemudian dibandingkan dengan pasca Soekarno sebagaimana ditampilkan pada Tabel 7.1.

7.1.1. Sistem Internasional dan Kebijakan Pertahanan

Analisis kritis terhadap sistem internasional ini sangat penting. Penjajahan di Indonesia terjadi akibat praktik sistem internasional yang kapitalistik dan imperialistik. Revolusi Industri berdampak pada perluasan daerah jajahan untuk mencari pasar bagi produk industri negara maju; Pencarian sumber daya; dan politik *lebensraum* sebagai implikasi kepentingan nasional negara maju, terutama Eropa dan Amerika Serikat. Analisis kritis Soekarno menempatkan penjajahan di Indonesia memiliki kesamaan nasib dengan bangsa-bangsa Asia-Afrika dan karenanya kemerdekaan Indonesia juga menjadi bagian kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika. Imajinasi Soekarno tentang Garis Hidup Imperialisme adalah bagian dari kesadaran sistem internasional yang bersifat bipolar. Kedua kutub yang saling berlawanan tersebut menguatkan kolonialisme. Atas dasar hal tersebut solidaritas Asia-Afrika ditransformasikan menjadi aliansi strategis bagi perjuangan melawan penjajahan, yang implikasinya pada penyelenggaraan KAA dan GNB. Pada periode ini strategi diplomasi bersifat keluar (*outward looking*) dalam dialektika dengan percaturan politik global, namun digerakkan kepentingan nasional Indonesia. Habitus dan *field* sebagaimana dimaksud dalam teori Bourdieu tercermin pada kepemimpinan strategik Soekarno yang

mampu memformat ulang tata dunia bipolar menjadi multipolar. Dalam proses ini *field* kebijakan luar negeri Indonesia, ruang pengaruhnya semakin kuat dari Asia-Afrika bergerak ke Amerika Latin dan akhirnya meluas ke seluruh dunia. Habitulasi Soekarno dalam diplomasi luar negeri menyatu dengan pertahanan didukung oleh kemampuannya melakukan *power projection* yang digerakkan kuasa pengetahuannya sebagai *capital* berupa politik luar negeri bebas aktif dengan konsepsi pemikiran tata dunia baru. Kapital ini dilaksanakan secara progresif revolusioner, menjadi pembeda utama antara kebijakan pertahanan pada masa Soekarno dan Pasca-Soekarno.

Pada masa pemerintahan Soeharto, kebijakan diplomasi dan pertahanan negara ditinjau dari doktrin, strategi, imajinasi geopolitik, dan arena menunjukkan konsentrasi ke dalam (*inward looking*). *Playing field* dunia berubah terkonsentrasi menjadi hanya wilayah ASEAN. Asia-Afrika dan Amerika Latin tidak menjadi landasan bagi perjuangan kepentingan nasional untuk dunia. Perspektif ancaman Neo-kolonialisme dan Neo-imperialisme diubah menjadi ancaman dalam negeri, baik melalui bahaya laten komunisme, maupun gerakan disintegrasi. Implikasinya kebijakan pertahanan menitikberatkan pembinaan teritorial, membangun stabilitas politik melalui operasi Sospol Kopkamtib, dan pelaksanaan Dwi-fungsi ABRI dalam skala sangat luas sehingga mereduksi tugas pokok fungsi ABRI di bidang pertahanan. Hal ini tercermin dari reorganisasi ABRI yang menghilangkan koridor strategis berdasarkan pembagian Komando Wilayah Pertahanan; Perubahan postur pertahanan berdasarkan proyeksi ancaman; Dan fungsi teritorial menjadi lebih dominan. Ditinjau dari konsepsi *frontier* untuk mengalahkan negara agresor di wilayah negara agresor dengan keunggulan kekuatan pertahanan udara dan laut digantikan dengan pertahanan darat. Pada masa Presiden Soeharto, eufemisme dalam pertahanan terjadi di mana konsepsi pertahanan aktif ditabukan dan diperhalus menjadi defensif aktif.²⁶⁵

Perubahan terjadi pada masa Presiden Habibie. Pengalaman internasionalnya yang luas menyebabkan kebijakan pertahanan bergeser ke Eropa khususnya Jerman. Berbagai kerja sama militer dan pengadaan Alutsista yang dilakukan selama Habibie menjadi Menteri Riset dan Teknologi serta memimpin industri strategis

265 Andi Widjajanto (2022). *Loc. Cit.*

pertahanan ikut mewarnai kerja sama strategis dengan negara di Eropa dan Amerika Serikat khususnya untuk pengembangan industri pertahanan. Namun konsentrasi utama Habibie menangani krisis multi-dimensi serta tekanan untuk melakukan reformasi politik menyebabkan berkurangnya konsentrasi terhadap kebijakan pertahanan. Hal ini juga terlihat dari kinerja industri strategis pertahanan yang mengalami krisis keuangan dan operasi.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kebijakan luar negeri yang berdaulat dan membangunkan pengaruh Indonesia pada dunia dikobarkan kembali. Kelincahan Presiden Gus Dur untuk mengambil terobosan diplomatik di luar pranata baku dilakukan, termasuk perhatiannya ke Timur Tengah dan juga wacana membuka hubungan diplomatik dengan Israel; Suatu kebijakan yang dikenal sangat sensitif. Pada masa Gus Dur, sesuai tuntutan reformasi, terjadi pemisahan TNI dan Polri. Perubahan kultur militer juga terjadi dengan menempatkan Panglima TNI yang sebelumnya selalu memberikan preferensi kepada Angkatan Darat diganti dengan memberikan ruang bagi Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri terjadi pengembalian spirit kebijakan luar negeri Indonesia pada karakter bebas dan aktif. Menurut Wirajuda sistem internasional pada era Megawati dunia bersifat uni-polar akibat runtuhnya Uni Soviet. Amerika Serikat menjadi satu-satunya “polisi dunia”. Dalam situasi itu terjadi peristiwa yang mengubah arsitektur keamanan global dengan serangan teroris di pusat hegemoni keuangan Amerika Serikat pada 9 September 2001. Atas peristiwa tersebut Megawati bertindak cepat dengan memperhitungkan secara cermat dampak terorisme terhadap perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Wirajuda menegaskan: “Di tengah konteks Amerika Serikat yang sangat uni-polar sebagai satu-satunya *super power*, Uni Soviet runtuh, Tiongkok belum muncul, dan Amerika sebagai negara uni-lateralis, Indonesia tampil dengan sikap yang sangat berani”.²⁶⁶

Serangan terorisme mengubah secara dramatis doktrin keamanan nasional Amerika Serikat (*homeland security*). Guna mencegah tindakan sepihak Amerika Serikat sebagai kekuatan uni-lateral, Indonesia secepatnya menjadikan Peristiwa 9/11 sebagai

266 Wirajuda (2022). *Loc. Cit.*

persoalan dunia dan menempatkan PBB pada peran sentralnya di dalam sistem internasional. Ditegaskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri: “(1) Bangsa Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas serangan teroris yang terjadi di New York dan Washington DC; (2) Islam adalah agama damai, toleran, dan anti kekerasan; (3) Penegasan bahwa serangan teroris merupakan ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia; (4) Meminta Dewan keamanan PBB dengan mandatnya untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia serta mengambil langkah-langkah pemulihan keamanan secepatnya”.²⁶⁷

Langkah Pemerintah Indonesia menjadi respons tercepat yang diambil negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Sikap Indonesia ini menjadi rujukan bagi Vatikan, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara Timur Tengah. Pesan penting dari sikap Pemerintah Indonesia menekankan pada kesadaran untuk menempatkan PBB sebagai aktor sentral dalam pemulihan keamanan global. Kebijakan luar negeri bebas aktif selama kepemimpinan Presiden Megawati juga tampak pada perhatiannya terhadap Asia-Afrika; Perdamaian di Semenanjung Korea, dan Timur Tengah. Dalam pengertian *field* sebagaimana digambarkan Bourdieu, Megawati memperkuat ASEAN sebagai komunitas strategis yang berdiri sejajar di dalam membangun kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat, Jepang, India, dan Tiongkok.

Pencanangan peringatan 50 tahun KAA menunjukkan arah kebijakan luar negeri Megawati kembali pada basis utama di Asia-Afrika dan Amerika Latin. Dalam kebijakan pertahanan, Megawati juga mengambil terobosan sebagai negara berdaulat dengan membeli alutsista dari Rusia guna meningkatkan efek gentar seperti Sukhoi sekaligus menjawab tekanan Barat yang melakukan embargo militer terkait dengan isu pelanggaran HAM di Indonesia. Selama kepemimpinannya, Presiden Megawati menunjukkan keberaniannya menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengekstradisi Abu Bakar Baasyir ke Guantanamo dengan pertimbangan kedaulatan hukum Indonesia.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diplomasi luar negeri dan pertahanan ditinjau dari penggunaan

267 Wirajuda (2022). *Loc. Cit.*

instrument of national power menunjukkan penurunan.²⁶⁸ Orientasi kebijakan lebih condong ke Amerika Serikat. Pada periode pertama Presiden SBY, Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda melanjutkan kebijakan luar negeri bebas aktif yang telah diletakkan pada era Presiden Megawati. Selama periode ini kebijakan luar negeri disusun dengan memberi ruang yang besar kepada para intelektual untuk saling berkumpul, bertukar ide, dan melakukan *intellectual exercises* sebagai bagian dari model kepemimpinannya. Pada periode kedua Presiden SBY, diskursus intelektual meluntur. Kebijakan luar negeri “*one thousand friends, zero enemy*”, menurut Oegroseno dalam pendekatan *multi direction foreign policy* menyebabkan melunturnya pengaruh Indonesia, “*you are just nobody*”. Dalam sistem internasional menurut pandangan Oegroseno; negara yang memiliki prinsip yang akan dianggap. Dalam pemahamannya: “*Countries are abstract, but states are concrete, not abstract*”.²⁶⁹

Dengan kebijakan *Zero Enemy* tersebut ditambah minimnya *intellectual exercises*, kebijakan luar negeri pada masa kedua Pemerintahan SBY menjadi birokratis, *top down*, dan elitis.²⁷⁰ Dampak yang sangat serius terjadi karena kebijakan Presiden SBY terkait *Defense Cooperation Agreement (DSA)* antara Indonesia dan Singapura. Perjanjian tersebut menunjukkan keunggulan Singapura menekan Indonesia. Persoalan ini menyentuh hal yang sensitif berkaitan kedaulatan Indonesia mengingat kerja sama pertahanan ditukar dengan ekstradisi para koruptor Indonesia yang berlindung di Singapura. Di sinilah Presiden SBY menempatkan *instrument of national power* pada titik terlemah.

Dalam kebijakan yang bersifat sangat strategis, keputusan SBY menandatangani *Non-Proliferation Treaty (NPT)* pada 6 Desember 2011 dikritik sebagai kebijakan yang tidak melihat kepentingan nasional dalam perspektif historis dan tanggung jawabnya bagi masa depan. Menurut Lalu Muhammad Iqbal, persoalan nuklir merupakan kebijakan pertahanan yang sangat sensitif. Suatu negara yang memiliki Nuklir secara otomatis masuk kategori *Weapon State*. Memiliki nuklir berada pada posisi *point of no-return*. Dalam pandangan Iqbal, *the ultimate deterrence* sampai saat ini adalah

268 Andi Widjajanto (2022). *Loc. Cit*; Wawancara Connie Rahakundini Bakrie (2022).

269 Wawancara Arif Havas Oegroseno (2022).

270 Arif Havas Oegroseno (2022), *Ibid*.

nuklir. Ditegaskannya dalam masa Presiden Soekarno, politik luar negeri Indonesia menampilkan sikap, tindakan, dan perilaku sebagai negara besar.²⁷¹

Dalam pandangan Soekarno, kebijakan nuklir sangat penting agar prinsip kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dapat dijalankan. Dengan memiliki nuklir, Indonesia dapat memimpin pergerakan bangsa-bangsa *The New Emerging Forces* di dalam menghadapi *the Old Emerging Forces*. Dengan memiliki bom atom, Indonesia dapat membela negara-negara yang menderita konflik akibat intervensi negara-negara besar sebagaimana terjadi di Sudan, Kongo, Vietnam, Korea, dan lain-lain. Bom atom dalam kebijakan pertahanan Soekarno sangat penting sebagai daya *deterrent* di dalam membela bangsa-bangsa terjajah.

Dengan penandatanganan NPT pada 2011 tersebut Indonesia tidak lagi memiliki daya tawar terhadap persoalan nuklir. Perubahan kebijakan strategis pertahanan negara terutama menyangkut substansi yang sangat sensitif dan strategis seharusnya berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 dan seluruh materi yang terkandung di dalamnya. Penandatanganan NPT tersebut juga melupakan aspek historis dan misi abadi Indonesia di dalam membangun perdamaian dunia.

Pada pemerintahan Presiden Jokowi dibangun kembali kesadaran geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi. Kebijakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (IPMD) lahir sebagai respons atas persoalan geopolitik di Indo-Pasifik. IPMD merupakan bentuk *adaptive foreign policy* terhadap persoalan yang terjadi di LCS. *Adaptive foreign policy* juga pernah dilakukan pada masa Soekarno. Pada saat itu dibentuk Poros Jakarta-Peking-Pyong Yang sebagai respons atas perubahan lingkungan eksternal pasca pembunuhan Kennedy. Dinamika global saat itu sangat *complicated*. Poros tersebut menjadi pilihan utama Soekarno di dalam menghadapi poros Amerika Serikat-Inggris yang oleh Soekarno dikatakan sebagai kekuatan Nekolim yang ingin menjajah kembali Indonesia.²⁷²

Menurut Perwita, kehadiran IPMD tidak terlepas dari peran penting Indonesia di kawasan Samudera Hindia melalui *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Dalam pandangannya, Indonesia

271 Lalu Muhamad Iqbal (2022), *Loc. Cit.*

272 Anak Agung Banyu Perwita (*Focus Group Discussion*, 2022).

harus menjadi tulang punggung IORA.²⁷³ Pemikiran yang sama disampaikan Wibisono bahwa IPMD menjadi peta geopolitik dan geostrategi Indonesia berkaitan dengan wilayah laut dan udaranya.²⁷⁴ IPMD seharusnya bisa mengoordinasikan ekonomi, politik, dan keamanan Indonesia untuk menjadi negara kuat, termasuk dalam kekuatan pertahanan. Namun implementasi IPMD belum ada. Penetapan IPMD dalam relevansinya terhadap pertahanan negara tidak diikuti perubahan doktrin pertahanan. Bahkan berkaitan dengan perencanaan alutsista yang semula *land based* menjadi *maritim based* juga tidak terjadi.²⁷⁵

Selain IPMD, periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi ditandai pembangunan infrastruktur secara masif. Kebijakan infrastruktur tersebut sejalan dengan teori *connectography*²⁷⁶ yang bertujuan untuk meningkatkan daya *leverage* posisi strategis Indonesia di jalur silang perdagangan dunia.²⁷⁷ Menurut Keliat, koridor strategis melalui pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari tuntutan globalisasi yang menempatkan geografi sebagai sesuatu hal yang sudah selesai mengingat perdagangan dunia telah melintasi batas negara, *borderless*. Meskipun demikian menurut Keliat, kajian geopolitik masih sangat relevan mengingat geografi merupakan faktor permanen di mana negara dalam hubungan internasionalnya selalu dipengaruhi oleh posisi geostrategisnya.²⁷⁸

Kajian geopolitik memerlukan interpretasi baru berkaitan dengan pentingnya kekuatan ekonomi dan perdagangan yang bisa digunakan sebagai instrumen pengendali geopolitik suatu negara, sebagaimana ditunjukkan Singapura. Instrumen pengendali di luar faktor geografis tersebut digunakan sebagai jawaban Singapura yang menempatkan dirinya dalam posisi kepungan dua negara besar yakni Indonesia dan Malaysia.²⁷⁹ Pandangan yang sama juga ditekankan oleh Khanna dan Sengupta tentang pentingnya jalur perdagangan sebagai kekuatan geopolitik.

273 Anak Agung Banyu Perwita (2022), *Ibid*.

274 Makarim Wibisono (Focus Group Discussion, 2022).

275 Widjajanto, (2022). Loc. Cit.

276 Parag Khanna (2016). Op. Cit.

277 Wawancara Heri Akhmadi (2022).

278 Wawancara Makmur Keliat (2022).

279 Keliat (2022), Loc. Cit.

Berdasarkan pemikiran tersebut, kebijakan Pemerintahan Jokowi memproyeksikan konsepsi pertahanan dalam perspektif lebih luas yang dibangun dari keunggulan daya saing perekonomian Indonesia melalui program infrastruktur. Kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan untuk mendorong investasi dan mempercepat terbentuknya koridor strategis perdagangan. Undang-Undang Cipta Kerja juga untuk mengatasi berbagai tumpang tindih regulasi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Di dalam Undang-Undang ini, diatur perubahan kebijakan industri pertahanan dengan mendorong peran swasta nasional dan asing.

Pada masa pemerintahan Jokowi postur dan gelar militer diperkuat dengan pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) dengan satuan TNI terintegratif; pembentukan satuan Siber TNI dan kebijakan Pertahanan melalui UU Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

7.1.2. Gelar Militer dan Gelar Operasi

Doktrin pertahanan pada masa Soekarno diwarnai penggalangan kekuatan progresif bagi tata dunia baru. Implikasinya kebijakan pertahanan berorientasi ke dalam dan ke luar. Ke dalam melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dengan berbagai gelar militer serta gelar operasi dalam rangka menjaga keutuhan NKRI seperti penumpasan Pemberontakan DI/TII, PRRI/Permesta, operasi Trikora dan Dwikora. Ke luar dengan melakukan gelar militer dan gelar operasi di luar wilayah kedaulatan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Afghanistan dan Pakistan.

Kebijakan pertahanan pada masa Soekarno berdasarkan pada proyeksi ancaman dengan menempatkan kekuatan Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai kekuatan yang mampu mematahkan negara agresor di wilayah kedaulatan negara agresor. Sementara itu pada pasca Soekarno, gelar militer dan gelar operasi lebih bersifat ke dalam. Menurut Widjajanto, pada masa Orde Baru tidak ada geostrategi untuk membendung ancaman dari luar.²⁸⁰ Pada masa ini

280 Andi Widjajanto (2022). *Loc. Cit.*

geostrategi pertahanan menghadapi ancaman eksternal ditinjau dari kekuatan alutsista, kekuatan pasukan, dan zona-zona pertahanan tidak memiliki relasi satu dengan lainnya. Bahkan ditinjau dari kekuatan militer dan kapasitas operasi, pada masa Orde Baru terjadi reduksi. Ekspansi pertahanan pada masa Orde Baru tidak terjadi karena adanya rasionalisasi pertahanan dalam kuantitas alutsista yang mempengaruhi kemampuan operasi. Dampak lebih lanjut pembelajaran perang lebih mengarah pada *land warfare* dengan kecenderungan melakukan glorifikasi (mengganggu-agungkan) perang gerilya. Praktis pada masa Orde Baru penggunaan kekuatan militer dan kapasitas operasi hanya terjadi pada Penumpasan G30S PKI, operasi penyerbuan Timor Timur, operasi menghadapi perlawanan bersenjata GAM, OPM, dan Fretilin. Hal yang menonjol dalam operasi militer justru ke dalam berupa operasi teritorial sebagai pelaksanaan fungsi sosial politik ABRI melalui Komkamtib.

Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri penggunaan kekuatan militer dan operasi-operasi militer masih diwarnai oleh pengaruh Orde Baru. Pada masa ini operasi dan penggunaan kekuatan militer difokuskan untuk menghadapi separatisme, dan operasi *contra-terrorism* akibat Serangan Bom Bali I dan II, serta serangan teroris terhadap Kedutaan Besar Australia dan Hotel J.W. Marriot.

Pada Pemerintahan SBY, penggunaan kekuatan militer dan operasi militer melawan separatisme GAM berhasil diakhiri melalui Perjanjian Perdamaian di Helsinki pada 5 Agustus 2005. Perjanjian damai tersebut didorong terjadinya gempa bumi dan tsunami besar pada 26 Desember 2004 dengan korban jiwa 227.898 orang. Perjanjian Damai Helsinki berhasil mengakhiri konflik kekerasan di Aceh.

Pada masa Presiden Jokowi pembentukan Kogabwilhan, Satuan TNI Integratif, penguatan komando teritorial Kostrad, Armada Angkatan Laut TNI, dan Pasukan Marinir TNI, serta penguatan Komando Operasi Udara Nasional telah meningkatkan kemampuan militer dan kapasitas operasi dalam rangka menghadapi ancaman baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

7.1.3. Peringkat Pertahanan

Penggunaan cara pandang geopolitik dalam menyusun kebijakan pertahanan negara berdasarkan korelasi pertahanan negara terhadap tujuh variabel pemikiran Geopolitik Soekarno dan variabel kepentingan nasional maka postur pertahanan, kekuatan alutsista, kemampuan industri pertahanan, dan penggunaan sumber daya nasional bagi kepentingan pertahanan negara ikut berpengaruh terhadap peringkat pertahanan Indonesia. Pada masa Presiden Soekarno kekuatan pertahanan Indonesia berada pada peringkat pertama, bahkan menurut Widjajanto, Indonesia terkuat di belahan bumi selatan; namun pasca Soekarno peringkat pertahanan menunjukkan penurunan.²⁸¹ Pada masa Presiden Soeharto terjadi embargo senjata dari Uni Soviet. Sementara itu setelah kejatuhan Soeharto pada 1998 akibat krisis moneter, krisis ekonomi yang dilanjutkan dengan krisis politik, Indonesia diembargo Amerika Serikat dan Eropa Barat akibat pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur. Ditinjau dari jumlah pesawat dan kapal perang, pada masa Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati hingga SBY pada periode pertama, Indonesia berada pada peringkat ke-4 di ASEAN. Setelah pengadaan alutsista dari Rusia pada masa Megawati dan diikuti peningkatan anggaran pertahanan pada periode kedua SBY hingga Presiden Jokowi peringkat Indonesia di ASEAN meningkat pada rangking ke-2 di ASEAN.

7.1.4. Geopolitik dan Pertahanan Negara

Pada masa Soekarno penggalangan kekuatan dan penggunaan kekuatan mampu dilakukan secara efektif melalui gabungan antara diplomasi luar negeri dan pertahanan. Kepiawaian para pemimpin nasional baik sipil maupun militer memanfaatkan konstelasi Perang Dingin bagi kepentingan nasional Indonesia dilakukan dengan baik. Pada masa Soekarno seluruh *instrument of national power* digunakan. Diplomasi pelaksanaan KAA dan GNB menginspirasi gerakan *civil society* untuk terlibat dalam diplomasi yang dilakukan negara. Adanya Konferensi Perempuan Asia-Afrika; Konferensi

281 Andi Widjajanto (2022). *Loc. Cit.*

Mahasiswa Asia Afrika; Konferensi Wartawan Asia-Afrika menunjukkan kesesuaian gerak kepemimpinan Indonesia bagi dunia.

Dalam masa Soekarno meskipun kondisi keuangan negara dalam situasi yang sulit akibat berbagai operasi penumpasan separatisme dan operasi pembebasan Irian Barat, perjuangan mewujudkan kepentingan nasional Indonesia dapat dilakukan dengan tetap mengedepankan perspektif geopolitik yang bertumpu pada tujuh variabel pemikiran geopolitik. Pasca pemerintahan Soekarno penggunaan cara pandang geopolitik dalam kebijakan pertahanan mengalami kemerosotan.

Pada masa Presiden Megawati terjadi embargo senjata oleh Amerika Serikat dan Eropa Barat akibat pelanggaran HAM pada masa pemerintahan sebelumnya. Pada saat bersamaan terjadi berbagai persoalan keamanan dan ancaman disintegrasi wilayah. Situasi ini mendorong Presiden Megawati untuk mengambil langkah terobosan dengan melakukan diplomasi pertahanan ke negara Barat. Upaya ini tidak mendapat tanggapan yang serius dan Indonesia tetap mendapat sanksi embargo senjata. Akhirnya Presiden Megawati mengalihkan perhatiannya ke Rusia sesuai politik luar negeri bebas aktif. Diplomasi pertahanan ini berhasil dengan kesepakatan pengadaan alutsista seperti Sukhoi dan Helikopter melalui perjanjian imbal dagang berupa komoditas pertanian seperti CPO, karet, teh, kopi, kakao dan lain-lain.

Pada masa Presiden Jokowi kebijakan pertahanan negara ditandai dengan peningkatan persentase anggaran pertahanan negara, yang memungkinkan penguatan postur pertahanan dan industri pertahanan. Koridor strategis yang dicanangkan Soekarno dalam cara pandang geopolitik dilakukan Presiden Jokowi melalui kebijakan IPMD. Meskipun demikian dalam perspektif geopolitik pemerintahan Jokowi dinilai tidak menaruh perhatian yang serius terhadap persoalan-persoalan internasional. Hal ini terlihat dari kemampuan mengambil prakarsa dan inisiatif terhadap usulan resolusi Indonesia pada saat menjadi anggota tidak tetap DK PBB.²⁸²

282 Oegroseno (2022). *Loc. Cit.*

Tabel 7.1. Perbandingan Perubahan dan Keberlanjutan Kebijakan Pertahanan Indonesia Tahun 1945 – 2019

Aspek	Soekarno 1945-1965	Soeharto 1966-1998	B. J. Habibie 1998-1999	A. Wahid 1999-2001	Megawati 2001-2004	SB Yudhoyono 2004-2014	Joko Widodo 2014-2019
Regulasi	UU Mobilisasi 14/1962 UU Gerakan Sukarelawan Indonesia 9/1964	UU Ketentuan Pokok Pertahanan Negara 20/1982	UU Ketentuan Pokok Pertahanan Negara 1/1988	TAP MPR 6/2000		UU TNI 34/2004	UU Pertahanan Negara 3/2002
		Ratifikasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Ledak Nuklir (CTBT), 2011 UU Industri Pertahanan 16/2012					
						UU Ciptaker (Industri Pertahanan) 11/2020	
							UU PSDN 23/2019
Doktrin	Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta: Strategi Perang Wilayah atau Perang Rakyat Semesta		Sishankamrata				Sistem Pertahanan Rakyat Semesta
			Bela Negara				
			Mobilisasi				

Doktrin	Anti Imperialisme dan Kolonialisme, Angkatan Perang dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	Dwi Fungsi ABRI Sosial Politik Kekaryaan	Pemisahan TNI POLRI	Tentara Rakyat, Tentara Nasional, Tentara Pejuang, Tentara Profesional	
	Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB)				Poros Maritim Dunia
	<i>Inward dan outward looking defense</i> , Jalur Diplomasi, Aliansi dan Operasi Militer Gabungan <i>Force projection</i> ke Aljazair dan Pakistan	<i>Inward Looking Defense</i>	Diplomasi dan Kerja sama	<i>Zero Enemy One Thousand Friends</i> dan Penguatan Industri Pertahanan	Diplomasi dan Kerja sama
Strategi	Presiden - Perdana Menteri Panglima Tertinggi ABRI	Presiden			
	Menteri Pertahanan				
Organisasi	Kepala Staf ABRI (KASAB)	Panglima ABRI	Panglima TNI		
	Gabungan Kepala Staf Angkatan	Kepala Staf Angkatan	Kepala Staf Angkatan		
	Kepala Staf/Panglima Angkatan Menteri Panglima Angkatan dan	Kapalri	Dewan Pertahanan Nasional		
	Menteri Muda Kepolisian RI (Kabinet Karya 1963-1965)				
	Dewan Pertahanan Negara Komando Operasi Tertinggi				
		KKIP			

Aspek	Soekarno 1945-1965	Soeharto 1966-1998	B. J. Habibie 1998-1999	A. Wahid 1999-2001	Megawati 2001-2004	SB Yudhoyono 2004-2014	Joko Widodo 2014-2019	
Postur	Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI, tahun 1962 menjadi ABRI). Sukarelawan ALRI, AURI, ADRI	Rakyat Terlatih (Ratih)	ABRI	ABRI	TNI	TNI	Kogabwilhan	
		ABRI						TNI AD, TNI AL, TNI AU
		TNI AD, TNI AL, TNI AU, POLRI	Cadangan TNI	Komponen Cadangan	Komponen Pendukung	Komponen Pendukung		Komponen Pendukung
		Perindungan Masyarakat						
Sumber Daya Alam, Buatan, Prasana								
Gelar Militer	Komando Mandala	Kogabwilhan					Kogabwilhan	
	Komando Operasi Tertinggi						Satuan TNI Integratif	
	AD: Komando Kewilayahan		AD: Komando Teritorial, Divisi I-II Kostrad				AD: Komando Teritorial, Divisi I-II Kostrad	
	AL: Komando Daerah Maritim, KKO-AL		AL: Armada Barat - Armada Timur, Pasukan Marinir I-II				AL: Armada RI, Armada I-II, Pasukan Marinir I-II	
	AU: Skadron TNI AU, Kopasgat		AU: Komando Operasi I -II, Komando Pertahanan Udara Nasional, Kopasgat (Paskhas)				AU: Komando Operasi Udara Nasional, Komando Operasi Udara III, Kopasgat	
			Kopkamtib				Satuan Siber TNI	

Gelar Operasi	Perang Kemerdekaan	Penumpasan G30S PKI	Kontra Separatis OPM			Operasi Keamanan Papua	
	Perang Separatis	Integrasi Timor Timur	Kontra Separatis GAM, OPM				
	Dwikora	Separatisme GAM, OPM, Fretilin	Kontra Teror				
	Trikora						
Industri Pertahanan	Operasi Militer di Pakistan dan Aljazair	Operasi Sospol - Kopkamtib					
	Antariksa, Nuklir, Industri Pertahanan	Industri Strategis Nasional	Industri Pertahanan	Kemandirian Industri Pertahanan	Investasi Pertahanan	Rantai Produksi Global	
	Alutsista Blok Timur dan Blok Barat	Alutsista Blok Barat	Diversifikasi Sumber Alutsista				
Misi Perdamaian	Misi Garuda 1-3 Kongo 1956, 1960, 1962	Misi Garuda 4-18 1973, 1974, 1989, 1992, 1994, 1997	Misi Garuda 19-20 1999 – 2002, 2003	Misi Garuda 21-30, 2005, 2006, 2008, 2011	Misi Garuda 39, 2018-2020	Misi Garuda 27, 2018-	
Sistem Internasional	Dunia anti imperialisme dan kolonialisme; Perang Dingin.	Perang Dingin - Bipolar	Multipolar				
Peringkat Pertahanan RI	Peringkat ke-1 di Asia Tenggara Salah satu kekuatan militer terkuat di belahan Bumi Selatan	Menurun karena embargo Uni Soviet	Peringkat ke-4 ASEAN, Peringkat ke-2 ASEAN (2019) Peringkat ke-24 dunia (2004-2005), Peringkat ke-13 dunia (2007-2009) Peringkat ke-14 dunia (2009-2010), Peringkat ke-18 dunia (2010-2011) Peringkat ke-15 dunia (2011-2012), Peringkat ke-19 dunia (2012-2014) Peringkat ke-12 dunia (2014-2015), Peringkat ke-14 dunia (2016-2017) Peringkat ke-15 dunia (2017-2018), Peringkat ke-16 dunia (2019-2021)				

Aspek	Soekarno 1945-1965	Soeharto 1966-1998	B. J. Habibie 1998-1999	A. Wahid 1999-2001	Megawati 2001-2004	SB Yudhoyono 2004-2014	Joko Widodo 2014-2019
Diplomasi	<p>LBB</p> <p>Konferensi Asia-Afrika 1955 <i>To Build The World Anew</i></p> <p>Sidang Umum P. B. B. ke-XV tanggal 30 September 1960</p> <p>KTT-GNB I di Beograd, Yugoslavia, 1961</p> <p>KTT-GNB II di Kairo, Mesir, 1964</p> <p>CONEFO, Jakarta 1965</p> <p>KIAPMA, Jakarta, 1965</p>	<p>Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (1973-1974, 1995-1996), ASEAN 1967 KTT APEC 1994</p>	<p>Bekerja sama dengan CGI, IMF, World Bank, ADB dan ILO memulihkan ekonomi</p>	<p>Memulai proses diplomasi dengan Israel</p>	<p>Mengakhiri IMF. Kunjungan pertama ke Pyongyang</p> <p>Persiapan KTT AA 2005.</p> <p><i>Interfaith and Cultural Dialog contra terrorism pasca 9/11 2001.</i></p> <p>Bali Concord II 2003.</p> <p><i>Recovering States and Nations Dignity and Returning Trust Policy.</i></p>	<p>Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (2007-2008), KTT AA 2005</p> <p>APEC dan <i>Global Climate Change</i></p>	<p>Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (2019-2020)</p>
		<p>Perdamaian Dunia</p> <hr/> <p>Kemerdekaan Asia-Afrika</p> <hr/> <p>Gerakan Non-Blok</p> <hr/> <p>ASEAN</p> <hr/> <p>Tata Dunia Baru</p> <hr/> <p>Anti-Kolonialisme dan Imperialisme</p> <p>Diplomasi Luar Negeri dan Pertahanan menyatu</p>					
	<p>G20</p>						

Sumber: diolah oleh Peneliti dari Widjajanto, 2022; Bakrie, 2022

Tabel 7.1. tidak hanya menggambarkan perubahan kebijakan pertahanan dari masa Soekarno dan pasca Soekarno tetapi juga menjelaskan keberlanjutannya hingga masa Presiden Joko Widodo Periode Pertama. Keberlanjutan tersebut dapat dilihat dari aspek konsistensi kebijakan, persamaan, dan kesesuaian kebijakan pertahanan negara yang secara garis besar terlihat pada: Pertama, Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Sistem pertahanan ini menempatkan kekuatan Angkatan Perang/ABRI/TNI yang berasal dari rakyat. Simbiosis TNI dan rakyat berakar dari pengalaman revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Roh kerakyatan ini tampak dari jati diri angkatan Perang Republik Indonesia, yang digambarkan oleh Soekarno pada Hari Angkatan Perang, 5 Oktober 1950:

“Camkan asal Angkatan Perang, kedudukan Angkatan Perang, tujuan Angkatan Perang. Apakah asalmu? Asalmu ialah pangkuan rakyat. Apakah kedudukanmu? Kedudukanmu tiada lain ialah sebagian dari rakyat Indonesia, yang memikul suatu tugas. Apakah tujuanmu? Tujuanmu ialah memenuhi tugas itu, yakni menjamin keamanan rakyat.” (Soekarno, 1950)

Reformasi yang terjadi pasca mundurnya Presiden Soeharto membawa tuntutan reformasi salah satunya adalah pemisahan TNI dan Polri. TNI hadir sebagai kekuatan utama pertahanan negara dan Polri sebagai kekuatan keamanan yang mengedepankan fungsi tertib hukum, budaya hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Meskipun TNI dan Polri dipisahkan namun berkaitan dengan jati diri yang berasal dari kekuatan rakyat tetap menjadi inti dari seluruh tugas utama TNI dan Polri dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai kekuatan penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; kekuatan penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan kekuatan pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam melaksanakan fungsi TNI tersebut, TNI merupakan komponen utama. Sementara itu fungsi kepolisian dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ditinjau dari landasan kebijakan, tampak kuatnya kesinambungan peran TNI dan POLRI sejak masa Soekarno dan pasca-Soekarno.

Kedua, Politik Luar Negeri bebas aktif. Kebijakan politik luar negeri ini tidak pernah mengalami perubahan mengingat “bebas-aktif” lahir sebagai konsekuensi dari eksistensi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bebas menentukan sikap serta kebijakannya terhadap permasalahan internasional tanpa mengikatkan diri secara *a priori* pada satu kekuatan dunia. Keberlanjutan Politik Luar Negeri bebas aktif juga dapat dilihat dari konsistensi Indonesia secara aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa, dan permasalahan dunia demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ketiga, Misi Perdamaian Dunia. Pengiriman Kontingen Garuda sudah dimulai sejak 1957 hingga terakhir 2018 terus berlanjut sebagai peran penting Indonesia untuk mengawal perdamaian dunia. Keterlibatan Indonesia secara aktif dalam perdamaian dunia menunjukkan konsistensi dan kesinambungan kebijakan pertahanan dan luar negeri di dalam ikut menjaga ketertiban dunia. Pada masa pemerintahan Presiden SBY, kesinambungan kebijakan makin menguat dengan dibentuknya Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI dengan sarana dan prasarana yang semakin memadai. Fasilitas PMPP TNI dipusatkan di Sentul, kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diresmikan pada tahun 2012 oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon dan Presiden SBY.

Keempat, Pembentukan Komponen Cadangan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara yang disahkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo lahir sebagai keberlanjutan kebijakan pertahanan negara melalui usaha penguatan Komponen Utama, pembentukan Komponen Cadangan, dan penataan Komponen Pendukung yang berintikan semangat bela negara.

Semangat bela negara ini berintikan nasionalisme, patriotisme, dan kesatupaduan rakyat dengan TNI dan POLRI, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa di dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan keutuhan wilayah NKRI. PSDN untuk pertahanan negara merupakan kesinambungan penjabaran Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945, bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

7.2 Relevansi pemikiran Geopolitik Soekarno dalam konteks Empiris

7.2.1 Besar Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Pengaruh Total

Pengaruh dari variabel eksogen terhadap endogen dalam model SEM Pemikiran Geopolitik Soekarno terdiri dari pengaruh langsung, tidak langsung dan pengaruh total. Besarnya pengaruh langsung model Pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap pertahanan sesuai formula berikut ini.

$$\begin{aligned}
 PER &= \rho_{PER\ DEM} DEM + \rho_{PER\ TER} TER + \rho_{PER\ SDA} SDA + \rho_{PER\ MIL} MIL + \\
 &\quad \rho_{PER\ POL} POL + \rho_{PER\ KOE} KOE + \rho_{PER\ TEK} TEK + \rho_{PER\ KEP} KEP + e_{PER} \\
 \widehat{PER} &= 0,069 DEM + 0,136 TER + 0,028 SDA + 0,019 MIL + \\
 &\quad 0,106 POL + 0,030 KOE + 0,101 TEK + 0,513 KEP
 \end{aligned}$$

Kemudian besar pengaruh tidak langsung terhadap pertahanan sesuai persamaan berikut:

$$\begin{aligned}
 PER &= (\rho_{PER\ DEM} DEM \cdot \rho_{PER\ KEP} KEP) + (\rho_{PER\ TER} TER \cdot \rho_{PER\ KEP} KEP) + \\
 &\quad (\rho_{PER\ SDA} SDA \cdot \rho_{PER\ KEP} KEP) + (\rho_{PER\ POL} POL \cdot \rho_{PER\ KEP} KEP) + \\
 &\quad (\rho_{PER\ KOE} KOE \cdot \rho_{PER\ KEP} KEP) + (\rho_{PER\ TEK} TEK \cdot \rho_{PER\ KEP} KEP) + \\
 &\quad e_{PER} \\
 \widehat{PER} &= (0,052 DEM \cdot 0,513 KEP) + (0,086 TER \cdot 0,513 KEP) + \\
 &\quad (0,1150 SDA \cdot 0,513 KEP) + (0,270 POL \cdot 0,513 KEP) + \\
 &\quad (0,166 KOE \cdot 0,513 KEP) + (0,279 TEK \cdot 0,513 KEP)
 \end{aligned}$$

Pengaruh total tujuh variabel pemikiran Geopolitik Soekarno, yaitu demografi, teritorial, sumber daya alam, militer, politik, koeksistensi damai dan sains dan teknologi serta satu variabel *intervening* kepentingan nasional terhadap pertahanan mengikuti persamaan berikut:

$$\begin{aligned}
 PER = & (\rho_{PER\ DEM}^{DEM} + \rho_{PER\ TER}^{TER} + \rho_{PER\ SDA}^{SDA} + \rho_{PER\ MIL}^{MIL} + \\
 & \rho_{PER\ POL}^{POL} + \rho_{PER\ KOE}^{KOE} + \rho_{PER\ TEK}^{TEK} + \rho_{PER\ KEP}^{KEP}) + \\
 & ((\rho_{KEP\ DEM}^{DEM} \cdot \rho_{PER\ KEP}^{KEP}) + (\rho_{KEP\ TER}^{TER} \cdot \rho_{PER\ KEP}^{KEP}) + \\
 & (\rho_{KEP\ SDA}^{SDA} \cdot \rho_{PER\ KEP}^{KEP}) + (\rho_{KEP\ POL}^{POL} \cdot \rho_{PER\ KEP}^{KEP}) + \\
 & (\rho_{KEP\ KOE}^{KOE} \cdot \rho_{PER\ KEP}^{KEP}) + (\rho_{KEP\ TEK}^{TEK} \cdot \rho_{PER\ KEP}^{KEP})) + e_{PER}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \widehat{PER} = & (0,069\ DEM + 0,136\ TER + 0,028\ SDA + 0,019\ MIL + \\
 & 0,106\ POL + 0,030\ KOE + 0,101\ TEK + 0,513\ KEP) + \\
 & ((0,052\ DEM \cdot 0,513\ KEP) + (0,086\ TER \cdot 0,513\ KEP) + \\
 & (0,1150\ SDA \cdot 0,513\ KEP) + (0,1150\ SDA \cdot 0,513\ KEP) + \\
 & (0,270\ POL \cdot 0,513\ KEP) + (0,166\ KOE \cdot 0,513\ KEP) + \\
 & (0,279\ TEK \cdot 0,513\ KEP))
 \end{aligned}$$

Untuk mempermudah memahami besar pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total terhadap pertahanan, disajikan dalam bentuk Tabel 7.2. di bawah ini.

Tabel 7.2. Besar Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total Terhadap Pertahanan

Variabel	MIL	DEM	TER	SDA	POL	KOE	TEK	KEP
Besar Pengaruh Langsung								
KEP	-	0,052	0,086	0,150	0,270	0,166	0,279	-
PER	0,019	0,069	0,136	0,028	0,106	0,030	0,101	0,513
Besar Pengaruh Tidak Langsung								
KEP	-	-	-	-	-	-	-	-
PER	-	0,027	0,044	0,077	0,138	0,085	0,143	-
Besar Pengaruh Total								
KEP	-	0,052	0,086	0,150	0,270	0,166	0,279	-
PER	0,019	0,095	0,180	0,105	0,244	0,115	0,244	0,513

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

7.2.2 Interpretasi Pengaruh Tujuh Variabel Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Kepentingan Nasional terhadap Pertahanan

Bagian ini menjelaskan pengaruh langsung, tidak langsung dan pengaruh total tujuh variabel pemikiran Geopolitik Soekarno dan kepentingan nasional terhadap pertahanan.

7.2.3 Pengaruh Langsung Variabel Eksogen dan Intervening Terhadap Pertahanan

Hasil uji hipotesis secara parsial pengaruh langsung tujuh variabel Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Kepentingan Nasional terhadap Pertahanan pada model struktural kedua memiliki pengaruh dengan tanda positif dan signifikan. Interpretasi nilai estimasi parameter dapat dijelaskan sebagai berikut: pengaruh langsung terhadap pertahanan sebesar 0,069 demografi, teritorial sebesar 0,136, sumber daya alam 0,028, militer 0,019, politik 0,106, koeksistensi damai 0,030, sains dan teknologi 0,101, dan kepentingan nasional yang memiliki tanda positif dan signifikan. Pengaruh langsung kepentingan nasional, teritorial, politik, dan sains teknologi memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh variabel demografi, militer, sumber daya alam, dan koeksistensi damai. Pemanfaatan yang optimal terhadap tujuh variabel pemikiran Geopolitik Soekarno dan kepentingan nasional turut mempengaruhi kekuatan pertahanan negara. Hal ini memberikan gambaran bahwa peningkatan pertahanan negara harus memperhatikan variabel yang menjadi prioritas utama seperti kepentingan nasional, teritorial, sains dan teknologi serta politik.

Upaya peningkatan pertahanan negara dari sisi kepentingan nasional dapat dilakukan dengan mengutamakan indikator prioritas, yaitu kebijakan, pertahanan, demokrasi, ekonomi, dan sumber daya alam. Sementara itu peran yang juga penting adalah meningkatkan pemanfaatan teritorial yang meliputi aspek tata ruang geopolitik nusantara dan konsep Tanah Air. Pengembangan sains dan teknologi memiliki peran yang penting untuk memperkuat sistem pertahanan yang didukung unsur pendidikan dan meningkatkan spesifikasi akademis yang diwujudkan melalui *city of intellect*. Dukungan

politik dalam memperkuat pertahanan negara diwujudkan melalui diplomasi dan penguatan ideologi. Di sisi lain, peran demografi dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan, pembangunan manusia dan sosial budaya yang terkandung dalam aspek kependudukan.

7.2.4 Pengaruh Tidak Langsung Variabel Eksogen Melalui Intervening Terhadap Pertahanan

Pengujian hipotesis secara parsial memberikan penegasan urutan pengaruh tidak langsung tujuh variabel Pemikiran Geopolitik Soekarno melalui Kepentingan Nasional terhadap Pertahanan pada model struktural kedua yang memiliki pengaruh dengan tanda positif dan signifikan. Koefisien parameter dapat diinterpretasikan sebagai berikut: pengaruh tidak langsung demografi terhadap pertahanan sebesar 0,027, teritorial sebesar 0,044, sumber daya alam 0,077, politik 0,138, koeksistensi damai 0,085 serta sains dan teknologi 0,143 yang memiliki tanda positif dan signifikan. Interpretasi pengaruh tidak langsung sains dan teknologi, politik, serta koeksistensi damai memiliki pengaruh tidak langsung yang lebih besar dibandingkan dengan variabel demografi, teritorial, sumber daya, militer. Optimalisasi tujuh variabel pemikiran Geopolitik Soekarno dan kepentingan nasional dapat memperkuat pertahanan negara.

7.2.5 Pengaruh Total Variabel Eksogen dan Intervening Terhadap Pertahanan

Merujuk hasil uji hipotesis secara parsial menjelaskan tingkatan pengaruh total tujuh variabel Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Kepentingan Nasional terhadap Pertahanan pada model struktural kedua yang memiliki pengaruh dengan tanda positif dan signifikan. Koefisien parameter dapat diinterpretasikan sebagai berikut: pengaruh total demografi terhadap pertahanan sebesar 0,095, teritorial sebesar 0,180, sumber daya alam 0,105, militer 0,019, politik 0,244, koeksistensi damai 0,115, sains dan teknologi 0,244 serta kepentingan nasional 0,513 dengan tanda koefisien positif dan signifikan. Interpretasi pengaruh total kepentingan nasional, sains

teknologi dan politik mempunyai pengaruh total yang lebih besar dibandingkan dengan variabel demografi, teritorial, sumber daya, militer dan koeksistensi damai. Memaksimalkan pemanfaatan tujuh variabel pemikiran Geopolitik Soekarno dan kepentingan nasional akan semakin memperkuat pertahanan negara.

7.3 Pemikiran Geopolitik Soekarno sebagai Peta Jalan Desain Pertahanan Negara

Konstruksi teoritis pemikiran Geopolitik Soekarno menempatkan kebijakan pertahanan dalam cara pandang geopolitik sebagai fungsi penggunaan seluruh *instrument of national power*. Dalam kajian kualitatif dan kuantitatif terbukti bagaimana demografi, teritorial, sumber daya alam, politik, koeksistensi damai, sains dan teknologi, memiliki pengaruh langsung dengan kepentingan nasional. Berbagai faktor tersebut ditambahkan dengan kemampuan militer memiliki pengaruh langsung dengan pertahanan negara. Pada sisi lain demografi, teritorial, sumber daya alam, politik, koeksistensi damai, sains dan teknologi memiliki pengaruh tidak langsung ke pertahanan negara dengan melalui kepentingan nasional.

Pemaknaan teoritis atas pemikiran Geopolitik Soekarno memberikan gambaran terhadap peta jalan desain pertahanan negara. Pertahanan negara dapat dimaknai sebagai segala bentuk usaha dalam mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yusgiantoro menegaskan, pentingnya pertahanan sebagai upaya membangun penangkalan (*deterrent*) baik militer maupun non militer yang dibangun berdasarkan karakteristik ancaman yang semakin kompleks.²⁸³ Untuk membangun kekuatan pertahanan ini aspek geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi harus diletakkan sebagai satu kesatuan konsep, dengan menempatkan peran penting energi, teknologi, hukum dan peran aktor.

Konsep pertahanan negara tersebut harus dijabarkan dalam strategi, doktrin, postur pertahanan, hingga aspek strategis berkaitan dengan membangun industri pertahanan. Industri pertahanan

283 Yusgiantoro (2000) dan (2015). *Op. Cit.*

ini tidak hanya dirancang sebagai wahana pengembangan dan penguasaan teknologi pertahanan, kerja sama pertahanan, namun juga menyediakan jalan pengembangan industri pertahanan negara ke depan agar bangsa Indonesia dapat mandiri di dalam memenuhi alat utama sistem persenjataan yang dirancang sesuai dengan proyeksi atas ancaman dan gambaran perang masa depan.

Berdasarkan penjelasan di atas, konstruksi teoritis atas kebijakan pertahanan negara yang disusun atas cara pandang pemikiran Geopolitik Soekarno dapat memperkuat kebijakan strategis pertahanan negara. Berdasarkan hasil analisis SEM, didapatkan kebijakan yang bersifat terintegrasi dalam membangun pertahanan negara dan dijelaskan dalam Tabel 7.3. sebagai berikut.

Tabel 7.3. Integrasi Kebijakan dalam Pembangunan Pertahanan Negara

NO	DIMENSI	PENGARUH TERHADAP PERTAHANAN	KEBIJAKAN PERTAHANAN PASCA SOEKARNO
1	DEMOGRAFI	Kependudukan (nilai estimasi parameter tertinggi: 0.239), sosial dan budaya (0.184) berperan penting terhadap demografi dengan pengaruh yang signifikan terhadap pertahanan negara	Demografi dapat digunakan sebagai <i>instrument of national power</i> bagi peningkatan kekuatan pertahanan negara. Jumlah penduduk yang besar, gotong royong sebagai sistem sosial, dan <i>nation and character building</i> menjadi instrumen positif bagi pertahanan negara.
2	TERITORIAL	Tata ruang geopolitik nusantara (nilai parameter 0.610) dan konsep tanah air (0.839) merupakan indikator penting bagi teritorial dalam kaitannya dengan pertahanan negara	Tata ruang geopolitik nusantara baik dilihat dari <i>connectography</i> , koridor strategis, maupun tata letak teritorial dapat menjadi <i>instruments of national power</i> guna memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dan pertahanan negara

NO	DIMENSI	PENGARUH TERHADAP PERTAHANAN	KEBIJAKAN PERTAHANAN PASCA SOEKARNO
3.	SUMBER DAYA ALAM	Tingginya estimasi parameter untuk ekologi (0.821) menjadikan sumber daya alam dinilai sebagai instrumen penting dan signifikan untuk dijaga dalam kaitannya dengan pertahanan negara. Eksploitasi berlebihan terhadap SDA hanya dalam pertimbangan ekonomi semata, akan menggerus pertahanan negara dimasa depan.	Konstruksi pemikiran Geopolitik Soekarno menempatkan sumber daya alam dengan mementingkan aspek ekologi dibandingkan <i>state driven economic</i> . Hal ini sejalan dengan kebijakan Soekarno yang membangun kekuatan pertahanan berdasarkan kepentingan nasional, melalui diplomasi internasional.
4	MILITER	Kekuatan pertahanan negara ditinjau dari kapabilitas militer sangat ditentukan oleh industri pertahanan dengan estimasi parameter 0.582, lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan intelijen sebesar 0.4	Berdasarkan besarnya pengaruh tersebut, membangun industri pertahanan menjadi kebijakan yang sangat penting dalam memperkuat kemampuan militer untuk pertahanan.
5	POLITIK	Diplomasi memiliki nilai pengaruh lebih besar (0.414) dalam membangun pertahanan negara dibandingkan ideologi (0.35) dan hukum (0.313).	Menurut Soekarno, masa depan dunia berada di Pasifik sebagai <i>geographical pivot</i> . Pandangan ini, membuat posisi-posisi silang Indonesia menjadi daya <i>leverage</i> penting dalam diplomasi internasional dan sekaligus instrumen kebijakan di dalam membangun pertahanan negara
6	KOEKSISTENSI DAMAI	Kebijakan politik luar negeri yang tidak ekspansif memiliki pengaruh lebih besar (0.593) daripada kerja sama dan aliansi (0.474)	Politik luar negeri yang mengedepankan koeksistensi damai, tidak netral, dan berpihak pada cita-cita dunia yang bebas dari imperialisme dan kolonialisme penting untuk membangun kekuatan pertahanan negara

NO	DIMENSI	PENGARUH TERHADAP PERTAHANAN	KEBIJAKAN PERTAHANAN PASCA SOEKARNO
7	SAINS DAN TEKNOLOGI	Pendidikan (0.671) dan <i>city of intellect</i> (0.294) berperan penting untuk mewujudkan sains dan teknologi bagi pertahanan negara	Membangun kekuatan pertahanan tidak mungkin tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penataan koridor strategis perguruan tinggi berdasarkan tata letak koridor strategis sangat penting bagi pertahanan negara

Sumber: diolah oleh Peneliti (2021-2022)

Berdasarkan penjelasan Tabel 7.3. tujuh variabel pemikiran Geopolitik Soekarno merupakan instrumen peta jalan kebijakan pertahanan negara. Terhadap indikasi adanya pengaruh dunia Barat khususnya Inggris, Australia, dan Amerika Serikat terhadap persoalan di Papua, dalam perspektif pertahanan negara, maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap persoalan tersebut dapat menggunakan besarnya pengaruh tujuh variabel pemikiran Geopolitik Soekarno. Pendekatan variabel teritorial misalnya, dapat digunakan untuk mendorong kerja sama pengamanan laut di Laut Selatan Jawa guna membendung arus migrasi penduduk ilegal yang akan datang ke Australia dan berpotensi mengganggu keamanan nasional Australia. Isu *asylum seeker* merupakan hal yang sangat serius dan mendapat perhatian luas dari masyarakat dan pemerintah Australia. Atas dasar kondisi ini, maka variabel teritorial dapat digunakan sebagai *instrument of national power* bagi pemerintah Indonesia untuk menyampaikan pengaruhnya agar Australia atau pun komponen dalam negeri Australia tidak mencampuri persoalan Papua sebagaimana sering dituduhkan. Pemerintah dan masyarakat Australia termasuk pers harus memahami bahwa persoalan Papua merupakan hal yang sensitif terhadap kedaulatan teritorial Indonesia, sama halnya dengan persoalan *asylum seeker* di Australia. Dalam hal ditemukan bukti-bukti campur tangan pihak asing terhadap persoalan Papua tersebut, maka tujuh variabel geopolitik Soekarno dapat digunakan sebagai *power*.

Demikian halnya kekuatan demografi, ekonomi, dan sumber daya alam Indonesia serta tata letak geografis Indonesia atas Singapura. Semua ini memiliki pengaruh penting bagi kepentingan nasional Indonesia di dalam membangun kesepahaman dan kerja

sama yang memberikan manfaat secara berkeadilan antar kedua negara. Terhadap perjanjian *defense cooperation agreement* dan *flight information region* (FIR), misalnya. Kedua negara pada dasarnya harus mendapatkan *mutual benefit* yang berkeadilan dan tentu saja tidak mengganggu kepentingan nasional kedua negara.

Dalam hubungan antara Indonesia dan Singapura, terdapat kasus menarik yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan meminta Singapura untuk mengizinkan ekstradisi terhadap para koruptor Indonesia yang bersembunyi di Singapura dan membawa kekayaan hasil dari korupsi. Upaya ini menghadapi berbagai kendala selama bertahun-tahun. Salah satu penyebabnya akibat *instrument of national power* tidak digunakan secara efektif. Di dalam perspektif yang lebih luas hubungan perdagangan antara kedua negara nampak adanya ketidakseimbangan keuntungan bagi Indonesia. Hal ini juga ditegaskan oleh Makmur Keliat bahwa selama ini Singapura dinilai mampu menggunakan posisi geoekonomi dan geostrategisnya sebagai pengendali atas keunggulan geopolitik yang dimiliki Indonesia.²⁸⁴ Apa yang disampaikan Keliat seharusnya tidak terjadi ketika pemerintah Indonesia dapat menggunakan tujuh variabel geopolitik Soekarno terhadap kebijakan luar negeri, pertahanan, dan perdagangan. Dari aspek demografi saja misalnya, setiap tahun terdapat lebih dari 3,2 juta penduduk Indonesia yang datang ke Singapura. Aspek demografi ini sebagai *instrument of national power* dapat menjadi alat yang efektif agar Singapura memperhatikan kepentingan nasional Indonesia, misalnya di dalam mendesak pemerintah Singapura untuk memberikan kewenangan pemerintah Indonesia dalam melakukan ekstradisi para koruptor. Terhadap upaya ini tidak ada pilihan lain bagi Singapura kecuali memberikan dukungan terhadap kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Indonesia dengan memberikan kewenangan ekstradisi terhadap para koruptor yang lari ke Singapura. Jika upaya ini tidak bisa dilakukan, maka instrumen demografi beserta enam variabel lainnya dapat digunakan sebagai *power*.

Dengan penjelasan di atas, tujuh variabel geopolitik Soekarno harus disimulasikan efektivitasnya melalui kebijakan luar negeri,

284 Wawancara Makmur Keliat (2022)

pertahanan, perdagangan, dan kebijakan lainnya secara terpadu agar menjadi *power* di dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di tengah dinamika pertarungan geopolitik global.

Berkaitan dengan hubungan antara pemikiran geopolitik Soekarno dengan desain kebijakan pertahanan negara dapat dijelaskan dengan memperhatikan pengaruh setiap variabel terhadap pertahanan negara. Dari hasil analisis SEM diperoleh pengaruh kepentingan nasional terhadap pertahanan negara sebesar: kepentingan nasional 0.513; politik 0.244; sains dan teknologi 0.244; teritorial 0.180; Koeksistensi damai 0.115; SDA 0.105; Demografi 0.095; dan Militer 0.019. Melalui besaran pengaruh terhadap pertahanan ini selanjutnya dapat disusun peta jalan desain pertahanan negara. Agar peta jalan efektif diperlukan *national leadership* yang mampu menggunakan seluruh *instrument of national power* di dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Semakin besar kepentingan nasional yang bisa dicapai semakin besar pula pengaruhnya terhadap pertahanan negara.

Atas dasar korelasi di atas, Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki peran sentral mendorong kebijakan luar negeri yang terintegrasi dengan kebijakan pertahanan. Hal tersebut dilakukan dengan memperkuat kemampuan diplomasi luar negeri dan diplomasi pertahanan dengan mendorong Indonesia berperan aktif pada berbagai persoalan global. Merujuk tesis Soekarno, dunia selalu dihadapkan pada berbagai manifestasi dari kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk wajah baru. Menghadapi realitas ini, spirit KAA dan GNB sebagai ruang diplomasi internasional yang memiliki tujuan menyuarkan berbagai ketidakadilan dunia masih relevan dipergunakan untuk membangun kepemimpinan dunia di dalam menghadapi tantangan geopolitik kontemporer.

Dalam konteks itu, kaitan kepemimpinan nasional dengan peta jalan desain pertahanan negara, harus mampu menjabarkan konsep tata dunia baru dengan berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, dengan menghadirkan kembali pentingnya imajinasi geopolitik melalui adanya pernyataan tentang kepentingan nasional Indonesia dalam percaturan politik dunia. Jika hal ini dapat dilakukan, tahap selanjutnya adalah mengubah keseluruhan imajinasi tersebut menjadi kebijakan yang bersifat strategis yang mampu mendayagunakan setiap *instrument of national power* menjadi kekuatan riil yang begitu diperlukan dalam diplomasi internasional.

BAB 8

PENGARUSUTAMAAN GEOPOLITIK SOEKARNO DALAM PERTAHANAN NEGARA

8.1 Pengaruh dan Relevansi Geopolitik Soekarno

Tradisi intelektual pemikiran Geopolitik Soekarno tidak terlepas dari proses dialektika. Setiap pengalaman dalam perjalanan hidupnya dijadikan sebagai pembelajaran hidup menjadi nilai-nilai dan membawa pengaruh pada pemikiran dan tindakan Soekarno. Penjajahan yang terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa di Asia Afrika oleh Eropa dan Amerika Serikat menjadi latar sosial geopolitiknya. Soekarno mengalami langsung dan merumuskan seluruh teori perjuangan dan menjalankannya bagi kemerdekaan Indonesia dan bangsa-bangsa Asia Afrika. Kesadaran sebagai bangsa terjajah membentuk alam pikir pemikiran Geopolitik Soekarno yang anti terhadap imperialisme dan kolonialisme. Soekarno dengan konsep geopolitiknya mengonstruksi tata dunia baru yang mengedepankan kemanusiaan, Internasionalisme, keadilan dan koeksistensi damai.

Kritik Soekarno terhadap Geopolitik Barat yang ekspansionis dan eksploitatif yang menjadi akar pertarungan hegemoni dunia atas perbedaan warna ideologi mendorong sikapnya untuk mengedepankan koeksistensi damai dalam konsep geopolitiknya. Ideologi pemikiran Geopolitik Soekarno bertumpu pada ideologi Pancasila sebagai lifeline dunia dan mengistilahkan geopolitiknya sebagai *Geografische Constellatie*. Gagasan pemikiran Geopolitik Soekarno berangkat dari mazhab Geopolitik Kritis dan perspektif analisisnya bersifat siklus dialektik dari mikro-meso-makro. Soekarno memberi konsep geopolitik

sebagai satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan tekad atau ideologis dan satu kesatuan cita-cita sosial (*social consciousness of man*). Adapun ruang lingkup geopolitiknya mencakup demografi, teritorial, SDA, militer, politik, koeksistensi damai, sains dan teknologi. Inilah *body of knowledge* pemikiran Geopolitik Soekarno dengan tujuh variabel geopolitiknya yang pemikirannya melampaui pemikir geopolitik klasik dan kontemporer. Kekhasan pemikiran Geopolitik Soekarno bercorak kritis sebagai *progressive geopolitical coexistence* menjadi *alternative of view* terhadap pemikiran geopolitik Amerika, Eropa, dan Asia.

Pada konteks perjuangan kepentingan nasional, pengaruh pemikiran Geopolitik Soekarno memiliki relevansi dalam pertahanan, di antaranya Pembebasan Irian Barat; Peta Jalan Koridor Pembangunan Nasional; Peta Jalan Koridor Kepentingan Nasional; Pelembagaan Pertahanan Negara: Darat, Laut, dan Angkasa; Tingginya Indeks Pertahanan Negara dan Kemandirian Pertahanan Negara. Sementara itu, siklus pemikiran Geopolitik Soekarno menggambarkan pertautan pemikiran Geopolitik Soekarno dengan kepentingan nasional, diplomasi, dan pertahanan negara.

Pengaruh pemikiran Geopolitik Soekarno terhadap dunia, diantaranya memproyeksikan Pasifik sebagai Pivot Dunia yang saat ini terbukti dan relevan; Pancasila sebagai *Lifeline* Tata Dunia Baru, KAA, GNB, dan Kemerdekaan Bangsa-bangsa Asia Afrik; Konsistensi pada pandangan bahwa dunia harus bebas dari penjajahan; Dan proyeksinya tentang perubahan konstelasi geopolitik dunia dari bipolar menjadi multipolar; Serta perubahan struktur Dewan Keamanan PBB.

Dalam konteks kekinian, relevansi pemikiran Geopolitik Soekarno merupakan *alternative of view* dalam melihat pertahanan negara dan kondisi dunia saat ini yang diwarnai pertarungan geopolitik kontemporer. Pertarungan ini bersifat dinamis dan kompleks dalam dunia multipolar. Meskipun demikian mengingat karakter pertarungan hegemoni dunia merupakan manifestasi baru penjajahan, hanya lain bentuk dan coraknya, maka pemikiran Geopolitik Soekarno tetap relevan. Pemikiran Geopolitik Soekarno ini berdasarkan lima ciri pokok: Pertama, didasarkan pada ideologi Pancasila. Kedua, bertujuan membangun tata dunia baru.

Ketiga, berdasarkan prinsip bahwa dunia akan damai apabila bebas dari imperialisme dan kolonialisme. Keempat, pentingnya

menggalang solidaritas bangsa-bangsa berdasarkan prinsip koeksistensi damai. Kelima, berorientasi pada struktur dunia yang demokratis, sederajat dan berkeadilan.

8.2 Pengarusutamaan Geopolitik Soekarno bagi Pertahanan Negara

Pemikiran Geopolitik Soekarno menjadi fondasi dasar kebijakan luar negeri dan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, internasionalisme, keadilan dan koeksistensi damai dengan melibatkan diri secara aktif pada berbagai persoalan dunia. Proyeksi pemikiran Geopolitik Soekarno tentang pentingnya reformasi dewan keamanan PBB agar mencerminkan kekuatan baru yang bersifat multipolar melampaui zamannya dan tetap relevan dalam konstelasi dunia saat ini. Selanjutnya tujuh variabel pemikiran Geopolitik Soekarno dapat menjadi peta jalan dalam kerangka mengkaji dan melahirkan kebijakan bagi pertahanan negara.

Pembuktian tujuh variabel Geopolitik Soekarno sebagai instrumen bagi kepentingan nasional dan pertahanan negara dapat dilihat dari hasil Uji SEM. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel pemikiran Geopolitik Soekarno yang paling berpengaruh terhadap kepentingan nasional adalah sains dan teknologi, politik dan koeksistensi damai. Sementara itu variabel pemikiran Geopolitik Soekarno yang paling berpengaruh terhadap pertahanan negara adalah sains dan teknologi dengan politik.

Adapun ditinjau dari pengaruhnya terhadap pertahanan, tujuh variabel pemikiran Geopolitik Soekarno secara berurutan sebagai berikut:

- a. Variabel Demografi (DEM), indikator kependudukan (KEP) mendapatkan prioritas tertinggi (0.239);
- b. Variabel Teritorial (TER), indikator Tata Ruang Geopolitik Nusantara (TTR) mendapatkan prioritas tertinggi (0.610);
- c. Variabel Sumber Daya Alam (SDA), Indikator Ekologi (EKO) mendapatkan prioritas tertinggi (0.821);
- d. Variabel Militer (MIL), indikator Kekuatan Alutsista (ALT) mendapatkan prioritas tertinggi (0.582);

- e. Variabel Politik (POL), indikator Diplomasi (DIP) mendapatkan prioritas tertinggi (0.414);
- f. Variabel Koeksistensi Damai (KOE), indikator Tidak Ekspansif (TEK) mendapatkan prioritas tertinggi (0.593); dan
- g. Variabel Sains dan Teknologi (TEK), indikator Pendidikan (PND) mendapatkan prioritas tertinggi (0.671).

8.3 Rekomendasi Akademis dari Pemikiran Geopolitik Soekarno

Rekomendasi akademis dari penelitian diskursus pemikiran Geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara, antara lain:

- a. Pemikiran Geopolitik Soekarno yang dinyatakan sebagai *Progressive Geopolitical Coexistence* melalui tujuh variabel geopolitik kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah untuk diterima sebagai dasar pembentukan teori Geopolitik Soekarno. Pemikiran Geopolitik Soekarno ini merupakan warisan Geopolitik Soekarno bagi *lifeline* bagi Indonesia dan Dunia.
- b. Pemikiran Geopolitik Soekarno tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan geopolitik, di antaranya:
 - 1. Genealogi pemikiran Geopolitik Soekarno berdasarkan fase perkembangan geopolitik, ilmu hubungan internasional, dan kajian pertahanan negara;
 - 2. Metode pengukuran Indeks pemikiran Geopolitik Soekarno sebagai instrumen perumusan kepentingan nasional dalam membangun kekuatan pertahanan negara;
 - 3. Strategi, doktrin, dan postur pertahanan berdasarkan pemikiran Geopolitik Soekarno; dan

4. Konstelasi geopolitik Perang Dunia II: pertarungan hegemoni bipolar di Asia Timur dan relevansinya dengan kedaulatan negara Indonesia.

8.4 Rekomendasi Praktis dari Pemikiran Geopolitik Soekarno

Rekomendasi praktis dari penelitian diskursus pemikiran Geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara, antara lain:

- a. Pembangunan pertahanan negara harus mengedepankan pemahaman Geopolitik. Hal ini dapat dilakukan oleh Kementerian Pertahanan RI (Kemhan RI);
- b. Pemikiran Geopolitik Soekarno dipergunakan untuk merumuskan kembali kebijakan luar negeri dan pertahanan guna menjawab posisi politik yang diambil Indonesia di dalam memperjuangkan kepentingan nasional, khususnya bagi Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) dan Kemhan RI;
- c. Kementerian Pertahanan RI dan Universitas Pertahanan RI (Unhan RI) dapat merintis kajian dan merumuskan kembali strategi, doktrin, dan postur pertahanan berdasarkan Pemikiran Geopolitik Soekarno dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dengan membangun kekuatan pertahanan negara berdasarkan proyeksi ancaman bangsa pada saat ini dan di masa yang akan datang;
- d. Perlu adanya fungsi strategis dalam struktur lembaga kepresidenan yang dapat mengintegrasikan kebijakan luar negeri dan pertahanan. Fungsi-fungsi tersebut salah satunya dapat dikaji oleh Kementerian Kesekretariatan Negara dan Sekretaris Kabinet RI;
- e. Kementerian Pertahanan RI dapat melakukan kajian komprehensif terhadap pentingnya Undang-Undang tentang Tata Ruang Geopolitik Nusantara yang memuat koridor strategis pertahanan dan ketahanan nasional;

- f. Pentingnya cara pandang geopolitik Indonesia dalam relevansinya dengan kepentingan nasional dan pertahanan negara untuk dimasukkan ke dalam kurikulum Ilmu Pertahanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik. Hal ini dapat diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Kementerian Pertahanan RI, dan Lemhannas RI;
- g. DPR RI bersama dengan pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk menetapkan kebijakan politik anggaran yang berkaitan dengan pertahanan dalam cara pandang geopolitik. Kebijakan politik anggaran tersebut harus bersifat rahasia dan sangat rahasia, yang digunakan sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan bernegara dan kepentingan nasional Indonesia.

EPILOG

AKTUALISASI GEOPOLITIK BUNG KARNO

Saya menyambut baik diterbitkan buku “Geopolitik Bung Karno *Progressive Geopolitical Coexistence*” oleh Dr. Ir. Hasto Kristiyanto M.M., IPU. Buku ini merupakan rangkuman dari pengalaman Penulis dalam menekuni ajaran Bung Karno selama ini, terutama cara pandang Soekarno terkait dengan dinamika geopolitik. Dari pengalaman praktis tersebut, diperkokoh dengan menggunakan pisau analisa Ilmu Pertahanan yang ditekuni selama Program Pascasarjana Doktorat (S3) di Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI), Penulis berhasil menjabarkan Geopolitik Soekarno (GPS) sebagai konsepsi yang relevan bagi pembangunan nasional. Secara umum, buku ini akan melengkapi pemahaman mengenai geopolitik, ilmu bumi politik yang terus berkembang, mengaitkan politik dengan teritorial/geografis pada tataran lokal dan internasional. Buku ini merupakan bentuk lain dari disertasi penulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh umum, merupakan karya tulis yang perlu diapresiasi dalam rangka sosialisasi ajaran Bung Karno dan GPS pada khususnya.

Berdasarkan sudut pandang Bung Karno, geopolitik tidak hanya ilmu yang membahas fenomena politik dalam tata pergaulan internasional, tetapi juga melengkapi teori kebangsaan tentang pentingnya persatuan antara rakyat dengan tanah airnya. Bung Karno mampu menyintesis geopolitik sebagai pengetahuan tentang keadaan yang berkaitan dengan falsafah bangsa, budaya, adat-istiadat, cara hidup suatu bangsa, hingga menyentuh kebijakan strategis berkaitan dengan pilar politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan

keamanan. Hal ini telah dibuktikan Dr. Ir. Hasto Kristiyanto M.M., IPU dalam tulisan disertasinya dengan menggunakan pendekatan model kualitatif dan model kuantitatif bahwa benar GPS identik dengan Geopolitik Indonesia sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya.

Terhadap dirinya sendiri, ruang lingkup GPS oleh Penulis dikonstruksikan terdiri dari tujuh variabel yaitu teritorial, demografi, sumber daya alam, militer, politik, koeksistensi damai, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Dinamika GPS dapat direfleksikan dengan membentuk konsepsi Trisakti yaitu Indonesia yang berdaulat di bidang politik, Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari) di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Perjalanan GPS juga dapat ditelusuri lewat sejarah kemerdekaan bangsa antara lain dalam pidato Bung Karno tentang Indonesia menggugat (1930), lahirnya Pancasila (1 Juni 1945), penetapan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Visi GPS juga tampak dari pemahamannya terhadap arah masa depan, melalui apa yang disebut *strategic thinking*. Bung Karno seorang pemimpin yang berpikir strategis. Terbukti pada tahun 1930, ia sudah mampu memperkirakan kemerdekaan bangsa Indonesia akan terjadi di tengah-tengah Perang Pasifik.

Dalam Pertahanan Negara (Hanneg), tampak jelas pemikiran GPS pada waktu pembebasan Irian Barat (Operasi Trikora) dan Dwikora. GPS juga tercermin pada saat ini dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) untuk membangun kekuatan Hanneg dalam rangka menghadapi ancaman (threat). Jakumhanneg yang terus diperbarui setiap lima tahun sekali, kemudian diuraikan dalam dokumen Produk Strategis Hanneg yang terbagi dalam lima buku Doktrin Hanneg, Postur Hanneg, Strategi Hanneg, Buku Putih Hanneg, dan *Essential Forces* (EF) TNI. Dari pandangan GPS tersebut, pembangunan kekuatan Hanneg mutlak diperlukan, namun dalam realisasinya perlu dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi negara Indonesia. Terhadap lingkungannya, ruang lingkup GPS oleh Penulis dikonstruksikan dalam pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal dengan "*To Build the World Anew* (Membangun Tata Dunia Baru) untuk menunjukkan realitas ketidakadilan yang dialami sebagian besar bangsa-bangsa di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Dalam berbagai pidato di konferensi

internasional, antara lain pada Konferensi Asia-Afrika (KAA), Gerakan Non-Blok (GNB), *Conference of The New Emerging Forces* (CONEFO), yang membawa dampak besar bagi perubahan geopolitik dunia. Di tangan Bung Karno, solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin, disatukan menjadi kekuatan alternatif bagi tata dunia saat itu yang terbagi pada dua blok besar, yakni Blok Barat di bawah Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah Uni Soviet. GPS menegaskan persamaan hak negara-negara berkembang dengan negara maju.

Sebagai puncak dari dinamika GPS, Bung Karno meresmikan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) pada tanggal 20 Mei 1965 dan memberikan kuliah perdana pada peserta Kursus Reguler Angkatan Pertama (KRA-1) tentang geopolitik. Seiring dengan perkembangan Lemhannas, Geopolitik Indonesia pada tataran strategik kemudian dikenal sebagai Wawasan Nusantara. Selanjutnya tujuh variabel dari GPS temuan Dr. Ir. Hasto Kristiyanto M.M., IPU pada saat ini lebih sebagai Geostrategi Indonesia, dikenal dengan Ketahanan Nasional (Tannas) yang mencakup modal dasar/statik (geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam) dan modal dinamik (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan). Dalam era revolusi industri, tidak dapat dimungkiri peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Demikian juga, aspek hukum menjadi penting untuk mendukung proses demokratisasi di Indonesia. Kedua variabel ini sejalan dengan dinamika GPS yang ditemui dalam buku ini.

Untuk variabel (aspek) pertahanan, Ilmu Pertahanan mencakup berbagai disiplin ilmu (multidisiplin) yang mempelajari pembangunan penangkalan (*deterrent*), baik militer maupun nonmiliter, untuk menghadapi ancaman (*threat*) militer, nonmiliter dan hybrid. Ancaman dapat berbentuk aktual dan potensial (tantangan, hambatan, dan gangguan) terhadap kedaulatan negara, kesatuan negara dan keselamatan bangsa. Pergeseran paradigma global sangat berpengaruh terhadap karakteristik ancaman, dan erat kaitannya dengan perkembangan geopolitik, geostrategi, geoekonomi hingga ke geolingkungan. Dr. Ir. Hasto Kristiyanto M.M., IPU yang telah menyelesaikan program doktor dengan predikat *summa cum laude*, telah dapat menjelaskan dengan baik dan lengkap “Geopolitik Bung Karno *Progressive Geopolitical Coexistence*”, sehingga sudah

sepatutnya buku ini menjadi pegangan para pembaca tidak hanya pada level strategis, tetapi juga pada level taktis dan operasional.

Oleh karena itu buku ini menarik untuk dibaca oleh semua kalangan, dari praktisi sampai akademisi, dari masyarakat sipil sampai militer, terlebih untuk generasi muda bangsa. Selain menjadi referensi dalam pengembangan Ilmu Pertahanan, buku ini juga dapat menambah literatur yang ada dalam geopolitik, khususnya geopolitik yang berlandaskan ajaran Bung Karno. Akhirnya, saya ucapkan selamat atas diluncurkannya buku ini. Harapan untuk kita semua, dapat memahami dan mengambil manfaat dari pemikiran dalam buku ini, serta melaksanakannya dalam upaya meningkatkan cinta kita kepada bangsa dan negara ini.

Jakarta, Mei 2022

Prof. Purnomo Yusgiantoro, Ir., M.Sc., M.A., Ph.D.

Pendiri & Guru Besar Universitas Pertahanan
Republik Indonesia (Unhan RI)
Guru Besar Tetap Institut Teknologi Bandung (ITB)
Senior Advisor Kepala Staf Presiden (KSP)
Founder Purnomo Yusgiantoro Center (PYC)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulgani, Roeslan. (1956). *Mendajung dalam Taufan: Ichtisar dan Ihtiar Politik Luar Negeri Indonesia*. Djakarta: Endang.
- Adams, Cindy. (2011). *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat*. Yogyakarta: Yogyakarta Media Pressindo.
- Alfandi, Widoyo. (2002). *Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Politik dan Geopolitik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Almond, Gabriel A. (1969). *Political Theory and Political Science*. New York: McGraw Hill.
- Andrew, Heywood. (1997). *Politics*. London: Macmillan Press.
- Bahar, Sastroedjo dan Ananda B. Kusuma. (1995). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Bartstra, J. S. (1880/1906). *Geschiedenis van het moderne imperialisme*. Haarlem : De Erven F. Bohn.
- Bauer, Otto. (2015). *Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie*. Scholar's Choice.
- Bigo, Didier. (1996). *Polices en reseaux: l'expérience européenne*. Paris: Presses de sciences Po.
- _____. (2006). *“Globalized (in) Security: the Field and the*

- Ban-opticon*". In Didier Bigo dan Anastassia Tsoukala (eds.). *Illiberal Practices of Liberal Regimes: the (in) security games*. Paris: L'Harmattan.
- Blache, Paul Vidal de la. (1926). *Principles of Human Geography*. Michigan: H. Holt.
- Blum, William. (2002). *Rogue State: A Guide to the World's Only Super Power*. London: Zed Books.
- _____. (2003). *Méditations Pascallienes, 2nd ed.* Paris: Seuil.
- Buckingham, Walters. (1961). *Automation: its impact on business and people*. New York : Harper.
- Burchill, Scott. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. New York: Palgrave Macmillan.
- Buzan, Barry. (1991). *People, State, And Fear: A Agenda for International Security Studies in The Post Cold Era 2nd edition*. London: Harvester Whatsheaf.
- Chris Alden, Sally Morphet and Marco Antonio Vieira. (2010). *The South in World Politics*. Palgrave Macmillan.
- Cohen, Saul Bernard. (2003). *Survey of Geopolitics. In Geopolitics: The Geography of International Relations*. London: Rowman and Littlefield Publishers.
- Crouch, Harold. (1978). *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- Dahm, Bernard. (1987). *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES.
- Defarges, Philippe Moreau. (2005). *Introduction à la géopolitique*. Paris: Édition du Seuil.
- _____. (2008). *Dechiffrez les règles du jeu planétaire, La Géopolitique pour les nuls*, Paris: Édition du Seuil.
- Djalal, Dino Patti. (1996). *The geopolitics of Indonesia's maritime territorial policy*. Jakarta : CSIS.
- Djamhari, Saleh A. (1997). *Sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Dorpalen, Andreas. (1984). *The World of General Haushofer*. Farrar & Rinehart, Inc., New York.

- Dugin, Alexander (2012). *The Fourth Political Theory*. Arktos Media.
- Farole, Thomas. (2011). *Special Economic Zones in Africa Comparing Performance and Learning from Global Experience*. The World Bank.
- Ferdinand, A. (2006). *Structural Equation Modelling Dalam Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Flint, Colin. (2006). *Introduction to Geopolitics*. New York: Routledge.
- Foley, Richard. (2007). Plato's undividable line contradiction and method in Republic VI. *Journal of the History of Philosophy*, 46 (1) 1-23.
- Fukuyama, F. (1992). *The End of History and The Last Man*. New York: Free Press.
- Gie, The Liang. (1987). *Pengantar Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi.
- Groom, A.I.R. and Margot Light. eds. (1994). *Contemporary International Relations: A Guide to Theory*. London and New York. Pinter Publisher.
- Guillard, Achille. (1885). *Éléments de Statistique Humaine ou Démographie*. Paris: Guillaumin et Cic Libraires.
- Harsono, Ganis. (1985). *Cakrawala Politik Era Soekarno*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Held, David, Hall, Stuart dan McGrew, Tony. (1992). *Modernity and Its Futures (Understanding Modern Societies)*. Cambridge: Polity Press.
- Hough, Peter. (2004). *Understanding Global Security*. London: Routledge.
- Isak, Joesoef dan Keefer, Edward C. (Ed.). (2008). *Dokumen CIA Melacak Penggulingan Soekarno dan Konspirasi G30S 1965*. Jakarta: Hasta Mitra, hal. 175-179.
- Kahin, A R dan George McT Kahin. (1995). *Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia*. New York: New Press.
- Kapitsa, M.S., Maletin N.P. (2017). *Soekarno: Biografi Politik*. Ja-

karta: Ultimus.

Kaplan, D. (2000). *Structural Equation Modeling: Foundations and Extensions*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Karim, Silmy. (2014). *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Kasenda, Peter. 1991. *90 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Simponi.

Kauppi, Mark V, dan Viotti, Paul R. (1999). *International Relations Theory, 5th ed.* USA: Pearson Education, Inc.

Kautsky, Karl. (1920). *Der Weg Zur Macht*. Bloch, Germany.

_____. (1920). *Terrorism and Communism: A Contribution to the Natural History of Revolution*. Cornell University Library.

Kelly, Phil, (2006). *A Critique of Critical Geopolitics*. United Kingdom: Routledge Taylor dan Francis Group, LLC, pp. 24-53.

Khanna, Parag. (2016). *Connectography: Mapping the Future of Global Civilization*. New York: Random House.

_____. (2019). *The Future is Asian*. Simon dan Schuster.

Khosirun, Irfan, dkk (2013). *Pijakan untuk Kemandirian Alutsista: 30 Tahun*. Bandung: PT. Pindad.

Kjellén, Rudolf. (1916). *Staten som lifesform*. Stockholm : Gebers.

Klinken, Gerry van (2010). *5 Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen*. Yogyakarta : LkiS.

Kristiyanto, Hasto. (2021). *Penelitian Pendahuluan: Kognisi Masyarakat tentang Soekarno*. Jakarta: Laporan Penelitian UN-HAN dan Riset.

Kulski, Wladyslaw W. (1959). *Peaceful Coexistence: An Analysis of Soviet Foreign Policy*. Chicago: Henry Regnery Company.

Lacoste, Yves. (1976). *La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre*. Paris: Maspero.

Lashmar, Paul dan Oliver, James. (1999). *Britain's Secret Propaganda War 1948-1977*. Sutton Pub Ltd.

Leander, Anna. (2007). *Thinking Tools: Analyzing Symbolic Power and Violence*. In Audie Klotz dan Deepa Prakash (eds.). *Qualitative Methods in International Relations*, London: Palgrave.

- Mabes TNI. (2000). *Sejarah TNI Jilid III 1960-1965*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi TNI.
- Mahan, Alfred T. (1890). *The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783*. Boston: Little Brown and Company.
- Mahbubani, K. (2009). *The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East*, Public Affairs.
- _____. (1985/1973). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfre A. Knopf.
- Miller, David. (2012). Territorial rights concept and justification. *Political Studies*, 60(2) 252-268.
- Mukmin, Hidayat. (1991). *TNI dalam Politik Luar Negeri. Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*. Jakarta: Pusataka Sinar Harapan.
- Nasution, A. H. (1967). *Menegakkan Keadilan dan Kebenaran*. Seruling Masa.
- Notonagoro. (1951). *Pantja Sila, Dasar Fllsafat Negara Republik Indonesia*. Kementerian Penerangan R.I.
- Oltmans, Willem. (2001). *Dibalik Keterlibatan CIA. Bung Karno Dikhianati*. Jakarta: Aksara Karunia.
- Ó'Tuathail, Gearoid. (1996). *Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space*. London: Routledge.
- Ó'Tuathail, G., Simon Dalby and Paul Routledge (1998). *The Geopolitics Reader*. Routledge.
- Prasetya, Sigit Aris. (2017). *Dunia dalam Genggaman Bung Karno*. Tangerang Selatan: Imania.
- _____. (2019). *Dunia dalam Genggaman Bung Karno 2*. Tangerang Selatan: Imania.
- Prashad, Vijay. (2007). *The Darker Nations: A People's History of the Third World*. New York and London: The New Press.
- Priyono, J dan Yusgiantoro, P (2017). *Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi*. Universitas Pertahanan (UNHAN) Press, Bogor.
- Ratzel, Friedrich. (2020). *The History of Mankind*. Hanse Book.
- Renan, Ernest. (1994). *What is a Nation? (1882)*. UK: Routledge.
- Ricklefs, M.C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakar-

ta: Serambi Ilmu Semesta.

Rosidi, Ajip. (2008). *Hidup Tanpa Ijazah: Yang Terekam dalam Kenangan Otobiografi Ajip Rosidi*. Pustaka Jaya.

Roxburgh, Ellis. (2015). *The Chinese Empire (Great Empires)*. London, United Kingdom: Wayland Publishers.

Rush, James R. (2014). "Soekarno: Anticipating an Asian Century". *In Makers Of Modern Asia (Ramachandra Guha, Ed.,)*. Cambridge, Massachusetts, London: Belknap Press Of Harvard University Press.

Salam, Moch Faisal. (2004). *Peradilan militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Sempa, Francis P. (2002). *Geopolitics: From the Cold War to the 21st Century*. New Brunswick: Transaction Publishers.

Sengupta, Anita. (2005). *Russia, China and Multilateralism in Central Asia*. New Delhi: Shipra Publications.

_____. (2009). *Heartlands of Eurasia*. Lexington Books.

_____. (2016). *Logistical Spaces – IV, The Asian Paradigm*. Mahanirban Calcutta Research Group: Policies and Practices 79.

Setiyono, Budi dan Triyana, Bonnie. (2014). *Revolusi belum selesai: kumpulan pidato Presiden Soekarno, 30 September 1965, pelengkap Nawaksara*. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta.

Shryock, HS. & Siegel, JS. (1976). *The Methods and Materials of Demography*. San Diego: Academic Press.

Sianturi, S.R. (2010). *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Sophiaan, Manai. (2008). *Kehormatan bagi yang Berhak. Bung Karno Tidak terlibat G30S/PKI*. Jakarta: Visimedia.

Soebandrio. (2019). *Meluruskan Perjuangan Irian Barat*. Jakarta: Hasta Mitra.

Soekarno. (1947). *Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Usaha Penerbitan Guntur.

_____. (1961). "Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat!". Jakarta: Departemen Penerangan RI.

- _____. (1963). *Sarinah (1947). Cetakan Ketiga*. Panitia Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Soekarno.
- _____. (1964). *Di bawah Bendera Revolusi*. Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- _____. [Pemrakarsa]. (1967). *Mustika Rasa: Resep Masakan Indonesia Warisan Soekarno*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- _____. (1986). *Ilmu dan Perjuangan*. Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno, Jakarta.
- _____. (1989). *Indonesia Menggugat*. Jakarta: [Haji Masagung](#).
- _____. [Dikumpulkan Penerbit]. (1989). *Soekarno dan ABRI: Kumpulan Pidato Bung Karno di hadapan ABRI*. Jakarta: PT. Inti Idayu Press dan Penerbit Yayasan Masagung.
- _____. (2005). *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- _____. (2005). *Dibawah Bendera Revolusi Jilid II*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- _____. (2010). *Bung Karno: Masalah Pertahanan-Keamanan*. Jakarta: Grasindo.
- Soerianegara, I. (1977). *Pengelolaan Sumber Daya Alam bagian I*. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor
- Spang, Christian W. (2006). *Japanese-German Relations, 1895-1945*. London: Routledge.
- Stilz, Anna (2011). Nations, States, and Territory. *Ethics*, Vol. 121(3), pp. 572-601.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan RdanD*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, S, et.al. (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sunardi, R.M. (2004). *Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Kuatemit Adidarma.
- Suradinata, Ermaya. (1997). *Paradigma Geopolitik*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Suradinata, Ermaya dan Alex Dinuth (Eds). (2001). *Geopolitik dan*

- Konsep Ketahanan Nasional: Pemikiran Awal, Pengembangan dan Prospek*. Jakarta: [Paradigma Cipta Yastigama](#).
- Suryadinata, Leo. (2019). *Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. (1995). *Membangun peradaban Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sutarto. (2006). *Prabu Kresna di Pindad*. Bandung: PT. Pindad (Persero).
- Tan, Andrew. (2004). *Force Modernisation trends in South East Asia*. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies.
- Theodore A. Couloumbis and James H. Wolfe (1990). *Introduction to international relations: power and justice*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Tilman, Robert O. (2019). *Southeast Asia And The Enemy Beyond: Asean Perceptions Of External Threats*. London: Routledge.
- Toer, Koesalah Soebagyo. (2019). *Kronik Abad Demokrasi Terpimpin Dari Manifes Politik sampai Naiknya Soeharto (5 Juli 1959-11 Maret 1967)*. Biora: Pataba Press.
- Umar, Ahmad Rizky Mardhatillahm. (2014). "Book Review: *The National Interest in International Relations Theory*", in Indonesian Journal of International Studies (IJIS) Vol.1 No.2 Desember 2014. hh. 185-190.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Utami, Silmi Nurul. (1 April 2021). "Asas-Asas Hubungan Internasional", (Seráfica Gischa, Ed.) Kompas.com.
- Vego, Milan. (2009). *Naval Classical Thinkers and Operational Art*. Rhode Island: Naval War College.
- Viotti, P.R. dan Mark V.K. (1999). *International Relation Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. Boston and London, Ally and Bacon.
- Wally, John Manangsang. (2018). *Dunia dalam Genggaman Papua sebuah Fenomena Geopolitik Global*. Jayapura: Yayasan Gratia Papua Jayapura.
- Walpole, R. E. (1992). *Pengantar Statistika, Terbitan ke-3*. Jakarta:

PT. Gramedia Pustaka Utama.

Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*. New York: McGraw Hill.

_____. (2010). *Theory of International Politics*. Waveland Press.

Widjajanto, Andi. (2022). *RTD Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negara*. Kamis, 24 Februari 2022.

Williams, Michael C. (2007). *Culture and Security: symbolic power and the transformation of the international security order*. London: Routledge.

Yazid, M.N. (2014). *The Indonesian Economic Development after 1965: Developmental State, Radical Politics dan Regional Co-operation*. SOP Transaction on Economic Research, 1 (3).

Yusgiantoro, Purnomo. (2000). *Ekonomi Energi: Teori dan Praktik*. Jakarta: LP3ES.

_____. (2000). *Ekonomi Pertahanan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

_____. (2015). *Sistem Pertahanan Negara*. Jakarta: UNHAN.

_____. (2017). *Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi*. Universitas Pertahanan (Unhan) Press, Bogor.

DISERTASI

Chairil, Tangguh. (2016). *Skenario Industri Pertahanan Indonesia 2029: Tantangan Menuju Kemandirian* (Tesis, Magister). Program Studi Kajian Ketahanan Nasional. Universitas Indonesia.

Cornejo, Robert M. (1999). *When Soekarno Sought the Bomb: Indonesian Nuclear Aspirations in the mid-1960s* (Thesis, Master). Naval Postgraduate School, Monterey, California, Amerika Serikat.

Djalal, Dino Patti. (1990). *Geopolitical Concept and Maritime Territorial Behavior in Indonesian Foreign Policy* (Thesis Master of Arts). Political Science Department, Simon Fraser Univer-

sity.

Höhn, Karl Hermann. (2011). *Geopolitics and the Measurement of National Power*. (Dissertation Doctor). Universität Hamburg.

JURNAL

Amr G. E. Sabet. (2015). Geopolitics of a changing world order Contemporary. *Arab Affairs* Vol. 8, No. 2 (April-June), pp. 163-180 (18 pages), University of California Press.

Anggoro, Kusnanto (2017). Perubahan Geopolitik dan Ketahanan Nasional: Sebuah Penjelajahan Teoretikal. *Jurnal Lemhannas RI*, 5(1): 5-17. Retrieved from <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/130>, diakses pada 18 Juli 2021.

Aurora A.C. Teixeira and Mariana Dias. (2013). The importance of geopolitics in firms' international location decisions: The Polish case. *Communist and Post-Communist Studies* 46 (2013) 79–93.

Arora, B. D. (1975). Pakistan's Role in Indian-Indonesian Relations During the Soekarno Era. *Sage Journals*.

Benedict R. O' G. Anderson (2002). Bung Karno and the Fossilization of Soekarno's Thought. *Indonesia*, Vol. 074, October 2002. Cornell University Southeast Asia Program.

Clinton, David W. (1986). "The National Interest: Normative Foundations", in *The Review of Politics*. Vol. 48 No.4 1986. pp. 495-519, DOI: <https://doi.org/10.1017/S0034670500039656>, diakses pada 7 Agustus 2021.

Dalby, Simon. (1990). "American Security Discourse: The Persistence of Geopolitics", *Political Geography Quarterly*, vol. 9(2), pp. 171-188, DOI: 10.1016/0260-9827(90)90017-5., diakses pada 7 Agustus 2021.

_____. (2003). Calling 911: Geopolitics, Security and America's New War. *Geopolitics* 8(3):61-86.

Feith, Herbert. (1968). Suharto's Search for a Political Format. *Indonesia*. 6 (6): 88–105. Cornell Paper.

Hendrajit *et al.* (2018). "Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional dari Heartland ke Asia Pasifik; Apa Geopolitik Leverage Indo-

- nesia?”. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 3 (6), pp. 721-732, retrieved from <http://journal.unas.ac.id/populis/article/download/469/369>, diakses pada 20 Juli 2021.
- Laksmana, A. Evan. (2011). “The Enduring Strategic Trinity: explaining Indonesia’s Geopolitical Architecture”. *Journal of the Indian Ocean Region*, volume 7, no. 1, pp. 95-116, doi: 0.1080/19480881.2011.587333, diakses pada 4 September 2021.
- Leander, Anna. (2002). “Do we really need reflexivity in IPE? Bourdieu’s two reasons for answering affirmatively (contribution to a colloquium on Pierre Bourdieu)”. *Review of International Political Economy*, vol. 9(4), pp. 601-609. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/4177440>, diakses pada 1 September 2021.
- Lenin, Vladimir. (1965). *Lenin’s Collected Works, 4th English Edition*. Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 31, pp 213-263.
- Mackinder, HJ. (1904). “The geographical *pivot* of history”. *The Geographical Journal*, vol. 23, pp. 421-437, doi: 10.2307/1775498, diakses pada 29 September 2021.
- Moolakkattu, John S. (2009). Robert W. Cox and Critical Theory of International Relations. *International Studies* 46(4) 439-456.
- Nincic, Miroslav. (1999). “The National Interest and Its Interpretation”, *The Review of Politics Vol. 61* No. 1 1999 pp. 29-55, DOI: <https://doi.org/10.1017/S0034670500028126>, diakses pada 27 Juni 2021.
- Nuechterlein, D.E. (1976). “National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making”, in *British Journal of International Studies* 2 (3) 1976. pp. 246-266, DOI: <https://doi.org/10.1017/S0260210500116729>, diakses pada 20 Agustus 2021.
- Oppenheim, Felix E. (1987). “National Interest, Rationality, and Morality”, in *Political Theory Vol. 15* No. 3 1987. pp. 369-389. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/191209>, diakses pada 8 Juli 2021.
- Ó’Tuathail, Gearóid. 1994. “Critical Geopolitics and Development Theory: Intensifying the Dialogue”, dalam *Transactions of the Institute of British Geographers, New Se-*

- ries, Vol. 19, No. 2, pp. 228-233, DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/01402399908437756>, diakses pada 7 April 2021
- _____. (1999). "Understanding critical geopolitics: Geopolitics and risk society", *Journal of Strategic Studies*, 22:2-3, pp. 107-124, DOI: <https://doi.org/10.1080/01402399908437756>, diakses pada 18 Juni 2021.
- Pouliot, Vincent. (2007). "Subjectivism: Toward a Constructivist Methodology". *International Studies Quarterly*, no. 51(2), pp. 359-384, retrieved from <https://www.jstor.org/stable/4621718>, diakses pada 5 Agustus 2021.
- Scholvin, Sören. (2016). "Geopolitics An Overview Of Concepts And Empirical Examples From International Relations" in *The Finnish Institute of International Affairs (FIIA) Working Paper*, No. 91, 2016, pp. 1-25, retrieved from <https://www.files.ethz.ch/isn/196701/wp91-Geopolitics.pdf>, diakses pada 4 Agustus 2021.
- Sengupta, Anita. (2019). Connectivity as Influence: India's Policy in Central Asia in the Era of the New Silk Road in *Revista UNISCI Journal Special Issue on Indian Strategic and Foreign Policy Making (Madrid Spain) No 49*, January.
- Sharp, Jo. (2021). Materials, forensics and feminist geopolitics. *SAGE Journals*, Volume 45 Issue 5, October.
- Smith, S. (2012). *Intimate geopolitics: Religion, marriage, and reproductive bodies in Leh, Ladakh*. *Annals of the Association of American Geographers*, 102, 1511-1528, DOI:<https://doi.org/10.1080/00045608.2012.660391>, diakses pada 7 Juni 2021.
- Pop, Stefano. (2000). "A Reconstruction of Constructivism in International Relations". *European Journal of International Relations*, vol. 6 (2), pp. 147-182, DOI: 10.1177/1354066100006002001, diakses pada 10 Agustus 2021.
- Song Tao, Liu Weidong, and Li Le. (2016). International research on the border regions with a geopolitical perspective and revelation. *Progress in Geography*, 35(3): 276-285.
- Ullman, RH. (1983). "Redefining Security". *International Security* 8, no. 1, pp. 129-153, DOI: 10.2307/2538489, diakses pada 6 September 2021.
- Yusgiantoro, Purnomo. (2021). *Kewaspadaan Nasional*. Seri Maka-

lah Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan Diklat Pegawai KPK Tahun 2021. Sentul: 21 Juli 2021.

KEBIJAKAN

Bappenas. (1964). *Peraturan-Peraturan*. Jakarta: Sekretariat Bappenas.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XII/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia.

Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda.

PIDATO

Soebandrio. (1961). Pidato Menteri Luar Negeri Soebandrio di hadapan Sidang Umum PBB pada tahun 1961.

Soekarno. (1930). *Indonesia Menggugat*. Pidato Pembelaan pada Persidangan di Landraad, Bandung, 22 Desember 1930.

_____. (1945). *Lahirnya Pancasila*. Pidato Soekarno di hadapan Sidang BPUPK, 1 Juni 1945.

_____. (1945). *Hukum Progresif*. Pidato Soekarno di depan Sidang Pleno BPUPK ke-2, 10 Juli 1945.

_____. (1945). *Wilayah Indonesia Merdeka*. Pidato Soekarno di hadapan Sidang BPUPK, 11 September 1945.

_____. (1950). *Dari Sabang Sampai Merauke!* Pidato Presiden Soekarno pada HUT Kemerdekaan RI ke-5, Jakarta, 17 Agustus 1950.

_____. (1950). *Angkatan Perang Bersiaplah*. Pidato Presiden Soekarno pada Hari Angkatan Perang, Jakarta, 5 Oktober 1950.

_____. (1951) *Ilmu dan Amal*. Pidato Presiden Soekarno ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 19 September 1951.

- _____. (1952). *Soal Pangan adalah Soal Hidup Matinya Bangsa*. Pidato Presiden Soekarno di Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia, Baranangsiang, Bogor, 27 April 1952.
- _____. (1952). *Harapan dan Kenyataan*. Amanat Presiden Soekarno Pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di Jakarta, 17 Agustus 1952.
- _____. (1953). *Kota Mahasiswa Djakarta*. Pidato pada Penanaman Kota Mahasiswa, Universitas Indonesia Kampus Rawamangun, Rawamangun, Jakarta, 15 September 1953.
- _____. (1955). *Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru*. Pidato Presiden Soekarno pada Konferensi Asia Afrika, Bandung, 18 April 1955.
- _____. (1956). *Susunlah Konstitusi Jang Benar-Benar Konstitusi Res Publica*. Pidato Presiden Republik Indonesia pada waktu membuka Konstituante, Jakarta, 10 Nopember 1956.
- _____. (1957). *Menggalang Massa Aksi Revolusioner Menuju Masyarakat Adil dan Makmur. Shaping and Reshaping Indonesia*. Pidato Presiden Soekarno tentang Marhaenisme pada malam peringatan 30 tahun berdirinya PNI pada 3 Juli 1957.
- _____. (1959). *Dekrit Presiden Republik Indonesia*. Pidato Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 di Jakarta.
- _____. (1959). *Penemuan Kembali Revolusi Kita*. Pidato Presiden Soekarno pada HUT Kemerdekaan RI ke-14, Jakarta, 17 Agustus 1959.
- _____. (1959). *Dewan Perantjang Nasional (DEPERNAS)*. Pidato pada Sidang Pleno Pertama, 28 Agustus 1959.
- _____. (1960). *Laksana Malaekat yang Menyerbu dari Langit. Jalannya Revolusi Kita (JAREK)*. Pidato Presiden Soekarno pada HUT Kemerdekaan RI ke-15, Jakarta, 17 Agustus 1960.
- _____. (1960). *Membangun Dunia Kembali (To Build the World Anew): Pidato Presiden Republik Indonesia di muka Sidang Umum P.B.B. ke-XV tanggal 30 September 1960*. Jakarta: Kepustakaan Presiden, Perpusnas RI.
- _____. (1961). *Amanat Pada Hari Armada di Dermaga Angkatan Laut di Surabaya*, 6 Januari 1961.
- _____. (1961). *Milikilah Dedication of Life*. Pidato Presiden

Soekarno di hadapan para mahasiswa Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 7 April 1961.

_____. (1961). *Revolusi-Sosialisme-Pimpinan Nasional (Resopim)*. Amanat Presiden RI Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-16, Jakarta, 17 Agustus 1961.

_____. (1961). *Persahabatan, Perdamaian, dan Keadilan Sosial di antara Bangsa-bangsa*. Pidato Presiden Soekarno pada KTT GNB I, Beograd, Yugoslavia, 1 September 1961.

_____. (1961). *Tri Komando Rakyat Kibarkan Sang Merah Putih Di Irian Barat*. Pidato Presiden Soekarno pada saat Pembebasan Irian Barat, Yogyakarta, 19 Desember 1961.

_____. (1962). *Untuk Menjadi Bangsa yang Jaya, Kuasailah Angkasa*. Amanat Presiden Soekarno pada Dwiwindu Angkatan Udara RI dan Hari Penerbangan Nasional di Lapangan Terbang Kemayoran Jakarta, 9 April 1962.

_____. (1962). *Kumpulkan Ilmu Pengetahuan Untuk Pembangunan*. Amanat Presiden Soekarno Pada Hari Sarjana di Istana Olahraga Bung Karno, Senayan, 29 September 1962.

_____. (1962). *Abdikan Ilmu Pengetahuan Kepada Tanah Air dan Bangsa*. Pidato Presiden Soekarno pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, Yogyakarta, 22 Oktober 1962.

_____. (1962). *Dalam Konstelasi Dunia Sekarang Tanpa Angkatan Bersenjata, Tidak Satupun Negara Selamat*. Amanat Presiden Soekarno pada Siswa Seskoad, di Istana Bogor, 15 Desember 1962.

_____. (1963). Amanat Presiden Soekarno pada Resepsi Pembukaan Seminar Hukum Nasional Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 12 Maret 1963.

_____. (1963). *Ilmu Pengetahuan Sekadar Alat Mencapai Sesuatu*. Pidato Presiden Soekarno ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan dari Universitas Indonesia, Jakarta, 2 Februari 1963..

_____. (1963). *Deklarasi Ekonomi*. Pidato Presiden Soekarno di Istana Merdeka, Jakarta, 28 Maret 1963.

_____. (1963). *Pahamilah Kondisi Obyektif Bangsa Kita*. Pidato di hadapan Mahasiswa yang akan Mengadakan *Study Tour* ke Sumatera di Istana Negara, Jakarta, 9 Juli 1963.

- _____. (1963). *Genta Suara Republik Indonesia (Gesuri)*. Amanat Presiden RI Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-18, Jakarta, 17 Agustus 1963.
- _____. (1964). *Tahun Vivere Pericoloso (TAVIP)*. Pidato Presiden Soekarno pada Proklamasi Kemerdekaan RI ke-19, di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 1964.
- _____. (1964). *Era Konfrontasi*. Pidato Presiden Soekarno pada KTT GNB II di Kairo, Mesir, 6 Oktober 1964.
- _____. (1964). *Soal Transmigrasi adalah Soal Mati Hidup Bangsa Indonesia*. Pidato Presiden Soekarno pada Musyawarah Gerakan Transmigrasi, di Istora Bung Karno, Jakarta, 28 Desember 1964.
- _____. (1965). *Tahun Berdikari (TAKARI)*. Pidato Presiden Soekarno pada HUT Kemerdekaan RI ke-20, di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 1965.
- _____. (1965). Amanat Presiden Soekarno pada Rapat Panglima ALRI di Jakarta, 17 Juni 1965.
- _____. (1965). Amanat PJM Presiden Soekarno pada Pembukaan Konferensi Internasional Anti-Pangkalan Militer Asing di Hotel Indonesia, Jakarta, 17 Oktober 1965.
- _____. (1965). *Pertahanan Negara Dapat Berhasil Maksimal Jika Berdasarkan Geopolitik*. Sari Amanat Presiden Soekarno pada Peresmian Lemhannas di Istana Negara, Jakarta, 20 Mei 1965.
- Soekarnoputri, Megawati. (2012). *Gerakan Non-Blok Dahulu, Kini dan Masa Yang akan Datang*. Slovenia: Peringatan 50 Tahun Gerakan Non-Blok, 19 Mei 2012.

WEBSITE

- Arora, B.D. 1975. *Pakistan's Role in Indian-Indonesian Relations During the Soekarno Era*. Sage Journals, <https://doi.org/10.1177/002088177501400202>.
- Dostal, Jorg Michael. (2016). Review on The Demon of Geopolitics: How Karl Haushofer Educated Hitler and Hess. *thimehigher-education.com*, 19 May.
- Lusignan, Bruce. (2003). *The Congo: From Leopold to Lu-*

mumba. Diakses dari: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=r-ja&uact=8&ved=2ahUKEwiRrdienPPeAhUMMo8KHT9eD-m4QFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fweb.stanford.edu%2Fclass%2F297a%2FThe%2520Congo%2520From%2520Leopold%2520to%2520Lumumba.doc&usg=AOv-Vawo9Lx4hLrhJ5gc8FjYrgJ-f>

Sumbodo, Sudiro. (2017). *Proyek Menang, Kemandirian Produksi Persenjataan Roket*. Diakses dari: <https://aviahistoria.com/2017/08/17/proyek-menang-kemandirian-memproduksi-persenjataan-roket/>

_____. (2018). *KOPELAPIP: Ambisi Membangun Industri Penerbangan Nasional*. Diakses dari: <https://aviahistoria.com/2018/10/23/kopelapip-ambisi-membangun-industri-penerbangan-nasional/>

ARSIP

ANRI. (2017). *Daftar Arsip Statis PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT IPTN) 1950 – 1988*. Direktorat Pengolahan Deputy Bidang Konservasi Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI),

Arsip Konferensi Asia Afrika

Arsip Dr. Ruslan Abdulgani (1950-1976): No. 1806.

Arsip Surat Pejabat Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto kepada DPP PNI perihal Hak Hidup PNI No. 6-57/Pres/12/1967 tertanggal 21 Desember 1967.

Dewan Perancang Nasional Jilid-03, Bab-30 Bidang Keamanan dan Pertahanan.

Perpustakaan Nasional RI (Tanpa Tahun). Pidato Presiden Soekarno pada Konferensi Asia Afrika 18 April 1955.

MAJALAH

Editorial Departments of Renmin Ribao (People's Daily) and Hongqi (Red Flag). (1963). Peaceful Coexistence—Two Diametrically Opposed Policies—Comment On The Open Letter Of The Central Committee Of The CPSU (VI). Peking: Foreign Languages Press. Sketsa Massa. (1965). ABRI Pengawal dan Pengaman Revolusi. No. 15 Th. VIII, 6 Oktober 1965.

Historia. (2018). *Mengincar Bung Besar: Tujuh Upaya Pembunuhan Presiden Soekarno*. Jakarta: Gramedia.

Soekarno (1961). *Resopim*, hlm. 482-483

_____. (1961). *Resopim*, hal. 483

INDEX

A

- ABRI v, 78, 82, 221, 228, 230, 233, 235, 244, 251, 259, 287, 298
- Afrika vii, vi, vii, xiii, 16, 20, 26, 28, 33, 38, 41, 42, 49, 62, 64, 66, 71, 75, 77, 80, 82, 86, 87, 89, 91, 94, 109, 164, 182, 187, 188, 193, 194, 195, 197, 198, 215, 216, 232, 234, 235, 243, 244, 246, 252, 271, 272, 278, 294, 297
- Alutsista v, 91, 106, 123, 129, 213, 215, 220, 244, 273, 284
- Amerika Latin 28, 187, 188, 194, 195, 197, 234, 235, 244, 246, 278
- ASEAN v, xii, xiv, 22, 244, 246, 252
- Asia vi, vii, vi, vii, xiii, 6, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 41, 42, 43, 44, 49, 56, 62, 64, 66, 70, 71, 75, 77, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 109, 164, 182, 186, 187, 188, 193, 194, 195, 197, 210, 212, 215, 216, 234, 235, 240, 243, 244, 246, 252, 271, 272, 275, 278, 286, 288, 290, 292, 294, 297

D

- Demografi vi, 88, 91, 98, 99, 100, 120, 121, 123, 126, 266, 270, 273
- Diplomasi 49, 91, 107, 130, 184, 212, 253, 267, 274

E

- Eropa 4, 6, 7, 10, 16, 20, 22, 44, 51, 55, 62, 92, 220, 243, 244, 252, 253,

271, 272

G

- Garis Hidup Imperialisme 27, 28, 62, 87, 90, 243
- Geoekonomi 49, 242, 285, 289
- Geografi 26, 115, 281
- Geopolitik ii, v, vi, xiii, xiv, xv, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 114, 115, 116, 120, 124, 125, 127, 136, 137, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 158, 159, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 194, 198, 204, 206, 207, 211, 212, 217, 229, 234, 235, 236, 241, 242, 243, 252, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 285, 287, 288, 289, 290, 296
- Geostrategi 2, 49, 279, 285, 289
- Geostrategis 1
- Gerakan Non Blok vi, vii, vi, vii, xiii, 28, 87, 91, 185, 193
- Gestok 31
- GNB vi, vii, vi, xiii, 28, 33, 65, 107, 109, 164, 182, 191, 195, 197, 198, 243, 252, 270, 272, 279, 295, 296

H

- Heartland 3, 5, 6, 7, 15, 32, 57, 185, 187,

- 290
- I**
- Imperialisme vii, viii, 54, 55, 62, 90, 186, 192, 232
- Indeks Pertahanan Negara 212, 272
- Irian Barat 28, 29, 33, 36, 38, 73, 75, 76, 88, 91, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 187, 195, 236, 238, 253, 272, 278, 286, 295
- K**
- KAA vi, vi, vii, xiii, 20, 28, 33, 42, 62, 87, 94, 182, 189, 206, 228, 236, 243, 246, 252, 270, 272, 279
- Kekuatan Nasional 242
- Kemerdekaan v, 42, 45, 60, 64, 79, 101, 103, 159, 161, 178, 192, 194, 272, 281, 282, 293, 294, 295, 296
- Kepentingan Nasional vii, 38, 45, 58, 98, 111, 113, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 133, 135, 141, 153, 157, 158, 159, 180, 181, 263, 264, 272
- Kolonialisme 90, 192
- Konferensi Asia Afrika vi
- Kuantitatif 146
- L**
- Laut China Selatan vii, 3, 32
- LCS 3, 32, 33, 90, 187, 206, 209, 248
- Lebensraum vii, 4
- M**
- Maritim vi, viii, 36, 76, 84, 248
- Militer vii, viii, vi, 28, 69, 88, 91, 104, 105, 106, 120, 121, 122, 123, 129, 216, 219, 220, 231, 233, 250, 270, 273, 296
- N**
- Nasakom 32
- National Power vi, 242, 290
- NATO vii, 22, 187, 239
- P**
- Pancasila vi, vii, viii, 31, 36, 37, 38, 46, 54, 56, 58, 64, 65, 66, 78, 81, 90, 101, 107, 115, 151, 181, 184, 185, 187, 188, 189, 194, 195, 206, 236, 271, 272, 278, 293
- Pasifik 16, 20, 32, 36, 44, 56, 62, 71, 88, 91, 185, 187, 235, 248, 267, 272, 278, 290
- Penjajahan 159, 243, 271
- Pertahanan viii, ix, v, vi, xii, xiii, xiv, xv, 28, 36, 38, 39, 45, 49, 53, 56, 58, 80, 88, 98, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 123, 133, 134, 135, 141, 179, 205, 208, 209, 212, 214, 217, 218, 220, 221, 241, 243, 244, 250, 252, 254, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 284, 285, 287, 289, 296, 297
- Pivot 5, 6, 185, 272
- Politik xiii, 20, 26, 29, 31, 41, 56, 57, 58, 88, 91, 106, 107, 120, 121, 122, 123, 129, 130, 147, 160, 164, 167, 171, 183, 196, 230, 231, 260, 267, 274, 281, 283, 285, 288, 293
- Polri 245, 259
- S**
- Sains dan Teknologi ix, 88, 109, 111, 120, 122, 123, 131, 132, 274
- Sishankamrata 218, 259
- Structural Equation Model ix, 100, 102, 103, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 125
- Sumber Daya Alam ix, 88, 102, 103, 120, 123, 128, 273
- T**
- Teritorial ix, 88, 91, 100, 101, 102, 120, 122, 123, 127, 273
- TNI vii, viii, ix
- TNI AD 221
- TNI AL 233
- TNI AU 233
- U**
- UUD 1945 181, 194, 242, 248, 261
- W**
- Wawasan Nusantara 28, 31, 36, 46, 49, 101, 210, 279

TENTANG PENULIS



Hasto Kristiyanto lahir di Yogyakarta pada 1966. Setelah lulus dari SMA Kolese de Britto, Yogyakarta, ia melanjutkan studinya di Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (UGM). Semasa kuliah Hasto aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan dan bergabung di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga akhirnya menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Lulus dari UGM pada 1991, Hasto bekerja di PT. Rekayasa Industri sebagai *professional engineer* hingga menjadi

project manager. Di tengah ketidakpastian akibat krisis ekonomi, pada tahun 2000 Hasto melanjutkan studi masternya di Prasetiya Mulya Business School. Pada tahun 2002 Hasto pensiun dini dari perusahaan BUMN dan memilih total di politik. Karir politiknya diawali dengan menjadi tim notulensi, hingga akhirnya menjadi pengajar di Sekolah Partai dengan materi ideologi, AD ART Partai, manajemen partai dan strategi kemenangan Pemilu. Pada tahun 2004 dalam usia 38 tahun, ia menjadi anggota DPR RI hingga tahun 2009. Sejak saat itu dia terus berkonsentrasi pada pelebagaan partai hingga akhirnya dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan sejak tahun 2014-Sekarang. Pada 2020 dia menempuh studi doktoral dalam Program Studi Ilmu Pertahanan dengan konsentrasi studi Strategi Pertahanan di Universitas Pertahanan

Republik Indonesia, Jakarta, dan berhasil meraih predikat *summa cum laude* pada 2022. Disertasinya “Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negara” dinilai berhasil menjadi terobosan baru dalam kajian geopolitik, terutama karena sukses mengonstruksikan teori geopolitik Bung Karno. Hasto sangat aktif menulis jurnal ilmiah dan sekarang tengah mengambil program doktoral di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Penelitiannya tentang kepemimpinan strategis politik dan pelebagaan partai semakin memperkuat tekadnya di dalam menggelorakan kepemimpinan intelektual sebagaimana halnya Bung Karno yang bersama Megawati Soekarnoputri menjadi sumber inspirasi baginya.

GEOPOLITIK BUNG KARNO

PROGRESSIVE GEOPOLITICAL COEXISTENCE

Buku ini diadaptasi dari disertasi yang mengonstruksikan pemikiran Geopolitik Soekarno di Program Studi Ilmu Pertahanan, Konsentrasi Strategi Pertahanan, Program Doktorat Universitas Pertahanan Republik Indonesia (2022).

Geopolitik Soekarno lahir dari tradisi pemikiran kritis. Epistemologi pemikiran geopolitiknya merupakan sintesis antara pemikiran asli Soekarno dengan pemikiran Geopolitik Barat dan Geopolitik Timur.

Soekarno mendefinisikan Geopolitik Indonesia sebagai konsep tentang kesatuan tanah dan air atau *geografische constellatie*, kesatuan kebangsaan, kenegaraan, tekad atau ideologis, dan satu kesatuan cita-cita sosial atau *social consciousness of man*. Menurut Soekarno ruang lingkup (variabel) geopolitik mencakup tujuh unsur penting yaitu demografi, teritorial, SDA, militer, politik, koeksistensi damai, serta sains dan teknologi.

Tujuan geopolitik Soekarno mewujudkan kemanusiaan, internasionalisme, persahabatan antar-bangsa, perdamaian dunia, dan keadilan bagi seluruh warga dunia. *State of the art* dari pemikiran geopolitik Soekarno disebut sebagai *Progressive Geopolitical Coexistence* (PGC). Pengaruh geopolitik Soekarno terhadap kepentingan nasional dibuktikan dengan pembebasan Irian Barat, peta jalan koridor pembangunan dan kepentingan nasional, serta pelembagaan pertahanan negara. Pengaruh geopolitik Soekarno terhadap dunia mencakup proyeksi Pasifik sebagai pivot dunia; Pancasila sebagai *life line* Dunia Baru; dan postulat geopolitiknya yang anti-kolonialisme dan imperialisme.

Relevansi geopolitik Soekarno yang abadi di masa kini dan yang akan datang dapat menjadi dasar pembuatan peta jalan kebijakan pertahanan negara dan alat di dalam mengonstruksikan kepentingan nasional Indonesia melalui penggunaan tujuh variabel sebagai *instrument of national power*.



UNHAN RI
PRESS

Kawasan IPSC Sentul
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810